BALAIRUNG

EDISI KHUSUS/ TH. XV/ 1999

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

JANGAN GADAIKAN KAMPUSKU





ISSN 0215-076X

Menguak Jaringan Intelijen di Kampus Biru

Rp 5000,-

Ternyata, dan semoga Kawan setuju, dunia jurnalistik—pers mahasiswa—itu sungguh-sungguh mengasyikkan. Mengapa demikian? Banyak jawaban bisa diajukan buat pertanyaan klasik ini. Salah satunya, dan yang benar-benar kami rasakan di BALAIRUNG, ialah bahwa dunia ini "interdisipliner", melibatkan banyak disiplin ilmu. (Mungkin itu pula yang mengondisikan wartawan supaya, setidaknya, sedikit "cerdas"-lah).

Demikianlah, BALAIRUNG telah menjadi wahana kami buat saling berdialog. Ya, dialog yang sejati, menuntut partisipasi semua latar belakang keilmuan awak BALAIRUNG—dan, yang pasti, kesadaran kemanusiaan kami.

Dengan sebab demikian, Kawan, momentum ultah ke-14 BALAIRUNG pada 29 Oktober lalu tak kami sia-siakan. Sambil meluncurkan BALAIRUNG edisi 30 (*Membaca Ekspresi Yogya*), sebentuk keriuhan kecil kami gelar: Malam Baca Puisi dan Cerpen, pada 13 Oktober, cukup di halaman muka Pondok B-21. Memang harinya dimajukan, akibat padatnya jadwal kami.

Syukurlah acara sederhana itu sukses. Lumayan banyak kolega BALAIRUNG yang hadir. Para sastrawan Yogya yang kami undang membacakan karya-karyanya (Kiswondo, Mulyadi J. Amalik, Whani Darmawan, Agus Noor—juga Grup Musik "Sanggar Suwung"), lagi-lagi syukurlah, amat antusias. Demi kerepotan yang menyenangkan itu, kawan kami Darmanto, "santri" Fak. Biologi '98, terpaksa banyak berlelah-lelah.

Sayangnya, kegembiraan tak mungkin abadi. Selalu saja ada kesedihan yang mengiringi. Dan, Bagian Promosi BALAIRUNG kali ini terlanda "kesedihan" itu. Apa pasal? Lagi-lagi spanduk BALAIRUNG raib, pada November kemarin. Lho, apa pentingnya membicarakan itu di kolom ini?

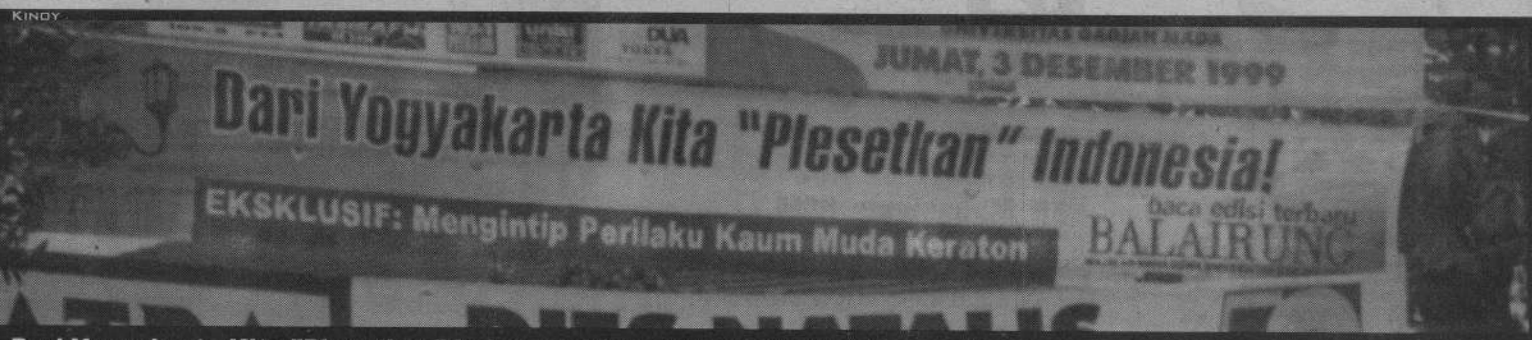
Kejadian ini menimpa kami berkali-kali. Lantas, selain jengkel, kami jadi bertanya-tanya sendiri. Mengapa spanduk-spanduk "tak berdosa" itu lenyap? Apa salahnya, juga salah BALAIRUNG? Semoga bukan karena sajian-sajian BALAIRUNG yang, kata banyak orang, keras dan tajam itu. Semoga pula tidak karena desain spanduk-spanduk itu yang, juga menurut hemat jamak pengamat, manis-apik.

Namun, untunglah, kesedihan itu cepat terobati oleh gelak tawa dan keseriusan kawan-kawan kami, para awak baru BALAIRUNG, yang hingga Februari 2000 nanti sedang magang. Pada Oktober 1999 kemarin, kami membuka lamaran anggota baru. Dari 132 orang pelamar, 31 sajalah yang—setidaknya setelah lama kami perdebatkan—layak kami terima. Selain mengikuti diklat pembekalan teknis dan wawasan umum, ada pula tugas lain: memproduksi media mini. Nah, Kawan, mereka inilah darah segar BALAIRUNG. Pada pundak mereka masa depan BALAIRUNG dipertaruhkan. Semoga!

Kawan, puncak segenap kerepotan kami ialah penggarapan edisi khusus 50 tahun UGM ini. Untuk mencapai target terbit Desember 1999, tepat Dies Natalis UGM 19 Desember, Luqman Hakim Arifin, *arek* Gresik yang kini *"nyambi"* belajar di Filsafat ('97) itu, agak garang dalam mengoordinir kerja-kerja redaksi. *All out!* Begitulah, sebagai rakyat negeri Gadjah Mada, BALAIRUNG ingin pula berbahagia merayakan ultah setengah abad UGM dengan memberikan kado yang "mengesankan". Ya, dan bagi kami yang paling mengesankan buat kampus yang kami sayangi ini adalah tumpukan kritik atas kondisi dan keadaannya saat ini. *Viva Gadjah Mada!* ❐

Penjaga Dapur

KINDY



Dari Yogyakarta Kita "Plesetkan" Indonesia! Spanduk kami yang hilang.

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❐ **Penerbit:** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM-UGM) ❐ **Rekomendasi Terbit Penerbitan Khusus:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor UGM No. UGM/82/7789/UM/01/37 Tgl. 14 Desember 1985. ISSN: 0215-076X ❐ **Pelindung:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. (Rektor UGM) ❐ **Penasihat:** Ir. Bambang Kartika (PR III UGM), Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❐ **Pemimpin Umum:** Monika Eviandaru ❐ **Sekretaris Umum:** Bekti Dwi Andari ❐ **Pemimpin Redaksi:** Luqman Hakim Arifin ❐ **Sekretaris Redaksi:** Fitria Agustina ❐ **Redaktur Pelaksana:** M. Bustom, Aris Mustafa ❐ **Kepala Litbang:** Hery Trianto ❐ **Staf Litbang:** Dedy Sushandoyo, Irfan Muktiono, Melanie Wulandari, Daru Indrastomo, Eko Nugroho, ❐ **Pemimpin Perusahaan:** Agoeng Widyatmoko ❐ **Sekretaris Perusahaan:** Reny Indrawati ❐ **Kabag Keuangan:** Sholihah ❐ **Kabag Iklan:** Yusuf Waluyo Jati ❐ **Kabag Distribusi:** Rima Rahmania ❐ **Kabag Promosi:** Bayu Iswara ❐ **Staf Redaksi:** Ajianto Dwi Nugroho, Imam Risdiyanto, Eka Rinanda Ridwan, Ibrahim Z. Fahmi, Rio Hutagaol, Veronika Kusuma, Maesita Maharani, Darmanto, Ajar Aedi, Adi Baskoro, Sugi Siswiyanti, Dian Fikriani, Faisol Adib, Zulkarnain, Dilla Damayanti, Tria Ayu, Nur Evi Rahmawati, Viktor Nara, ❐ **Redaktur Bahasa:** Hs. Bachtiar ❐ **Staf Perusahaan:** Sriyani Puspa Kinasih, Agung Marhaenis, Jarwo Wanita, Ahmad Mujahidin, Sophia Cakti, Rinaldi, Dyah Ayu Roesusita, Erwin Susanto,Dita Hendriani, Syaiful Akbar ❐ **Redaktur Artistik:** Titik Puji Lestari ❐ **Staf Artistik:** Afiaty Dian Irfanti, Lalu Rizki Rahman, Rendra Jaka Dilaga, Margareta Wulandari, Dave Ardian Seta, Murdiono, Rahmat Yulianto ❐ **Fotografer:** Fajar Risqi ❐ **Rekening:** TAPLUS BNI Cabang UGM No. Rek. 228-007-816-062-901 (a.n. Sholihah) ❐ **Alamat Redaksi dan Perusahaan:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901703 Faks. (0274) 566171 E-mail: balairung.ugm@eudoramail.com, balai@ugm.ac.id

BALAIRUNG **on-line** http://members.tripod.com/balairung

Redaksi mengundang pembaca untuk menuangkan gagasan kritis-konstruktif-demokratis. Artikel diketik spasi rangkap pada kertas kuarto, disertai foto diri dan keterangan penulis. Sebaiknya dalam bentuk disket format RTF atau melalui *e-mail*. Redaksi berhak menyunting tulisan.

BALAIRUNG

nafas intelektualitas mahasiswa



TITIK PL

Jangan Gadaikan Kampusku

Skenario otonomi PT bergulir sudah. PP No. 60 dan 61/1999, produk hukum yang melandasinya, memang lumayan misterius. Apa mau pemerintah? Pendidikan diobok-obok lagi karena utang luar negeri yang, rasanya, mustahil terbayar. Mahasiswa menolak!

12



FAJAR RIZQ

KKN Mahasiswa UGM

Sebagai pencetusnya, mestinya UGM konsisten dengan program KKN. Namun di lapangan ditemukan penyimpangan praktik di sana-sini. Barangkali, universitas *ndeso* ini kini sudah *nguthο*, borjuis?

37

Malapetaka Ketidakberesan Intelijen

Di kampus kerakyatan UGM, intel-intel berkeliaran. Ada jaringan spionase yang rapi. Korban-korban bergelimpangan. Benarkah mereka profesional?

55

Wajah Bopeng Pusat-Pusat Studi

Jangan lagi percaya bahwa pusat-pusat studi jadi *trade mark*-nya UGM. Selain banyak yang sudah tak bernafas, ada pula PS bentukan pemerintahan Orba. Tampaknya, impian *research university* masih jauh di awang-awang.

67



Kulit Muka Diolah dari Karya Leonardo Da Vinci Oleh Titik Puji Lestari

SARI HUSADA

A member of ROYAL NUMICO N.V.



"Sari Husada secara berkesinambungan menunjang pembangunan kesehatan dan meningkatkan kecerdasan anak - anak Indonesia."

Selintas PT Sari Husada Tbk.

PT Sari Husada Tbk., perintis produsen susu bayi dan makanan bergizi di Indonesia didirikan pada tahun 1954 dengan nama NV. Saridele oleh Pemerintah Indonesia bersama UNICEF. [illegible]un demi tahun perusahaan dengan mantap memberikan produk - produk terbaik bagi pertumbuhan anak - anak Indonesia berlandaskan visi dan misi perusahaan. Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut dan manifestasi tujuan perusahaan jangka panjang, pada bulan Februari 1998 Sari Husada menjalin aliansi strategis dengan Royal Numico NV. Holland, salah satu produsen susu terkemuka dalam peringkat lima besar dunia. Manfaat aliansi strategis tersebut bagi perusahaan meliputi memperluas ekspansi bisnis, menjangkau pasar internasional dan alih teknologi, serta menambah kepercayaan dunia internasional, perbankan serta para mitra bisnis. Wujud nyata langkah bisnis ini berupa ekspor perdana susu bayi merek "NINI" ke Iran pada tahun 1998, serta penjajakan intensif ke pasar negara - negara di Teluk, Asia Tengah dan negara - negara Asia lainnya.

Visi Perusahaan.

Kondisi dunia perekonomian yang masih lemah dan sarat persaingan ketat, memacu manajemen menggariskan sikap mengelola bisnisnya secara sigap dan kompetitif. Menurut Bapak Dwiyatno Siswosumarto, Presiden Direktur PT Sari Husada Tbk., "Sebagai perintis produsen susu dan makanan bayi Indonesia kami berpegang teguh pada visi kami :'Turut menunjang pembangunan kesehatan dan kecerdasan anak - anak bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk makanan bergizi unggul'. Keberhasilan produk kami tidak terlepas dari dukungan sinergi berbagai kebijakan operasional perusahaan, diantaranya langkah "go publik" tahun 1983, restrukturisasi organisasi dan peresmian pabrik berteknologi canggih di Klaten pada tahun 1998".

Terobosan Produk Andalan dan Kebijakan Perusahaan.

Berbagai terobosan produk Sari Husada diawali peluncuran perdana susu bayi SGM pada tahun 1965. SGM adalah non acidified formula bayi pertama yang diproduksi di bumi Indonesia. Sesungguhnya, hal ini merupakan kejadian yang amat berarti, karena pada waktu itu pasar masih didominasi oleh produk - produk susu bayi acidified dan masih diimpor. Menyusul suksesnya SGM, pada tahun 1972 diluncurkan SNM, bubur susu bayi pertama di Indonesia, tahun 1979 muncul Vitalac, kemudian tahun 1987 diperkenalkan SGM 2 dan melengkapi rangkaian produk andalan pada tahun 1990 merupakan peluncuran perdana Lactamil, makanan tambahan bagi ibu - ibu hamil dan menyusui.

Pemasaran, Penjualan dan Keunggulan Produk.

Menurut B[illegible]d[illegible] B. Regar, Direktur Pemasaran [illegible]ulan PT Sari Husada Tbk., pemasaran dan penjualan perusahaan berpegang teguh pada visi : "Menjadi produk andalan yang terpilih di pasar susu dan makanan bayi", sedangkan, misi pemasaran adalah :"Unggul di segmen pasar manapun kami hadir". Berkat aplikasi teknologi inovatif. PT. Sari Husada Tbk., berhasil menyajikan pilihan produk dengan kemasan alternatif dan harga yang lebih terjangkau dengan tetap menjamin kesinambungan mutu. Keunggulan produk PT. Sari Husada Tbk., ditunjang oleh penerapan yang konsisten dari ISO 9002 (1996), ISO 9001 (1999) serta Total Quality Management (TQM). Selanjutnya, SGM, SGM-2, SNM, Vitalac-1, Vitalac-2, LLM, dan Lactamil telah dinyatakan 'Halal' oleh Majelis Ulama Indonesia. Sesuai persyaratan standar mutu Internasional semua produk PT. Sari Husada Tbk., telah mengacu pada batasan standar yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission Standard.

Menyongsong Milenium Baru.

Khusus menjelang tahun 2000 Perusahaan telah siap dengan sebuah program mengantisipasi Y2K guna menjamin agar gaya hidup konsumen serta kinerja Perusahaan tidak terputus. Berkat kemantapan kinerja selama 45 tahun keberadaannya, dukungan dan kepercayaan para mitra dan konsumen, serta manfaat dari aliansi strategis, Perusahaan yakin dapat mengantisipasi tantangan masa depan dan tetap memainkan peran memimpin dalam industri makanan bayi di Indonesia.













Kantor pusat: Jl. Kusumanegara 173. P.O. BOX 37, Yogyakarta 55002, Indonesia, Telp. (62-274) 512990, Fax. (62-21) 563328 **Kantor cabang:** TIRA Building, 3rd floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-3, Jakarta 12920, Indonesia. Telp. (62-21) 5256388. Fax. (62-21)5222423. **E-mail:** msdir@sarihusada.com **Pabrik:** Jl. Kusumanegara No. 173, Yogyakarta 55002. Tel (0274) 512990. Fax (0274) 563328 Jl. Raya Yogya Solo Km 19, Desa Kemudo, Prambanan, Klaten. Tel. (0274) 498001

KELIK SUPRIYANTO

Pejah-gesang ndherek Gus Dur!?

Menikah...

YENY MAINITA, S.I.P.
(MANTAN SEKUM BULAKSUMUR)
DENGAN
TRIAS ANDROMEDA
14 NOVEMBER 1999
DI YOGYAKARTA

AGUNG WIDIATMOKO, S.P.
(MANTAN STAF REDAKSI BALAIRUNG)
DENGAN
NURANI WENING DARMASTUTI
6 NOVEMBER 1999
DI KLAMPOK, BANJARNEGARA

KOMUNITAS B-21

Innaalillaahi wa inna ilaihi rooji'uun

IKUT BERBELASUNGKAWA ATAS
MENINGGALNYA
IBU SUMARYATUN
SUHARDIMAN
PADA 21 NOPEMBER 1999
IBUNDA AGOENG WIDYATMOKO
PEMIMPIN PERUSAHAAN BALAIRUNG

KELUARGA BESAR BALAIRUNG

Wisuda...

AGUS RIYANTO, S.I.P.
MANTAN PEMIMPIN PERUSAHAAN BALAIRUNG
AMBAR SARI DEWI, S.SOS.
MANTAN STAF PERUSAHAAN BULAKSUMUR
RUDI ISBOWO, S.S.
MANTAN STAF REDAKSI BALAIRUNG
PRAHASTUTI MAHARANI, A.MD.
MANTAN STAF PERUSAHAAN BULAKSUMUR
F. INDIRASARI, S.PSI.
MANTAN STAF REDAKSI BALAIRUNG

SALAM HANGAT,
EKOSISTEM B-21

Website BALAIRUNG Mana?

Mon, 15 Nov 99 00:16:54 +0700
From: Majalah *Vonis* <vonis@law.com>
Subject: Selamat Berjuang
To: balairung.ugm@eudoramail.com
Cc: balai@ugm.ac.id

Halo, Kawan-Kawan BALAIRUNG di Jogjakarta.... UKPM *Vonis* Fak. Hukum Unpad mengucapkan selamat kepada pengurus baru. *Oh iya, kok website* BALAIRUNG kini susah munculnya? Apa sudah selesai *up-dating*-nya? Sayang, Pusat Informasi Data-nya *nggak* muncul-muncul lagi.

Salam dari kawan-kawan di Bandung (Forum Pers Mahasiswa Bandung--*udah dibubarin*). *Gimana* dengan kawan-kawan pers mahasiswa di Jogja (PPMY)? Lagi ada kerjaan apa sekarang ini? Ada kabar penting dari Sekjen PPMI, Mas Edi Sutopo (di *Ekspresi*, UNY) buat pers mahasiswa se-Indonesia? Kapan kawan-kawan di Jogja *mo'* berkunjung lagi ke Bandung?

Salam mahasiswa!

UKPM *Vonis* Fak. Hukum Unpad
http://vonis.tsx.org,
E-mail: vonis@justice.com, vonis@law.com
This E-mail was sent from http://www.law.com

Pada 4--6 Desember 1999, PPMI merayakan Dies Natalis ke-8, di Denpasar, Bali. Acara ini menjadi pijakan eksistensi PPMI memasuki tahun 2000, agar PPMI semakin membumi dan dibutuhkan semua penerbitan mahasiswa di Indonesia. Tentang situs BALAIRUNG, kami masih terus melakukan pembenahan, termasuk situs Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI)-nya. Sabar, ya....

Info Alamat Penerbit Yogya

Saya mahasiswa D-3 Bahasa Inggris, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, semester V, yang akan melakukan kerja praktik.

Kalau boleh, saya minta kesediaan redaksi untuk memberikan referensi tentang lembaga penerbitan yang ada di lingkungan UGM. Referensi ini akan saya jadikan bahan pertimbangan sebagai lokasi kerja praktik karena saya tertarik bekerja di lingkungan penerbitan. Untuk itu, saya ingin tahu alamat Gadjah Mada University Press.

Besar harapan saya untuk mendapatkan informasi itu secepatnya. Terima kasih sebelumnya.

Imamah S.
Jl. Cendrawasih 52 Grendeng
Purwokerto 53122

Beberapa lembaga penerbitan/penerbit buku antara lain:

1. Gadjah Mada University Press, Jl. Grafika 1 Kotak Pos 14 Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 561037, 902250, 902259 Faks. (0274) 561037 Pemasaran (0274) 902727.

2. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM, Telp. (0274) 901231 Kotak Pos 3 Bulaksumur, Yogyakarta 55281, atau Jl. Gambiran 37 Yogyakarta 55161 Telp. (0274) 373760 Faks. (0274) 380819

-Alamat lainnya kami kirim via pos.

Info tentang LP3Y...

Saya adalah mahasiswa yang berdomisili di Malang. Kami ingin mendapatkan informasi tentang LP3Y. Saya mohon redaksi bisa membantu. Terima kasih.

Marluwi
Ponpes Raudlatul Ulum I Ganjaran
Gondanglegi, Malang, Jawa Timur 65174

Alamat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogya (LP3Y) yaitu Jl. Kaliurang Km 13,7 Gg. Banteng, Sleman, Yogyakarta 55584 Tromol Pos 40/YKBS Yogyakarta 55281 Telp. (62-274) 896016, 896141 Faks. (62-274) 896016, http://www.ugm.ac.id/lp3y-aids, e-mail: lp3y@idola.net.id.

Mohon Izin Penelitian

Salam reformasi, kawan-kawan BALAIRUNG!

Saya mahasiswa Fak. Psikologi Universitas Wangsa Manggala, Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi. Rencananya, skripsi saya berjudul "Konsep Diri dan Keterampilan Sosial Mahasiswa yang Aktif di Badan Pers dan Penerbitan (BPP) Kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Bersama ini saya mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian di Majalah Mahasiswa BALAIRUNG. Boleh, 'kan? Mohon jawaban secepatnya.

Sektus Tanja
Fakultas Psikologi Unwama
Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753

Awas! Arisan Berantai dan Penipuan Gaya Modern

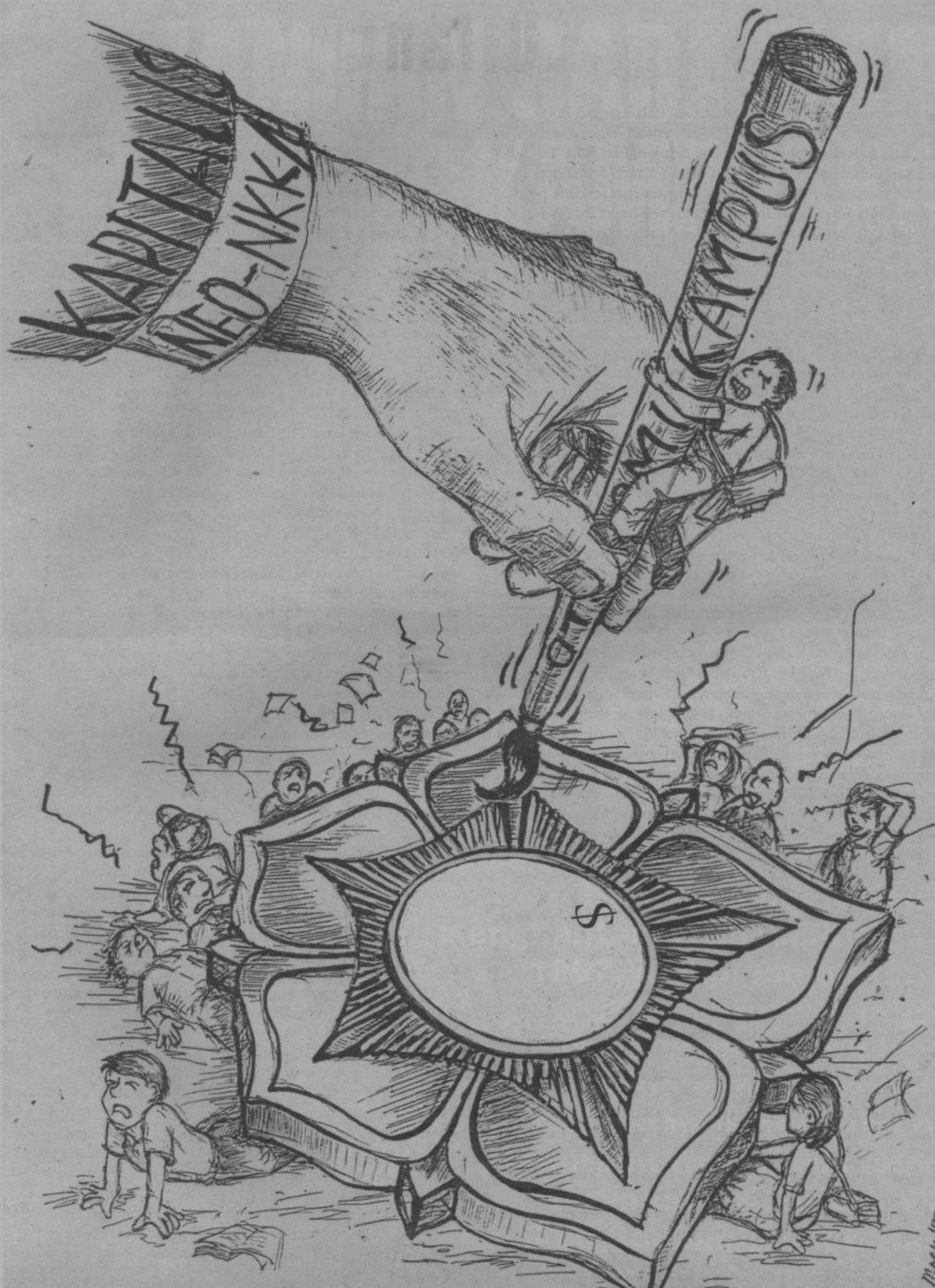
Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan pemerataan kemiskinan di mana-mana. Untuk sekadar bertahan hidup, berbagai cara dilakukan orang, terkadang tak lagi memperhatikan halal-haramnya atau untung-ruginya bagi orang lain. Tak heran jika perjudian, perdagangan barang terlarang, pencurian, perampokan, dan penipuan berkedok bisnis atau menggunakan perangkat modern bermunculan menjamur.

Arisan berantai dan *multilevel marketing* (MLM) palsu secara khusus kami cermati. Bisnis dengan iming-iming uang puluhan hingga ratusan juta, tanpa arus bekerja keras, ini sulit dijerat hukum karena praktiknya terselubung--menggunakan jasa pos. Bisnis ini biasanya menggunakan nama-nama yang indah, bahkan sebagian berkedok Islam.

Siapapun Anda tentu tak mau terjerat bisnis palsu ini. Untuk mengantisipasi kerugian lebih besar, maka Ash-Shiddiq Intellectual Forum bekerja sama dengan Forum Remaja 21 dalam dua tahun ini berhasil mendata berbagai sindikat Arisan Berantai, MLM palsu, dan beberapa modus operandi kejahatan dengan teknik modern.

Anda yang memerlukan data itu, kami sediakan gratis, silakan hubungi kami di alamat berikut. Setiap surat *insya allah* akan dibalas. Jangan lupa melampirkan prangko balasan Rp700. Terima kasih kepada redaksi BALAIRUNG atas dimuatnya surat ini.

Toha Nasrudin, S.Ag.
Forum Remaja 21
Kotak Pos 36 Soreang Bandung 40901
Jl. Tambakan No. 111
Bojengkunci, Pameungpeuk
Bandung 40376
Telp. (022) 5943620


KAPITALIS
NEO-NKK
OTONOMI KAMPUS
$
MOERDIONO

Ujian

Kamis, 18 November 1999. Di sebuah ruangan kecil *Gelanggang Mahasiswa* UGM, sebuah kesepakatan bersejarah telah diambil. Tak ada ketukan palu. Tak ada tepukan bergemuruh. Tak ada publikasi. Cuma komitmen 28 elemen mahasiswa: tegas menolak konsep dan rencana pelaksanaan otonomi perguruan tinggi (PT) "versi rektorat atau negara". Komite Aksi Pendidikan Kerakyatan (Komite Apik) akhirnya didirikan.

Kita lantas bertanya: berlebihankah sikap 28 elemen mahasiswa yang menolak otonomi PT itu? Tidakkah otonomi PT menjadikan UGM universitas yang mandiri dan berkualitas? Fasilitas makin lengkap, beasiswa dan proyek-proyek "basah" penelitian bertambah. Dana melimpah, dan UGM pun makin dekat pada impian *research university*-nya.Bukankah itu menguntungkan sivitas akademika UGM? Tunggu dulu! Mari kita lihat persoalan ini secara lebih jernih, komprehensif, dan kritis.

Mereka yang menerima ataupun yang menolak, tentulah, punya argumennya masing-masing. Namun, alasan mereka yang menolak otonomi PT kiranya perlu mendapat perhatian tersendiri. Rencana pelaksanaan otonomi PT jadi "ramai" tak lepas dari munculnya penolakan terhadapnya. Atau, lain katanya, otonomi PT akan berjalan baik-baik saja bila penolakan dari satu pihak tak muncul. Lalu, mengapa mereka menolak otonomi PT?

Pada dasarnya, akar persoalannya bukan sekadar persoalan eksklusivitas dan kemisteriusan munculnya otonomi PT dengan PP No. 61/99 (PTN sebagai badan hukum)-nya. Bukan pula sebatas absennya mahasiswa dalam penggodokan konsep otonomi. Minimnya sosialisasi pun tidak. Tapi, ada hal lain yang lebih mendasar: otonomi PT adalah "akal-akalan negara", melepaskan diri dari tanggungjawabnya atas pendidikan yang murah dan merata untuk rakyat. Alasan kebangkrutan, yang disebut-sebut sebagai latar belakang munculnya PP No. 61/1999, tentu saja tak mudah diterima. Bagaimanapun, pendidikan yang merata dan murah adalah hak setiap warga negara. Dan, itu mutlak tanggung jawab negara. Pengurangan subsidi negara untuk PT--dari 65% menjadi 35%--adalah bukti keculasan negara kepada rakyat. Rakyat kembali jadi korban? Benarkah demikian?

Penjelasannya kurang lebih begini: Dengan dikuranginya subsidi negara, sisa biaya pendidikan dibebankan kepada masing-masing PT. PT dapat menambal kekurangannya dengan tiga cara. Pertama, menaikkan SPP, jumlah pastinya belum jelas. Kedua, mencari dana ke pemodal asing atau institusi swasata. Ketiga, mendirikan unit-unit usaha, seperti pom bensin, supermarket, wartel, dll.

Kecuali cara ketiga, dinaikannya SPP sudah jelas menjadikan pendidikan di PT konsumsi orang kaya, *thok*! Ini yang tak bisa diterima, apalagi jika dikaitkan dengan visi kerakyatan UGM. Demikian pula cara kedua. Meminjam uang kepada pemodal asing atau institusi swasta, buntutnya ternyata panjang: pengalihan utang. Kalau dulu yang berutang negara, sekarang ganti PT, yang sudah menjadi badan hukum. Konsekuesi selanjutnya, posisi PT kian lemah. PT dengan penyandang dana tidak pada satu garis yang seimbang-sejajar. PT harus selalu mengajukan proposal-proposal proyek. Bila tidak, bagaimana PT mampu mencukupi biayanya yang 65% tadi?

Namun, dilemanya, jika ia selalu mengajukan proposal-proposal proyek, maka kontrak (jual-beli) pun makin banyak. Tuntutan dari luar juga membesar. Dengan asumsi bahwa "tak ada pemberian atau peminjaman tanpa ada kepentingan", bagaimana mungkin PT independen menentukan sistem dan kualitas pendidikannya? Tidakkah nantinya sarjana-sarjana UGM hanya untuk memenuhi tuntutan pasar? Inilah hal lain yang tak bisa diterima: hilangnya orientasi keilmuan pada PT.

Pemerintah ternyata juga *plin-plan*. Di satu sisi, ia ingin melepas PT dalam segi pendanaan. Tapi di sisi lain, ia juga enggan melepas pengaruhnya di PT. Dalam pemilihan rektor, misalnya, pemerintah (wakil mendiknas) masih memiliki 35% hak suara. Anehnya, dalam Majelis Wali Amanat (MWA) mahasiswa tak dilibatkan sama sekali, tapi justru para "pengguna" lulusan--yang dianggap mewakili masyarakat--mendapatkan kursi di majelis tertinggi PT ini. Wajar bila penerapan otonomi PT ini diragukan.

Dampak lainnya pada (rencana) pembatasan masa studi mahasiswa. Ini tak kalah mengkhawatirkannya. Ketika SPP dinaikkan, ketika batas maksimal studi ditegaskan, dan ketika budaya pragmatisme semakin tak terbendung, masihkah kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sekitarnya bisa diharapkan? Tentu bukan mengada-ada kalau otonomi PT versi negera ini dianggap suatu bentuk baru depolitisasi mahasiswa, atau NKK/BKK baru, yang lebih canggih--dan licik.

Benar-tidaknya argumen-argumen di atas memang patut diuji. Tapi, persoalannya kini, bagaimana menjembatani pro dan kontra terhadap persaoalan ini? Asumsi kita, kedua kutub--secara prinsip--memiliki tujuan/kepentingan yang sama: niat baik memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kualitas pendidikan di UGM, khususnya, dan Indonesia, umumnya. Dan kalau soalnya adalah dana, fasilitas dan impian *research university*, benarkah konsep otonomi PT, yang nyata-nyata banyak *mudhorot* itu, adalah solusi alternatif? Jawaban ada pada anda. Ya atau tidak, di sinilah kebesaran hati anda dan kita diuji.

Kita tahu dan paham kebingungan sekaligus keseriusan pihak rektorat. Tapi kalau memang rektorat sudah sampai pada "titik beku", mengapa kita tidak sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Suara mahasiswa, dosen ataupun karyawan sebaiknya jangan selalu ditempatkan di "pinggiran". Itu jelas tidak menguntungkan dan berbahaya.

Walhasil, apa yang dapat kita lakukan dalam sisa waktu--sampai Juni 2000 ketika PP penunjukan PT berbadan hukum dikeluarkan--adalah membuka kembali ruang-ruang dialog yang lebih intens antara pihak rektorat dan warga UGM, melakukan pengkritisian ulang terhadap PP No. 61/1999, dan kalau perlu melakukan tuntutan pencabutan atau penolakannya. Beranikah UGM? Kita tunggu saja! Sebagai universitas yang selalu berada di garda depan perubahan negeri ini, inilah saatnya komitmen dan keberpihakan (visi kerakyatan) UGM di uji.

Otonomi PT hanya satu persoalan UGM di HUT-nya ke-50. Dengan slogan "50 tahun Mendidik Bangsa" tampaknya ulang tahun kali ini menarik untuk dicermati. Kita bangga dengan apa yang sudah dicapai UGM hingga kini, sejak kelahirannya. Namun, kita tak bisa menutup mata terhadap setumpuk persoalan yang mesti diselesaikan secara arif dan bijaksana. Kuliah Kerja Nyata (KKN), kondisi pusat studi, mutu dosen, fasilitas pendidikan, perilaku mahasiswa, juga "orang-orang yang tak terhitung"--tukang sapu, tukang parkir, atau pegawai TU--yang kerap terlupakan, adalah diantaranya. Momentum setengah abad UGM seharusnya kita manfaatkan buat introspeksi dan refleksi diri; menguji kebenaran slogan itu dengan kenyataannya. *Selamat ulang tahun, UGM!*□

Luqman Hakim Arifin

JANGAN GADAIKAN KAMPUSKU

Krisis ekonomi, yang menghantam Indonesia sejak 1997, makin mendorong pemerintah untuk memperbesar utang luar negeri. Tanpa dana tersebut, keberlangsungan pendidikan di perguruan tinggi (PT) akan terancam. Akankah PT dijadikan agunan pemerintah untuk meraup dolar?

FAJAR NIZAR



Konferensi Pers tentang Otonomi PT (3/12/99). Hanya mengupas kulitnya saja.

Presiden Habibie, meski masa pemerintahannya sangat singkat, ternyata masih sempat mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengejutkan kalangan kampus, yaitu PP No. 61/1999. PP ini mengatur tentang perubahan status PTN menjadi badan hukum, atau lebih populer disebut "otonomi PT". Sebagai uji coba, dipilihlah empat PTN: Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Jika semua berjalan sesuai rencana, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar pada bidang akademik, finansial, dan organisasi.

Ungkapan "tak ada asap tak ada api", kiranya, berlaku pula bagi kemunculan PP No. 61/1999. Prof. Dr. Conny R. Semiawan, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menduga bahwa kemunculan otonomi PT sebagai akibat bangkrutnya negara. Dasar itulah, menurutnya, melatarbelakangi munculnya otonomi PT kini. "Yang jelas, di masa resesi ekonomi ini, pemerintah kehabisan *duit*!" ungkapnya tanpa ragu. Padahal, lanjut Conny, selama ini keempat PTN itu paling banyak menghabiskan anggaran pendidikan PTN. Akibatnya, pemerintah merasa perlu "menyapih" mereka. Dugaan senada juga dilontarkan oleh Dr. Mahfud M.D., Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII). Menurut pakar hukum tata negara ini, kemampuan ekonomi pemerintahlah salah satu faktor penyebab dikeluarkannya peraturan kontroversial itu.

Sementara itu, pada diskusi yang diselenggarakan BALAIRUNG (22 Oktober 1999), Arie Sudjito, dosen muda Fisipol UGM, menganggap pemberian otonomi PT merupakan reaksi negara setelah gagal memberikan jaminan sosial kepada PT, berupa subsidi. Kegagalan ini sebagai akibat lanjutan dari krisis ekonomi yang berlarut-larut hingga kini.

Melihat besarnya utang negara sampai tahun 1997 (lihat Tabel 1), mencapai Rp62,5 triliun, maka keraguan dari beberapa pihak di atas beralasan. Bahkan, Drs. Kwik Kian Gie, Menteri Koordinator Ekonomi Kabinet Gus Dur, belum lama ini, menyatakan pendapatan pemerintah sekarang sudah negatif. Namun, Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Dirjen Dikti, buru-buru menangkis dugaan bahwa program otonomi PT muncul karena bangkrutnya negara. Ia menjelaskan, pemerintah masih tetap akan mendanai keempat PTN itu, sekalipun telah otonom. Mengapa UI, UGM, ITB, dan IPB yang jadi percobaan? Kata Satryo, karena keempat PTN itu paling boros. "Supaya PT efisien, kita buat dia otonom," tegasnya dalam wawancara dengan BALAIRUNG, awal November lalu.

Bila dirunut lebih jauh, tuntutan otonomi PT sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari rencana pemerintah untuk menerima dana bantuan Bank Dunia. Caranya memang tak mudah. Di saat negara sangat kekurangan, sekalipun getir bak racun serangga, syarat-syarat yang ditetapkan donatur harus ditelan negara penerima, tak terkecuali Indonesia. Ketika Bank

Dunia menuntut pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada PT, sebagai syarat bantuan pendidikan, maka tak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memenuhi permintaan itu. Seandainya semua syarat telah terpenuhi, Bank Dunia mau mengucurkan bantuan langsung kepada PT, tanpa melalui birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit. "Bank Dunia mau memberi bantuan, kalau pemerintah melaksanakan otonomi PT melalui hierarki yang demokratis seperti ini (otonomi PT—*Red.*)," ungkap Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A., Rektor UGM.

Malangnya, bantuan dana dari Bank Dunia bukan dalam bentuk hibah, melainkan berupa pinjaman. Saat ditanya siapa yang harus mengembalikan dana pinjaman tersebut, Dr. Supriyadi, anggota Tim Inti Persiapan Otonomi (TIPO) UGM Bidang Finansial, menjawab, "Secara umum, negara yang akan membayarnya." Meski bukan UGM yang harus membayar, tapi pinjaman ini pastilah bakal menambah panjang daftar utang Indonesia kepada lembaga yang bermarkas di Amerika itu. Bahkan, hingga kini, utang negara terhadap lembaga tersebut untuk biaya pendidikan saja mencapai lebih US$9 juta (lihat Tabel 2).

Dari pengalaman, bantuan dana dari Bank Dunia selalu diikuti oleh kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan kaum kapitalis, yang berdampak bagi negara kreditor(Indonesia). Akhir tahun 1990-an. saat kran liberalisasi perdangangan dibuka, muncullah perusahaan-perusahaan yang berskala nasional dan multinasional di Indonesia. Hal itu menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja melambung tinggi. PT dipaksa menyediakan tenaga kerja yang mampu memenuhi tuntutan pasar. Sejak itu, terjadi perubahan kebijakan pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industrialisasi. Orientasi pendidikan menjadi bertujuan praktis dan mekanik, yang mengabaikan esensi pendidikan. Demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute Development and Economic Analisys (IDEA).

Sekalipun demikian, Menteri Pendidikan Nasional, Dr. Yahya Muhaimin, melalui Dirjen Dikti, menyatakan setuju untuk tetap memberlakukan rencana otonomi PT. "Ya, beliau *ngomong* ini jalan terus, tidak ada masalah," tutur Satryo. Tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sekarang butuh dana yang begitu besar buat mengatasi resesi ekonomi nasional.

Peraturan yang dibuat dalam kondisi mendesak seperti itu tentulah memunculkan berbagai kesenjangan. Conny R. Semiawan menangkap gejala itu. "Ya, ada kesenjangan dalam peraturan pemerintah itu," ungkap Ketua Komisi Disiplin Ilmu Pendidikan ini. Di antaranya, papar Conny, adalah pembahasannya yang hanya menonjolkan aspek bisnis. Sedangkan aspek-aspek lain, seperti masalah akademik, kurang mendapat perhatian. Ali Fahmi, Ketua Legislatif Transisi UGM, bahkan terang-terangan menolak diberlakukannya peraturan itu. "PP itu dibuat dengan sangat terdesak. Posisi rejim saat itu terjepit karena desakan IMF dan Bank Dunia," tegasnya.

Ternyata kesan itu ditangkap juga oleh Prof. Dr. Koento Wibisono, Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) dan Ketua Pusat Studi Pancasila (PSP). Saat ditemui di ruang kerjanya, guru besar Filsafat ini menyatakan, "Aspek pendidikan, saya kira, *kok* terasa ditinggalkan. Itu yang saya prihatinkan." Sampai sekarang, TIPO-UGM lebih sibuk menyiapkan proposal yang berkaitan dengan aspek pendanaan. Padahal, otonomi PT merupakan suatu kesempatan untuk menampilkan ciri khas suatu universitas. Namun, menurut Dr. Sahid Susanto, anggota TIPO-UGM, "Akademik cuma sebagian kecil dari proyek otonomi. Ada yang lebih substantif. Akademik tak akan bisa berjalan kalau kita tak pandai-pandai bernegosiasi dengan pemerintah. Akademik tak akan bisa jalan kalau tidak ada kesiapan finansial," ujar Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan UGM ini.

Jika demikian, wajar kalau di kalangan aktivis mahasiswa, otonomi yang ditawarkan oleh pemerintah, lewat pihak rektorat, lebih terkesan sebagai proyek swadana daripada swakelola. Artinya, dengan otonomi yang bersifat swadana, nantinya pemerintah akan memberikan dana berupa *blockgrant* dalam jumlah tertentu. Kekurangannya harus dicari sendiri oleh kampus. "Ini saya *kasih* uang *segini. Nek kurang goleko dhewe* (kalau kurang, cari sendiri—*Red.*)," ujar Koento, mencoba memberi gambaran mekanisme pemberian dana tersebut.

Karena itu, pemerintah membebaskan PT untuk mencari dana, terserah dari mana saja. Dari sinilah euforia "komersialisasi" PT itu bermula. TIPO-UGM segera menyiapkan

Tabel 1
Beban Utang Luar Negeri Pemerintah

Tahun	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Cicilan Pokok Utang	4.588	4.642	5.183	5.961	5.546	5.715	6.123	5.701
Pembayaran Bunga	2.808	2.941	2.994	3.233	3.248	3.773	3.620	3.215
Beban Utang Pemerintah (US$ 000.000)	7.395	7.583	8.177	8.923	8.794	9.488	11.743	8.916
Beban Utang Pemerintah (Rp 000.000.000)	14.790	18.958	20.443	22.308	21.985	23.720	29.358	62.412

Sumber: Diolah dari World Debt Tables, 1980-1997 dan Laporan Bank Indonesia, 1997-1998

Tabel 2
Bantuan Bank Dunia Untuk Pembangunan Pendidikan Indonesia, 1971-1998

Nama Proyek	Tahun Fiskal	Proyek	Total Pinjaman (juta US$)	Total Dicairkan (juta US$)
Human Resource-Education Dev. (HRE)	1971-1992	20	1301,1	971,1
Human Resource-Education Dev. (HRH)	1994-1998	8	528,3	6,7

Sumber: Basri, dkk. (1999), "Studi Kasus Korupsi pada Proyek-Proyek Bank Dunia", makalah tidak diterbitkan.
Keterangan: Tahun Fiskal adalah tahun mulai dilaksanakannya proyek.
Data untuk tahun fiskal 1983—1993 adalah sampai 31 Agustus 1993.

sejumlah rencana buat menutupi kekurangan tersebut. Pelbagai kemungkinan pun dijajaki. Kelonggaran-kelonggaran dalam memilih jenis usaha juga diberikan. Mulai dari pengoptimalan unit-unit usaha, seperti UPT Komputer, hingga bisnis baru untuk mengeruk untung lebih besar: toko buku, pom bensin, apotek, bahkan juga mal. Ichlasul Amal punya ide mendirikan mal atau membisniskan Gelanggang Mahasiswa UGM. Janjinya, semua pengelolaan dan keuntungannya untuk mahasiswa.

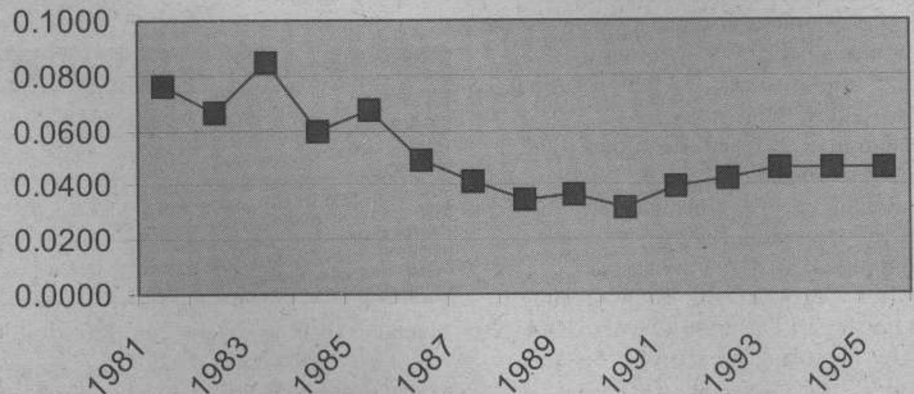
Perburuan dana pun tak dibatasi wilayahnya. Usaha memburu "harta sisa yang tak terpakai" dari berbagai *funding*, baik dari dalam negeri, seperti dari dunia industri, konglomerat, dan dana masyarakat lainnya, atau dana dari luar negeri, silakan saja. Singkat kata, berbagai jenis usaha boleh dilakukan. Mungkin, batasan yang diberikan hanya satu: *sing penting untung, ora rugi* (yang penting untung, tidak rugi—*Red.*).

Apakah semudah itu? Nanti dulu. Prof. Kenneth R. McKinnon, konsultan dari Australia yang ditunjuk Dikti sebagai *technical assistant* TIPO-UGM, jauh-jauh hari telah mengingatkan pada tim inti, di manapun, termasuk di Amerika, bahwa bantuan dari industri tak akan melebihi 30% dari total dana yang dibutuhkan. Tapi, seperti diutarakan Ichlasul Amal, tampaknya sulit untuk mencapai nilai sebesar itu, jika melihat potensi industri di Yogyakarta. Maka, penggalian dana masyarakat, salah satunya melalui penarikan SPP, diharapkan dapat menutupnya. Persoalannya kemudian, seperti dicatat Dewan Mahasiswa (DEMA), 1070 mahasiswa pada periode 1998/1999 menunggak uang SPP. Rata-rata dari para penunggak itu ternyata mengalami kesulitan ekonomi.

batas minimal IPK, lama masa studi, atau syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian. Makin banyak sarjana yang memenuhi kriteria, makin banyak pula jumlah uang yang akan diraih PT. *Para mahasiswa, bersiaplah. Anda akan "dijual"!*

Cuma, sampai sekarang,

Grafik Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Pengeluaran Pemerintah



Sumber: IDEA Diolah dari Nota Keuangan Statistik Indonesia 1981—1996, BPS, Jakarta.



Prof. Dr. Conny R. Semiawan. Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

ISTIMEWA

Kalau demikian, kekhawatiran Arie Sudjito sangat mungkin terjadi. Menurut peneliti pada Institute for Research and Empowerment (IRE) ini, jika negara sampai melakukan pengurangan subsidi keuangan—apalagi kalau sama sekali—jelas akan memberatkan PT. Maka, bukan mustahil bila kemudian muncul alasan untuk menyerap dana yang bersumber dari masyarakat, misalnya melalui SPP.

Tentang minimnya bantuan dana dari konglomerat juga dikeluhkan oleh mantan Rektor UGM, Prof. Teuku Jacob. Pada hemat Jacob, konglomerat Indonesia belum banyak menyumbang. Padahal, merekalah yang nantinya banyak menggunakan lulusan PT, tapi mereka tak mau merogoh koceknya untuk pendidikan. "Kalau yang *nyumbang* orang miskin, ini tidak adil!" protes guru besar Bioantropologi ini. Di Eropa saja, ceritanya, para konglomerat mau menyisihkan dananya untuk pengembangan PT.

Bagaimanapun, masih ada celah yang bisa diupayakan PT untuk mencari kekurangan dana. Rencananya, pemerintah juga akan menyubsidi PT dalam bentuk "pembelian" lulusan. Pemerintah akan mengganti biaya yang dikeluarkan PT sesuai jumlah sarjana yang berhasil diluluskan. Tapi, biaya pengganti pendidikan hanya akan diberikan kalau sarjana yang diluluskan berhasil memenuhi kualifikasi tertentu: kesungguhan pemerintah untuk merealisasikan *blockgrant* belum terbukti. "Komitmen pemerintah untuk memberikan *blockgrant* itu belum ada. Ya, *gimana*, kalau otonomi tak ada *blockgrant*, mau otonomi pakai apa?" keluhnya. Padahal, tanpa dana pemerintah, otonomi PT yang dicanangkannya tak akan jalan.

Penekanan yang berlebihan terhadap aspek bisnis berakibat terabaikannya "pertimbangan moral" dalam rencana penciptaan keunggulan kompetitif. Sekarang ini, pertimbangan-pertimbangan moral semacam itu memang sulit mendapat tempat dan dukungan. Sudjito memberi gambaran lebih jauh tentang kondisi ini. "Dalam dunia yang dikuasai oleh kaum liberal sekarang ini, setiap orang diandaikan memiliki kemampuan yang sama. Yang berlaku kemudian adalah siapa yang kuat, dialah yang menang" ujarnya.

Kehidupan demokrasi di kampus pun bakal terjadi kesenjangan. Buktinya, pada Bab X Pasal 14 (3) PP No. 61/1999 dikatakan bahwa rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). MWA terdiri dari unsur-unsur: menteri (Mendiknas), senat akademik, masyarakat (pengguna lulusan—*Red.*), dan rektor. Dalam proses pemungutan suara, menteri memiliki 35% dari seluruh suara yang sah. Sementara seluruh dosen dan mahasiswa justru tak punya hak pilih.

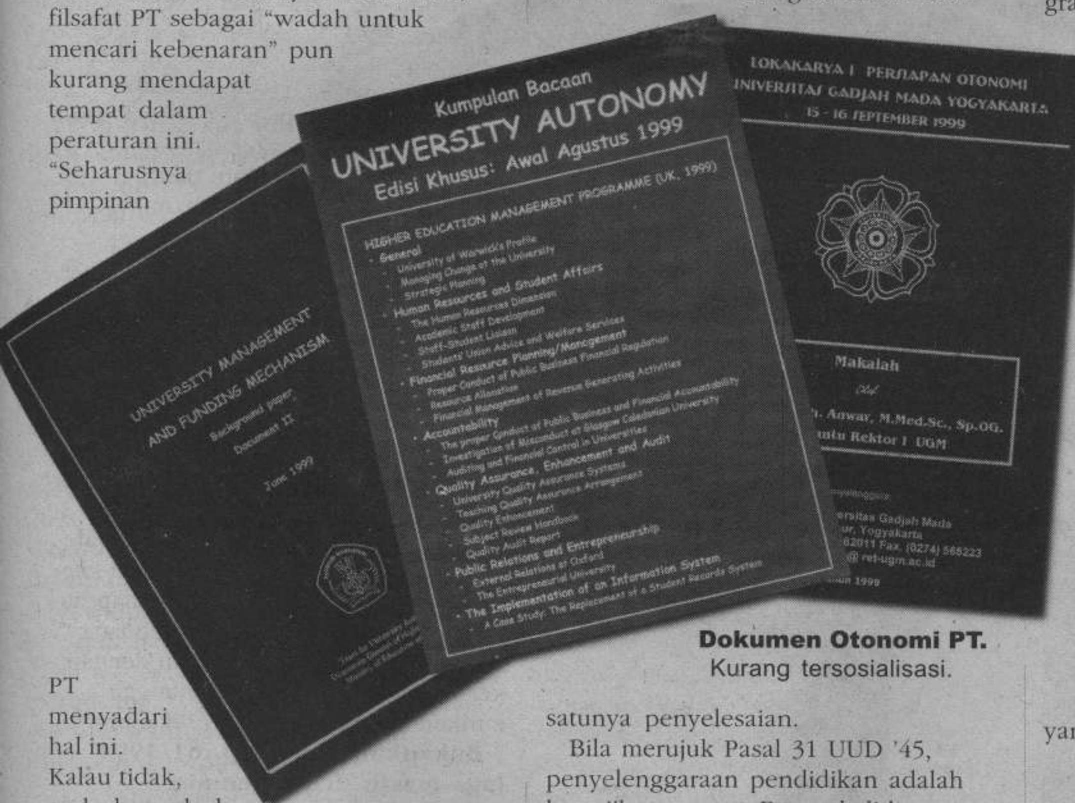
Di sini tampak masih kentalnya intervensi pemerintah.

Namun, menurut Mahfud M.D., keberadaan menteri di sana justru menjaga agar arah pendidikan tak melenceng ke tujuan bisnis. Ini berkaitan dengan diberikannya hak kampus untuk membuka usaha. Selain itu, menteri sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak mengontrol pendidikan. Namun demikian, tak ada jaminan ke arah sana, mengingat selama ini menteri justru dijadikan alat kontrol penguasa terhadap kampus.

Tidak dilibatkannya mahasiswa, baik dalam pembahasan konsep otonomi maupun MWA, kian menisbikan demokrasi di kampus. Di pihak lain, kalangan pengusaha—wakil unsur masyarakat—yang didudukkan di MWA banyak diuntungkan sebab bisa terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan di kampus. Ini makin menguatkan asumsi bahwa mahasiswa memang diplot sedemikian rupa untuk kepentingan industri. Apalagi, pihak pemerintah, sebagai klien dalam kontrak "jual-beli", berhak meminta pertanggungjawaban badan hukum (PT) bila kualitas produk yang dihasilkan tak sesuai yang dijanjikan. Maka, menurut Conny R. Semiawan, filsafat PT sebagai "wadah untuk mencari kebenaran" pun kurang mendapat tempat dalam peraturan ini. "Seharusnya pimpinan PT menyadari hal ini. Kalau tidak, salah-salah pengembangan yang dilakukan justru akan mematikan institusi itu sendiri," tegas Conny.

Terkait dengan peliknya soal dana ini, T. Jacob justru berpendapat, penyelenggaraan pendidikan tak mesti membutuhkan biaya yang mahal. Pesantren adalah satu contoh. Banyak pesantren yang mandiri secara ekonomi dengan mendirikan koperasi, usaha industri kecil, atau pertanian. T. Jacob juga melihat, sekarang ini yang disebut penelitian hanyalah yang nilainya berjuta-juta. Sedangkan penelitian yang nilai uangnya kecil tak disebut penelitian. Padahal, salah satu pemberi dana untuk penelitian itu adalah Bank Dunia. "Jadi, Bank Dunia memberikan (baca: mengutangkan—*Red.*) uang penelitian yang besar, biar utang kita semakin membengkak," demikian Guru Besar UGM ini menyadarkan.

Selanjutnya, T. Jacob membandingkan India sebagai negara miskin yang ternyata dapat menyelenggarakan pendidikannya secara gratis. Itu pun dari level terendah, yaitu sekolah dasar, sampai strata yang paling tinggi, yakni jenjang doktoral. "Sekalipun di sana SD-nya masih beralas tanah," ungkapnya. Dalam kesederhanaan seperti itu, hasil pendidikan di India justru sangat maju. Banyak pakar-pakar India yang diakui di Amerika. Contoh itu membuktikan bahwa utang bukanlah satu-satunya penyelesaian.



Dokumen Otonomi PT. Kurang tersosialisasi.

Bila merujuk Pasal 31 UUD '45, penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara. Barangkali harus dikaji ulang proporsi pembagian APBN setiap tahunnya. Kalau diamati, dari tahun 1980 sampai 1995, berdasarkan data penelitian Institute Development and Economic Analisys (IDEA), anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah ternyata sangat rendah. Sebagai gambaran, pada tahun 1995 saja, negara cuma menganggarkan 0,0459% untuk biaya pendidikan dari total keseluruhan anggaran . (lihat grafik). Inilah salah satu penyebab biaya pendidikan di Indonesia tergolong mahal.



Prof. Dr. Koento Wibisono. Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama).

Peningkatan anggaran pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi alokasi anggaran bidang lain, misalnya militer. Penelitian yang dilakukan oleh IDEA (1999) membuktikan, ada korelasi antara beban utang dan pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan. Hasil pengujian *Looney* dengan data anggaran pendidikan dari tahun 1980 sampai 1997 menyimpulkan, meningkatnya beban utang negara justru menyebabkan semakin terjadi pengurangan alokasi anggaran pendidikan. Melihat kenyataan di atas, banyak cara yang dapat dilakukan oleh PT. Salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan yang murah, seperti yang dilakukan India.❑

Dedy Sushandoyo
Dian Fikriani, Bachtiar, Adi Baskoro, Ibrahim Fahmi

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.

"...Mau Lari ke Mana?

IKA RAHMAWATI HILAL

Mengapa UGM menerima proyek otonomi kampus?

Kita dijadikan *pilot project* oleh Dikti. Sampai sekarang, komitmen kita seperti itu. Nanti kita akan dijamin dana berupa *block grant.* Dan dana itu bukan berasal dari pemerintah, tapi dari Bank Dunia. Jadi Bank Dunia mau memberi bantuan kalau pemerintah memberikan otonomi kepada kampus.

Apakah sudah benar-benar dipikirkan risikonya?

Saya katakan, otonomi itu bukan pilihan. Mau tak mau kita harus menghadapinya.

Otonomi seperti apa itu?

Pada prinsipnya, otonomi itu, kalau dalam istilah politik sekarang ini, artinya merdeka. Segalanya akan sepenuhnya dikelola universitas, baik masalah pegawai, biaya untuk pengembangan, penelitian, dan sebagainya. Nantinya, pemerintah pusat memberikan semua dana itu dalam bentuk *blockgrant.* Jadi kita bebas menentukan sendiri pengelolaannya.

Selain itu, dari pusat juga ada konsep Majelis Wali Amanat (MWA), yang salah satunya berperan dalam pemilihan rektor. Itulah *final goal*-nya. Nah, sekarang ini kita belum sampai ke sana. Tahap-tahap itu harus kita lalui. Kita akan membuat kurikulum sendiri, disesuaikan dengan keadaan. Tak perlu lagi menunggu kurikulum nasional seperti sekarang.

Bukankah di PP No. 61/1999 juga masih diatur tentang kurikulum nasional?

Tapi bentuknya beda dengan yang sekarang. Kurikulum nasional saat ini 'kan cuma tingkat fakultas. Seringkali fakultas malah *nggak*

Ke Planet?"

mengembangkannya. Kalau *dikasih* kurikulum (nasional), fakultas harus cari-cari dosen, dan itu tak sesuai dengan semangat otonomi. Prinsip otonomi, kita harus mencari sendiri bidang-bidang yang *fisibel*. Kalau di tingkat lokal itu tidak *fisibel*, kenapa dikembangkan?

Sejauh mana peran serta mahasiswa dalam kurikulum yang akan diterapkan?

Sebenarnya, yang paling penting dalam kurikulum itu adalah adanya akuntabilitas. Di situlah mahasiswa bisa ikut campur, dalam arti mereka bebas mengambil mata kuliah yang paling dibutuhkan. Sekarang 'kan *nggak* ada alternatif. Mau cocok atau tidak dengan pekerjaan tidak peduli, pokoknya harus diambil. Nantinya, mahasiswa bebas meramu sendiri mata kuliah yang diminatinya. Mahasiswa teknik, misalnya, mau mengambil mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Fisafat boleh saja. Atau di Fisipol, ya, silakan ambil. Itu tak bakal mengakacaukan.

Berarti tak ada batasan mahasiswa dari suatu fakultas mengambil mata kuliah di fakultas yang lain?

Saat diterapkan, pada tahap pertama nanti akan lebih bersifat selektif. Pengaturannya oleh masing-masing fakultas. Misalnya dari fakultas ditentukan, Anda boleh mengambil mata kuliah di luar fakultas sekian SKS, mengambil di luar jurusan sekian SKS. Namun, kalau mahasiswa dari Fakultas Filsafat, ya jangan mengambil mata kuliah di Fakultas Kedokteran.

Kalau begitu, lulusan UGM jadi prematur?

Saya kira tidak. Sarjana Indonesia di luar setingkat *undergraduate*. Itu cuma dasarnya, kemudian makin lama makin meruncing.

Anda sendiri setuju dengan otonomi kampus?

Saya kemarin baru pulang dari Jepang. Dulu, di negara itu, semua biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Namun, kini, negara tak mau lagi membiayai, sehingga mahasiswa harus membayar SPP. Selain itu, jika ada beberapa program studi yang "tidak *marketable*", atau tak ada *demand*, maka program studi itu dihilangkan. Itu saya katakan bukan pilihan.

Kalau saya boleh memilih, beberapa program studi yang tak ada *demand*, tapi itu masih diperlukan, akan saya pertahankan. Tapi kalau tak ada yang memilih, ya, mau *gimana* lagi! Sebagi contoh, dulu di Jerman semua universitas punya program bahasa latin. Sekarang, universitas di sana dipaksa untuk menghilangkan program tersebut. Jadinya, program itu ada di universitas tertentu saja. Kalau mahasiswa mau mengambil bahasa latin harus ke universitas itu.

Apakah otonomi kampus tidak bertentangan dengan idealisme UGM?

Saudara jangan melihat otonomi kampus sebagai polar yang kontradiktif dengan idealisme. Otonomi merupakan proses yang menyangkut perkembangan dunia. Dan itu sesuatu yang harus dihadapi. Anda boleh tidak setuju dengan kapitalisme, tapi Anda mau lari ke mana? Mau lari ke planet?

Lantas, bagaimana penyiasatan UGM?

Kita mengarahkan semua rencana untuk kepentingan idealisme. Sekarang, idealisme tanpa akuntabilitas itu *nggak* ada gunanya. Bukan idealisme kalau begitu. Nah, sekarang ini kita ciptakan idealisme yang *accountable*.

Tampaknya, pembentukan tim otonomi UGM tidak transparan. Mahasiswa juga tidak dilibatkan. Bagaimana sebenarnya prosesnya?

Mahasiswa sudah diikutsertakan. Badan Eksekutif Mahasiswa selalu diajak. Tim itu di bawah PR I dan juga PD-PD I. Selain itu, ada pula tim di tingkat universitas, yang beranggotakan orang-orang yang tertarik dengan masalah ini. Kini mereka sedang bekerja keras. Dikti dan Bank Dunia pun mengirimkan konsultan asing.

Bagaimana bila ada protes dari mahasiswa?

Tidak akan ada resistensi. *Lha wong* tidak ada perubahan apa-apa. Yang ditakutkan mahasiswa itu 'kan kalau SPP dinaikkan. Dan itu jelas tidak.

Bukankah mahasiswa UGM banyak dari kalangan tak mampu secara ekonomi?

Ya, saya tahu itu. Tapi sekarang ini, ada yang tak wajar pada pembayaran SPP. Yang kaya mendapat subsidi dari yang miskin. Coba bayangkan, kalau orang kaya cuma membayar SPP Rp400 ribu, itu 'kan tak ada artinya. Dengan data-data yang ada, nanti saya akan mengimbau kepada yang kaya untuk menyumbang lebih banyak. Jangan sampai yang miskin menyubsidi yang kaya.

Kalau mahasiswa harus cepat lulus dan uang kuliah mahal, apakah tak akan mengurangi kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat?

Kalau aktivis, terpikir dalam benak saya untuk memberikan *exception*. Paling berapa *sih* yang aktivis? Ada pikiran, kenapa yang aktivis itu tak diberi beasiswa saja. Jadi, yang aktivis tak ada masalah untuk membayar uang kuliah. Walaupun saya pernah meneliti soal ini, tak ada korelasi antara yang aktivis dengan lamanya masa studi.

Adakah rencana pembatasan terhadap lembaga kemahasiswaan?

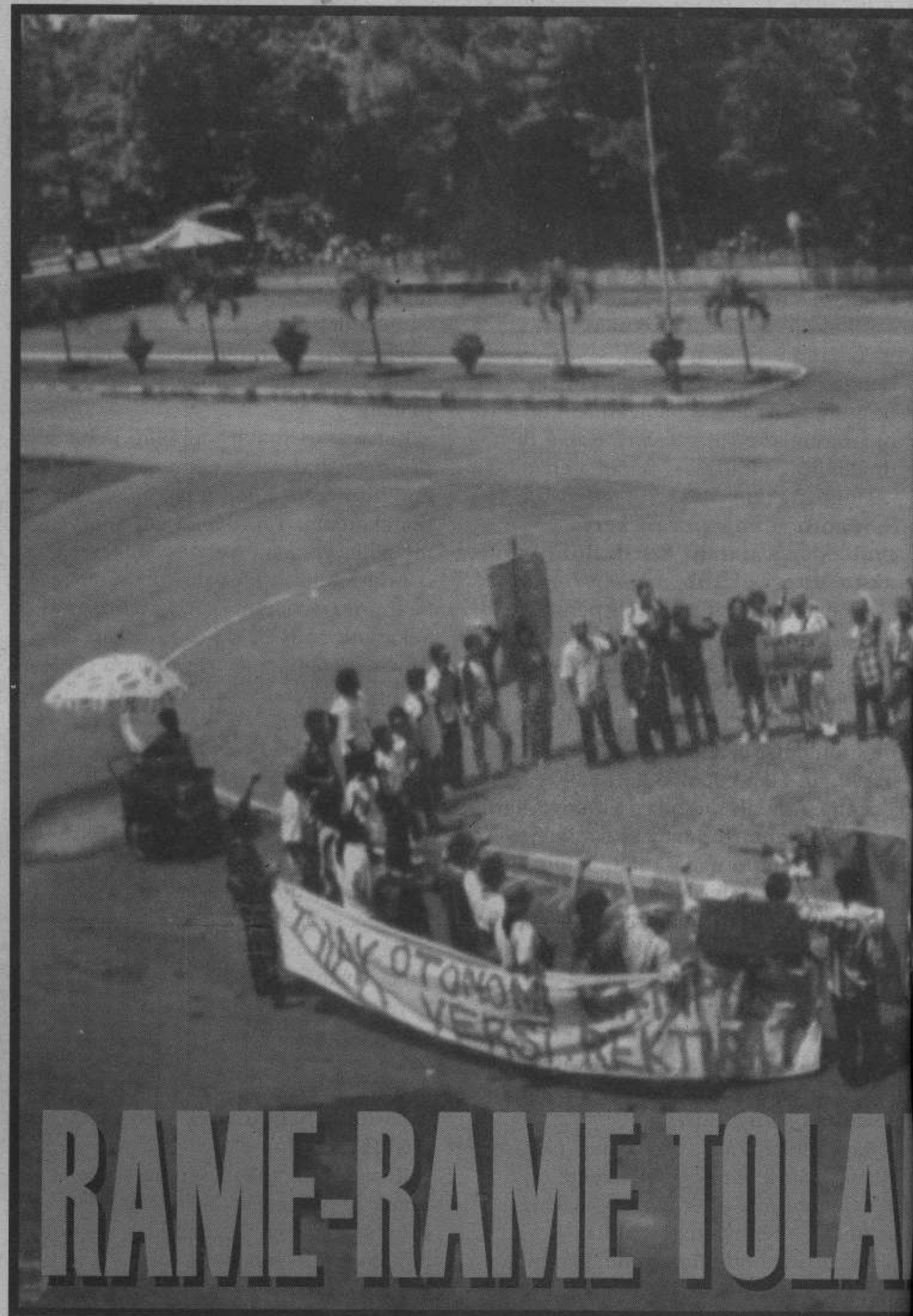
Tak akan ada pembatasan bagi organisasi kemahasiswaan. Memang seharusnya begitu. Kalau saya boleh usul, Direktur Kemahasiswaan di Depdikbud sebaiknya dihapus saja.

Jadi, otonomi merupakan pilihan terbaik bagi UGM?

Sekali lagi, ini bukan pilihan, tapi sesuatu yang harus dihadapi. Sistem yang sekarang tak mungkin lagi dipertahankan.❐

Dedy Sushandoyo
Ajar Aedi

Awal 1990-an, mahasiswa UGM membentuk Komite Tegak Lima guna menuntut diberikannya otonomi kampus. Kini, ketika Dirjen Dikti menunjuk UGM sebagai salah satu pilot project rencana otonomi PT, mengapa mahasiswa justru menolaknya?



RAME-RAME TOLA

Pascakeluarnya PP No. 61/1999 tentang PTN sebagai badan hukum, atau lebih populer dikenal sebagai otonomi kampus, UGM segera membentuk Tim Inti Persiapan Otonomi (TIPO). Prof. dr. Mochammad Anwar, Pembantu Rektor I UGM Bidang Akademik, ditunjuk sebagai ketuanya. Selama perumusan proposal otonom, TIPO jadi *think tank-nya,* didukung tim otonomi tingkat fakultas yang anggota-anggotanya terpisah dari TIPO.

Rangkaian panjang kerja konseptual dan teknis telah dilaksanakan. Sampai sekarang, rapat-rapat maraton untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan di tingkat universitas dan fakultas terus dilakukan. Bahkan, lokakarya dengan menghadirkan seluruh anggota tim, baik tim tingkat universitas dan tingkat fakultas, telah dua kali digelar, pada 15—16 September 1999 dan 20 November 1999. Konsultan dari Australia, yang disediakan Dirjen Dikti untuk membantu TIPO-UGM—juga ketiga PTN lain—telah pula didatangkan. Akhir itu semua ialah sebuah proposal yang akan segera diserahkan ke pemerintah, pada April 2000 nanti.

Meski banyak tahapan kerja sudah dilampaui, hingga kini hampir sebagian besar anggota sivitas akademika UGM justru tak tahu- menahu dengan rencana tersebut. Kalaupun ada yang tahu, informasi itu justru dari media massa. Ironis, bukan TIPO-UGM sendiri yang menyosialisasikannya. Ini terjadi sebab hasil kerja tim tersebut memang bukan untuk kalangan kampus (mahasiswa, dosen, karyawan), tapi bagi pemesannya, yakni Dirjen Dikti. Wajar kalau sampai kini rencana otonomi PT masih remang-remang, diselimuti awan tebal.

Ketidaktahuan akan rencana tersebut, ternyata, bukan monopoli mahasiswa saja. Dosen pun masih merasa asing dengannya, apalagi para karyawan, yang selama ini memang seringkali tak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan kampus. "*Wah*, saya kurang begitu tahu rencana tersebut," tutur Prof. Sri Harto, mantan Dekan Fakultas Teknik, yang belum lama diganti.

Waspada akan rencana-rencana "X" di balik misteriusnya proyek otonomi, elemen-elemen mahasiswa UGM segera mengambil posisi kritis terhadap isu ini. Pembentukan tim khusus untuk membahas masalah otonomi PT mulai dilakukan oleh beberapa elemen. Dewan Mahasiswa (Dema) UGM, organisasi mahasiswa ekstrakampus, jauh-jauh hari telah menaruh perhatian serius terhadap isu ini. "Kami telah membentuk tim khusus sejak enam bulan lalu," ujar Willy, salah satu aktivisnya. Bahkan, Dema telah pula menugaskan anggotanya untuk survai ke UI, ITB, dan IPB. Tak hanya sampai di situ, Dema bahkan menyusun sejumlah penyikapan organisasi atas rencana tersebut. Salah satu bukti konkret dari keprihatinan itu, antara lain, ditunjukkan dengan pengangkatan tema tentang otonomi PT pada buletin *Suluh* yang mereka terbitkan. "Awas, Otonomi Kampus Versi Rektorat, Membawa Kita ke Tiang Gantungan", demikian judul pada sampul *Suluh* Edisi



5/Th. I/1999.

Dengan tegas, Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP)—juga wadah ekstrakampus— menolak proyek otonomi PT yang ditawarkan pemerintah. Salah satu rasionalisasi penolakannya, antara lain, tak dilibatkannya mahasiswa dalam proses perumusan konsepnya. Ini mengindikasikan, birokrat kampus dan pemerintah masih menganggap mahasiswa sebagai objek. Selain itu, dampak-dampak yang ditimbulkan rencana tersebut juga menjadi dasar penolakan KPRP. Terciptanya ketergantungan pada lembaga multilateral yang menjadi donatur, semakin asingnya mahasiswa dari realitas sosial masyarakatnya, dan juga semakin mahalnya biaya pendidikan adalah beberapa dampak yang dikhawatirkan komite aksi ini.

Ternyata Eksekutif Transisi (EKTI) dan Legislatif Transisi (ELTI) tak mau ketinggalan. Lembaga formal tertinggi mahasiswa UGM ini juga sudah membentuk tim khusus guna mengkaji proyek otonomi PT. Menurut Rektor UGM, ELTI-EKTI telah sejak awal dilibatkan dalam pembahasan oleh TIPO-UGM. Namun, toh mereka merencanakan untuk mengadakan referendum, guna mengetahui pendapat mahasiswa. "Kita akan membuat referendum tentang otonomi PT," cetus Ali Fahmi, Ketua ELTI, saat diadakan diskusi antara Ketua TIPO-UGM bersama elemen mahasiswa, yang digelar BALAIRUNG, 22 Oktober 1999. Untuk memperkuat rencana tersebut, Huda Tri Yudiana, Presiden EKTI, menegaskan kembali rencana referendum itu saat dilakukan pertemuan antarelemen, pertengahan November.

Di tingkat fakultas, hal yang sama telah pula dilakukan. Setidaknya, seperti yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Mahasiswa fakultas ini telah membentuk komite aksi untuk menolak "swastanisasi" UGM. Komite yang kemudian diberi nama Komite Aksi Anti-Pendidikan Kapitalis (KAPAK) didukung Majalah *Sintesa* dan Kelompok Plaza Atas, di samping kelompok-kelompok yang lain. Fakultas-fakultas lain, kabarnya, berencana serupa. Tak sedikit kelompok-kelompok diskusi yang juga mengkaji isu otonomi PT. Lingkar Studi Alternatif (LSA) misalnya. Kelompok yang sebagian besar anggotanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum ini secara kritis telah meneliti rencana yang didasarkan PP No. 61/1999.

Minimnya informasi yang untuk mahasiswa, khususnya elemen-elemen yang ada di UGM, mendorong Majalah BALAIRUNG mengadakan serangkaian diskusi, yang khusus membahas rencana tersebut secara menyeluruh. Latar belakang dikeluarkannya PP No. 61/1999, serta alasan UGM menerima (pasrah?) rencana tersebut, menjadi topik pertama yang diangkat BALAIRUNG. Dengan menghadirkan Ketua TIPO-UGM, Prof. dr. Moch. Anwar, dan Ketua ELTI, Ali Fahmi, serta Arie Sudjito, dosen muda Fisipol UGM, diskusi di Gedung Pusat itu ternyata mendapat respon positif dari mahasiswa UGM. Setidaknya, indikasi itu dapat dilihat dari jumlah peserta, di samping banyaknya pertanyaan-pertanyaan kritis yang terlontar. Diskusi-diskusi lanjutan pun segera dilakukan, baik menyangkut rencana bidang akademik, organisasi, maupun finansial. Nara sumbernya juga langsung dari8 TIPO-UGM (lihat: "Sulit Menawar, Dikira Sosialis").

Setelah diskusi demi diskusi dilewati, mahasiswa segera melakukan kritik atas segala rencana otonomi UGM. Pertemuan itu diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Pusat UGM, 12 November 1999, dihadiri oleh utusan dari Dema, KPRP, HMI-MPO, BEM-FE, LSA, Kelompok Plasa Atas, EKTI-ELTI, dan elemen lainnya. Dari latar belakang



Aksi Menolak otonomi kampus.
Demi masa depan pendidikan bangsa.

munculnya proyek otonomi PT hingga dugaan-dugaan atas adanya rencana-rencana terselubung, langkah-langkah memperkuat posisi mahasiswa sampai perlunya menyusun kerja bersama, menjadi pokok bahasan pertemuan itu. Dan, tindak-lanjut untuk menggalang kekuatan lebih besar segera disepakati.

Kamis, 18 November 1999, kembali diadakan pertemuan lanjutan. Kali ini, giliran EKTI fasilitatornya. Tercatat, 28 wadah kemahasiswaan, baik intra maupun ekstrakampus, hadir dalam pertemuan di Ruang Sidang Gelanggang Mahasiswa UGM. Forum itu serangkaian dengan semiloka yang menghadirkan Prof. Dr. Djohar, M.S., Dr. P.J. Soewarno, dan Drs. A. Tony Prasetyantono, M.Sc.

Berbagai kekhawatiran akan dampak otonomi PT mengemuka pada pertemuan hari kedua. Willy dari Dema berpendapat, otonomi hanya akan meletakkan mahasiswa di menara gading, dan menjauhkannya dari realitas masyarakat. Selain itu, Alia, wakil BEMF Geografi, juga menyatakan penolakannya. Keputusan itu, lanjut Alia, didasari atas hasil jajak pendapat yang pernah dilakukan di Fakultas Geografi. *Polling* itu dimenangkan kelompok yang menentang otonomi PT. Tetapi, benang merah yang bisa ditarik dari berbagai lontaran argumen ialah penolakan terhadap otonomi PT yang diformulasikan oleh pemerintah, atau yang kemudian disebut otonomi kampus versi rektorat ini.

Untuk mewadahi kesamaan gagasan menolak otonomi PT, dan akibat banyaknya elemen yang bergabung, terasa dibutuhkan sebuah wadah perjuangan sebagai alat untuk lebih menyolidkan langkah. Dengan pertimbangan tersebut, maka peserta sepakat untuk membentuknya. "Kita harus membuat komite atau apapun namanya," ujar salah satu peserta. Alasan pembentukan wadah tersebut, lanjutnya, untuk lebih mengonkretkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini.

Sebanyak 28 elemen secara resmi menyatakan bergabung menolak otonomi PT. Lembaga mahasiswa intra-UGM antara lain EKTI-ELTI, BEMF/SMF Biologi, Ekonomi, Filsafat, Geografi, dan Pertanian. Sedangkan kelompok-kelompok studi antara lain DENGUNG, Apis Dorsata Fak. Kehutanan, Kelompok Plaza Atas Fisipol, SIKAT, Kelompok Tengah Hari, Lingkar Studi Alternatif (LSA), juga Komite Aksi Anti Pendidikan Kapitalis (KAPAK), Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), dan Komite Mahasiswa Merdeka (KMM). Begitu pula, tercatat Lembaga Mahasiswa Teknik untuk Perubahan (LMPT), Partai Kebangkitan Demokrat (partai mahasiswa). Beberapa lembaga penerbitan mahasiswa tak ketinggalan hadir, yaitu Majalah *Balairung*, Majalah *Foresta* dan *newsletter Lumut* Fak. Kehutanan, Majalah *Pijar* Fak. Filsafat, dan Majalah *Sintesa* Fisipol. Selain itu, masih ada Dema, GMNI, KAMMI, HMI-MPO, dan PMII, yang merupakan elemen ekstrakampus.

Usulan-usulan nama komite aksi segera diajukan. "Jangan menggunakan nama rakyat karena itu akan membuat fobi mahasiswa," sergah salah satu peserta, saat menanggapi usulan yang mencantumkan kata rakyat. "Kita sebaiknya mencantumkan kata mahasiswa karena kita adalah mahasiswa, dan lingkup perjuangan kita juga di kampus," ujar yang lain. Akhirnya, forum pun sepakat: lahirlah Komite Aksi Pendidikan Kerakyatan, atau disingkat jadi Komite APIK.

Dalam *press release*-nya, komite ini mengemukakan beberapa argumen yang mendasari penolakan otonomi kampus versi rektorat. Pertama, otonomi PT yang tidask sekadar swakelola, tapi lebih utama swadana, ternyata berdampak pada naiknya SPP mahasiswa. Akibatnya, biaya pendidikan tak akan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Argumen yang lain, mahasiswa tak pernah dilibatkan dalam perumusan konsep tentang otonomi PT. Menurut Komite APIK, sejauh ini mahasiswa hanya diberi peran menjadi "tim sukses otonomi PT", tanpa tahu bagaimana dan mengapa itu harus disukseskan. Di samping kedua argumen tersebut, ada tanda-tanda bahwa PT diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar. Dampaknya, pendidikan yang dihasilkan oleh PT akan kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Pengajuan argumen penolakan atas rencana otonomi PT segera disosialisasikan ke mahasiswa, dengan berbagai metode: poster, selebaran, siaran berita pers, dll. Didirikan pula tenda keprihatinan, lantas aksi demonstrasi dilakukan pada 8 Desember 1999, dan rencananya pas tanggal 18 Desember 1999 diadakan demo lagi. Slogan besar aksi ialah "tolak otonomi kampus versi rektorat". Yang menarik, Komite APIK juga berkomitmen untuk tak cuma menolak konsep otonomi, tapi berusaha pula melakukan upaya-upaya perbaikan kondisi pendidikan saat ini.

Baiklah, kita tunggu saja.❐

Dedy Sushandoyo
Bachtiar

Meninjau Persiapan 4 Fakultas Menghadapi Otonomi UGM

PERSIAPAN YANG BAIK, SETENGAH KEBERHASILAN

Ini memang ironis. Otonomi UGM--versi rektorat--yang akan diberlakukan pada Juni 2000, gaungnya justru tak sebesar tumpukan persoalan di dalamnya. Pun demikian, kondisi fakultas-fakultas, yang mestinya telah siap, ternyata sangat mengkhawatirkan dan belum jelas. Padahal, program ini sudah lama digulirkan, sedang waktu pelaksanaan tinggal 6 bulan lagi.

Terlepas menerima atau tidak, ada baiknya pepatah ini dicamkan: "sedia payung sebelum hujan". Di sinilah perlunya usaha menakar kesiapan setiap fakultas, untuk kemudian menghitung peluangnya menyongsong otonomi kampus.

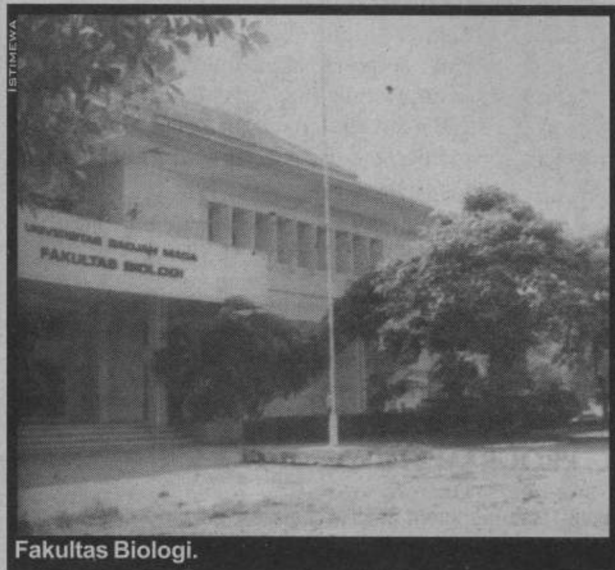
Akibat keterbatasan ruang, hanya empat fakultas yang disajikan dalam laporan ini: Fakultas Biologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Filsafat. Mengapa yang dipilih hanya empat fakultas itu? Seperti anggapan Tim Inti Otonomi UGM, keempat fakultas itu dinilai sebagai representasi kesiapan 18 fakultas dalam menghadapi otonomi kampus. Ukurannya, fakultas yang siap dan tak siap, fakultas yang mampu dan tak mampu.

Fakultas Biologi: Maju Terus, Pantang Mundur!

Mukhlisul Faatih, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Biologi (BEM-FB) itu tak tahu harus berkata apa. "Anda lihat sendirilah, mahasiswa di sini sibuk dengan praktikum," jawabnya kepada BALAIRUNG tentang minimnya kepedulian mahasiswa Biologi terhadap rencana pelaksanaan otonomi UGM.

Fatih, begitu panggilan akrab mahasiswa asal Kudus ini, tentu tak mengada-ada. Meningkatkan kepedulian mahasiswa Biologi terhadap persoalan otonomi kampus bak menembus tembok tebal "sikap cuek" mahasiswa--yang dibungkus atas nama "kuliah dan praktikum". Seperti ditandaskan Autar, mahasiswa Biologi '94, "Buat apa *mikir* hal lain kalau *nggak* ada hubungannya dengan kuliah!"

Namun demikian, mahasiswa tak bisa serta-merta dijadikan "kambing hitam" soal ini. Peran birokrat fakultas, tampaknya, patut pula dipertanyakan. Tapi, di mana persisnya keganjilan ini?


ISTIMEWA

Fakultas Biologi.

Akar masalahnya ialah sosialisasi yang rendah, tidak saja antara mahasiswa, tapi juga dari fakultas. Diakui sendiri oleh Dekan Fak. Biologi, Prof. Dr. Issirep Sumardi, "Persoalan otonomi UGM memang belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Di sini baru pada tingkatan dosen. Mahasiswa belum."

Terang sudah. Kepedulian yang rendah, sosialisasi yang minim, dan waktu yang pendek (pada Juni 2000 program otonomi PT akan diberlakukan) ini tentu saja menyisakan kekhawatiran, yang bukan mengada-ada, terhadap pelaksanaan otonomi UGM di Fakultas Biologi.

Bahkan, seperti tersebut dalam Proposal Persiapan Otonomi UGM (Lokakarya I, 15--16 September 1999), Fak. Biologi menyimpan beberapa kelemahan mendasar: jumlah dosen yang masih kurang, iklim akademis yang belum terbentuk, kurangnya kontrol dosen pembimbing terhadap mahasiswa, juga kurang memadainya perlengkapan laboratorium sebagai sarana belajar mahasiswa. Sedang pada segi keuangan, Fak. Biologi menghadapi dua persoalan besar. Pertama, tingkat kemandirian keuangan tahunan yang rendah. Kedua, tingkat kesejahteraan ekonomi dosen dan staf pendukung yang juga rendah.

Menyikapi hal ini, masih seperti yang tersebut di proposal Persiapan Otonomi UGM, Fak. Biologi telah menyiapkan Badan Kerjasama dan Pelayanan Fakultas (BKPF). Badan ini bertugas mengembangkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan LSM. Kegiatannya berupa penjualan prasarana untuk laboratorium di SMU-SMU, membuka kursus-kursus, konsultan bidang botani, dll. Program ini, barangkali, tidak mustahil dilakukan Biologi untuk menutup kekurangan dananya.

Soal keuangan ini, Isserep Sumardi membantah data yang menyatakan bahwa neraca keuangan Biologi selalu minus pada 3 tahun terakhir. "Anggaran keuangan tahunan kami selalu pas," tandasnya meluruskan. Dekan perempuan ini juga tak mau fakultasnya dianggap miskin. "Bila dibandingkan dengan Fakultas Filsafat, kita masih *mendingan*," tambahnya.

Tentang kesiapan fakultasnya, Isserep punya catatan khusus. Beberapa persoalan, menurutnya, perlu

segera diselesaikan.

Pertama, sedikitnya jumlah karyawan laboratorium, yang tak seimbang dengan jumlah mahasiswa praktikan. Ada kemungkinan penambahan karyawan laboratorium akan dilakukan. Kedua, persoalan mahasiswa "abadi". Tercatat 10% dari 950 mahasiswa Biologi sudah terlampau lama studinya. Isserep mengaku sangat pusing dengan persoalan yang satu ini. Dan ketiga, kuranganya dosen yang *concern* pada program-program penelitian.

Namun, mahasiswa bukannya tak punya catatan. Fatih, contohnya, mengritik fasilitas laboratorium Biologi yang kurang memadai untuk universitas sebesar UGM. Seorang mahasiswa angkatan tua, yang tak mau disebut namanya, menilai banyak dosen Biologi kurang mengikuti perkembangan iptek termutakhir. Bahkan, beberapa kali kasus terjadi, mahasiswa berinisiatif mencoba penelitian yang menantang, tapi sang dosen meremehkannya. Fak. Biologi UGM tak mau--padahal mampu--menjadi yang terdepan. Dan, masih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi Fak. Biologi.

Jadi, bagimana? Jangan khawatir! Itulah kesan yang muncul dari seorang Ibu Isserep. Dengan tegar ia mengatakan, "*Wong urung maju kok wedi mati*!" tantangnya. Artinya, belum maju kok takut mati duluan....

Fakultas Ekonomi: Pancasila 2 SKS Saja

Dikeluarkannya PP. 61/99 tentang PTN sebagai Badan Hukum tak membuat fakultas ini kebingungan. Kesempatan dan peluang yang menggiurkan justru "terbentang" menunggu sambutan. Sebabnya, pengelolaan manajemen di Fak. Ekonomi telah terkondisikan secara baik. Sarana pendukung kegiatan perkuliahan, misalnya, boleh dikata cukup memadai. Fak. Ekonomi punya fasilitas komputer yang lumayan lengkap. Terdapat 120 unit komputer plus CD-ROM.

Kemudahan dan akselarasi kegiatan akademik pun telah "maju satu langkah" dibanding fakultas-fakultas lain. Sejak setahun lalu sistem registrasi mahasiswa Fak. Ekonomi sudah *on-line*. Dalam waktu dekat, ada rencana registrasi mahasiswa yang bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Ini semua, menurut Prof. Dr. Nopirin, M.A., Dekan Fak. Ekonomi, bertujuan untuk mendongkrak kualitas mahasiswa.

Impian mewujudkan fakultas yang berstandar internasional pun telah dirintis. Misalnya, ada sebuah kelas khusus yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengajaran. Kerja sama dengan jaringan luar negeri, umpamanya dengan Monash University di Australia, Kentucky University di AS, dan banyak lagi, sudah pula dilakukan. Tak heran, banyak dosen-dosen Fakultas Ekonomi lulusan luar negeri.

Di bidang finansial, Fak. Ekonomi tak beroleh persoalan yang berarti. Arief Ramelan, Ph.D., Pembantu Dekan I Fak. Ekonomi, mengatakan, "*Nggak* ada masalah. Kita tinggal menaikkan gaji dosen dan pensahan otonomisasi UGM. Itu saja."

Boleh dibilang, hampir tiap tahun anggaran dana yang diberikan UGM ke fakultas ini selalu *surplus*. "Sayangnya", kelebihan dana itu tak masuk ke fakultas, tapi malah kembali ke universitas. Untuk mendapat dana lebih, adanya program D-3 dan D-4 dirasa cukup membantu. Juga cara lain, seperti penyelenggaraan pelatihan untuk Perumka, atau Departemen Keuangan. Kegiatan ini kerap digarap oleh Pusat Penelitian Fakultas Ekonomi, dan terbukti cukup efektif untuk membuat dana terus mengalir.



Fakultas Ekonomi.

Demikian pula proyek QUE (*Quality for Undergraduate Education--Red.*), proyek peningkatan mutu pendidikan kesarjanaan, tahun ini ternyata cukup banyak memberikan kontribusi dana bagi ketiga jurusan di Fak. Ekonomi.

Di bidang akademik, untuk rencana ke depan, mata kuliah yang tak berhubungan kuat dengan kuliah-kuliah di Fak. Ekonomi akan dikurangi jumlah SKS-nya. Pancasila (Ketatanegaraan dan Filsafat), mata kuliah yang selama ini amat dibosani mahasiswa, dimampatkan cuma 2 sks.

Lalu, bagaimana dengan kepedulian mahasiswa Fak. Ekonomi terhadap rencana otonomi UGM?

Tidak berbeda dengan fakultas sebelumnya (Biologi), ketakpedulian pun menerpa banyak mahasiswa Fak. Ekonomi. Fakultas ini memang terkenal dengan budaya "lulus cepat". Tak heran bila keseharian mahasiswanya adalah kuliah dan kuliah. Iklim akademik yang ketat memang sangat mempengaruhi penyikapan mahasiswa Fak. Ekonomi pada hal-hal di luar kuliah. "Sangat sedikit yang peduli dengan rencana otonomi UGM," keluh Awan Santoso, Ketua BEM Fakultas Ekonomi.

Sementara itu, di bidang keorganisasian, Nopirin mengaku belum tahu akan dibentuk seperti apa. Satu hal yang, menurutnya, memberatkan untuk menuju otonomi UGM, yaitu mentalitas birokrasi. Kiranya, bidang inilah yang membutuhkan waktu banyak buat mengubahnya.

Fakultas Teknik: Siap Bagi-Bagi Rezeki

Terletak di sebelah utara RS Dr. Sardjito, jumlah mahasiswa dan dosen Fak. Teknik terbanyak di UGM. Lebih-kurang ada 6780-an mahasiswa dan 306 dosen. Fakultas ini memiliki 8 jurusan: Teknik Arsitektur, Teknik Geodesi, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Nuklir, dan 2 program studi yang sebentar akan menjadi jurusan, yaitu Teknik Industri dan Teknik Fisika.

Berdiri di atas tanah seluas 11.272 meter persegi, tak perlu disangsikan lagi, Fak. Teknik-lah yang terlengkap sarana dan prasarananya. Maklum, kegiatan praktikum diprioritaskan di sini.

Sejumlah 64 laboratorium bertebaran di berbagai jurusan. Di jurusan Arsitektur, misalnya, terdapat 4 laboratorium: Lab. Perancangan, Lab. Teknologi Bangunan, Lab. Perumahan, serta Lab. Perencanaan Kota dan Daerah.

Tentang kesiapan menghadapi otonomi UGM, dilihat dari sarana,

kualifikasi tenaga pengajar, dan pengelolanya, banyak orang menilai Fak. Teknik relatif lebih siap dan lebih baik. Benar-tidaknya tentu juga relatif. Namun, jika dilihat dari bidang finansial, misalnya, tampaknya penilaian itu tak mengada-ada.

Menurut data dari Proposal Persiapan Otonomi UGM, ada empat sumber dana di Fak. Teknik yang didapatkan setiap tahunnya: SPP mahasiswa, subsidi pemerintah, beasiswa, serta proyek-proyek. Besarnya dana yang mengalir tiap tahunnya mencapai Rp14.902.944.000. Rinciannya, dari SPP mahasiswa Rp1.032.444.000, subsidi pemerintah Rp12.138.500.000, dan dari proyek-proyek sebesar Rp1.750.000.000.

Melihat kondisi keuangannya, tak heran jika Fak. Teknik siap untuk "berbagi rezeki" dengan fakultas-fakultas lain. Dituturkan Dekan Fak. Teknik, Ir. Haryana, M.Arch., bahwa kemungkinan Fakultas Teknik menyubsidi fakultas-fakultas lain sangat besar. "Subsidi itu sebenarnya komitmen bersama. Jadi sebagian hasil dari fakultas akan kita kirimkan ke universitas untuk *cross* subsidi itu," ujarnya.

Keinginan Fak. Teknik untuk memandirikan fakultasnya, sebetulnya, telah ada bahkan sebelum UGM dipilih sebagai *pilot projet* otonomi PT ini. "Usulan-usulan itu muncul dari jurusan-jurusan yang ada di Fak. Teknik," ungkap M. Bisri Habibie, Sekretaris Umum LMTP (Lembaga Mahasiswa Teknik untuk Perubahan, gantinya BEM--*Red.*) kepada BALAIRUNG.

Tapi, yang masih tetap mengganjal bagi LMTP yaitu bahwa pemberlakuan otonomi UGM di satu sisi akan menjauhkan mahasiswa untuk peduli dengan aktifitas di luar kuliah. Dengan dimampatkannya masa studi (5,2 tahun--*Red.*), mahasiswa semakin sibuk dengan praktikum dan kuliahnya.


Fakultas Teknik.

Fakultas Filsafat: Kursus, Matrikulasi, dan Ekstensi

Menyongsong otonomi UGM, mau tak mau Fak. Filsafat harus berpikir lebih keras. Anggapan bahwa Fak. Filsafat "miskin dan tidak *marketable*", tentu, tak bisa dibiarkan begitu saja.

Keadaan fisik dan sarana pendukung belajar di Fak. Filsafat masih amat memprihatinkan. Perpustakaan contohnya. Ruang baca yang kurang nyaman, juga minimnya koleksi buku, adalah cerita lama tentang perpustakaan. Sangat jarang ditemukan buku-buku filsafat kontemporer. Banyak mahasiswa yang terpaksa lari keluar kalau ingin mendapatkan buku-buku yang representatif.

Dalam *polling* yang pernah dilakukan mahasiswa Filsafat, hampir semua mahasiswa filsafat mengeluh dengan keberadaan dan kondisi perpustakaannya. Penambahan buku, ruang baca yang nyaman, serta pelayanan yang tak hanya sampai pukul 12.30 siang merupakan tuntutan mereka. Koleksi buku dan referensi, yang sekarang sekitar 17.192 judul, jelas dinilai masih kurang.

Dalam bidang finansial, fakultas yang didirikan pada 18 Agustus 1967 ini, tiap tahunnya, selalu minus. Mungkin itu wajar sebab sumber dananya cuma dari SPP dan subsidi pemerintah.


Fakultas Filsafat.

Memang Fak. Filsafat berbeda jauh dengan Fak. Teknik atau Fak. Ekonomi. Fak. Filsafat boleh dibilang tak cukup siap di bidang finansial ini. Meski begitu, rencana ke depan Fak. Filsafat untuk menyongsong otonomi UGM cukup beragam.

Pertama, Fak. Filsafat akan mengadakan berbagai kursus keahlian, umpamanya metodologi penelitian filsafat, etika, dan logika. Kedua, Fak. Filsafat akan membuka kelas matrikulasi untuk sarjana S-1 yang bukan alumni Filsafat dan ingin melanjutkan ke program pascasarjana. "Selain itu, Fak. Filsafat juga akan membuka program ekstensi," jelas Dekan Fak. Filsafat, Drs. Sri Soeprapto, M.Hum..

Rencana penghapusan mata kuliah Pancasila dan Kewiraan, misalnya, tidak terlalu membuat lapangan pekerjaan dosen-dosen Fak. Filsafat pusing. "Kita masih ada mata kuliah Filsafat Ilmu untuk seluruh fakultas di UGM," ujar Sri Soeprapto, tersenyum.

Hal lain yang cukup merepotkan adalah masalah sumber daya manusia. Tim Fak. Filsafat terdiri atas 4 orang. Kadang dari universitas mendadak meminta laporan *self evaluation* fakultas. "Bayangkan, dalam waktu lima hari harus membuat laporan profil fakultas dalam bentuk statistik," keluh Heri Santoso, salah seorang dosen yang menjadi anggota tim.

Sebagai fakultas yang mengelola MKU (mata kuliah umum), Fak. Filsafat sebenarnya cukup memiliki potensi pasar. Karena itu, Fak. Filsafat akan mendirikan penerbitan buku-buku yang berhubungan dengan MKU.

Di pihak mahasiswa sendiri, sejauh pemantauan BALAIRUNG, isu otonomi belum tersosialisasikan dengan baik dan luas. Isu ini hanya milik beberapa aktivis mahasiswa. Sejumlah diskusi tentang otonomi kampus memang pernah dilakukan, salah satunya dilakukan PIJAR, majalah mahasiswa Fak. Filsafat.❐

Adi Baskoro
Ibrahim Fahmi, M. Bustom

Prof. Kenneth R. McKinnon

"Mustahil Universitas Bisa Berjalan Tanpa Pemerintah"



Nama **Prof. Kenneth R. McKinnon** mungkin masih terasa asing bagi mahasiswa UGM. Padahal, McKinnon berperan besar untuk menentukan "hitam-putih"-nya UGM ke depan. Konsultan pendidikan asal Australia ini kini sedang membantu UGM—sebagai *technical assistant*, istilahnya—selama proses perumusan proposal otonomi UGM.

Sesuai jadwal, keempat PTN yang menjadi proyek percobaan otonomi, selama September 1998—Februari 2000, mengundang konsultan sebagai pendamping dalam penyusunan proposal otonomi PT. Kesemuanya, ternyata, dari luar negeri. Alasannya, seperti diungkap Dirjen Dikti, Satryo Soemantri, mereka lebih berpengalaman dalam manajemen PT otonom.

Lantas, mengapa UGM memilih McKinnon, konsultan dari Australia? Bukan karena pertimbangan hubungan diplomatis kedua negara, namun McKinnon memang lama berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi. Apakah McKinnon pakar yang tepat untuk urusan manajemen PTN otonom di Indonesia? Semoga begitu. Ia baru tiga kali ke Indonesia, dan belum cakap berbahasa Indonesia.

Setelah bertahun-tahun mengajar di Universitas Wollongong, profesor psikolinguistik ini kemudian jadi konsultan pendidikan di beberapa negara, antara lain AS, Inggris, Selandia Baru, juga beberapa negara Asia. Ia lantas ditarik kembali menjadi Direktur Departemen Pendidikan Australia. Setelah tujuh tahun berkarier di pemerintahan, McKinnon kemudian kembali ke universitasnya, menjabat wakil rektor selama 14 tahun. Lelaki 59 tahun ini, setelah lama bergelut dalam dunia pendidikan formal, akhirnya memilih pensiun. Bersama istrinya, Walker, McKinnon mendirikan sebuah lembaga swasta, bidangnya juga konsultasi pendidikan.

Berikut perbincangan BALAIRUNG dengan Prof. Kenneth McKinnon.

Seperti apakah otonomi PT yang Anda idekan?

Secara esensial, otonomi berarti universitas bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas menentukan program studi apa yang dimiliki. Dosen pun bebas mengajarkan mata kuliah yang sesuai, atau membuat ujian sendiri. Akhirnya, memang tak akan ada kurikulum nasional. Setiap universitas memiliki ciri khasnya, mahasiswa bebas memilih mana universitas yang sesuai pilihannya. Pemerintah tak bisa campur tangan. Inilah inti otonomi PT.

Kalau begitu, mengapa masih ada suara 35% untuk pemerintah dalam Majelis Wali Amanat (MWA)?

Saya pikir mustahil universitas bisa berjalan tanpa keterlibatan pemerintah. Bukankah uangnya dari mereka? Jika tidak memberikan subsidi, tak mungkin pemerintah mau menjamin kualitas universitas . Alternatifnya, PTN harus seperti PTS. Jadi, suara 35% di MWA berfungsi untuk itu. Saya yakin itu hanya untuk masa transisi. Kemudian, dalam 5—10 tahun ke depan, pemerintah akan menguranginya, dan hanya akan menjadi *one man one vote.*

Ini juga salah satu langkah besar pemerintah "membebaskan" PTN. Selama ini 'kan pemerintah masih turun tangan dalam pemilihan rektor. Dulu, untuk menjadi rektor universitas di Indonesia, seseorang harus menghabiskan hidupnya di universitas itu. Dalam otonomi PT nanti, kita dimungkinkan untuk memilih rektor dari luar universitas. Hal itu membawa ide segar: untuk mencegah *inbreeding* dan ketergantungan masa lampau. Misalnya, untuk menjadi rektor, dia harus terkenal di antara guru besar di senat universitas, mempunyai hubungan dekat dengan anggota senat, atau berkolusi dengan pemerintah. Saya melihat, di UGM banyak profesor atau dosen yang *nyambi* di luar (PTS—*Red.*). Mungkin bila rektornya orang luar akan bisa berbuat sesuatu untuk mengatasi itu.

Tapi, saya tidak yakin itu bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Jika tidak sekarang mungkin lima sampai sepuluh tahun lagi. Ini masih menjadi perdebatan dalam tim otonomi sendiri.

Universitas di Australia sudah lama otonom. Melihat komposisi di MWA-nya, mahasiswa bisa duduk di sana. Kenapa di Indonesia mahasiswa tak diberi ruang untuk itu?

Masalahnya, universitas di Indonesia, juga di UGM, masih belum paham fungsi dari MWA. Banyak yang bertanya mengapa harus ada MWA ketika lembaga tertinggi universitas, yaitu senat akademik, yang dulu adalah pengambil kebijakan tertinggi di universitas, masih bisa berfungsi. Dulu, penentuan pengeluaran universitas, program studi apa yang boleh didirikan, atau siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi rektor harus lebih dulu mendapat "anggukan" dari Dirjen Dikti. Semua fungsi itu nanti akan dilimpahkan sepenuhnya ke universitas. Nah, di sinilah MWA berperan. Terus terang, orang-orang di senat akademik sendiri tak setuju adanya MWA.

Sebenarnya, bukan hak saya untuk menentukan apakah mahasiswa bisa duduk di MWA atau tidak. UGM lebih berhak menentukan itu. Saya pernah bilang kepada anggota tim otonomi, ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Niat mahasiswa baik, mau menolong universitas walaupun mereka masih muda dan belum berpengalaman. Ini ada untungnya juga. Suara mahasiswa adalah suara dari bawah. Merekalah yang paham apa yang terjadi di universitas.

Saya belum tahu budaya di sini. Masalahnya, saya masih heran kenapa di sini rektor, wakil rektor, anggota parlemen, atau lainnya tak pernah berpikir untuk mendengar pendapat mahasiswa. Jika saya menjadi wakil rektor, saya malah berharap mahasiswa datang dan berdiskusi tentang apa yang mereka maui. Saat ini, rektor Anda seorang ilmuwan politik. Dia sepertinya sangat familiar dengan kegiatan mahasiswa. Bila mahasiswa mau bertemu dan mengatakan kemauannya untuk terlibat, atau dengan Mr. Anwar—PR I Bidang Akademik, Ketua Tim Inti Otonomi UGM—*Red.*— saya yakin itu akan membantu, walaupun tak pasti seberapa besar.

Tapi, ingat, saya belum paham tradisi atau budaya di sini. Mungkin mereka akan menunjukkan pintu keluar, atau mereka malah mendengarkan. *What do you think?*

Mahasiswa masih saja melihat ini sebagai proyek misterius, apalagi

Tim Otonomi UGM tak pernah memberikan informasi yang komprehensif. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?

Sebaiknya kalian butuh sedikit kepercayaan di sini. Kenapa mereka tidak memberikan informasi komprehensif? Itu lebih karena mereka tengah "bergulat" dengan permasalahan itu sendiri. Mereka masih bekerja sangat intensif untuk hal ini. Tim Otonomi UGM belum punya jawaban final atas pertanyaan Anda. Nah, kebanyakan mahasiswa mengira hal ini misterius karena kebijakan ini telanjur ditetapkan, sedang perencanaan otonomi PT sendiri masih digodog oleh sebuah tim yang belum siap. Jadi, kalau Anda percaya tim ini tidak eksklusif, dan tradisi selama ini yang tak pernah melibatkan mahasiswa dalam proses akademik kampus bisa diubah, berusahalah untuk bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Saya memang tak bisa menjamin itu, tapi sekaranglah saat yang tepat untuk berbicara dan terlibat.

Masalahnya, tak ada transparansi informasi tentang ini oleh Tim Otonomi UGM....

Ya...jika kalian bertanya kepada sebagian besar guru besar di sana, mereka akan menjawab bahwa mereka tak tahu. Seperti saya bilang tadi, yang terjadi sekarang adalah mereka bekerja secara intensif.

Lantas, bagaimana dengan isu swadana dalam otonomi PT ini? Apakah pemerintah benar-benar melepaskan tanggung jawabnya?

Swadana dalam otonomi PT sangat problematis jika lepas total dari pemerintah. Sebaiknya memang pemerintah masih terus memberikan subsidi. Bila tidak, biaya pendidikan akan naik. Dan ada kekhawatiran, mahasiswa yang kurang mampu tak bisa lagi kuliah karena biayanya mahal. Ini isu kunci otonomi PT. Namun, pemerintah masih memberikan bantuan dana berupa *block grant*, dan universitas bebas menentukan untuk apa saja uang itu.

Tentu saja, swadana tak lepas dari persoalan mencari sumber dana. Bagaimana strategi universitas menarik dana dari luar? Dengan berlomba-lomba menawarkan program studi yang menarik Program studi yang tak berjalan, atau yang universitas lain sudah punya, tak bakal dipertahankan. Sebutlah, misalnya, universitas ini punya fakultas teknik yang besar. Tapi, ternyata, minat mahasiswa sekarang lebih besar pada bidang komputer. Universitas pun bebas mengurangi dana untuk program studi ini, atau bahkan menghilangkannya. Uang itu bisa digunakan untuk membangun program studi lain yang lebih potensial, jika dalam hal ini untuk meng-*cover* area informasi dan teknologi tersebut.

Artinya, universitas harus mendirikan program studi yang *market-oriented*?

Ya, pilihan mahasiswa secara tidak langsung membuatnya seperti itu. Namun, mahasiswa memang tak selalu memilih program studi yang *marketable*. Itu tergantung minat mereka. Ambil contoh, psikologi, mahasiswa yang belajar psikologi masih kebingungan dengan lapangan kerja apa yang tersedia untuk mereka.

UGM punya fakultas-fakultas yang tidak *market-oriented*, seperti ilmu sosial-politik, filsafat, dan sastra. Anda setuju program studi seperti itu dihapus?

Yang saya sepakat adalah universitas harus membicarakan ini dan menentukan apa yang mesti dilakukan. Untuk mengambil contoh filsafat, harus diakui bahwa disiplin ilmu ini memang kurang populer. Tapi, ternyata, banyak profesor yang tak setuju jika ini dihapus. Itu tidak salah, namun mereka lebih baik mengubah sistemnya jika ingin mempertahankan ini sebab filsafat tidak terlalu diminati calon mahasiswa. Menurut saya, kenapa mereka tak mengubahnya menjadi lebih menarik, dengan mengajarkan filsafat modern, misalnya etika.

Sejauh ini, apakah UGM sudah siap otonom?

Saya tidak tahu. Saya harus belajar lagi. Setiap tahun, setiap universitas yang dijadikan *pilot project*, bersama dengan *technical assistant*-nya, harus bertemu dengan Menteri dan Dirjen Dikti. Kita duduk bersama, membicarakan masalah masing-masing, apa yang perlu diperbaiki atau ditambah.

Cuma, sebagai orang luar, saya bisa mengatakan bahwa proyek otonomi PT ini masih bisa diteruskan bila pemerintah berjanji untuk terus memberikan dana. Jika tidak, pilihannya adalah biaya pendidikan akan naik atau universitas yang akan bangkrut. Keduanya, jelas, bukan pilihan yang baik.❒

Dian Fikriani
Bachtiar

Konsekuensi kebijakan otonomi PT adalah tuntutan profesionalitas tenaga pengajar. Apa jadinya jika dosen-dosen UGM dilarang mengajar di PTS-PTS? Bagaimana sikap PTS-PTS di Yogya?

MEMOTONG

Bak "sinterklas" yang membagi-bagikan hadiah pada semua anak di malam Natal. UGM yang punya banyak dosen "berkualitas" pun mesti berbagi dengan berbagai perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta. Semula, niatnya hanya untuk membantu PT lain yang masih baru. Tapi sejak *booming* PTS pada 1980-an, tuntutan kepada UGM, untuk menyumbangkan tenaga pemikirnya demi perkembangan PT, semakin besar. Tak heran, seringkali dijumpai dosen yang sama mengajar di berbagai PTS. Bahkan ada yang empat sekaligus.

Saat otonomi PT nanti, UGM menjadi badan hukum mandiri. Selain bidang finansial dan akademik, UGM bebas mengatur manajemennya, termasuk soal staf pengajar. Status dosen, misalnya, nanti bukan lagi pegawai negeri sipil (PNS) tapi pegawai "biasa" UGM. Tenaga pengajar ini akan kian dituntut lebih profesional, lebih fokus, dan *concern* pada tugas utamanya: mengajar—dan meneliti. Bukan malah terbebani masalah-masalah lain di luar ruang kuliah.

Konsekuensi perubahan ini ialah "tercerabutnya" dosen-dosen UGM yang tersebar di PTS-PTS, baik di Yogya ataupun di luar Yogya. Persoalannya kemudian, sejauh mana kesiapan 79 PTS yang ada di Yogya menghadapi perubahan kebijakan itu?

Baiklah disimak Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa). Sekolah tinggi yang mempunyai lima program studi, baik D-3, D-4, maupun S-1 ini, dari 88 orang dosennya, 30 di antaranya dosen UGM.

Dengan angka ketergantungan setinggi itu, Drs. M. Sartono Sumotaruno, Ketua APMD, mengaku belum berpikir secara serius untuk mengantisipasi soal ini. "Masalah otonomi PT ini kami baru dengar-dengar, belum tahu persis," jelasnya. Sartono hanya berharap, jika kebijakan itu memang sudah diterapkan, hubungan kerja sama antara UGM dengan PTS seyogianya masih bisa diteruskan. "Kalau nanti dosen negeri tak bisa lagi mengajar di sini, kami kepayahan," tambahnya lagi. Dan Drs. H. Jazuli Akhmad, M.M., Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha, berharap tak jauh beda dengan Sartono.

Kekurangsiapan beberapa PTS menanggapi isu otonomi PT ini pun tampak dari tanggapan beberapa rektor PTS lainnya. Setidaknya, itu tampak di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNas), yang terletak di Jalan Yos Sudarso, depan Hall Kridosono, Yogya. Ketua STTNas, Prof. Dr. Sri Harto Brotowiryatmo, rupanya agak "aneh". Ia mengaku tak tahu persis bagaimana otonomi PT ini nantinya. Bahkan, mantan Dekan Fakultas Teknik UGM ini yakin, UGM tak akan mengurangi tenaga-tenaga pengajarnya, yang tersebar di swasta, terlalu drastis. Sebabnya, UGM mempunyai kewajiban menjadi universitas pembina.

Bukan cuma mereka yang kurang sepakat dengan terhapusnya kewajiban UGM itu. Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Moh. Mahfud M.D., jelas-jelas mengatakan bahwa UII tak berencana untuk melepaskan penuh hubungan kerja samanya dengan UGM. "Saya kira, mungkin saja ada yang keberatan dari dosen UGM sendiri, jika mereka tak boleh lagi mengajar di UII," tandasnya, sembari menceritakan bahwa dosen-dosen UGM justru lebih rajin mengajar di UII ketimbang di UGM.

Penegasan Ketidakadilan

Kebijakan privatisasi ini—dengan menarik dosen-dosen negeri dari swasta, kelak—bukan tanpa risiko. Drs. E. Kusumadmo, M.M., Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, melihat adanya privatisasi PTN ini sekadar penegasan "ketidakadilan" dalam sistem PT yang sudah-sudah.

UGM—juga UI, ITB, IPB—akan menjadi PT berbadan hukum. Status ini mensyaratkan keempatnya harus mencari sendiri dana operasional pendidikan, juga efisiensi manajemen universitas pada sumber daya yang dimiliki. "Prinsipnya hampir sama dengan sistem PT swasta. Yang membedakannya adalah PT yang otonom belum bisa dilepaskan pemerintah sepenuhnya," demikian pendapat Prof. Dr. Djohar, M.S., pengamat pendidikan.

Bukti ketidakadilan itu, salah satunya, ialah sistem *block grant*. *Block grant* di sini adalah hibah dana dari pemerintah untuk PT otonom, yang pembelanjaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing. Rektor UGM, Prof. Dr. Ichlasul amal, M.A., menyebut angka Rp100 miliar setahun untuk dana ini.

"UGM yang memiliki tanahnya luas 'kan tidak mungkin membayar PBB. Maka diatur sedemikian rupa agar tak usah membayar PBB dengan adanya saham pemerintah 35% di Majelis Wali Amanat," kata Kusumadmo, yang sudah menjabat rektor UAJY sejak 1995.

Pendapat ini dibenarkan Djohar, yang



STIE Widya Wiwaha. Kepayahan kalau dosen negeri tak bisa mengajar.

FAJAR RISQI

BUNTUT UGM DI SWASTA

juga mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada BALAIRUNG Djohar menjelaskan, PTS dan PTN yang otonom sama kedudukannya di mata hukum. "Tapi tidak-adilnya, yang satu disubsidi yang satu tidak. Dan PTS seperti dianaktirikan," ungkapnya.

Lebih jauh guru besar UNY ini menambahkan, ketika universitas negeri otonom diberi *block grand*, tanah yang bebas pajak dan fasilitas lain di tempat lain harus memenuhi kebutuhannya sendiri, pun sampai ada penarikan pajak penghasilan. "Seharusnya universitas swadana, kalau mau hidup, ya, pakai cara-cara swasta," katanya.

Bukan itu saja, Kusumadmo menimpali, bantuan tenaga pengajar akademik UGM, yang tersebar di PTS-PTS dan semula dimaksudkan untuk membantu, ternyata juga tidak "cuma-cuma" (baca: *gratisan*). Selain harus membayar honorarium si dosen, PTS pun mesti membayar *instituional fee* kepada PTN asal. "Saya kira konsep bantuan di sini tidak ada, bahkan itu merupakan transaksi," kata anggota International Federation of Catholic Universities (IFCU). Ia malah khawatir, setelah otonomi berlaku bukan tak mungkin *institutional fee*, yang dulu hanya sepuluh persen, bakal meningkat.

UGM selain murah—dibanding UI, ITB, dan IPB—UGM menjanjikan pula dosen-dosen dengan kualifikasi top. Inilah yang juga menjadi senjata PTS buat menarik minat mahasiswa. Biasanya, para dosen UGM itu dicantumkan sebagai dosen luar biasa. Seperti diakui oleh Jazuli Akhmad, "Yang ditawarkan sebagai unggulan kami adalah keterlibatan dosen UGM."

Koordinator Kopertis Wilayah V DIY, Dr. Ir. H. Supriyanto N., M.Sc., juga mengakui, dosen UGM memang seperti memiliki stempel "layak jual". Tak heran jika kemudian semua program studi di UGM dipukul rata: *qualified!* Pun jika prodi itu baru dibuka pada tahun pertama. Ini dampaknya pada animo calon mahasiswa untuk belajar di PTN sesuai pilihannya. "Mau tak mau, calon mahasiswa akan lebih tertarik kepada PTN daripada swasta," kata Jazuli, yang juga lulusan UGM ini.

Pasang Kuda-Kuda

UII, UAJY, STIEWW, STPMD-APMD, STTNas, dan juga 73 PTS lain di Yogya kini tengah pasang kuda-kuda untuk berlomba meningkatkan kualitas tenaga pengajarnya. "Kami telah menyiapkan dana sebesar Rp2,6 miliar per tahun buat menyekolahkan dosen yang mau melanjutkan pendidikannya," jelas Moh. Mahfud dari UII.

Hal senada diungkapkan pula oleh Rektor UAJY, Pembantu Ketua I STIE Widya Wiwaha, Ketua STTNas, dan Rektor STPMD-APMD. "Dalam waktu lima sampai enam tahun, bila lancar, STTNas akan mengurangi ketergantungan pada UGM sekitar 50% dari yang sekarang ini," kata Sri Harto Brotowiryatmo, ketua STTNas yang juga pakar hidrologi ini. Upaya lain untuk meningkatkan mutu pendidikan, di UAJY, misalnya, yaitu meningkatkan kerja sama dengan beberapa lembaga di dalam maupun luar negeri. Dari kerja sama ini, menurut Kusumadmo, bakal mengalir bantuan beasiswa untuk belajar di luar negeri, juga kerja sama penelitian.

Bahkan, Supriyanto cukup yakin bahwa PTS-PTS di Yogya akan lebih berkembang. Jika melihat dari segi kepangkatan dan jabatan akademik, sudah banyak tenaga pengajar PTS yang berpangkat lektor ataupun bergelar doktor. "Salah satu dosen PTS dalam jajaran Kopertis malahan sudah ada yang diusulkan untuk menjadi profesor," tambahnya.

Sikap UGM

Apakah UGM akan menarik semua dosennya yang mengajar di luar? Dr. Mas'oed Machfoedz, M.B.A, Pembantu Rektor II UGM, kepada BALAIRUNG hanya dapat menegaskan, UGM tak begitu saja menarik dan melarang dosen-dosennya untuk mengajar di luar UGM.



FAJAR RISQI

STPMD "APMD". Dari 88 dosennya, 30 di antaranya dari UGM.

Mesti diakui, prioritas para dosen tetap ditujukan kepada praktik mengajar dan penelitian di UGM. Itu untuk merealisasikan "impian-impian" konsep otonomi kampus. Namun demikian, bukan berarti UGM akan memutus hubungan begitu saja dengan PTS-PTS di Yogya. Dosen-dosen UGM tetap memiliki peran dan posisi penting dalam dinamika pendidikan

Lantas, bagaimana membuat peraturan agar tak merugikan keduanya? Menurut Mas'oed, "Hubungan antara UGM dengan PTS di Yogya akan menjadi hubungan yang sinergis, *co-opetition*, bukan *total co-operative* atau *total competition*."

Aturan itu memang bukan main-main. UGM yang otonom akan membentuk dewan tersendiri—semacam "Study Leave Committee". Dewan ini bertugas mengatur lalu lintas dosen dari dalam ke luar, yang dikoordinasi oleh Staf Akademik dan Komite Penilaian. Itu artinya, setiap dosen yang bertugas keluar harus mendapat persetujuan dari komite ini. Tambahan lagi, jika membaca proposal otonomi UGM, disebutkan bahwa dosen boleh mengajar di luar hanya satu semester dalam tujuh semester di UGM.❒

Dian Fikriani
Dedy Sushandoyo, Nur Evi

Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Dikti)

"Yang *Nggak* Puas Berapa Orang?"

Sebenarnya, apa latar belakang pemerintah menggulirkan otonomi PT ini?
Latar belakang yang paling utama adalah meningkatkan kredibilitas perguruan tinggi.
Apakah pemerintah sudah tak sanggup lagi membiayai keempat PTN ini?
Saya tak mengatakan itu, *kok*. Pemerintah akan tetap menandai mereka. Tapi kalau ada ketakefisienan, pemerintah 'kan sayang uangnya. Selama ini PTN boros, dan itu merugikan mahasiswa. Supaya efisien, kita buat PT otonom. Pemerintah justru kini memberi keluasan masing-masing PT untuk mengurus dirinya sendiri. Selama ini PTN banyak yang boros, mutunya turun. Dosen-dosennya mengajar di swasta, cari tambahan. Itu 'kan menurunkan kredibilitas PTN. Itu yang kita khawatirkan.
Dana dari pemerintah dalam bentuk *blockgrant*. PT juga diberi kewenangan lebih untuk mencari dana. Kalau begitu, PT jadi *profit oriented*?
Nggak begitu, *dong*. Cari uang 'kan bukan untuk *profit*.
Tapi kalau UGM, misalnya, mau bikin hotel, apakah itu cukup tepat bila dikaitkan dengan fungsi PT sebagai lembaga pendidikan?
Kalau keuntungannya dipakai untuk membangun laboratorium, untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa, apa yang salah?
Dalam PP No. 61/1999, kekuasaan tertinggi PT ada di tangan Majelis Wali Amanat (MWA). Mengapa wakil Mendiknas di situ punya kekuatan 35% suara?
Karena kita ingin menjamin bahwa misi PT sebagai tetap institusi pendidikan, yang memberi kesempatan sebanyak mungkin masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
Mengapa tidak sama, satu suara untuk tiap unsur?
Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menjamin PT tidak akan komersil, seperti yang Anda khawatirkan? Jadi, wakil pemerintah di sana untuk menjaga agar PT tetap sesuai misinya.
Mengapa justru mahasiswa tak diberi suara dalam MWA?
Apa kalian bisa? Begini, kita lihat 'kan mahasiswa itu kegiatan utamanya kuliah. Ya, mungkin ia cuma bertahan 4—5 tahun di kampus. Padahal, kita butuh orang yang terus-menerus berada dalam MWA dan melihat bagaimana perkembangan PT dari tahun ke tahun. Bagaimanapun, kita punya andil 35% di situ untuk menjamin pendidikan yang bagus bagi mahasiswa. Nah, aspirasi mahasiswa dapat ditampung oleh semua. Umpamanya, dalam MWA ada wakil dari masyarakat. Mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya lewat wakil masyarakat. Jadi, aspirasi bisa ditampung oleh semua, baik dosen maupun unsur lainnya yang ada di kampus.
Apa itu bisa dijamin? Selama ini mahasiswa sering tak puas.
Ya, yang *nggak* puas berapa orang?
Lembaga mahasiswa biasanya memrotes kebijakan kampus yang dinilai merugikan mahasiswa.
Ya, tapi berapa orang itu? Anda lihat, mahasiswa itu 'kan barangkali 1% tokoh-tokohnya yang vokal. Yang lain 'kan ikut saja. Apakah yang 1% itu mewakili semua? Sekarang, siapa yang duduk di situ? Apa semua mahasiswa duduk semua di situ? 'Kan susah. Perwakilan bagaimana? Apakah ketua lembaganya? Apakah itu mewakili semua? 'Kan mungkin juga *nggak* itu. Nah, lebih baik semua mahasiswa itu bisa memberikan *in-put* lewat dosen, pimpinan, ataupun pemerintah. Kalau yang diberikan sangat jelas, ada yang tak beres atau kurang baik, pasti kita sesuaikan. Kita pasti sensitif, *kok*.
Kalau begitu, tahap-tahapnya yang lama, *dong*.
Bisa langsung! Kepada rektor langsung bisa. Kepada MWA, atau saya pun bisa. Ada yang *nggak* cocok dalam kuliah, kita cek langsung. *Nggak* perlu menunggu rapat tahunan.
Dalam otonomi nanti, mahasiswa subjek terbesar yang bakal terkena dampaknya.
Makanya kita bikin otonomi ini untuk mahasiswa. Anda jangan mengira ini cuma untuk kita.
Namun, kalau mahasiswa tak bisa ikut dalam proses pengambilan kebijakan yang tertinggi, 'kan sama saja?
Bukan! Kita 'kan bikin kebijakan otonomi ini buat mahasiswa. Supaya apa? Supaya pendidikan lebih baik. Biaya sesuai dengan kemampuan pemerintah dan mahasiswa yang bersangkutan. Itu tujuannya. Lantas, apa lagi yang diinginkan mahasiswa? Berikan kepada kami, pasti akan kami tampung. Kita akan buat ini lebih demokratis. Pasti itu! Tapi jangan sampai mengorbankan biaya atau sistem yang ada.
Saat otonomi, mahasiswa dituntut efisien. Kuliah mesti cepat, tak bisa terlalu banyak berkegiatan. Artinya, mahasiswa akan dijauhkan dari peran-peran politis.
Anda harus melihat, universitas 'kan sebuah lembaga pendidikan. Kita ingin menyediakan tenaga terdidik yang lebih baik. Tentunya kita mengharapkan satu sistem yang *langgeng*, berjalan baik. Sekarang kita mengharapkan lembaga kemahasiswaan itu menjadi mitra pimpinan kampus, memberikan masukan-masukan yang terbaik. Tapi, bukan menjadi penentu keputusan. Nanti akan repot kalau begitu, terjadi dualisme. Kalau pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan jalan sendiri-sendiri, tidak ketemu maunya, 'kan susah. Padahal Anda tahu, semua fasilitas kampus 'kan untuk mahasiswa juga, bukan untuk kami semata. Jadi, kita akan memperhatikan semua masukan dari mahasiswa, dengan berbagai cara: lewat informal, dosen, juga lembaga yang ada. Kalaupun lewat lembaga, apakah itu memang sungguh-sungguh mewakili mahasiswa? 'Kan belum tentu. Di kampus, mahasiswa yang terlibat aktif paling-paling 1%. Yang lain menggantung, *floating mass*; bagi mereka ini pokoknya pendidikan baik, ya sudah. Apa itu tidak diperhatikan? Ya, harus diperhatikan juga. Jangan-jangan suara ini cuma suara sekelompok kecil mahasiswa. Itu mewakili apa tidak, 'kan jadi masalah. Nanti bisa-bisa ada lima atau lebih lembaga tandingan, terus begitu. Susah, *dong*, siapa yang mesti diperhatikan. Jadi, selama mereka itu pendidikannya baik, mestinya *nggak* ada masalah.
Sekarang, ke-4 PTN yang jadi proyek percobaan sedang membuat proposal. Mestinya ada sosialisasi dulu kepada mahasiswa tentang paket PP yang mengatur otonomi PT.
Itu sudah kita minta, *kok*, supaya masing-masing PT menjelaskan sampai ke bawah.
Tapi sampai kini, masih banyak mahasiswa yang belum tahu apa maksud otonomi PT.
Karena itu, kita minta supaya masing-masing PT lebih serius menjelaskannya.❑

Bachtiar
Ibrahim Fahmy

MENGAPA HARUS DITUTUP-TUTUPI?

Ibarat bayi baru lahir, otonomi PT adalah bayi yang cacat. Kelahirannya prematur. Bahkan, sejak di dalam kandungan, "otonomi" yang sebetulnya baik bagi kalangan akademik berubah menjadi anak jadah yang mesti disingkirkan dan ditolak kehadirannya.

Rencananya, otonomi PT bakal diterapkan pada Juni 2000. Berbagai komentar miring segera muncul menanggapi tawaran "menggiurkan" pemerintah itu. Kecemasan terhadap implikasi berbagai perubahan mendasar di bidang akademik, organisasi, dan pendanaan ini berkembang di semua lapisan sivitas akademika. Ketakutan akan naiknya biaya kuliah pun merebak di empat PTN (ITB, IPB, UI, dan UGM), yang jadi *pilot project* otonomi. Minimnya sosialisasi dan pelibatan seluruh elemen kampus, seperti karyawan dan mahasiswa, adalah penyebab utama berbagai kecemasan tadi.

Sejauh mana respon warga kampus yang akan otonom? BALAIRUNG mewawancarai beberapa mahasiswa, pimpinan lembaga mahasiswa, dosen, dan karyawan di dua kampus: UI Jakarta dan ITB Bandung. Akibat sejumlah hambatan teknis, BALAIRUNG tak sempat mengunjungi IPB di kota hujan Bogor.

Berikut pembicaraan mereka yang mengaku kini masih berada "di luar sistem".

Otonomi UI: Kekecewaan dan Harap-Harap Cemas

Masalah otonomi kampus di UI pernah hangat dibicarakan. Kala itu, di UI sedang marak aksi penolakan kenaikan biaya kuliah--yang hingga 300% dari total biaya sebelumnya. Kenaikan SPP dan DPKP (Dana Penunjang Kualitas Pendidikan) itu pun disinyalir sebagai langkah persiapan UI menyambut otonomi.

Setelah aksi keprihatinan, yang dinilai belum cukup kompromis, mahasiswa UI seolah-olah trauma. Kebanyakan mereka acuh dengan proses sosialisasi konsep otonomi di almamaternya. "Hubungan Kami dengan rektorat agak renggang setelah protes masalah kenaikan SPP," ungkap Bachtiar Firdaus, Presiden Mahasiswa UI.

Soal sosialisisasi yang sangat kurang dan tak dilibatkannya unsur mahasiswa, Firdaus menanggapi, "Semua amat tergantung pada budaya pimpinan universitas. Langkah-langkah para birokrat feodal itu tak mudah dibaca dan tak terduga."

"Ini sebenarnya kelanjutan dari penandatanganan *letter of intent*-nya IMF tentang penghapusan subsidi, dan mengurangi akses negara di bidang ekonomi. Dampaknya selalu ke masyarakat kecil, mulai dari penghapusan subsidi pupuk, listrik, air, bahkan kini subsidi di bidang pendidikan," ungkap Kokom Fezan Razak. Lebih lanjut, mantan kandidat nomor dua presiden mahasiswa UI ini menjelaskan, otonomi PT terkait dengan transparansi dan demokratisasi. Itu menyangkut pula pelibatan mahasiswa. Selama ini, mahasiswa diproduk untuk manjadi buruh, dengan segala slogan profesionalismenya.

Lembaga kemahasiswaan UI mempermasalahkan kesiapan otonomi UI, terutama di bidang finansial. Firdaus menjelaskan, UI sudah siap otonom kecuali untuk masalah finansial. Subsidi pemerintah (± 70%) yang perlahan-lahan dicabut itu memacu UI agar segera menutup kekurangannya. Padahal, UI belum memiliki lembaga khusus pencari dana, juga kontak yang luas dengan pengusaha. Dewan Penyantun UI kabarnya bangkrut, tak kuat lagi mengucurkan duit. "UI terlalu pragmatis," tambah Bachtiar.

Walaupun membantah ketika UI dinilai tak siap otonom, Rektor UI, Prof. Dr. dr. Asman Boedisantoso, tetap mengakui beratnya

Kampus UI

ISTIMEWA

beban yang bakal ditanggung UI jika subsidi pemerintah dikurangi. Secara finansial UI masih defisit. Penerimaan potensial berupa SPP dan DKPM dari mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 tak proporsional dengan biaya riil yang dibutuhkan mahasiswa. Lebih lanjut Boedisantoso menegaskan, UI akan tetap melanjutkan program otonomisasi sesuai PP No. 61/1999 (*Media Indonesia, 1999*).

"Ketika otonomi nanti, pengaturan hak-hak penyelenggara pendidikan mesti tersistem jelas. Kita sudah punya mekanisme yang rinci untuk mengontrolnya. Target kami, mahasiswa harus bisa masuk dalam Majelis Wali Amanat (MWA). Tapi jangan sampai terjebak dan dicap sebagai jembatan perantara rektorat," tandas Firdaus.

Pendapat ini berbeda dengan Yanda Putra. Wakil Ketua SMF Teknik ini memastikan, keterlibatan mahasiswa di MWA justru akan melegitimasi MWA. "Saya pesimis, setelah depolitisasi dan deideologisasi yang cukup lama oleh rejim Orba, apakah mahasiswa cukup mampu duduk di MWA. Mahasiswa UI sekarang pragmatis dan punya bakat oportunis tinggi," tegas Yanda.

Di kampus yang, menurut banyak orang, 80% mahasiswanya adalah golongan *the haves* ini, pilihan untuk menaikkan biaya pendidikan bukanlah hal sulit. "Selama ini UI menganggap bahwa sebagian besar mahasiswanya adalah kaum *the haves*. Jadi, bila subsidi dicabut, imbasnya langsung pada kenaikan SPP," tutur Inga Mariskha Nuh, mahasiswi Teknik Industri '97.

Inga menambahkan, anggapan itu tak sepenuhnya benar. Inga juga mengaku punya banyak teman yang sebenarnya ekonominya kurang mampu, terutama mahasiswa asal luar Jakarta. "Angka 80% itu diambil dari formulir isian UMPTN mahasiswa baru, jadi tidak valid. Mahasiswa baru pun sanggup membayar biaya yang melonjak itu hanya karena *euforia* diterima UMPTN," kata Firdaus.

Menyambut otonomi UI, lembaga kemahasiswaan UI menuntut adanya independensi dan kesejajaran dengan lembaga rektorat. "Perubahan lembaga akan ke arah pemerintahan mahasiswa. Maka, kami menuntut adanya independensi pada dua hal, yaitu di bidang pendanaan dan perizinan."

Udin Wahyudin, Ketua Senat SMF Kedokteran, sependapat dengan Firdaus. Menurutnya, dengan kontribusi sebesar 30%, mahasiswa sepantasnya punya peran dalam penentuan kebijakan kampus. Aktivis Forum Salemba ini juga menceritakan tentang ketidakjelasan porsi DPKP bagi lembaga kemahasiswaan.

Bagaimanapun, bagi kampus dengan jumlah mahasiswa 34.666 orang ini, otonomi adalah sebuah keniscayaan. "Kami tak akan menolak semuanya karena otonomi artinya kita bebas mengembangkan diri. Terlepas dari campur tangan pemerintah itu baik. Kita harus memperjuangkannya," tegas Firdaus, optimis.

Sebagaimana mahasiswa, masalah sosialisasi pulalah yang dialami dosen. "Sekilas, kata rektor otonomi adalah peningkatan kesejahteraan. Namun bagaimana bisa berimbas pada kesejahteraan itu sendiri, saya masih belum jelas," tutur Ir. Bertrianis, dosen Teknik Industri. Menurut ibu berjilbab ini, sosialisasi program otonomi PT di kalangan dosen belum *clear*. Penjelasan yang diberikan rektor masih terlalu umum, belum detail menyangkut teknis pelaksanaannya.

Dijelaskan juga oleh Bertrianis, sosialisasi di kalangan dosen baru berlangsung satu kali di rektorat. Caranya, para dosen digilir per fakultas, masing-masing jatahnya dua jam. Pemaparannya pun cuma dengan transparansi. Tak ada berkas yang bisa dibawa pulang untuk dipelajari.

Tatkala otonomi diterapkan, peran dosen sebagai pengajar dan peneliti bakal kian diintensifkan. Bila selama ini dosen boleh *nyambi* mengajar di swasta, itu sulit dilakukan lagi. Perampingan jumlah dosen pun tak terhindarkan. Soal ini, Bertrianis menjawab, "Jika alasan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja bisa diterima kedua belah pihak, tak akan ada masalah."

Pilihan otonomi PT untuk menjadi badan hukum mandiri menyimpan tuntutan profesionalisme. Menurut Bertrianis, profesionalisme adalah tanggung jawab menyangkut perkuliahan: materi studi hingga hasil akhir. Jika profesionalisme harus diartikan sebagai ketaatan pada peraturan universitas, maka mesti ditinjau: sesuaikah ketaatan itu dengan nilai yang ia yakini secara pribadi, yaitu nilai agama? Tahun lalu, aku Betrianis, ia mengajar di Perguruan Asy-Syafiiyah. Namun, bila ketentuan di UI tak menghendaki, "Saya akan tetap memprioritaskan mengajar di UI," tandasnya.

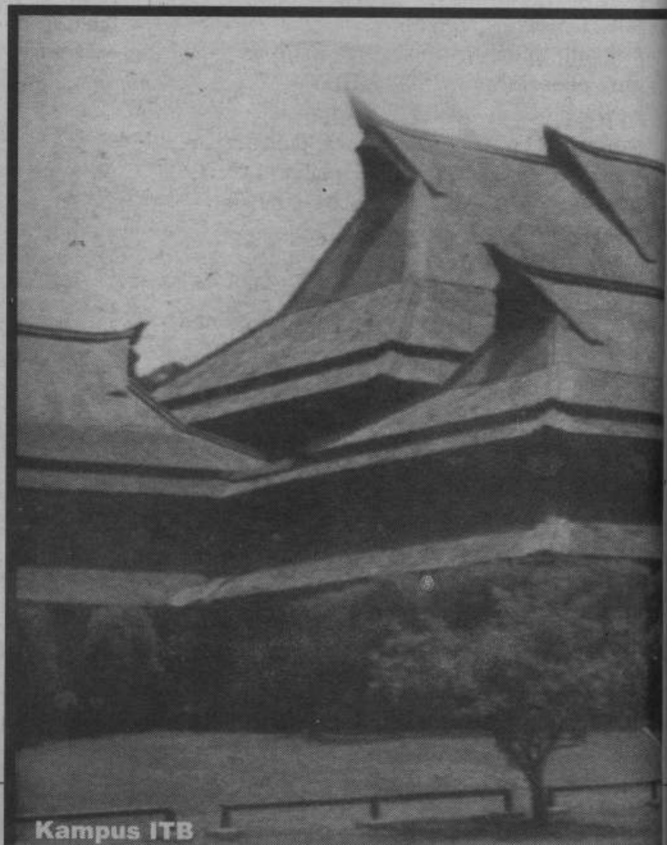
Sementara itu, Mufti Patria, dosen FMIPA yang kini sedang tugas belajar di Jerman, berpendapat bahwa otonomi harus disertai dengan konsistensi dosen terhadap tanggung jawabnya mengajar. Mutu pengajaran mesti ditingkatkan. Tak boleh ada dosen *nyambi* di luar.

Otonomi ITB: Pendidikan Harus Dijual?

Apa yang hendak Anda lakukan jika mal dan KFC masuk kampus, SPP naik 3 kali lipat, bahkan Anda "dibeli" oleh pemerintah/perusahaan swasta? Dengan wajah agak merah, Rusman, mahasiswa (***jurusan apa?***) ITB, menjawab, "Kalau itu yang terjadi, saya akan mengajak teman-teman mogok kuliah!"

Tak jauh beda dengan kondisi di UI, masalah otonomi kampus di ITB juga menyangkut sosialisasi dan partisipasi warga kampus. "Kebanyakan mahasiswa ITB tahu soal otonomi lewat TV dan koran. Yang saya tahu, ITB harus menanggung biaya sendiri," ujar Chris, mahasiswa Teknik Nuklir '96. Aktivis GMIP-ITB ini menilai, mahasiswa ITB terkesan tidak merasa berkepentingan dengan masalah otonomi sebab belum terkena dampaknya secara langsung, misalkan kenaikan SPP.

Namun, menurut Susan, mahasiswi Kimia '96, masalah sebenarnya lebih pada watak rektorat yang tak pernah mau mengikutsertakan mahasiswa. "Sebenarnya prosesnya sudah sedemikian lama, dan yang paling berkepentingan 'kan mahasiswa. Tapi kita sebagai mahasiswa seolah-olah tak terlibat dalam pembahasan itu," tambah koordinator



Kampus ITB

tabloid *Ganesha* ini.

Persisnya, sejauh mana persiapan otonomi ITB? "Semuanya masih sangat mentah. Saya belum bisa memberikan keterangan konkretnya seperti apa," jawab Dody Abdasah, salah seorang anggota Badan Pekerja Otonomi ITB, ketika dihubungi BALAIRUNG usai pengarahan dengan konsultan pendidikan asing di BPI-ITB.

Tanggapan tentang otonomi kampus di kalangan dosen ITB ternyata cukup beragam. "Ada yang senang dan ada yang tidak," kata Priyono Eko Sanyoto, dosen Teknik Mesin. "Yang senang mungkin merasa lebih independen, lebih leluasa, *nggak* diatur-atur lagi. Pendapatan bisa lebih baik dengan mengajar dan meneliti saja. Yang tak senang adalah dosen yang biasa *ngobyek* di luaran. Datang cuma seminggu sekali, sekarang harus diatur. 'Kan pusing dia," lanjut Koordinator Sekretariat Forum Rektor ini.

Tak satu pun dosen ITB, tandas Eko, yang tidak *nyambi*: mengajar di swasta atau menggarap proyek penelitian kerja sama dengan pemerintah atau industri. Eko mengakui, ia mengajar juga di Institut Teknologi Nasional (ITNas) Bandung. Alasannya, ITNas adalah salah satu institut yang dibina ITB. "Saya juga merasa *nggak* enak dimintai tolong teman," tambahnya.

Masalah lain adalah kemungkinan dosen dikontrak secara profesional. Akibatnya, dosen harus patuh pada peraturan lembaga. Eko menjelaskan, nanti akan ada pemilahan yang jelas antara dosen yang diserahi tanggung jawab mengajar, meneliti, atau bekerja di perusahaan milik ITB. "Strukturnya terpisah tapi masih di bawah satu payung," tambahnya.



Berbeda dengan dosen, para pegawai ITB lebih berat menerima imbas otonomi kampus. Isu pembebastugasan atau PHK diarahkan kepada para pegawai ini. "Itu jelas akan ada, tapi di jurusan ini sudah dilakukan pertemuan antara pengurus jurusan, pegawai, dan dosen. Diusahakan supaya tak terjadi PHK, kecuali kepepet," ujar Lany, karyawan Jurusan Teknik Lingkungan FTSP.

Apakah program otonomi kampus sudah tersosialisasikan? Lany mengaku tahu tentang soal otonomi dari ketua jurusan. Ia menambahkan, pegawai tak begitu resah dengan otonomi sebab realisasinya kemungkinan baru mulai tahun 2003 nanti.

Seperti lembaga mahasiswa lain pula, Keluarga Mahasiswa (KM) ITB masih mempertanyakan proses penggarapan otonomi. Walaupun secara formal KM-ITB membentuk tim khusus pengkaji masalah otonomi, toh belum bisa berbuat apa-apa. Ke mana ITB akan di bawa kala otonomi dijalankan masih belum terang. "Sejauh yang kami tahu baru batasan-batasan yang sifatnya umum, belum sampai turunan-turunan yang lebih detail. Hal-hal yang disepakati masih sangat fundamental pada PP No. 61/1999," jelas Novi Darmawan, Ketua Tim Otonomi Kampus (TOK) bentukan KM-ITB.

Di bidang akademik, TOK menemukan, program otonomi kampus masih kurang relevan dengan visi-misi ITB: menjadi institusi yang *science making* (menciptakan teknologi). Disimpulkan TOK, ITB belum bisa merumuskan nilai yang akan dibawanya, dan derivasinya, ke bentuk yang lebih konkret. Menurut Novi, "Orientasi ITB masih bias." Ini terkait pula dengan kecenderungan kurikulum di ITB yang berkiblat pada salah satu universitas luar negeri.

Di bidang finansial, tim ini mengritisi kemungkinan kenaikan SPP, dan lebih jauh pada kesiapan ITB bila harus memenuhi anggarannya sendiri, hingga keharusan membentuk badan-badan pencari dana. Masalah yang akan timbul nanti, jika otonomi dipaksakan, padahal ITB belum siap mencari dana sendiri, maka ITB akan meraih apa yang ada di depan mata (baca: mahasiswa). ITB nanti akan menjadi "lembaga transaksional", bukan lembaga transformasional. "Yang lebih diutamakan aksesibilitas bagi pemenuhan anggaran ketimbang proses peningkatan kualitas mahasiswanya," kata Novi, mengutip komentar seorang guru besar ITB.

Bukti itu semua, SC (*student centre*) berubah jadi pusat bisnis. Di SC kini telah bertengger wartel, optik, toko mahasiswa, beberapa *box* ATM bank swasta, dan kabar terakhir Ayam Goreng Mbok Berek Jogja bakal masuk pula. Sebentar lagi, "Fasilitas olahraga, ruangan kemahasiswaan, semuanya akan dibisniskan!" lanjut mahasiswa Teknik Elektro '96 ini.

"Saya menolak otonomi kampus di bidang finansial sebab pendidikan adalah tanggung jawab negara," tegas Rusman. Tambahnya, pendidikan hanyalah satu subsistem dari kapitalisme, sehingga banyak bergantung kepada kehendak pemodal. Imbasnya, mahasiswa dibungkam lewat program-program seperti *Q-grand*. Akibatnya, ITB dipaksa memproduksi lulusan yang siap jadi "buruh pintar tapi penurut".

Pada hemat Novi, dan kini sedang diperjuangkan KM-ITB, organisasi mahasiswa layaknya punya kedudukan yang seimbang dengan rektorat, walaupun tetap harus ada irisan-irisan kepentingan antara keduanya. Idealnya, memang, mahasiswa berdiri sebagai sebuah pemerintahan mahasiswa yang legitimatif. Ini, tentulah, tak lepas dari keberakaran lembaga itu sendiri dan upayanya agar tak terkondisi elitis. "Namun, sangat sulit mewadahi semua kepentingan," kata Novi.

Keterwakilan di MWA itu mutlak diperlukan. Ketika otonomi dijalankan, maka MWA ini berperan besar dalam penentuan kebijakan-kebijakan ITB. Inilah yang juga disetujui Sigit Adi, Presiden Mahasiswa. Sigit berpendapat, mahasiswa seharusnya terwakili di MWA, dan harus dilibatkan dalam semua proses perumusan keputusan.

Bagaimana jika imbas otonomi akan benar-benar ekstrem, misalnya kenaikan SPP sampai batas irasional hingga mengancam banyak mahasiswa kurang mampu di-DO? "Saya akan mencoba membangun dialog walaupun mungkin belum memiliki *bargain*. Langkah selanjutnya adalah aksi massa," jawab Sigit. "Kalau begitu, saya akan mengajak teman-teman mogok kuliah," tukas Rusman, sinis.❐

Ibrahim Fahmy
Bachtiar

SULIT MENAWAR, DIKIRA "S

Perbincangan tentang otonomi PT pastilah akan terasa hambar bila para mahasiswa, warga sah mayoritas dan yang bakal menerima dampaknya, tak diikutsertakan. Untuk itu, BALAIRUNG menggelar serangkaian diskusi dengan melibatkan seluruh elemen mahasiswa UGM.

Diskusi perdana, menghadirkan para pembicara antara lain, Prof. dr. **Mochamad Anwar**, M.Med.Sc., Sp.Og. (Ketua Tim Inti Persiapan Otonomi UGM), **Arie Sudjito**, S.Sos. (staf pengajar Jur. Sosiologi), dan **Ali Fahmi** (Ketua Legislatif Transisi—EKTI). Diskusi dilangsungkan pada 22 Oktober 1999 di Ruang Sidang Pimpinan, Gedung Pusat UGM. Dalam pertemuan itu konsep asli otonomi PT versi pemerintah dan langkah-langkah UGM disosialisasikan. Diskusi kedua, mendatangkan Dr. Ir. **Sahid Susanto**, M.S. (anggota TIPO-UGM, Ketua LP3-UGM), dilaksanakan pada 9 November 1999 di LP3-UGM. Aspek-aspek perubahan bidang akademis dalam otonomi UGM dikritisi pada diskusi kedua ini. Dan diskusi putaran ketiga, dengan pembicara Dr. **Supriyadi** (anggota TIPO-UGM Bidang Finansial, asisten PR II UGM), digelar pada 12 November 1999 di Ruang Sidang Utara, Gedung Pusat UGM. Aspek finansial dan organisasional UGM ditelaah dalam diskusi ketiga ini. Sesudah melalui ketiga diskusi, mahasiswa lantas sepakat untuk melakukan sejumlah penyikapan terhadap persoalan otonomi PT, khususnya UGM.

Tak cukup itu, BEM-UGM Transisi juga mengadakan seminar dan lokakarya, dengan kajian yang sama, pada 17—18 November 1999. (Sebelumnya, EKTI pernah pula menyelenggarakan dengar-pendapat tentang otonomi PT). Penyikapan mahasiswa yang sudah dibuat dalam putaran diskusi BALAIRUNG kian dipertegas usai semiloka yang menghadirkan Prof. dr. M. Anwar, Dr. P.J. Soewarno, Drs. A. Tony Prasetyantono, M.Sc., dan Prof. Dr. Djohar, M.S. itu. Waktu itu, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya 28 elemen mahasiswa bersepakat untuk menolak otonomi PT, lalu membentuk sebuah komite yang mampu mengakomodir tuntutan-tuntutan mereka. Maka, lahirlah Komite Aksi Pendidikan Kerakyatan (Komite APIK). Pada 8 Desember 1999, Komite APIK menggelar aksi demonstrasi menolak otonomi PT, diikuti sekitar 50-an mahasiswa. Esoknya, 9 Desember 1999, EKTI menyelenggarakan kembali Lokakarya Mahasiswa "*Counter* terhadap Tawaran Pepesan Kosong", di Fisipol UGM. Aksi-aksi konkret kemudian terus digulirkan, meski di bulan Ramadhan ini sekalipun. Salah satunya, dengan mendirikan Tenda Komite APIK di Boulevard UGM, mulai Kamis, 9 Desember sampai Ahad, 19 Desember 1999.

Berikut ulasan perbincangan-perbincangan itu.

* * *

Semua wartawan yang hendak meliput acara seminar otonomi PT di Auditorium Magister Manajemen UGM, 20 November 1999, kesal. Pasalnya, mereka tak boleh masuk. Seminar itu memang tertutup untuk pihak luar, wartawan sekalipun, apalagi mahasiswa. Kabarnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), hadir menyampaikan makalah di situ. Para *technical assistant* dari luar negeri, yang tengah mendampingi keempat PTN mempersiapkan proposal otonominya, juga hadir. Namun, para kuli tinta itu harus pulang dengan tangan hampa, pada siang yang mendung itu.

Melihat hal itu, tak terlampau salah kalau banyak mahasiswa menilai otonomi PT ini suatu proyek "misterius". Betapa tidak. Paket peraturan pemerintah (PP) tentang ini (PP No. 60 dan 61/1999) "tiba-tiba" turun. Tim Inti Persiapan Otonomi (TIPO) UGM pun terlihat kurang serius melakukan sosialisasi di tingkatan mahasiswa. Seolah-olah, persoalan otonomi ini hanya milik mereka. Akibatnya, mahasiswa atau siapa pun yang ingin tahu tentang persoalan ini cuma bisa mendapatkannya dari media massa, yang tentu tidak lengkap dan komprehensif. Kalau mau sedikit bersusah-susah, paling tidak mereka harus mendatangi sekretariat TIPO-UGM.

Tragisnya, tiadanya sosialisasi program otonomi PT memang suatu kesengajaan. Sahid Susanto mengakui itu. Menurutnya, TIPO-UGM kini sedang bekerja intensif, dan karenanya tak boleh diganggu. Ketika ada mahasiswa yang menuntut supaya masalah otonomi PT ini disiarkan kepada seluruh mahasiswa UGM, ada jawaban menarik. "Buat apa sosialisasi, nanti kita dikira 'sosialis'!" celetuk Wisnu Martani, sekretaris Sahid. Mendengar jawaban itu, siapa yang tak bakal terbahak-bahak?

Ini tentulah berlawanan dengan kesemestian. Satryo justru menyuruh masing-masing PT yang siap otonom untuk menyosialisasikan PP No. 60-61/1999 berikut konsep otonominya kepada lapisan terbawah, terutama mahasiswa. "Sudah saya minta kepada keempat PT (UI, UGM, ITB, IPB—*Red.*) untuk menjelaskan dengan serius konsep otonomi kepada mahasiswa, sebelum proposal dibuat. Pasti bakal saya cek nanti," kata Satryo. Kalau begitu, apa yang salah dengan ini semua?

Tak ada yang salah, dan tak ada yang perlu disalahkan. Begitulah watak birokrasi Indonesia: gemar bekerja tak transparan. Bahkan, Eksekutif Transisi mesti berinisiatif memfasilitasi sosialisai otonomi PT, Agustus 1999. Itu berarti, mahasiswalah yang proaktif menyambut otonomi kampusnya. Dan perhatian besar—juga kepedulian—sebetulnya coba ditunjukkan oleh mahasiswa.

Sayang, respon tidak simpatik dari birokrat kampus yang justru diterima balik mahasiswa. Dalam diskusi-diskusi, misalnya, seorang birokrat UGM berkali-kali menanggapi kritikan mahasiswa dengan jawaban yang mengecewakan: mahasiswa disuruh baca *background paper*-lah, baca PP No. 60-61/1999-lah, baca dokumen-dokumen TIPO-UGM, dll. Juga, mahasiswa "diimbau" untuk "bersabar", tidak "emosional". Akibatnya, banyak mahasiswa menyangsikan itikad para birokrat UGM, apakah mereka mau mendengarkan suara mahasiswa ataukah tidak—dan apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat banyak ataukah tidak.

Bila dicermati, penjelasan Mochamad Anwar tentang latar belakang mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi PT ini, lewat sepaket PP (No. 60 dan 61/1999—dan beberapa yang bakal terbit, sebentar lagi), segera dijumpai poin-poin krusial. Krisis ekonomi dan tuntutan globalisasi, telah dijadikan semacam "latar belakang filosofis" proyek otonomi kampus itu. Ini kemudian digarisbawahi oleh banyak

SOSIALIS"



Diskusi Putaran Kedua Balairung. Upaya Mempertemukan Dua Kutub yang Berbeda

peserta diskusi sebagai: otonomi PT ternyata untuk merespon tuntutan pasar (global)!

Kemudian melihat otonomi PT telah diartikan sebagai melihat peluang. Ia memang menjanjikan banyak hal: efisiensi manajemen dan sumber daya PT, peningkatan kualitas, upaya merespon tututan global, penguatan institusional, dsb. Dalam rangka itu, akan terjadi perubahan fundamental dalam ketiga bidang: akademik, organisasi, dan finansial. Deskripsi kerja pun telah terinci, mantap.

Para pejabat UGM, tampaknya, menyambut kebijakan pemerintah ini dengan antusias. Telah terbentuk beberapa tim persiapan otonomi UGM: Tim Inti (Bidang Organisasi, Akademik, Finansial), Tim Persiapan Transisi, tim-tim di tiap fakultas, dll. Hingga laporan ini diturunkan, tim-tim tersebut masih bekerja dengan sangat intensif. "*Your team works very hard,*" ujar Kenneth R. McKinnon, *technical assistant* TIPO-UGM. Profesor psikolinguistik dan pakar manajemen PT asal University of Wollongong, Australia, itu melihat bahwa UGM lebih siap dibanding UI, ITB, dan IPB. Tak usah disangsikan, UGM optimistis menyongsong program ini.

Akan tetapi, sudah cukupkah itu semua? Benarkah *everything runs well?* Tunggu dulu. Pandangan Ali Fahmi, Ketua ELTI, perlu disimak. Fahmi langsung menukik ke inti persoalan. Pada hemat Fahmi, otonomi PT ini, implikasinya, tak lebih merupakan (1) skenario pemerintah untuk menerapkan NKK/BKK jilid II, (2) praktik nyata kapitalisasi pendidikan, dan (3) pemarginalan mahasiswa dalam negosiasi dengan pejabat kampus. Sejumlah tawaran diberikan oleh Fahmi kemudian: Fahmi menuntut di antaranya agar kekuatan pemerintah (32%) dalam MWA dikurangi, atau bahkan dihapus saja. Otonomi itu mesti dibarengi dengan akuntabilitas PT yang tinggi untuk menghindari "proyek-proyek pesanan". Juga, menurut Fahmi, mahasiswa wajib diikutsertakan dalam setiap pengambilan kebijakan kampus.

Arie Sudjito, dosen muda Sosiologi, memberikan kerangka pandang yang lebih luas dalam penyikapan persoalan otonomi PT ini. Sejak awal 1990, sebenarnya ide otonomi PT ini telah dilontarkan. Ide ini tak lain sebagai respon atas gejala dependensi kampus akibat hegemoni negara. Ada *setting* politik besar yang menyebabkan itu semua: depolitisasi, deideologisasi, *floating mass*, dan korporatisme negara Orde Baru. Beberapa kasus, misalnya NKK-BKK, perizinan untuk forum-forum ilmiah, penangkapan mahasiswa-demonstran, pencekalan intelektual kritis, hingga rektor *drop-dropan* adalah indikasi nyata politik korporatisme negara.

Kondisi demikian, dalam anggapan banyak sivitas akademika, memandulkan peran kampus sebagai agen demokratisasi. Kampus tak lagi independen dalam mengemban misi pendidikan. Pendidikan sekadar untuk memenuhi kebutuhan "pembangunan"—ideologi rezim Orde Baru. Sayangnya, kritik semacam ini, kala itu, sangat tabu. Pelontarnya pastilah bakal dicap subversif-akademis, mengancam kemapanan kekuasaan.

Maka, otonomi PT bisa menjadi suatu jalan bagi upaya pemberdayaan kampus. Para akademisi berharap besar lewat otonomi ini, yaitu tercapainya kebebasan akademis yang sepenuhnya. Namun, tak perlu dipungkiri bahwa negara, akibat krisis ekonomi, tak mampu lagi membiayai PT—terutama keempat PTN yang jadi percobaan otonomi ini, yang masing-masing selama ini menyedot anggaran terbesar dari pemerintah. Pemerintah, sebaiknya, tak usah "sungkan" ngomong bahwa duitnya sudah habis.

Namun, Satryo tak mau mengakui itu. Kata Satryo, juga sebagaimana tertera dalam draf-draf sosialisasi, otonomi PT tiada lain demi efisiensi PT sendiri—"bahkan" demi akuntabilitasnya. Rektor UGM, Ichlasul Amal, ketika didemo mahasiswa (8 Desember 1999), ternyata jujur: pemerintah jelas kehabisan anggaran untuk membiayai PT. Jadi, mau apa lagi? Maka, sasaran terbesar otonomi PT ialah keswakelolaan. Pada akhirnya, sesudah PT mandiri dalam manajemen dan kurikulumnya, ia akan pula mandiri secara finansial (swadana). Lantas, langkah-langkah apa saja yang bakal ditempuh UGM untuk menuju keswadanaan itu?

Jawaban untuk soal ini sudah amat terang. PT bakal mendirikan unit-unit usaha (*bussiness unit*), yang terkategorikan ke dalam dua kelompok: (1) *auxilliary enterprise*, yaitu unit bisnis yang "erat kaitannya" dengan fungsi PT dalam Tridharmanya; dan (2) *commercial enterprise*, yakni unit bisnis yang tak berkaitan langsung dengan Tridharma PT. Pengelolaan *commercial enterprise* juga akan terpisah dari PT, sehingga diharapkan benar-benar profesional (baca: *pure profit oriented*). Pada titik inilah kerawanan muncul. Maklum, soal duit pastilah "panas".

Karena itu, segi inilah yang terbanyak dikritisi mahasiswa. Kata seorang partisipan, bila diamati lebih mendalam, PP No. 60 dan 61/1999 memang sangat bernuansakan tuntutan pasar/globalisme. Ada beberapa kosakata yang "indah": efisiensi, kebutuhan pasar, *global competition*, peningkatan kualitas, SDM, dll. Demi itu semua, PT mesti bergerak

efisien, dan dana bolehlah mencari sendiri. (Meskipun selama ini UGM, misalnya, sudah banyak berhubungan dengan donatur luar negeri). Kalau PT sudah tak sepenuhnya mengurusi pendidikan, dalam artian murni memikirkan pengembangan ilmu, tapi sudah ikut-ikutan mengurusi bisnis profesional (terutama *commercial enterprise*), akan dikemanakankah pendidikan kita?

Supriyadi, salah seorang anggota TIPO-UGM Bidang Finansial, menyambut baik kritik mahasiswa ini. Ia mengaku tak benar-benar paham latar belakang pemerintah menelorkan kebijakan otonomi PT. Selama ini, aku Supriyadi, banyak yang salah mempersepsikan otonomi PT. Itu wajar, tambahnya, sebab TIPO-UGM pun melakukan hal yang sama awalnya. Kata kunci memahami otonomi PT ialah "swakelola", bukan swadana. Paling tidak, janji Supriyadi (juga Satryo, Mochamad Anwar, dll.), bisnis yang bakal dilakukan UGM benar-benar untuk pengembangan kegiatan akademis. Tak ada salahnya, bukan?


Prof. dr. Mochamad Anwar, M.Med.Sc., Sp.Og.

Masalah klasik dalam otonomi PT ini ialah kenaikan SPP. Tetapi, juga tak salah kalau mahasiswa mempersoalkan itu. Resesi ekonomi nasional jelas sekali kian menambah beban mahasiswa, terutama yang berasal dari kelas menengah ke bawah.

Soal ini, Surpiyadi berjanji bahwa UGM tak akan gegabah melakukannya. Mekanisme kenaikan SPP mestinya melalui kebijakan MWA. Kalau dihitung nominal, selama ini pemerintah mensubsidi mahasiswa UGM jurusan eksakta Rp3 juta/tahun. Artinya, beban pemerintah teramat besar. Mungkin memang benar bahwa pemerintah sejak krisis ekonomi tak mampu lagi menanggung itu semua. Biar begitu, sebenarnya SPP mahasiswa hanya menopang 15% dari seluruh biaya operasional UGM. Nah, nanti kalau otonomi PT diterapkan, UGM bakal menerima anggaran dari pemerintah dalam bentuk *block grant*. UGM tinggal mengajukan proposal, tanpa campur tangan pemerintah. Benarkah?

Pertanyaan ini belum terjawab. Logika yang sehat mengatakan, tak mungkin "seseorang memberi tanpa meminta imbalan". Pun demikian, proposal-proposal proyek yang diajukan UGM ke donatur-donatur luar negeri ataupun institusi swasta, mungkinkah mereka memberi tanpa meminta imbalan sedikitpun?

Kalau memang otonomi UGM jadi dilaksanakan, perubahan apa saja dalam segi akademik yang akan terjadi di UGM? Di awal paparannya, Sahid menjelaskan—mengulang Mochamad Anwar—*philosophycal background* program otonomi PT ini. Kesimpulan Sahid, program otonomi PT ini di satu sisi merupakan suatu tantangan (*challenge*), yang bila tidak kita ambil akan membuat kita tertinggal. Sementara di sisi lain ia berisiko tinggi (*high risk*) sehingga kita tak boleh gegabah. Tentang kurikulum, Sahid cuma menyinggung sekali, yaitu bahwa sasaran utamanya ialah peningkatan kualitas akademik. Selebihnya, Sahid cuma menunggu pertanyaan dari peserta diskusi.

Mendengarkan penjelasan Sahid, mahasiswa terlihat banyak yang risau. Apa sebab? Kentara bahwa otonomi PT di mata TIPO-UGM seibarat "proyek empuk". Buktinya, persiapan yang amat penting tentang aspek akademik (kurikulum) tak dilakukan secara serius. Yang tampak lumayan matang ialah persiapan bidang finansial dan manajemen. Dengan alasan mendadaknya undangan, Sahid belum siap menjelaskan visi akademis UGM ketika otonom nanti.

Pertanyaan penting dilontarkan seorang partisipan: bagaimana mewujudkan visi kerakyatan UGM dalam segi akademik? Sahid menjawab, nilai-nilai kerakyatan UGM bakal menjiwai mata-mata kuliah di UGM. Mahasiswa diarahkan agar memiliki *social responsibilities* yang tinggi. Tapi, bagaimana konkretnya? Sahid belum bisa menjawab.

Kembali partisipan tadi menanggapi, bukankah selama ini mahasiswa yang berhasil menyerap nilai-nilai kerakyatan itu dengan cara aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstrakampus—dan dengan demikian kuliahnya juga lama, terganggu segala


Dr. Ir. Sahid Susanto, M.S.

kegiatannya? Tidakkah justru mahasiswa yang murni kuliah cenderung apatis terhadap isu-isu kerakyatan—meski kuliahnya cepat plus IPK-nya bagus? Apakah mata kuliah seperti Kewiraan dan Pendidikan Pancasila mampu mengakomodasi itu semua?

Maka, tidak ada korelasi yang meyakinkan antara penyisipan nilai-nilai kerakyatan ke dalam mata-mata kuliah di UGM dengan internalisasi nilai-nilai itu ke dalam jiwa mahasiswa. Kalau sudah begitu, bolehlah ditarik kesimpulan: otonomi PT berikut segala janji-janjinya akan kian menumpulkan kepekaan-kerakyatan mahasiswa.

* * *

Setelah melewati diskusi-diskusi dan perdebatan panjang, tibalah waktunya mahasiswa merumuskan sikapnya. Tapi, pertanyaannya, sikap seperti apakah yang mesti diambil mahasiswa? Setuju sepenuhnya, pasrah? Ataukah protes, tidak menerima?

Seluruh elemen mahasiswa, baik organisasi intra maupun ekstrakampus, yang hadir dalam rangkaian diskusi, beberapa kali melakukan *sharing*. Dalam forum-forum itu kembali dievaluasi alasan mendasar pemerintah menerapkan otonomi PT. Langkah-langkah yang ditempuh UGM mempersiapkan otonomi banyak menimbulkan tanda tanya besar.

Selain itu, sejumlah kesepakatan dibuat oleh segenap partisipan diskusi: kajian-kajian lanjutan dipandang amat perlu, dan persoalan otonomi ini menjadi kepedulian bersama mahasiswa UGM.❐

Bachtiar
Adi Baskoro, Dian Fikriani, Yusuf W. Jati, Dedy S.

Menimbang Kritis Otonomi Kampus



Arie Sudjito
Staf Pengajar Sosiologi UGM

Keprihatinan yang dalam masih melanda Indonesia. Diawali munculnya "sekadar" krisis moneter, kemudian metamorfosis menjadi bencana ekonomi. Hanya butuh waktu yang demikian kilat, secara ekskalatif krisis ekonomi berdampak lahirnya prahara politik. Negeri yang selama 32 tahun "tampak harmonis" ini akhirnya kalut. Tahap pertama krisis ekonomi-politik itu mencapai klimaksnya ketika sang tiran, Soeharto, dipaksa turun takhta oleh gerakan mahasiswa-rakyat pada 21 Mei 1998. Lalu disusul sang penguasa darurat, Habibie, yang cuma berkuasa satu setengah tahun.

Meski intensitas krisis reda, namun problema sosial bangsa saat itu makin meluas. Pergantian pimpinan baru, duet Gus Dur-Megawati, yang berarti untuk sementara berhasil memulihkan kepercayaan politik, bukan berarti konflik-konflik sosial usai. Pergolakan meletup di berbagai daerah, menuntut kemerdekaan—beberapa orang menyebutnya separatisme. Itu semua, tentunya, menjadi catatan awal bagi terbentuknya potensi disintegrasi bangsa.

Tak bisa dipungkiri, krisis ekonomi-politik ini telah "berhasil" mengoyak berbagai aspek struktural masyarakat. Tak terkecuali dengan dunia pendidikan kita. Di tengah suasana itu, beberapa waktu berselang terlontar niatan pemerintah untuk menerapkan otonomi kampus. Meski bukan ide baru, otonomi kampus sempat menyedot perhatian banyak kalangan, khususnya insan kampus, yang relatif memiliki kepentingan di dalamnya.

Dulu, ide otonomi kampus ini mulai dipopulerkan sekitar awal 1990-an. Gelombang protes—dimotori mahasiswa dan elemen sivitas akademika—yang menuntut diterapkannya otonomi kampus tak lain sebagai respon atas gejala dependensi kampus akibat hegemoni negara. Tuntutannya sederhana saja: agar negara tak berlebihan melakukan intervensi. Kampus ingin ditempatkan secara otonom; hak-hak warga kampus, baik yang bersifat akademis maupun hak sosial-politik, mesti diterapkan. Misalnya, kebebasan dalam penentuan kurikulum, berkreasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, beroganisasi, serta otoritas penentuan pemimpin kampus.

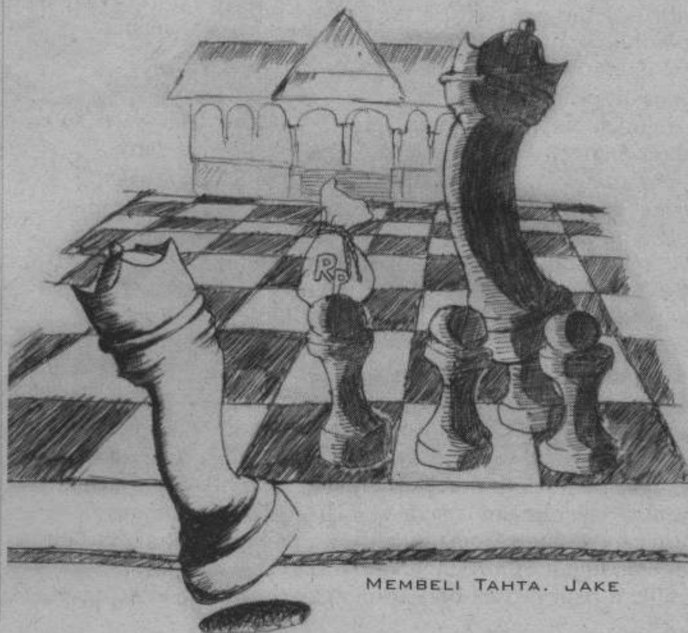
Hak mahasiswa berorganisasi menjadi topik penting. Tahun 1991, misalnya, mahasiswa UGM, ITB, UI, serta universitas-universitas swasta berdemonstrasi menolak keberadaan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) sebab dianggap sebagai agen kendali negara atas mahasiswa. Umumnya mereka menolak politik korporatisasi. Meski diakhiri dengan kompromi minimalis, kesadaran untuk melawan terus berkembang kala itu. Apalagi, didasari masih kuatnya posisi negara, politik represi demikian dominan.

Kegiatan ilmiah seperti diskusi harus memperoleh izin dari aparat. Para aktivis/demonstran mahasiswa ditangkapi. Tokoh-tokoh kritis pun dicekali. Bahkan, negara tak memberi kesempatan sedikit pun kepada masyarakat kampus untuk menentukan pemimpinnya. Kasus terakhir ini sebagai reaksi para mahasiswa yang menolak rektor *"drop-dropan"*. Tahun 1994, umpamanya, mahasiswa yang tergabung dalam Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) UGM menolak keputusan pemerintah dalam penentuan rektor UGM. Alasannya, cara itu dianggap tidak demokratis karena tak sesuai dengan aspirasi mahasiswa sebagai mayoritas warga kampus. Hal yang sama berlangsung pula di universitas-universitas lainnya.

Fakta-fakta itu, sedikitnya, dapat dijadikan argumen untuk memahami maraknya protes-protes mahasiswa bersama dosen dalam tuntutan ditegakkannya otonomi kampus.

Kebijakan depolitisasi, deideologisasi, *floating mass* melalui desain korporatisme, membuat kampus mandul dan statis. Pembonsaian ini memang dikonstruksi oleh negara, agar kampus termobilisasi dan terintegrasi pada "pembangunan". Makna pembangunan di sini dimaknai dalam parameter *economy growth* dan politik yang mapan. Tak pelak, kampus umumnya sekadar menjadi arena proses ekonomisasi dan birokratisasi. Prestasi kampus diukur melalui tingkat loyalitas dalam melaksanakan pembangunan. Kenyataan itu jelas menjadi hambatan mendasar upaya pemberdayaan (*empowerment*) kampus sebagai agen demokratisasi. Kampus tidak independen lagi dalam mengemban misi pendidikan bangsa.

Sayangnya, keresahan-keresahan itu tak terlalu besar mendapatkan porsi perhatian publik, apalagi tanggapan positif negara. Sebaliknya, diskursus otonomi kampus justru dianggap "subversif-akademis", akibat tafsir "kemerdekaan



MEMBELI TAHTA. JAKE

kampus" sebagai bentuk ancaman sistematik atas kekuasaan. Akibatnya, wacana otonomi kampus menguap tak berbekas. Karena itu, jika pada masa transisi demokrasi saat ini muncul ide otonomi kampus, ia bukan merupakan isu baru, kecuali ia memiliki konteks yang berbeda serta menemukan momentumnya untuk diungkap kembali.

Konteks Otonomi

Membaca *setting* sosio-politiknya, kebijakan yang bakal diintrodusir tahun 2000, dan dieksperimentasikan pada empat PT terbesar di Indonesia (UGM, ITB, UI, dan IPB), itu tampaknya diletakkan pada dua konteks alasan signifikan.

Pertama, sebagai resultante aliran reformasi, *political will* ini dapat dimengerti sebagai bentuk reaksi atas gagalnya negara memberi jaminan sosial, berupa subsidi pada perguruan tinggi, terutama akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut hingga kini. Kapasitas struktural negara yang merosot lalu memaksa perguruan tinggi (PT) mencari sendiri alternatif sumber dana guna menopang operasionalisasi pendidikan.

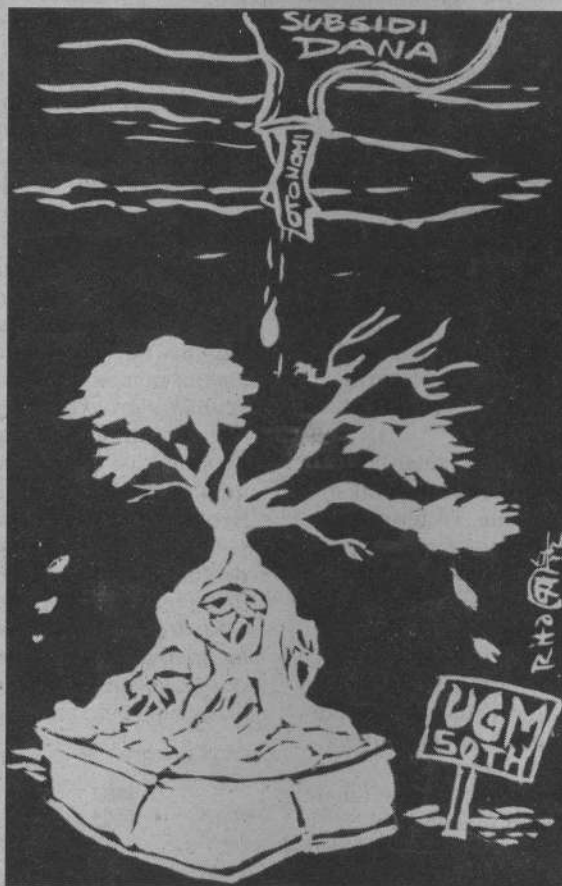
Kedua, seiring dengan akselerasi perkembangan global, institusi PT memang dihadapkan pada tantangan besar: kompetisi internasional yang tajam. Hal ini berarti relasi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak hanya dipagari pada level lokal atau nasional, tetapi justru, mau tak mau, harus memasuki zona internasional. Dalam konteks itu, secara kelembagaan PT dituntut lebih fleksibel, menghilangkan struktur dan kultur yang kaku dan birokratis.

Menimbang Peluang

Kondisi negara yang miskin, seperti tersebut pada konteks pertama, dapat dipahami sebagai isyarat hilangnya alasan kendali oleh negara atas dunia PT. Itu berarti PT relatif berpeluang keluar dari lingkaran ketergantungan atas hegemoni (politik) negara. Perubahan-perubahan dalam hal pendanaan, contohnya, di mana proporsi 65% dibebankan perguruan tinggi masing-masing, sementara sisanya sebesar 35% menjadi tanggung jawab negara, menjadi faktor penting premis di atas. Kurikulum, yang pada mulanya 40% lokal dan 60% nasional, maka pada desain otonomi kampus justru sebaliknya. Selebihnya pula, PT leluasa mengelola administrasi kepegawaian. Misalnya, status dosen dan karyawan dikonversikan, dari PNS menjadi pegawai institusi kampus, dan bertanggung jawab hanya kepada PT masing-masing.

Model seperti itu tentu tak menuntut pertanggungjawaban politik kepada negara, kecuali pertanggungjawaban akademik dan manajerial kepada publik atau masyarakat. Dengan demikian, sivitas akademika jauh berpeluang mengembangkan kreatifitas, leluasa berimajinasi dengan pengetahuannya tanpa harus disensor oleh penguasa.

Selebihnya, jika otonomi kampus ini diterapkan melalui basis konseptual, visi, misi, dan program kerja yang jelas dan *aplicable*, juga akan menjadi peluang besar bagi PT untuk merintis relasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga internasional, tanpa melalui jalur birokrasi yang berbelit-belit. Pengembangan ilmu pengetahuan dan ragam informasi yang signifikan bagi proses belajar-mengajar menjadi lebih mudah dilakukan, tanpa dibatasi kepentingan politik negara. Akses bagi mobilitas PT menjadi lebih terbuka. Jalinan kerja sama internasional untuk mengucurkan dana, atau beasiswa studi mahasiswa dan dosen, serta pengembangan kelembagaan--untuk sedikit contoh—adalah sesuatu yang bukan mustahil direngkuh.



OH...SEMAKIN MERANGGAS... RITA

Mewaspadai Ancaman

Meski otonomi kampus tampak menawarkan masa depan yang relatif menjanjikan, ia bukan berarti tanpa persoalan. Berkurangnya subsidi anggaran dari negara, yang katanya dilandasi efisiensi, itu jelas akan menambah beban PT untuk membiayai operasionalisasinya. Maka, bukan mustahil jika muncul alasan rasionalisasi penyerapan dana, khususnya bersumber dari masyarakat, misalnya melalui SPP. Melambungnya SPP mahasiswa yang akhir-akhir ini terjadi, agaknya, merupakan "pemanasan" awal sebelum diterapkannya kebijakan otonomi kampus. Demikian pula, perguruan tinggi "dipaksa" untuk mencari peluang berdagang, demi biaya hidup lembaga. Jangan heran jika kampus akhirnya ibarat "perusahaan pendidikan", yang memiliki macam-macam usaha minyak (pompa bensin), mal, percetakan, toko buku, dan usaha-usaha lainnya yang terjangkau.

Sekolah menjadi mahal, dan terjadi privatisasi pendidikan. Hipotesis ini jelas mengasumsikan bahwa kemampuan struktural masyarakat tumbuh secara positif dengan nilai kenaikan dana pendidikan tersebut. Padahal, dalam kenyataan empiris, daya ekonomi masyarakat jelas mengalami kemerosotan, atau berbanding terbalik, khususnya sebagai akibat langsung benturan krisis ekonomi. Di sanalah kesulitan mendasar akan muncul, ketika masyarakat tak mampu lagi mengikuti akselerasi kenaikan biaya pendidikan akibat hambatan struktural.

Otonomi kampus juga memberikan ruang buat terbangunnya relasi dengan sistem global. Kenyataan ini memang memaksa negara untuk menciutkan peran dan kendalinya terhadap sistem pendidikan di PT.

Situasi selanjutnya beralih kepada interaksi perguruan tinggi dengan globalisme. Artinya, penetrasi ideologi global itu, atau kapitalisme misalnya, menjadi hal yang perlu dipertimbangkan efeknya. Ada keyakinan, dilandasi oleh tuntutan pasar kapitalisme, orientasi pendidikan pun "dipaksa" untuk berintegrasi dengan kemauan pasar itu sendiri. Jangan heran jika muncul sejumlah kekhawatiran, yakni bakal ditutupnya jurusan-jurusan yang dianggap "tak laku dijual di pasar", meski ia teramat penting sebagai ilmu pengetahuan.

Karena itu, salah-salah, otonomi kampus hanyalah bentuk pendelegasian peran hegemoni: dari hegemoni negara kepada hegemoni kapitalisme atas PT. Siapkah perguruan tinggi merespon secara kritis kecenderungan ini?❑

Ironi Impian
Pengabdian Masyarakat

Ketika borok-borok program KKN-UGM semakin parah, sikap UGM ternyata masih belum jelas. Belakangan malah muncul konflik dan konspirasi antara P3KKN dan pihak rektorat. Akankah KKN-UGM tinggal kenangan?

Tak terasa, 28 tahun sudah—sejak tahun 1971—universitas *ndeso* ini menerapkan program KKN. Tercatat lebih dari 25.000 mahasiswa telah mengikuti program ini. Tidak saja daerah-daerah di DIY dan Jawa Tengah yang mereka rambah, daerah Lampung dan Palembang pun pernah mereka kunjungi.

Sayangnya, tak semua berjalan mulus. Walaupun sudah cukup lama dilaksanakan, KKN-UGM ternyata menyimpan banyak kekurangan. Beberapa mahasiswa yang telah melaksanakan KKN, ketika ditemui BALAIRUNG, memberikan banyak catatan kritis untuk program "kerakyatan" ini. Mulai dari anggapan bahwa KKN sudah tak lagi menjalankan fungsinya, hanya memberikan mahasiswa "pelajaran berbohong", menguras kocek mahasiswa, sampai pada persoalan-persoalan teknis, seperti masalah pembekalan yang kurang efektif, pemilihan lokasi KKN yang tak akurat, dan rancunya hasil penilaian bagi setiap peserta.

Program yang dilaksanakan mahasiswa KKN melulu itu-itu saja. Kalau tidak membangun jembatan, atau tugu batas desa, ya, membuat WC, lapangan volli atau plang penunjuk arah. Tak heran bila kemudian terlontar banyak kritik pedas untuk KKN-UGM, khususnya kepada P3KKN (Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata), sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan KKN-UGM (*lihat: Program KKN, kurang memahami masyarakat*).

Gede Ananta, umpamanya, mahasiswa Fisipol Jurusan Sosiatri ini menyayangkan kekurangmaksimalan KKN sebagai media transormasi ilmu pengetahuan dari mahasiswa kepada masyarakat. "Ya, itu betul. Cuma sekitar 20% dari seluruh ilmu yang saya pelajari bisa saya tularkan. Padahal, semua studi saya tentang pembangunan masyarakat," tandasnya. Kenyataan itu dibenarkan Lastarya Wibisono, dosen Fakultas Ekonomi yang juga pembimbing lapangan. "Kita harus



Pemberangkatan KKN. Sejalan dengan otonomi PT, KKN akan dijadikan pilihan.

realistis. Memang itulah yang terjadi di lapangan," tanggapnya.

Yoga lain lagi. Mahasiswa FE '95 ini mempunyai kesan bahwa KKN hanya memberikan "pelajaran berbohong" bagi mahasiswa KKN. Indikasinya, menurut Yoga, dapat dilihat dari apa yang dilakukan mahasiswa KKN ketika membuat laporan KKN. Banyak di antara mereka yang menuliskan program kerja KKN. Padahal, program itu tak pernah dikerjakannya.

Hal senada dipaparkan pula oleh Dedy Sushandoyo., mahasiswa Teknik Mesin (Alih Jalur) '97. Menurutnya, masalah "pelajaran berbohong" juga bisa dilihat pada tingkah laku banyak mahasiswa KKN yang mengaku membuat program, padahal program itu sudah ada sebelum ia datang. Atau, ia hanya membantu sekitar 50%, tapi diklaim seluruhnya.

Persoalan lain yaitu banyaknya biaya yang keluar dari dompet mahasiswa KKN. Persoalan duit ini, bagi banyak mahasiswa KKN-UGM, tentu saja bukan persoalan remeh. Seperti dijelaskan Hafsah, mahasiswi berjilbab dari Sastra '95, bahwa setiap mahasiswa diperkirakan mengeluarkan uang sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta untuk menyukseskan program-program KKN-nya. Hafsah sendiri mengaku paling sedikit telah mengeluarkan uang sebesar Rp300 ribu untuk menyukseskan program-program KKN-nya di daerah Blora, Jawa Tengah.

Yang lebih mengerikan, dan juga cukup prinsipil, adalah pandangan mahasiswa sendiri tentang KKN. KKN tak lagi murni niatan "mulia" seorang mahasiswa untuk mengabdi kepada rakyat—yang telah membiayainya kuliah. KKN lebih "formalitas" belaka untuk meraih gelar sarjana. Karena KKN mata kuliah wajib, maka yang paling penting adalah nilai A-nya.

Betapapun bagus dan bermanfaatnya program yang dibuat oleh seseorang, betapapun semangat dan rajinnya ia dalam pelaksanaan KKN, tapi jika nilai yang didapatnya D atau C, sama juga bohong. Yang terpenting, lulus dengan nilai yang memuaskan sebab itulah syarat untuk memakai toga sarjana.



ISTIMEWA

Pemberangkatan KKN UGM. Akankah tinggal kenangan?

Anggapan semacam ini, setidaknya, tanpak dari pernyataan Ratih, mahasiswi Fak. Kedokteran Hewan '94. "Mas, saya ini sudah ko-asistensi, sudah sarjana, jadi tinggal KKN kemudian wisuda. *Masak* KKN harus *ngulang*?" ujarnya kepada BALAIRUNG, sambil tertawa.

Ibarat mata air, persoalan-persoalan KKN di UGM adalah mata air yang tak pernah berhenti mengalir. Persoalan-persoalan KKN di UGM seperti tak habis-habisnya. Adalah Dra. Aisah Indati, M.S., dosen Fakultas Psikologi, yang menandaskan bahwa format pembekalan kurang berjalan dengan baik. "Bayangkan saja, ketika *coaching* (pembekalan—*Red.*) saya harus menghadapi 250 mahasiswa dalam satu ruangan. Bagaimana materi bisa ditangkap dengan baik? Mungkin mahasiswa yang depan bisa mengerti. Tapi yang di belakang, mereka kerjaannya ribut saja," jelasnya.

Pada tahapan pembekalan, ada sehari kegiatan bakti sosial di fakultas. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemantapan dan pembekalan mahasiswa, dengan ilmu yang dapat diterapkan pada masyarakat. Namun, nyatanya, hal itu juga tak terjadi. Mahasiswa justru disuruh-suruh untuk membersihkan halaman fakultasnya masing-masing. Peran dosen pembimbing lapangan (DPL)? Entahlah. Seharusnya, di sinilah letak peran mereka. Aisah Indati sendiri mengaku sudah melakukan pembekalan seperti yang diharapkan, tapi bagaimana dengan DPL-DPL lainnya? "*Wallahua'lam*," ujar Aisah.

Bukan itu saja, lokasi KKN pun menjadi masalah tersendiri. Selama ini, pemberitahuan tempat lokasi seorang mahasiswa KKN baru diumumkan seminggu sebelum hari pelepasan. "Bagaimana kami dapat membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan waktu survei yang sempit? Itu pula yang membuat program kami jadi amburadul. Juga pihak P3KKN tak memberikan apa yang dibutuhkan oleh daerah itu. Dan semua program harus kami selesaikan dalam waktu yang cuma 2 bulan itu," cetus Gede Ananta sedikit kesal.

Tak tahan menerima banyak kritikan, P3KKN pun tampaknya mulai berbenah diri. Menurut drg. M. Masykur Rahmat, Sp.B.M., ketua P3KKN, untuk menyukseskan pelaksanaan KKN yang sesuai harapan, paling tidak, ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pijakan.

Pertama, prinsip keterpaduan tiga aspek Tri Dharma PT. Kedua, interdisipliner--sebab KKN diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Ketiga, prinsip komprehensif--KKN diharapkan dapat menjadi pengikat dan perangkum semua kurikulum, bahkan kalau bisa melengkapi isi kurikulum yang telah ada. Keempat, prinsip pragmatis—sebab program-program KKN memang harus bertumpu pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dan prinsip kelima, partisipatif—di sini mahasiswa harus mampu melakukan proses interaktif dan sinergis dengan masyarakat, sehingga keduanya mampu terlibat secara intensif dalam setiap kegiatan.

Pembenahan lain yang dilakukan

P3KKN ialah pengembangan model KKN. Banyaknya mahasiswa UGM yang ingin menyelesaikan studi secepatnya membuat peserta KKN semakin membludak. Alhasil, KKN reguler dianggap tak mampu lagi menampung luberan calon peserta KKN. Pengembangan KKN pun akhirnya dilakukan.

Kini, selain KKN reguler, di UGM juga terdapat beberapa model KKN, antara lain bentuk KKN semester pendek, KKN ekstensi yang dikhususkan bagi mahasiswa program ekstensi, serta KKN alternatif, yang dikembangkan sejak tahun akademi 1997/1998.

Maksud lain pengembangan model KKN, selain alasan melubernya peserta, ialah pertimbangan bahwa di UGM akan diberlakukan otonomi kampus. Alasan ini sangat mendasar sebab pengembangan model KKN, pada dasarnya, adalah sebuah usaha P3KKN sendiri untuk tetap "mempertahankan eksistensinya" ketika otonomi kampus nanti dilaksanakan. Kalau tidak demikian, dengan alasan bahwa P3KKN tak mengguntungkan, kemungkinan dihapusnya P3KKN sebagai lembaga sangat besar. Tentu saja ini tak bisa diterima.

Di era otonomi kampus, UGM mau tak mau harus *profit-oriented*. Terlepas dari polemik diterima atau tidak otonomi kampus, yang kini sedang digodok itu, P3KKN pun bersiap diri agar tak digusur, yaitu dengan "menyulap" dirinya menjadi *profit-center*. Salah satunya adalah dengan memperbanyak KKN alternatif, yang memang menghasilkan banyak uang. "Kami baru saja melakukan semiloka untuk merumuskan konsep baru KKN, apalagi dalam rangka menghadapi otonomi kampus," tegas Masykur.

Selesai? Tampaknya belum. Gayung terus bersambut. Sikap rektorat yang begitu saja melepas tanggungjawabnya di bidang pengelolaan finansial KKN, yang salah satu bentuknya yaitu penghapusan tabungan KKN mahasiswa (sejak angkatan 1999), tentu saja membuat P3KKN kelimpungan dalam persoalan finansialnya.

Akibatnya, ini menuntut P3KKN untuk mulai membuat banyak jaringan dan mencari peluang. Berbagai lembaga seperti Bank Danareksa, BUMN, juga Pemda DIY mulai dirangkul. Tujuannya jelas: pengucuran dana untuk menghidupi P3KKN, agar tetap eksis dalam era otonomi kampus.

Sampai di sini, timbul masalah baru. Para pemberi dana jelas tidak memberi bantuan begitu saja. Mereka jelas mengharapkan imbalan setimpal dengan dana yang dikeluarkan. Akibatnya, para mahasiswa lebih banyak bekerja bagi pemberi dana, dan bukan bekerja untuk mengabdi bagi masyarakat setempat.

Contoh riilnya adalah model KKN alternatif pemantau kawasan industri di Cilegon, dan KKN alternatif pemantau petani tebu di Pabrik Gula Kanigoro, Madiun. Di sana terbukti bahwa kerja mahasiswa lebih banyak untuk pemberi dana ketimbang mengabdi kepada masyarakat setempat *(lihat: Tak Seindah yang diharapkan)*.

Pengembangan model KKN, terbukti, bukan malah menjadikan program KKN-UGM lepas dari persoalan. Pelaksanaan KKN alternatif pemantau pemilu '99, misalnya, bahkan telah memunculkan konflik cukup keras antara P3KKN dan rektorat.

Akar persoalannya sederhana, yakni fungsi koordinasi dan komunikasi yang tak berjalan baik. P3KKN merasa kewenangan dan otoritasnya dilangkahi oleh pihak KPP (Komite Pemantau Pemilu), khususnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam teknis pemantauan dan penentuan nilai relawan—sesuatu yang sebenarnya masih merupakan otoritas P3KKN.

Sementara itu, pihak KPP-UGM, melalui rektor UGM, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A., menampik hal itu. "Ya, ini 'kan cara yang tidak betul. Masa KKN pemantau pemilu, dalam pelaksanaannya seperti KKN biasa plus pemantauan Pemilu! Ini 'kan harus diintegrasikan," dalihnya. Masykur sendiri, ketika dikonfirmasi tentang persoalan ini, malah terkesan menutup diri. "Ya...sedikit *korsleting*. Konflik itu tak ada, cuma memang ada masukan dari Rektor tentang berbagai pola pelaksanaan dan mekanismenya," paparnya.

Masalah lain adalah tentang keberadaan KKN di UGM. Fenomena beberapa PTN dan PTS yang telah menghapus program KKN-nya, tentunya, menggelitik sivitas akademika di UGM. Pro dan kontra pun tak terelakkan.

Ichlasul Amal pun, kelihatannya, tak dapat memastikan apa yang akan dilakukan rektorat terhadap keberadaan KKN. "Ya...bertahap. Mungkin sejalan dengan proses otonomi kampus, KKN akan dijadikan pilihan. Sekarang para dekan sedang mencari mata kuliah yang cocok sebagai pengganti KKN," jelasnya.

Penyikapan para mahasiswa tentang keberadaan KKN, ternyata, juga beragam. Yoga, misalnya, jelas-jelas sudah antipati dengan KKN. "*Nggak* ada gunanya! Kalau tujuannya untuk sosialisasi dengan masyarakat, kita bisa melakukannya sehari-hari, tak perlu ke desa," tegasnya.

Ini jelas berbeda dengan Lais Abid, mahasiswa Biologi '91. Menurut penulis buku *Wartawan Terpasung* (1998) ini, KKN masih perlu dipertahankan sebab di situlah sarana mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Hal senada juga ditandaskan oleh Ir. Dodiet W., alumnus Fak. Pertanian yang kini bekerja di Pabrik Gula Kanigoro. "KKN itu jiwanya UGM. KKN akan bermanfaat ketika kita sudah bekerja," tuturnya.

Namun demikian, yang justru menarik kemudian ialah munculnya semacam "konspirasi terselubung", antara P3KKN dan rektorat, dalam menyikapi keberadaan KKN saat ini. Ini memang aneh, tapi nyata.

Dua fenomena besar yang erat kaitannya dengan dugaan ini sudah jelas: pertama, diberlakukannya otonomi kampus di 4 PTN; dan kedua, menjamurnya penghapusan program-program KKN di berbagai PTS dan PTN. Selain UI, UNDIP, ITB, dan IPB, terakhir UNS juga telah menghilangkan program KKN-nya.

Mengapa KKN perlu dipertahankan? Menurut P3KKN, selain alasan untuk sarana pengabdian bagi para dosen, alasan yang lebih bersifat "eksistensialis" yaitu adanya ancaman penghapusan lembaga P3KKN ketika otonomi kampus diberlakukan di UGM. Kekurangan dana dan anggapan bahwa P3KKN tak menguntungkan adalah alasan tersendiri.

Sedang bagi rektorat, ketika kritik terhadap otonomi kampus begitu menderu, karena ditakutkan akan menghilangkan visi kerakyatan UGM, KKN untuk sementara bisa dijadikan bemper peredam kritik—walaupun setelah itu akan dijadikan program pilihan. Dengan masih adanya KKN, minimal UGM masih bisa mengaku sebagai "kampus rakyat". Dan pelaksanaannya tak perlu membebani *budget* pengeluaran universitas.❐

Ajar Aedi

KKN Mahasiswa

Gagal Memahami Masyarakat

Tujuan mulianya: menerjemahkan visi kerakyatan UGM. Melalui KKN, diharapkan mahasiswa mampu memahami kenyataan masyarakat. Namun, berhasilkah mahasiswa melakukannya?

Nyonya Darsono, Ketua RW V Wirobrajan, tertegun ketika mendengar mahasiswa ekstensi UGM berencana ber-KKN di kampungnya. Salah satu program mahasiswa yaitu pembuatan pemajang koran umum. Ibu asal Kebumen ini tak habis mengerti mengapa mahasiswa membuat program itu di daerahnya. Efektifkah program itu bagi warga setempat?

Apalah artinya etalase koran, bila rata-rata warga sudah akrab dengan informasi. Jelas Nyonya Darsono, warga rata-rata sudah berlangganan dan membeli koran sendiri. "Warga lebih senang membeli koran dan menikmatinya di rumah daripada harus antre membaca di tempat itu," ujarnya kalem.

Berderet kasus ketidakefektifan program KKN pun bisa digelar. Misalnya, seperti yang dialami warga Dusun Banaran, Cangkringan, Sleman. Mahasiswa membuat program keterampilan masak-memasak, yang ternyata kurang diminati masyarakat setempat. Parahnya lagi, warga merasa digurui dan diposisikan layaknya murid. Menurut Sugiyanto (37), warga setempat, ibu-ibu merasa kecewa karena mereka tak memperoleh tambahan ilmu dari program tersebut.

Hal yang sama dialami warga Dusun Panggung, Cangkringan, Sleman. Dengan kondisi geografis yang didominasi areal pertanian dan perikanan, wajar bila harapan warga ketika mahasiswa KKN datang ialah adanya pembenahan sektor tersebut. Warga berharap mahasiswa datang dengan membawa program penyuluhan yang berisi pengetahuan teknik bertani dan beternak ikan yang benar, pemanfaatan lahan kosong, serta pengenalan komoditi pertanian yang mampu bersaing di pasaran.

Menurut pengakuan Agus Sutrisno, mantan ketua Pemuda Dusun Panggung, harapan itu ternyata meleset. Mahasiswa yang datang tak satu pun yang membawa program untuk sektor pertanian. "Program penyuluhan tentang kanker rahim dan kanker payudara memang bermanfaat. Akan tetapi sektor pertanian yang paling kita butuhkan," cetus Agus.

Hal senada pun dikeluhkan oleh Ny. Maryadi. Menurut ibu berusia setengah abad lebih ini, program yang telah dijalankan mahasiswa kurang memenuhi harapan. Bagi Ny. Maryadi, program yang benar-benar dibutuhkan ibu-ibu di kampung Panggung ini ialah peningkatan keterampilan rumah tangga, semisal menjahit atau menyulam. Dengan demikian, menurutnya, ibu-ibu dapat memperoleh penghasilan tambahan dan tidak selalu tergantung hidupnya dari suami.

Selain kurang kontekstual dengan kebutuhan warga, program yang dijalankan mahasiswa pun banyak yang tidak kreatif. Seringkali program yang dijalankan mahasiswa merupakan pengulangan dari periode sebelumnya. Pembuatan plang penunjuk tempat di Kelurahan Wirobrajan, bagian barat Yogyakarta, contohnya. Program itu sudah dilaksanakan oleh KKN ekstensi 1997/1998. Kini, oleh KKN ekstensi 1998/1999 kembali dijadikan program.

Hal ini tampak juga dari program pengadaan perpustakaan di Desa Krasakan, Tempel, Sleman. Pengadaan perpustakaan ternyata tak lebih hanya menata ulang buku-buku yang sudah ada. Tak ada penambahan koleksi buku dari mahasiswa, apalagi perbaikan sistem perpustakaan. Mahasiswa sekadar menata buku-buku yang ada agar lebih rapi dan tak berdebu.

Kurangnya inovasi dalam hal program, tampaknya, tercermin dari kasus aktanisasi. Program ini sering dijumpai untuk bidang sosial-budaya. Seperti latah, mahasiswa selalu menganggap pembuatan akta kelahiran penting dan paling mungkin dijalankan. Selain itu, program klasik juga yang kerap dilakukan mahasiswa yaitu pembuatan papan tulis dan peta desa.

Kurangnya konsolidasi antara mahasiswa dan warga juga menjadi persoalan pelik lain. Setidaknya, ini dirasakan Pak Maryadi, warga Panggung, dusun yang jaraknya dua kilometer dari kota Kecamatan Cangkringan. Menurutnya, mahasiswa terlalu pasif, kurang *srawung* (adaptasi—*Red.*) dengan masyarakat sekitar. Dia memberi contoh terbengkalainya salah satu program KKN. "Pemagaran dan konblokisasi mushalla, yang idenya dari masyarakat sendiri, sampai sekarang tak pernah dibahas ulang atau dibicarakan bersama-sama," ujar bapak yang sudah beruban ini.

Problem sosialisasi ini tercermin pula pada kasus-kasus lain. Mahasiswa KKN sering memilih-milih dalam pergaulan. Menurut Mustofa, Ulum, dan Hamdan kepada BALAIRUNG, mahasiswa KKN di desanya mengakrabi salah satu kelompok pemuda saja dan kurang bisa bersosialisasi dengan kelompok pemuda lain. "Kami hampir tak pernah diajak ngobrol-ngobrol. Mereka lebih akrab dengan pemuda dari kelompok barat. Bahkan mereka *muter* film bersama-sama," ujar Hamdan (23), yang mengaku pengangguran ini.

Selain itu, mahasiswa banyak yang tak menyediakan waktu sepenuhnya di lokasi KKN. Itu terjadi, umpamanya, di Desa Krasakan. Warga setempat mengeluh, mahasiswa sering pergi meninggalkan lokasi. "Ada *sih*, Mas, yang tiap minggunya pulang terus," ucap Syarifah Mulyani, gadis yang masih sekolah di MAN 3 Yogyakarta ini. "Untungnya, warga setempat masih berbesar hati dan memberi toleransi, tak sampai menegur mahasiswa yang sering pulang," tambahnya.

Kondisi lebih parah pada program KKN ekstensi: masalah pembauran. Dengan alasan siang digunakan untuk bekerja, mahasiswa KKN menyediakan waktu cuma sekitar lima jam bagi warga. Mereka datang pukul lima sore, pulang



Ritual KKN. Butuh inovasi agar tak sekedar jadi seremoni

pukul 9.30 malam. Timbul pertanyaan: bagaimana dalam waktu lima jam mahasiswa bisa melakukan transformasi ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah--sesuai dengan tujuan KKN?

Itu diakui Joni Hartanto, warga Wirobrajan. Menurut Ketua Pemuda RW V dan pedagang warung *kucing* ini, mahasiswa kurang optimal bekerja sama dengan pemuda kampung akibat keterbatasan waktu. "Bagaimana bisa akrab, *wong* waktu yang disediakan mahasiswa cuma lima jam," tukas pemuda gempal berambut *gondrong* ini.

Antara Keluhan dan Harapan

Kebanyakan masyarakat beranggapan, ukuran kesuksesan KKN yaitu ada-tidaknya program fisik yang dihasilkan. Tak heran, masyarakat berharap mahasiswa berperan sebagai "sinterklas": bagi-bagi rezeki. Ahmad Syarif (18), pemuda Desa Panggung, mengatakan, "Kalau mahasiswa mau bantu, ya...harus kelihatan! Seperti mensponsori kegiatan sepakbola di desa dengan membelikan bola dan kaus tim, atau mengadakan turnamen."

Ungkapan senada pun dari Pak Maryadi. "Saya berharap mahasiswa mampu membuat program yang dapat dipandang oleh warga," ujarnya. Ia membandingkan hasil program KKN-UGM 1985/1986, yang berhasil membangun mushalla. Dan, ia menyayangkan mahasiswa KKN tahun ini, yang sampai kini belum berhasil membangun sarana fisik bagi desanya.

Namun, tak semua masyarakat ingin mahasiswa jadi "sinterklas". Sugiyanto (37), pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Sleman, ketika ditemui BALAIRUNG sesaat usai mencangkul di sawahnya, berujar lebih bijak, "Yang dibutuhkan dari mahasiswa KKN adalah penyadaran cara berpikir warga." Menurut Sugiyanto, masyarakat masih membutuhkan bimbingan dari mahasiswa, terutama cara menyikapi lingkungan. Sambil mencontohkan kondisi buruknya sanitasi dan penataan lingkungan di desanya, Sugiyanto mengatakan, "Masyarakat sangat *owel* menerima masukan, kecuali dari mahasiswa KKN. Saya berharap mahasiswa mampu melakukan penyadaran dan bimbingan."

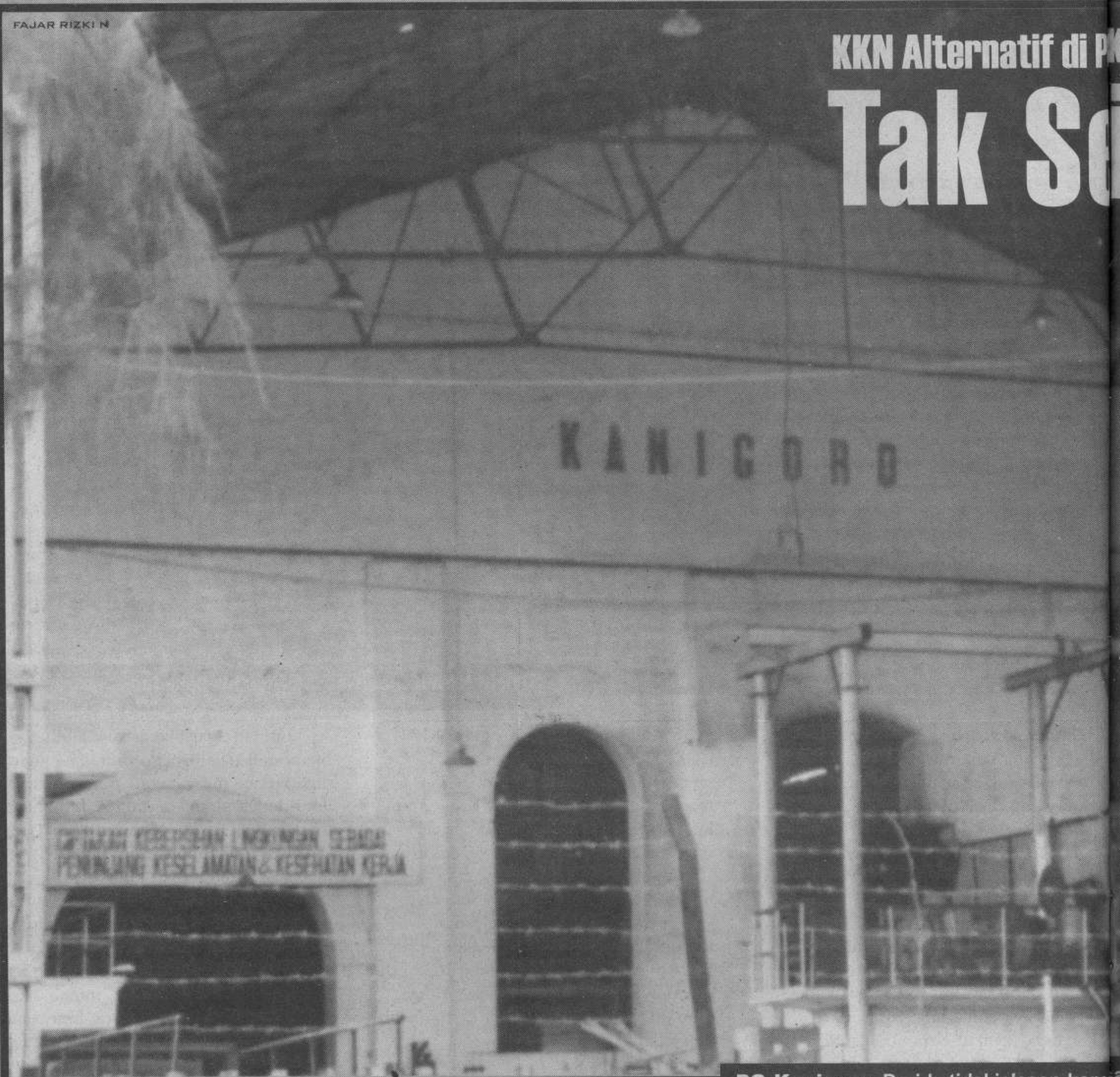
Lebih jauh, bapak berperawakan kecil ini berharap agar mahasiswa KKN bekerja sama dengan warga secara egaliter, jangan menggurui. Ia minta mahasiswa yang belum selesai KKN, tapi waktunya sudah habis, agar meneruskan program di luar waktu KKN.

Tuntutan agar mahasiswa lebih membumi dalam berkomunikasi juga dipaparkan masyarakat: penyampaian ilmu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Menurut Heri Tri C., sia-sia saja jika ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah tak bisa ditransfer kepada masyarakat. "Mahasiswa harusnya mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan persoalan masyarakat," ujar pemuda 21 tahun asal Ngentak, Tempel, Sleman, ini.

Program KKN-UGM, yang kini usianya 28 tahun, menyisakan keluhan sekaligus harapan. Meski masih banyak pertanyaan seputar pelaksanaan salah satu bentuk pengabdian UGM kepada masyarakat ini, kehadirannya tetaplah dibutuhkan.

Warga yang ditemui BALAIRUNG kebanyakan masih menyisakan harapannya pada KKN, dengan beragam alasan. Alasan utama adalah untuk kemajuan desa dan pembenahan pola pikir masyarakat. Masyarakat pun merasa mendapatkan manfaat, meski kadar manfaatnya tak amat besar, seperti halnya tujuan dan harapan yang tertera dalam buku pedoman KKN. "Paling tidak, menambah kawan bicara," kata Agus Sutrisno.❐

Darmanto



PG Kanigoro. Dari ketidakjelasan kons

Indah!?
Mimpi yang indah!?
jauh dari rumah
mengharap berkah
lari dari rumah
mendapat musibah

Meraih impian
bersama teman
menggantungkan
harapan pada
ketidakpastian
bak menunggu matahari
kehabisan api....

Puisi berjudul "Alternatif" ini, tak jelas siapa penulisnya, tertempel begitu saja pada "paku curahan hati". Itulah paku yang digunakan untuk menempel lembaran kertas *uneg-uneg* setiap peserta Kuliah Kerja Nyata Alternatif (KKNA) di Pabrik Gula (PG) Kanigoro, Madiun, Jawa Timur.

Ekspresi kekecewaan? Ya. Mimpi akan harapan yang berakhir, dengan musibah yang penuh ketidakpastian, adalah tragis! Dan "bak menunggu matahari kehabisan api", kurang lebih adalah asa yang terasa dan terus menipis menunggu usainya KKNA di PG Kanigoro itu.

Sebagai peserta KKNA, penulis puisi anonim tadi pantas kecewa. Harapan untuk mendapatkan bentuk KKN yang "lebih", ternyata, ilusi belaka. Siapa sangk KKNA pemantau petani tebu jadinya tak seindah yang dibayangkan. Di KKNA di Kanigoro, mahasiswa dituntut untuk ker dua kali. Pertama, kerja untuk pemantau tebu (*monitoring*); dan kedua, kerja untu pengabdian masyarakat, seperti KKN biasanya.

Adalah Akip, seorang sinder (pengawa mandor--*Red.*), yang mengatakan bahwa tugas *monitoring* petani tebu sangat bera bagi mahasiswa. "Dengan tugas yang

PGKanigoro Madiun:

...indah yang Diharapkan

...mpai perasaan takut dan khawatir.

sekarang ini diberikan kepada mahasiswa, susah bagi mereka untuk melaksanakan KKN. Kasihan mahasiswanya," ujar Akip kepada BALAIRUNG. Hal senanda pun diutarakan oleh Lastaryo Wibisono, dosen pembimbing lapangan (DPL) KKNA di Kanigoro. "Saya *nggak* yakin mahasiswa bisa mengerjakan KKN karena mereka lebih banyak ke *monitoring*-nya," tegas dosen Fak. Ekonomi ini.

Selain itu, pada dataran konsep, program KKNA di PG Kanigoro juga tak cukup jelas. Mahasiswa tak mendapat gambaran sejak awal tentang apa yang harus dilakukan di lapangan. Ini diakui Masykur, Kepala P3KKN. Menurutnya, selama ini konsep UGM tentang KKNA memang belum jelas.

Kalaupun sekarang mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan, itu lebih karena mereka telah bertanya kepada Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, yang sebelumnya melakukan *monitoring* di PG Rejosari. "Kami menerima petunjuk pelaksanaan dari Unair ketika peserta sudah diberangkatkan, dan banyak istilah dalam penanaman tebu yang tidak mereka ketahui. Jadi, mahasiswa mungkin agak bingung," dalih Masykur.

KKNA di PG Kanigoro ini diikuti oleh 10 mahasiswa, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dalam tugas *monitoring*, setiap mahasiswa mendapat jatah sekitar 80--100 ha ladang tebu, yang terpencar di berbagai daerah bahkan sampai ke luar kota Madiun. Kenyataan ini, tentulah, membikin capek para peserta KKNA.

Di bidang finansial, program KKNA menyediakan uang saku sebesar Rp200.000/bulan bagi setiap mahasiswa. Namun, karena beberapa hal uang saku itu dinaikkan menjadi Rp250.000/bulan. Dana itu sudah termasuk biaya makan dan transportasi untuk melaksanakan KKNA selama 2 bulan.

Walau demikian, uang bukanlah motif para mahaasiswa mengikuti KKNA di PG Kanigoro. Darma, misalnya, mahasiswa Biologi '95 ini mengaku ikut KKNA karena kesesuaian objek KKNA dengan skripsinya, yang mengangkat tema tentang tebu. "Untuk mendukung data skripsi, biar cepat selesai kuliah," ungkapnya.

Lantas, apa yang membuat mereka bertahan di KKNA? Tampaknya, mereka membawa cita-cita luhur pengabdian kepada masyarakat, dan demi nama baik UGM pula. Alasan lain adalah soal nilai mata kuliah KKN yang bakal mereka terima.

Ada fenomena menarik yang dijumpai BALAIRUNG ketika meliput ke lokasi KKNA di Kanigoro ini. Perasaan takut dan khawatir yang berlebihan telah menghinggapi sebagian peserta KKNA. Ketika ditanya tentang "masalah-masalah" yang mereka hadapi selama menjalani KKNA, perbincangan akan mengalir santai dan menarik. Tapi, saat perbincangan mengarah pada kelemahan-kelemahan konsep KKNA, atau kebijakan-kebijakan P3KKN, mereka langsung tutup mulut, menarik diri, atau meminta namanya tak disebutkan dalam pemberitaan.

Alasannya sederhana. Mereka mengaku khawatir "kritik"-nya akan berpengaruh terhadap nilai KKN. Ini, jelas, risiko yang terlalu besar bagi mereka.

Bersamaan dengan KKNA di PG Kanigoro, KKNA di kawasan industri Cilegon, Jawa Barat, juga sedang berlangsung. Hanya bedanya, para peserta KKNA di Cilegon ialah mahasiswa program kuliah jarak jauh Fakultas Teknik UGM, yang semuanya pekerja pabrik Cilegon. "Mereka harus KKN karena akan mengakhiri masa studinya. Dikatakan alternatif sebab mereka berbeda dengan mahasiswa lainnya," tutur Drs. M. Mukhtasar, DPL di Cilegon.

Sedang dalam pelaksanaannya, mereka didukung sepenuhnya oleh perusahaan, dari masalah akomodasi, mendatangkan DPL, sampai realisasi program. Inilah pula yang membedakan KKNA di Kanigoro dengan KKNA di Cilegon.

Perbedaan lainnya yaitu masalah fasilitas. Mahasiswa KKNA di Cilegon fasilitasnya cukup baik, menempati mess di pabrik berikut fasilitas lainnya. Sedang mahasiswa KKNA di Kanigoro harus mengusahakan tempat tinggal sendiri. Sampai kini mereka sudah berpindah tempat sebanyak dua kali, bahkan mesti membersihkan sendiri rumah tempat menginap. Tentu saja semua itu menyita banyak waktu untuk KKNA.

"Dengan strategi alternatif, mahasiswa harus mencari jalan untuk melaksanakan program KKN-nya, walaupun kadarnya 50%:50%," ujar Lastaryo Wibisono. Sebenarnya, dari berbagai kenyataan di lapangan, KKN alternatif perlu banyak perubahan mendasar. Seperti ditandaskan oleh Masykur sendiri, "Setelah ini kami akan melakukan evaluasi dan merumuskan konsep baru, sehingga mahasiswa angkatan berikutnya tak akan kebingungan melaksanakan KKN," tegasnya. Ya, semoga.❐

Fajar Rizqi
Ajar Aedi, Fitria Agustina

Kapan KKN Harus Dihapus?



MUHAMMAD MUSTAFIED
Mantan Ketua PMII
Komisariat Gadjah Mada

Apa yang terlintas dalam benak kita begitu mendengar nama Universitas Gadjah Mada (UGM)? Ternyata, banyak hal. Satu di antaranya adalah mitos "kampus kerakyatan". UGM sering diidentikkan dengan kampus kerakyatan. Ungkapan ini tak seluruhnya salah, namun tak sepenuhnya benar. Benar, karena rahim sosial UGM telah melahirkan gerakan mahasiswa, yang menjadikan ketertindasan rakyat sebagai basis nilai gerakan dan refleksi. Salah, sebab secara kelembagaan peran UGM dalam transformasi sosial masih jauh dari ideal.

Ini pun masih terancam tereduksi lagi dengan proyek "otonomi kampus", yang implikasi praksisnya langsung terasa: naiknya biaya pendidikan. Itu artinya, institusi ini secara sistematis mereduksi hak-hak edukatif rakyat-miskin, yang inheren sebagai warga negara. Dalam skala makro, UGM ternyata tak mampu mengelak dari hegemoni developmentalisme: sebuah proyek kapitalisme yang berkepentingan mempertahankan status ketergantungan kaum miskin-kaum kaya, Dunia Ketiga-Dunia Pertama. Bila demikian halnya, di mana posisi tugas dan peran UGM sebagai penggerak transformasi sosial, sehingga layak mengklaim diri sebagai kampus kerakyatan?

Tulisan ini mencoba merefleksikan hal tersebut. Sebagai basis material, tulisan ini memokuskan pada obyek Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM yang, secara akademik, dipahami sebagai salah satu manifestasi "pengabdian kepada masyarakat". Konstruksi wacananya berbasiskan pengalaman penulis mengikuti KKN periode semester pendek 1998/1999, dan pembacaan terhadap konsep KKN, yang dikaitkan dengan dua hal: tugas transformasi sosial dan rencana "otonomi kampus"—atau komersialisasi pendidikan. Sebagai jendela fenomenologis, KKN akan dilihat dari dua sisi, yakni sisi konseptual dan sisi praktikal.

Konseptualisasi KKN

KKN secara normatif diposisikan sebagai salah satu pengejawantahan konsep pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu dari tiga serangkai konsep Tri Dharma PT. Dua yang lainnya ialah kegiatan pendidikan dan penelitian. Falsafah dasar pengabdian masyarakat, seperti ditulis A. Samik Wahab dalam *Buku Panduan KKN* (1998), adalah "pemindahan ilmu, sikap, dan keterampilan dari universitas ke masyarakat". Sedangkan tujuan dasar KKN, M. Masykur Rahmat (*Ibid.*) menguraikan ada tiga: (1) agar PT menghasilkan sarjana sebagai "penerus pembangunan", yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan, dan yang belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner; (2) untuk lebih mendekatkan Lembaga PT pada masyarakat dan lebih menyesuaikan PT kepada "tuntutan pembangunan"; dan (3) mengembangkan kerja sama antardisiplin ilmu. Sedangkan sasaran KKN diarahkan pada tiga sasaran: mahasiswa sebagai calon penerus pembangunan, universitas sebagai tempat mahasiswa belajar, serta masyarakat yang dibantu oleh para mahasiswa.

Tulisan ini, selanjutnya, hendak mengevaluasi KKN, dengan pemfokusan pada "sasaran untuk mahasiswa dan masyarakat". Secara teoritis, tujuan KKN yang diarahkan pada mahasiswa bertujuan, antara lain, untuk (a) memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara berpikir dan bekerja interdisipliner, kegunaan pendidikannya bagi pembangunan, mengetahui kesulitan masyarakat desa dalam pembangunan dan konteks keseluruhan masalah pembangunan pengembangan daerah pedesaan; (b) mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis-ilmiah; (c) memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan desa; (d) membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan *problem solver*; serta (e) memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai "kader pembangunan".

Sedangkan bagi masyakarat, sasaran itu dirumuskan sebagai berikut: (a) memperoleh bantuan dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan "proyek pembangunan"; (b) cara berpikir, bersikap, dan bertindak akan lebih ditingkatkan sehingga sesuai dengan "program pembangunan"; (c) memperoleh pembaharuan-pembaharuan; dan (d) terbentuknya "kader-kader pembangunan" dalam masyarakat, sehingga terjamin terbentuknya penerus-penerus pembangunan.

Praktik KKN

Pelaksanaan KKN memerlukan waktu minimal dua bulan.



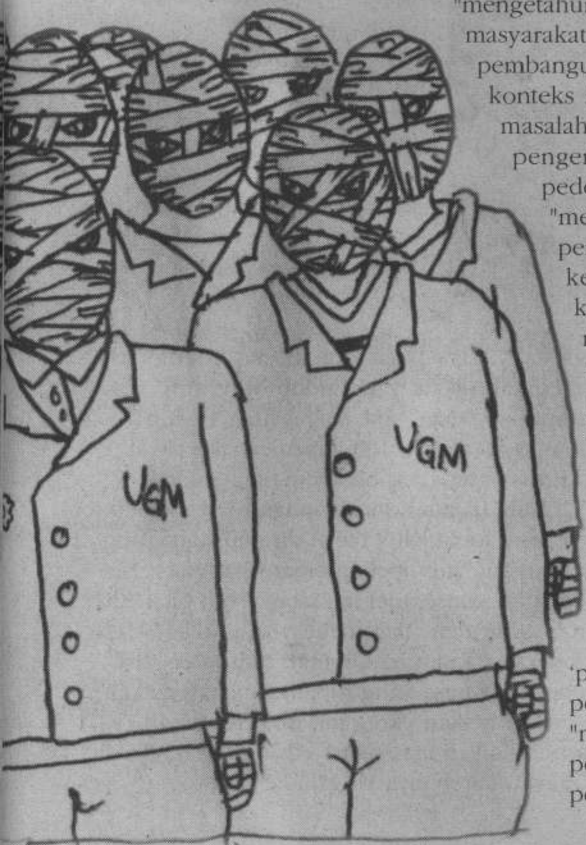
Pada minggu pertama, tugas mahasiswa adalah melakukan observasi lapangan sebagai dasar dalam menentukan program. Dalam observasi ini mahasiswa diharuskan mengidentifikasi seluruh permasalahan yang ada, untuk kemudian diseleksi berdasarkan analisis SWOT guna perumusan program individual.

Pada tahap selanjutnya, yakni minggu ke-2 hingga ke-7, mahasiswa melaksanakan program kerjanya. Pelaksanaan program kerja ini dimungkinkan untuk diubah atau ditambah, oleh karena perkembangan situasi dan kondisi yang barangkali belum ter-*cover* pada perumusan masalah dan pemilihan program. Program kerja yang digarap meliputi empat wilayah besar: prasarana fisik, sosial-budaya, kesehatan masyarakat, dan peningkatan produksi. Pluralitas wilayah kerja inilah yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk merancang programnya secara interdisipliner. Tahap terakhir, yakni minggu ke-8, merupakan masa penghentian seluruh kegiatan mahasiswa dan diisi dengan penulisan laporan kerja hingga penarikan.

Demikianlah selintas konsep dan praktik KKN-UGM. Sebagaimana diketahui, beberapa universitas, seperti UI, ITB, IPB, dan terakhir UNS, menghentikan program ini dengan alasan masing-masing. UGM sebagai konseptor dan pencetus gagasan itu hingga kini masih tetap melaksanakannya.

KKN dan Ideologi Developmentalisme

Begitu membaca konsep KKN di atas, siapapun akan dengan segera menghirup bau menyengat atmosfer developmentalisme. Bertebaran kata-kata pembangunan yang bertendensi ideologis-developomentalistik, tanpa mengindikasikan suatu sikap kritis. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini: "...agar Lembaga PT menghasilkan sarjana sebagai 'penerus pembangunan', yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan, dan lebih menyesuaikan P T kepada 'tuntutan pembangunan'"; "mengetahui kesulitan masyarakat desa dalam pembangunan dan konteks keseluruhan masalah pembangunan pengembangan pedesaan"; "memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai 'kader pembangunan'"; "agar cara berpikir, bersikap, dan bertindak akan lebih ditingkatkan dan sesuai dengan 'program pembangunan'"; "memperoleh pembaharuan-pembaharuan"; "terbentuknya 'kader-kader pembangunan'..."; dst.



Mulai dari falsafah, asas, tujuan, sasaran, hingga praksis KKN dikonseptualisasikan berdasarkan paradigma developmentalisme. Seluruh konsep di atas dibangun atas dasar asumsi-asumsi wacana developmentalistik, yang melihat masyarakat dengan kaca mata teori pembangunan (modernisasi). Dalam teori tersebut diandaikan setiap masyarakat akan mengikuti proses sebagaimana dialami negara-negara modern. Salah satu rujukan teoritis konsep itu ialah W.W. Rostow, dengan teori lima tahap perkembangan masyarakat. Menurutnya, proses pembangunan berjalan sesuai tahap-tahap pertumbuhan sebagaimana negara modern mengalaminya. Mansour Fakih (1996: 70) menulis bahwa pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju "modernitas". Modernitas ini tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi, seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju.

Target atau sasaran yang hendak dicapai KKN, seperti meningkatkan cara berpikir, bersikap, bertindak agar sesuai dengan program pembangunan atau agar terjadi pembaharuan-pembaharuan, sebangun dengan paradigma modernisasi. *Encyclopaedia of The Social Sciences* (1968), seperti dikutip Mansour Fakih (1996: 72), merumuskan "modernisasi yang sebangun dengan pembangunan" meliputi:

> ...sekularisasi; komersialisasi; industrialisasi; peningkatan standar hidup materi; penyebaran melek huruf; pendidikan, media massa, persatuan nasioanal; dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi.

Model pembangunan seperti ini memposisikan masyarakat sebagai obyek yang harus dibina, dididik, "dinalarkan". Ini sama persis dalam KKN. Keterlibatan masyarakat yang paling intens cuma pada observasi. Ini pun minimalis sebab, dalam proses dialog tersebut, tak dimungkinkan mahasiswa menyelami persoalan rakyat secara intim—dan membahasakannya dalam bahasa rakyat. Pencarian data melalui wawancara dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat secara umum, sehingga tak teridentifikasi struktur ketertindasan masyarakat. Proses hegemoni dan dominasi antara kelas-kelas sosial masyarakat, penguasa, kaum borjuasi, tidak tersketsakan. Misalnya, simpul hegemoni dan domestikasi terhadap kelas buruh atau petani, yang hampir pasti ada dalam setiap tempat KKN, tidak ter-*cover*. Yang muncul ke permukaan justru masalah-masalah pembangunan fisik kampung atau dusun, seperti plangisasi, pengerasan jalan, atau neonisasi.

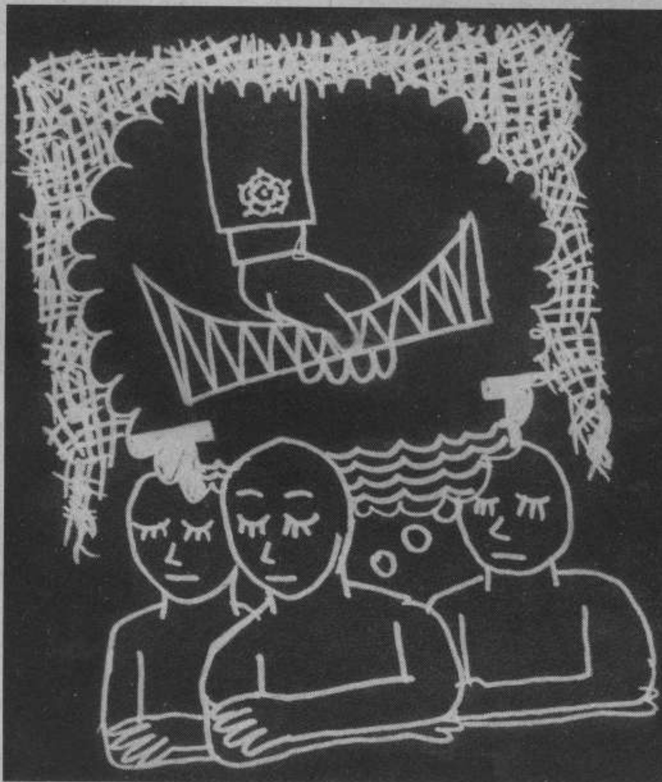
Dengan demikian, terang sudah bahwa KKN menggunakan paradigma developmentalisme. Tafsir sosial yang dipakai KKN ialah tafsir sosial developmentalistik. Karena memakai wacana tersebut maka KKN tak pernah, atau hampir mustahil, kritis terhadap konsep pembangunan. Wacana di atas menjadikan KKN tak mampu melihat bahwa pembangunan itu sendiri sebagai suatu permasalahan mendasar yang inheren. Akan tetapi, tafsir sosial KKN justru melihat permasalahan pembangunan lebih disebabkan masyarakat yang dianggap kurang terdidik. Maka, dapat ditebak: KKN sibuk dengan upaya mengubah nalar masyarakat yang, konon, "tak-nalar". Yang nalar hanyalah yang rasional-empiristik (terukur, teraba, terindra) sebab di sanalah terkandung kebenaran. Karena apa yang didekati oleh KKN pada dasarnya merupakan pinggiran-pinggiran atau ekses dari pembangunan, maka KKN tak pernah berhasil menembus hakikat persoalan sosial yang digumuli masyarakat.

Realitas tersebut menghadirkan suatu persoalan yang

menggelisahkan, oleh karena KKN tak mempersoalkan mengapa terjadi realitas seperti ini: ada sebagian masyarakat yang sudah memasuki tahapan industrialis berikut segenap ekses ekonomi dan politiknya, dan sekaligus terdapat—bahkan sebagian besar—masyarakat yang masih hidup dalam lilitan kemiskinan dengan segala ketertindasan yang dialami.

Wacana developmentalis di atas, selain menghegemoni diskursus tugas pendidikan, juga berimplikasi serius pada dataran praksis. Dalam merumuskan programnya, KKN tidaklah berangkat dari realitas ketertindasan dan keterpinggiran masyarakat *grass root*. Penyusunan program kerja juga tak didasarkan pada hakikat terdalam persoalan sosial. Pembangunan dianggap sebagai sesuatu yang benar dan tak teragukan. Dus, musuh utama pembangunan adalah nalar masyarakat, yang dianggap masih primitif dan tak rasional—sehingga perlu diubah.

Akan tetapi, tanpa mengandaikan terpahaminya struktur relasi kuasa, KKN langsung disusun berdasarkan observasi lapangan. Observasi ini dilakukan lewat wawancara dengan anggota masyarakat dan perangkat pemerintahan. Observasi diharapkan pula mampu mengindentifikasi persoalan-persoalan pokok masyarakat, kemudian dengan "ambisius" hendak diselesaikan persoalan tersebut. Oleh karena tidak memandang pembangunan sebagai bagian dari persoalan—dan tak memakai perspektif kritis—maka program-program kerjanya berada di luar lintasan (*track*) persoalan sosial sebenarnya, yang tengah digumuli oleh masyarakat. Perhatikanlah daftar program kerja berikut ini: plangisasi, pengecatan gapura/pos ronda, pembangunan jalan, penyuluhan-penyuluhan, neonisasi, pasar murah, pembinaan PKK, dll. Pendek kata, keempat wilayah bidang kerja boleh dikatakan hampir semuanya program-program "karikatural", gagal menggerakkan transformasi sosial masyarakat.



(Catatan: sebagian program sebenarnya lumayan konstruktif, seperti pembangunan jalan, penyuluhan ekonomi kecil, pembinaan kepemudaan. Namun sayang, program itu berjalan tanpa disertai proses penyadaran tentang hak-hak sipil dan politik warga negara, suntikan ide-ide dan gagasan progresif yang dapat terus berdialektika di masyarakat sekalipun telah ditarik. Jadinya, pembangunan jalan atau peningkatan ekonomi, misalnya, seolah-olah hanya bersentuhan dengan kewajiban masyarakat, yang tak berkaitan apa-apa dengan struktur kuasa dan kapitalisme. Tak terjadi transformasi kesadaran bahwa akses ekonomi, politik, atau informasi merupakan hak inheren sebagai warga negara. Hubungan penguasa dan rakyat tetap dipahami dengan logika tuan-hamba, dan bukan sebaliknya. Atau pembinaan kepemudaan—PKK, karang taruna—hanya pada persoalan administratif. Tak terjadi transformasi kesadaran historis generasi muda bahwa merekalah minoritas kreatif yang mampu menggerakkan perubahan. Pengalaman penulis menunjukkan hal itu. Ketika hendak dilaksanakan program *civic education* bagi generasi muda sempat dipertanyakan oleh DPL, dan juga aparat pemerintah).

Implikasi sosial dari semua itu adalah KKN—disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung—justru terjebak dalam lingkaran hegemoni developmentalisme, dan ikut berperan dalam pelestarian struktur ketertindasan masyarakat. Escobar (1990: 7, dalam Mansour Fakih, 1996: 74) menggambarkan proses hegemoni penyebarserapan diskursus developmentalisme ini melalui:

> ...penciptaan jaringan kerja kelembagaan luas (dari organisasi internasional dan universitas hingga pelaku pembangunan tingkat lokal).... Sekali dikonsolidasikan, sistem ini menentukan apa yang dapat dikatakan, dipikirkan, dibayangkan; singkatnya, sistem itu mendefisnisikan bidang perseptual ruang pembangunan.

Mengapa? Sebab KKN tak memberikan penyadaran atau perspektif pada rakyat tentang terjadinya realitas kontras borjuis-proletar. KKN justru meninabobokkan rakyat dengan mencekoki bahwa semua ini dikarenakan nalar dan sikap mental rakyatlah yang kurang sesuai dengan pembangunan, yang menyebabkan mereka tertinggal. Maka, terapi yang diambil ialah mengubah nalar dan sikap mental rakyat agar kondusif bagi proyek modernisasi.

Catatan Akhir

Survei singkat di atas menyimpulkan bahwa konsep dan praktik KKN layak ditinjau ulang apabila diletakkan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Bila tidak, maka pengabdian pada masyarakat, sebuah kesadaran nan tulus, justru menjadi instrumen kapitalisme dalam menghegemoni dan menumpulkan sikap kritis masyarakat.

Dengan melihat *setting* sosial masyarakat Indonesia, yang sebagian besar masih tertindas (angka resmi pemerintah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 49,3 juta, sedangkan angka yang beredar di LSM konon mencapai 100 jutaan), maka UGM memikul tugas historis yang amat besar: menggerakkan transformasi sosial. Nah, dalam konteks inilah KKN memiliki nilai strategis, dengan catatan KKN mesti dirumuskan ulang dalam paradigma transformatif-liberatif-emansipatoris.

Tanpa pembongkaran konseptual ini, akan lebih baik KKN dibubarkan—dan dengan demikian menegaskan keberadaan kampus sebagai operator kaum neo-liberal. Atau, dengan melihat jutaan generasi bangsa yang dipaksa meninggalkan bangku sekolah karena belitan ekonomi, masih tegakah UGM menaikkan biaya pendidikan atas nama efisiensi, efektifitas? "UGM membela rakyat, karenanya UGM ada!" ❐

Mahasiswa dan Penguasa



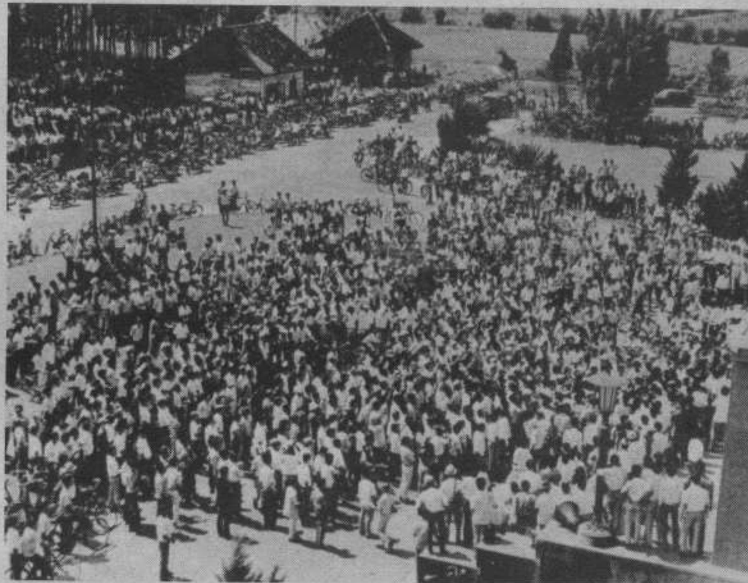
Presiden Soekarno hadir pada acara Dies Natalis UGM pertama. Kala itu Kampus UGM masih di Sitihinggil Keraton Yogyakarta. (Moelyono/Dok. *Bulaksumur*)

Keduanya bisa intim, seringkali berjarak.
Bersitegang, bahkan saling merenggutkan.
Melalui lintasan sejarah,
UGM mencatatnya.
Mesra, lalu curiga, saling menelikung,
dan akhirnya satu sama lain meniadakan.
Dengan berulang, begitulah di setiap orde.



Bulan madu dimulai tahun lima satu.
Soekarno tak melewatkan UGM
tiap tanggal 19 Desember.
Doctor Honoris Causa digenggamnya.

Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Ir. Soekarno, 1951. (Moelyono/Dok. *Bulaksumur*)



Demo Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia UGM menentang PKI tahun 1966. (Moelyono/Dok. *Bulaksumur*)

Namun, gemuruh aksi KAMI
menghentikannya dengan paksa.
Saat ia menjadi seorang *despotis*,
di tembok-tembok kampus,
momen itu diguratkan.



Sedikit coretan anti-PKI dan Anti kekuasaan Orla di UGM (ketika itu masih di Pagelaran Keraton Yogyakarta) tahun 1966. (Moelyono/Dok. *Bulaksumur*)



Soeharto saat menghadiri pameran Geofisika di UGM, Desember 1974. Pada Dies tahun itu, ia mengajak sivitas akademika UGM untuk menggali teori ilmiah tentang P4, salah satu upaya mengukuhkan kekuasaannya. (Humas UGM/Dok. *Bulaksumur*)

Pun, tak jauh beda
dengan pasca enam lima.
Sorak-sorai kemenangan atas orde lama membahana.
Penguasa lahir dari peluh—juga lalai—mahasiswa.
Keduanya menjadi akrab dan tertawa.

Ketika penguasa melenceng
dari garis asali.
Ketika NKK/BKK membekap mahasiswa
di menara gading.
Menjauhkannya dari remah-remah
problematika sekeliling...



Demonstrasi pertama setelah NKK/BKK di Gelanggang Mahasiswa UGM, 1987
(M. Thoriq/Dok. *Bulaksumur*)



Protes mahasiswa UGM atas penyerbuan massa Golkar–partai berkuasa–ke Kampus UGM, saat kampanye Pemilu 1992.
(Kelik Supriyanto/BALAIRUNG)



Demonstrasi dan bentrok menentang kekuasaan Soeharto, 2 April 1998.
(Bambang Pamungkas/BALAIRUNG)

Mahasiswa meniti jalan kembali.
Hulu perlawanan mulai diledakkan.
Selebaran, merunduk di bawah tanah,
lalu aksi.
Perubahan adalah kata
yang terus dilesakkan.

Tulikah penguasa? Butakah mata mereka?
Menjadi korup dan tiran. Mungkin!
Tak ada jalan lain.
Ketidakadilan, penghianatan, kemunafikan
menunggu dienyahkan.
Dan hanya satu kata: Lawan!
Seperti gemuruh Mei '98.
Mengalir, heroik.
Entah sampai kapan....

Narasi: Darmanto



Pembakaran patung Presiden Soeharto
di depan Gedung Pusat UGM, 11 Maret 1998.
(Bambang Pamungkas/BALAIRUNG)

Requiem

Enam Desember 1790. Udara begitu dingin, serasa membekukan aliran darah. Sore itu, cakrawala perlahan telah menebarkan selimut hitamnya di atas hamparan salju yang kian menebal. Seolah-olah ia hendak membumihanguskan seluruh impian peradaban. Dan, sebuah potret kelam di mana samudra kepedihan, kemalangan, dan rasa sakit seorang anak manusia baru saja diakhiri lewat sebuah teriakan kematian. Keranda jenazah pun diarak. Namun, tiada pula orang-orang merasa berkewajiban buat mengantarkannya ke liang lahat, kecuali hanya segelintir di tengah udara Wina yang busuk. Mozart adalah sebuah nostalgia yang telah lama mati, tapi naluri estetisnya tak pernah mati. Ia berbicara kepada kita lewat simbol dendang kematiannya yang indah untuk kita.

Hai manusia, dengarkanlah requiem ini bersama para pemain ensemble dari kegelapan. Live!!!.... Sambutlah denting kematianmu sekarang juga. Apakah kalian termasuk orang-orang yang mati setelah diperkosa dan disiksa ketika terjadi amuk massa? Apakah Anda telah melampaui detak-detik menegangkan di sebuah ruang interogasi itu? Bagaimana akhir ceritanya—ditembak, digorok, bagian mana dari tubuhmu yang dipotong? Ataukah "sekadar" siksaan-siksaan kecil, dicambuk dengan rantai sepeda onthel milik sipir? Ataukah tengkukmu disulut puntung rokok milik Sersan, yang tinggal seperempatnya, akibat selalu bungkam dan melanggar prosedur? Barangkali tanganmu disilet hingga darahmu menetes, atau disetrum dengan tegangan rendah di bagian tubuhmu yang sensitif hingga menggelinjang dan berteriak menahan sakit.

Ketika tubuh ini sudah kelelahan, kamu akan terbiasa dengan semuanya itu. Yang ada di depan matamu—bagus juga jika kamu sadar, tetapi rata-rata akan menjawab tidak!—mungkin seperti ilustrasinya Camus: akan mengalami suatu perceraian antara manusia dan hidupnya, antara sang aktor dan pentasnya. Hasrat akan ketiadaan perlahan kian menggerogoti kepalamu, dan tampaknya ada dua saja pemecahan filosofis di sini: "bertahan" atau "tidak".

Itulah perasaan absurditas yang sesungguhnya. Bagaimana tidak. Seseorang yang mencoba bertahan dari siksaan, sepertinya, masih memiliki keyakinan ontologis: hidup dan kemanusiaan masih bermakna. Tapi, lihatlah, juga bahwa mereka yang meyakini "tidak" bertindak seakan-akan mereka juga meyakini "ya" akan makna hidup tadi. Apakah tak usah dipikirkan dulu cerita-cerita tragis itu, sebab toh sebagian dari kita tak mengalaminya? Tunggu dulu!

Sepanjang perjalanan sejarahnya, sebagian manusia selalu ingin membuka tabir ekses-ekses yang menghancurkan keselarasan kemanusiaan. Manusia, menurut golongan ini, dipandang memiliki dorongan untuk menyebabkan ketakseimbangan dalam masyarakat—akibat ketamakan, ambisi, kebodohan, atau kejahatan. Ini menandakan, manusia masih ada "harga"-nya, atau setidaknya kehidupan itu sendiri bernilai.



Tak salah bila mereka pun lalu berontak dan lahirlah para pemberontak dari golongan mereka. Sang pemberontak tak punya rencana, tak punya program, selain memantapkan integritas dirinya semata—mungkin itu pendapat Fowler. Mereka sekadar mencari keseimbangan, dan berusaha kembali menemukan ke-"diri"-annya. Berbeda dengan sang revolusioner, yang dilaksanakan menurut rencana dan program, dengan cita-cita untuk merobohkan tatanan yang sudah ada serta menggantinya dengan yang baru. Memang, setiap perjuangan kemanusiaan akan selalu bercerita tentang inspirasi dan tragedi.

Lantas, apakah yang menandai zaman sekarang? Seperti biasa, pemberontakan meletus di mana-mana. Sampai detik ini Ambon menjerit. Suara dari Aceh menggelegar minta referendum. Timor Leste bingung mengurusi pengungsi, wabah penyakit, dan huru-hara antara kaum milisi melawan Interfet. Penduduk sipil terbantai. Sudah berapa banyak bangkai manusia ditanam di sana?

Telah lama kemunculan hantu-hantu yang mengatasnamakan kemanusiaan, demi rakyat dan tegaknya demokrasi, demi keadilan, demi persatuan dan kesatuan, bahkan demi kejujuran, selalu mengusik telinga kita—akibat ambisi-ambisi kuasanya. Setelah kerusuhan, ada hantu bernama TGPF, Komnas HAM, dan LSM-LSM yang berlindung di balik topeng ideologi kemanusiaan. Setelah pemerkosaan, ada tim relawan, organisasi-organisasi solidaritas dengan cita-cita "mulia" demi keselamatan para korban. Tak kalah bengisnya, semenjak otoritarianisme Orba, muncul pula hantu yang bernama partai dengan segudang utopia—memaksakan secara halus suatu ideologi kepada orang lain sebagai paham yang wajib.

Mungkin, mereka yang merasa sebagai "rakyat" selama ini tertipu jika menganggap ketertiban dan keadilan merupakan ciptaan dan pekerjaan hukum serta lembaga-lembaga kekuasaan di atas itu. Tatanan "agung" itu cuma penampilan luarnya, sedang di baliknya manusia kisruh berjuang untuk saling menaklukkan dan menyakiti, berusaha mengambil laba dari sesama. Keadilan dan kemanusiaan palsu dibilang "benar" oleh orang-orang yang mampu mendominasi sesamanya, sambil menjadikan hukum sebagai alat pemuas kepentingan-kepentingannya. Pierre Joseph Proudhon pun berteriak, "Pemerintah adalah anarki!" Atau Anda sendiri berteriak begitu, boleh-boleh saja. Awas, kita pun akan dicap anarkis oleh penguasa.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pahlawan kemanusiaan sepanjang zaman—Socrates, para penentang Abad Gelap, Kant, Marx, Schopenhauer, Habermas, Buddha, Gandhi, Bunda Theresa, Sartre, Camus, Freire, dll.—dalam perjuangan yang tiada henti untuk meraih kembali kemanusiaan yang terampas. Tulisan sederhana ini bukan hendak mengajukan nalar pesimis. Ia sekedar banyolan skeptis.

Setelah memproklamasikan kematian Tuhan dalam Kitab Zarathustra, dan kebangkitan manusia super oleh Nietzsche, kini giliran manusia dinyatakan mati! Mengapa orang selalu ingin merasakan kebebasan, sedangkan hidup ini penuh penderitaan? Tak ada musik yang lebih sempurna selain kematian manusia. Dan setiap orang telah membawa nyanyian itu di dalam jasadnya masing-masing, bersama bencana alam, bersama wabah penyakit, bersama peperangan, bersama kelaparan, bersama sang eksekutor, bahkan bersama kegilaan...

Bersiaplah...sebentar lagi requiem itu datang untuk mengantarmu tidur lelap.❑

Yusuf Waluyo Jati

Jurusan Teknik Mesin

Mengapa Gondrong Dilarang?

Sudah Rapikah Anda? Apabila Anda: Berambut gondrong, memakai T-Shirt, memakai celana butut, memakai sandal dan belum rapi. Bagi semua mahasiswa yang masuk wilayah kampus jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Dipersilahkan Pulang!

Tulisan di atas tertempel di kaca depan Jurusan Teknik Mesin Fakutlas Teknik UGM. Tak ada dispensasi bagi siapa pun. Tapi, tidak pula ada hukuman buat pelanggarnya. Bila anda memuhi semua atau salah satu dari kriteria larangan itu, ada dua pilihan: sebaiknya anda pergi atau bersiap-siaplah untuk ditolak atau tidak dilayani, jika mengurus sesuatu.

Aturan "No Gondrong" adalah salah satu dari berbagai aturan kerapian di jurusan teknik mesin. Sebenarnya, ada banyak larangan lainnya, seperti larangan memakai T-Shirt, celana butut, sandal dan tidak rapi. Namun demikian, apa yang paling menggelitik beberapa mahasiswa teknik mesin untuk menggugat adalah persoalan larangan berambut gondrong. Secara umum, larangan-larangan tersebut, selain anti- gondrong, juga sama diterapkan di berbagai jurusan lain di Fakultas Teknik. Itulah sebabnya, aturan lain tak terlalu diributkan oleh mahasiswa Teknik Mesin, yang memang mayoritas kaum laki-laki.

Wajar jika kemudian muncul tradisi baru di Teknik Mesin. Hampir setiap tahun, khususnya ketika tahun akademi baru dimulai, muncul pertanyaan-pertanyaan bernada protes menggugat kebijaksanaan pelarangan berambut gondrong ini. Mereka biasanya adalah para mahasiswa angkatan baru, atau angkatan yang telah masuk setahun sebelumnya. Tapi, tak semua mahasiswa mempertanyakan, apalagi menolak, pelarangan rambut gondrong ini. Seperti ditandaskan Guritno, mahasiswa Teknik Mesin '97, di kalangan mahasiswa terdapat dua blok dalam menyikapi persoalan ini. Blok pertama setuju aturan, dan blok kedua tidak setuju aturan.

Untuk blok pertama, tak jelas apa yang dilakukan untuk tetap mempertahankan larangan gondrong ini. Dan memang lebih tepatnya bukan blok yang tak setuju larangan gondrong, tapi blok yang "cuek" terhadap persoalan ini. Kecenderungan besar angkatan-angkatan yang minimal telah dua tahun kuliah di Teknik Mesin adalah sikap *cuek*. Ini diungkapkan Eko, mahasiswa '93. "Kalau yang tua (angkatannya-*Red.*) sudah *nggak* peduli lagi. Kita inginnya kuliah cepat rampung, cepat lulus, dapat kerja," ujarnya.

Blok kedua agak berbeda, kubu yang tak setuju aturan gondrong. "Pemberontakan-pemberontakan" kecil sebenarnya telah mereka lakukan, meski secara personal. Satu-dua mahasiswa mencuri-curi kesempatan untuk mempertahankan ke-*gondrong*-annya. Sampai akhirnya pemberontakan itu semakin banyak, dan terakumulasi memunculkan istilah GPK *(Gondrong Pans Klub)*.

Menindaklanjuti besarnya kelompok yang tak setuju dengan larangan gondrong ini, beberapa mahasiswa terinspirasi untuk mengadakan jajak pendapat sederhana. Dengan mengambil momentum Pekan Ilmiah Kegiatan Mahasiswa (PIKM) 1999, program jajak pendapat ini dikoordinatori Gunawan, mahasiswa '98. Menurut Gunawan, kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui hanya pendapat mahasiswa baru yang masuk Teknik Mesin tahun 1999.

Maka, 100 angket pun disebar. Isinya, secara garis besar, adalah pertanyaan tentang relevan-tidaknya aturan larangan gondrong diberlakukan di Teknik Mesin. Hasil jajak pendapat kemudian menunjukkan, dari 100 angket yang disebar, 88 angket kembali. Yang setuju aturan ini ditinjau kembali sebanyak 54 orang, dan 34 orang menolak atau

FAJAR RIZQI N.



Prasasti Keramat. Kerapian adalah segala-galanya.

abstain.

Selanjutnya, dengan maksud menempuh *legal action*, hasil jajak pendapat ini diajukan kepada Keluarga Mahasiswa Teknik Mesin (KMTM), disertai harapan besar agar KMTM mau meneruskannya kepada pihak jurusan. Tentu saja KMTM menerimanya. "KMTM berusaha menampung karena merasa yang ingin berambut gondrong juga banyak. Aspirasi ini kami teruskan ke jurusan," ucap M. Nashihuddin, wakil ketua KMTM.

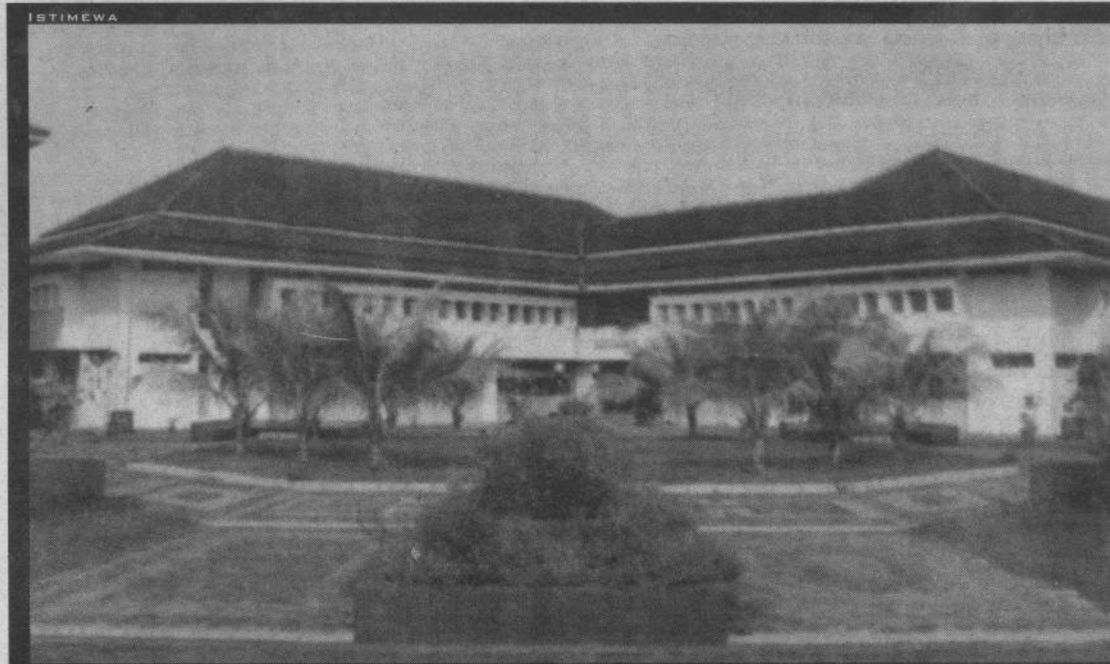
Memang, harapan agar keinginan ini diperjuangkan, selama ini, terus ditumpukan kepada KMTM selaku organisasi resmi wadah aspirasi dan aktivitas mahasiswa. Pada setiap Kampanye Pemilihan Ketua KMTM, misalnya, tuntutan ini tak bosan-bosannya mencuat, hingga akhirnya tahun ini jajak pendapat muncul.

Menanggapi hasil jajak pendapat itu, reaksi pihak jurusan ternyata sangat mengecewakan bagi KMTM dan mahasiswa pelaksana jajak pendapat. Langkah pertama yang ditempuh jurusan bukannya langsung menghubungi KMTM, melainkan dengan inisiator sekaligus koordinator jajak pendapat, Gunawan. Sebuah surat bernada peringatan keras melayang ke tangan Gunawan. Tak ketinggalan, sebuah surat lagi dikirimkan jurusan kepada orang tuanya di rumah.

"Angket itu tidak valid. Mereka langsung minta aturan itu dicabut tanpa jelas sejarahnya," komentar Ir. Jamasri, Ph.D., Pembantu Jurusan (PJ) II. Senada dengan itu, Dr. Ir. Suhanan, D.E.A., Pembantu Jurusan III, mengatakan, "Metode angket harus dipertanyakan. Hasil angket bukan suara seluruh mahasiswa Teknik Mesin. Seluruh mahasiswa berjumlah kurang lebih 200 orang, *kok* respondennya hanya 100 orang. Itu pun cuma sekitar 80 yang kembali," bantahnya.

Sementara itu, aturan "No Gondrong" tetap tak tergoyahkan. Jurusan hanya bisa berjanji akan merapatkannya dalam Rapat Pleno tanggal 11 Oktober 1999. Tetapi, hingga sekarang keputusan maupun tindak lanjut konkret belum terlihat. "Akan kami bicarakan kembali dalam Rapat Pleno bulan November ini," kata Jamasri lagi.

Melihat kondisi ini, tentu saja niat hendak mengungkapkannya kembali tercetus dari KMTM. Nashihuddin berjanji, "Akan kami angkat lagi dalam Sarasehan (antara mahasiswa dengan jurusan-*Red.*) bulan November." Dan karena mahasiswa angkatan '99 adalah responden terbesar angket, banyak kemudian yang mempertanyakan kelanjutan hasil jajak pendapat itu.


ISTIMEWA

Jurusan Teknik Mesin. Hampir setiap tahun penolakan kebijakan rambut gondrong itu diprotes

Aturan-aturan lain bukan saja masalah rambut. Kerapian penampilan pun juga diatur di Teknik Mesin. Batas-batas kerapian itu didefinisikan sebagai anti-gondrong, anti-kaus oblong, anti-celana butut, dan anti-sandal. Secara umum, larangan tersebut, selain anti- gondrong, juga sama diterapkan di berbagai jurusan lain di Fakultas Teknik. Itulah sebabnya, aturan lain tak terlalu diributkan oleh mahasiswa Teknik Mesin, yang memang mayoritas kaum laki-laki.

Apa yang mendorong pemberlakukan pelarangan rambut gondrong di Teknik Mesin?

Berdasar angket, terungkap beragam alasan yang menyertai persetujuan atas aturan pelarangan rambut gondrong ini. Mulai dari alasan agar kelihatan rapi, cermin pribadi yang baik, mengganggu studi, hingga alasan keselamatan. "Pada tahun 1980-an, pernah ada kejadian, ada yang gondrong ikut praktikum. Kemudian rambutnya masuk ke mesin bubut. Akibatnya, kulit kepalanya terkelupas meskipun korbannya selamat," kisah Eko.

Keselamatan memang ditempatkan sebagai alasan utama penerapan aturan ini. Seperti juga ditekankan Suhanan, "Untuk praktik kita banyak berhubungan dengan benda bergerak sehingga riskan. Ini demi keselamatan mahasiswa sendiri."

Alasan lain yaitu "masa depan" mahasiswa Teknik Mesin. Menurut Jamsari, bidang industri sebagai orientasi kerja lulusan Teknik Mesin menuntut kerapian agar mengesankan citra baik. "Kira-kira 4—5 tahun lalu, ada mahasiswa yang dipulangkan dari ASTRA gara-gara rambutnya gondrong," tutur Jamasri. Maka, agar kejadian ini tak terulang, jurusan berusaha membiasakan mahasiswa untuk tampil rapi dan tidak gondrong.

Namun, tentu saja alasan ini tak bisa diterima begitu saja oleh banyak mahasiswa. "Alasan itu terlalu dibuat-buat. *Toh* bisa diakali dengan dikucir. Kalau memang alasan *safety,* mengapa yang putri boleh?" kilah sumber BALAIRUNG yang tak mau disebut namanya. "Memang, waktu kerja nanti kita *nggak* akan gondrong. Tapi kalau kuliah, mengapa keinginan ini harus dilarang?" ujar Gunawan, mencoba sedikit kompromi dengan alasan tentang citra yang tampak dari penampilan.

Jika ada mahasiswa yang nekat melancarkan "perlawanan personal", sanksi yang akan menghadang bervariasi. Mulai dari sekadar teguran lisan hingga nilai tak dikeluarkan. Apalagi bila masih nekat bergondrong-ria saat ujian berlangsung, seketika itu juga mahasiswa dikeluarkan dari ruang ujian. Boleh pilih: pulang atau potong rambut!

Upaya memperjuangkan "hak gondrong" ini, mulai dari perlawanan personal hingga langkah *legal action*—walau dengan jajak pendapat sederhana—melalui KMTM, tampaknya, tak mudah. Sampai kapan? Entahlah.

Masalahnya sederhana tapi pelik. Jika tekanan mahasiswa terhadap jurusan makin keras, para pelaku akan dihadapkan pada selembar kertas bermaterai, dengan tanda tangan yang pernah mereka bubuhkan sendiri pada awal kuliah. Surat pernyataan kesediaan menaati aturan kerapian dan tidak berambut gondrong, yang bermeterai Rp 2.000,- itu, adalah senjata ampuh jurusan.

"Jelas, ketika awal masuk Teknik Mesin kita mau menandatangani surat pernyataan itu sebab, bagaimanapun, kita butuh masuk dulu (diterima sebagai mahasiswa—*Red.*)," ujar Nashihuddin. Artinya, seberapa pun upaya yang dilakukan, mahasiswa tetap memiliki posisi tawar yang lemah di hadapan "hukum".

Kategori gondrong sendiri, jurusan—seperti diungkap Jamasri—memberi batasan: melebihi kerah baju, menutup telinga, dan/atau menutup mata. Dengan batasan ini, "akal-akalan" mahasiswa pun mendapat tempatnya. Rambut yang mulai memanjang ke belakang bisa disibakkan ke balik telinga. Meskipun, batas maksimal panjang yang boleh dipertahankan adalah sebelum kerah baju.

"Sebenarnya, yang perlu ditegaskan adalah definisi rambut gondrong sendiri," kembali Gunawan menekankan. Menurut mahasiswa berambut cukup rapi dan pendek ini, yang patut dipertanyakan adalah apakah mereka yang berambut agak panjang—semi gondrong, istilahnya— juga termasuk melanggar aturan, sementara rambut mereka tak sampai kerah dan tak menutup telinga—karena disibakkan. Selain, secara keseluruhan penampilan mereka tetap rapi.

Elliott Aronson, ahli psikologi, seperti dikutip Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. dalam *Psikologi Komunikasi* (1998), berdasar penelitiannya menyimpulkan, kita lebih terpengaruh oleh mereka yang penampilannya menarik daripada mereka yang secara fisik tak menarik. Dan selain secara spesifik terpesona oleh mereka, kita cenderung lebih menyukai mereka. Berdasar pendapat inikah aturan kerapian dan anti-gondrong masih dipertahankan di Teknik Mesin?

Jika ya, maka pendapat mereka yang ingin aturan ini ditinjau kembali—seperti karena larangan ini mengekang kreativitas, melanggar hak asasi manusia, hingga keinginan bebas mengekspresikan diri—patut dilupakan.

Tapi, jika tidak, maka pernyataan Wasis (20), seorang mahasiswa berambut gondrong yang akhirnya dipaksa potong rambut oleh seorang dosen, tidak bisa diabaikan begitu saja. "Aku sebetulnya sekarang *nggak* ingin gondrong. Tapi kalau aku ingin, kenapa mesti dilarang?" tandasnya. ❐

Fitria Agustina
Fajar Rizqi

Cerita Dari Kampus Biru

Malapetaka Ketidakberesan Intelijen

Semoga tidak terlupakan! Inilah sisi lain ekses demonstrasi mahasiswa di UGM yang menuntut reformasi (1998). Bahwa ketidakberesan kinerja intelijen telah memberikan kontribusi yang tidak kecil atas jatuhnya korban-korban kekerasan: tidak saja dari pihak mahasiswa, tapi juga dari pihak intel sendiri. Apa pasal?

Pengantar Redaksi

Pada 19 April 1999 lalu, tim investigasi BALAIRUNG berhasil meraih Juara II Lomba Investigasi Pers Mahasiswa se-Indonesia, yang diadakan Tabloid *Bulaksumur*. Juara III direbut tabloid *Suaka* IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Sedang juara I kosong *alias* tidak ada juaranya. Alasan panitia lomba, karena standar nilai yang dipakai untuk meraih Juara I—yang ditentukan dewan juri—tak dapat dipenuhi oleh para peserta lomba. Akibatnya, cuma ada Juara II dan III. Dan kewajiban bagi para juara ini ialah mempublikasikan laporan investigasinya di medianya masing-masing.

Hadirnya tulisan ini, sebenarnya, tak lepas dari kewajiban di atas. Tenggang waktu yang sangat jauh antara penulisan laporan investigasi ini dengan waktu pemuatannya, tentu saja, menuntut banyak perbaikan dan perubahan di sana-sini. Bagaimanapun, harus diakui bahwa *setting* dan aktualitas tulisan ini telah jauh berbeda dibanding ketika permasalahan intelijen masih sangat hangat di kalangan aktivis mahasiswa UGM (1998).

Oleh karena itu, apa yang terpenting bagi kami kemudian adalah pemaknaan bahwa tulisan ini hanyalah catatan kecil atas haru-biru perjalanan gerakan mahasiswa di UGM. Tentu saja masih banyak kekurangan. Dan terus terang, pada dasarnya, terlalu berat dan besar untuk menyebut tulisan ini sebagai sebuah "laporan investigasi". Itulah mengapa laporan investigasi ini diletakkan di rubrik Sisipan. Ini tentu saja setelah kami memahami apa itu jurnalisme investigasi dengan kenyataan dari tulisan ini.

Dikoordinatori oleh **Luqman Hakim Arifin**, tim ini terdiri dari **Bekti Dwi Andari**, **Dedy Sushandoyo**, **Veronika Kusuma**, dan **Ajar Aedi**. Selamat menikmati!□



DOK. BERNAS



Mimbar bebas digelar. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang. Pagi itu, Sabtu, 4 April 1998, halaman Balairung UGM penuh sesak oleh ribuan mahasiswa yang menuntut reformasi. "Hidup reformasi! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!" Satu per satu—dosen, mahasiswa, sampai penjual teh botol—maju menyampaikan orasinya.

Jarum jam menunjuk pukul 10.00 WIB lewat, ketika tiba-tiba ribuan orang, yang sedari tadi duduk manis, serentak berdiri dan mengarahkan pandangannya ke sayap timur Balairung. Suasana gaduh. Sebagian berlarian menuju ke arah keributan. Sebagian yang lain memilih diam di tempat. Gumam gelisah pun menerpa setiap kepala.

"Intel...intel...! Tangkap! Bunuh!" Berkali-kali teriakan itu terdengar di tengah kalut massa yang berlarian mengejar ke arah munculnya suara. Korlap (koordinator lapangan—*Red.*) pun tampil ke depan massa. "Tenang, tenang, kawan-kawan!" teriaknya berkali-kali dengan suara tegang. "Komando ada di depan, komando ada di depan." Lalu, terdengarlah *koor* dari massa, "Satu komando, satu tujuan! Satu komando, satu tujuan!"

Kepanikan tampak mereda, korlap berhasil menggendalikan massa. Tetapi, tidak demikian halnya dengan area timur Balairung. Jalan aspal di sebelah timur Balairung adalah saksi bisu kejadian hari itu: betapa massa amat kalut, beringas, ketika mengejar-ngejar orang yang diduga intel itu. "KTP, Mas! KTP-nya, tahan! Tahan! Jangan dilepaskan! Tangkap! Tangkap!" teriakan-teriakan itu terdengar bersahut-sahutan dari kerumunan massa.

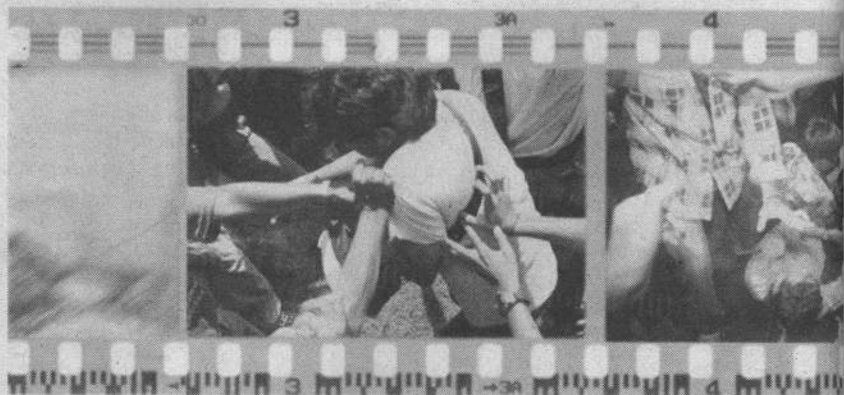
Yang dikejar pun tak kalah kalutnya. Sambil lari terpontang-panting, orang yang dituduh intel itu terus berlarian tanpa arah. Laki-laki itu berusaha mencari perlindungan dari petugas satpam yang kebetulan berada di sekitar perempatan Jalan Sosio Justisia (depan Fisipol).

Tapi sayang, massa adalah massa—mereka tak lagi dapat dicegah. Dan, ya ampun...mereka semakin tak terkendali. Laki-laki yang sudah terkepung itu ditangkap, dihajar, dipukuli, seperti melampiaskan amarah kepada durjana yang tertangkap basah. Dari kejauhan, yang terdengar hanya suara "bak-buk-bak-buk" di tengah kerumunan massa. Tubuhnya menjadi bulan-bulanan. Sebuah sebuah senjata genggam diamankan. Sedang *tape recorder* dan *handy-talkie* (HT) milik laki-laki malang itu hancur dibanting massa.

Untung ada Prof. Dr. Amien Rais, M.A. Kalau tidak, mungkin nyawa orang itu sudah melayang. Bapak Reformasi yang kebetulan melewati tempat peristiwa kejadian—usai mengikuti rapat dengan Rektor UGM waktu itu—dipaksa beberapa orang untuk menenangkan massa, dan tentu saja menyelematkan nyawa orang yang sudah diujung tanduk itu. Di atas kap mobil satpam, Amien berdiri dan menyerukan massa agar tak terbawa emosi atau bertindak main hakim sendiri. "Cukup, cukup! Kalian jangan terbawa emosi. Dia adalah anak manusia juga seperti kalian. Saya minta kejadian ini dihentikan," teriaknya berkali-kali, memecah keributan.

Sedikit demi sedikit massa mulai tenang. Massa tampaknya mematuhi imbauan Amien. Laki-laki yang sudah tak berdaya itu, akhirnya, dilarikan ke RS Sardjito dalam keadaan koma. Tragis!

Yuswohady, nama orang naas itu. Bukan pencopet, juga bukan provokator. Dia hanyalah abdi negara, petugas Intel Pengamanan Polisi (IPP) Polres Sleman, yang sedang menjalankan instruksi atasan. Dia sudah punya istri dan anak. Berkaos putih oblong, berbadan gempal dan berambut gondrong, tugas Yuswohady—seperti juga tugas-tugas intel lainya—adalah menyamar menjadi peserta sebuah aksi, mengawasi, mencari, mencatat, dan menyampaikan informasi-informasi penting kepada institusi keamanan negara yang menaunginya. Selanjutnya, bila perlu ia melakukan pengamanan atau penyergapan. Pangkat Yuswohady lumayan tinggi: Sersan Mayor Polisi. *Keren* memang, tapi tak punya arti apa-apa, ketika yang berbicara adalah amuk massa yang mengganas dan tidak terkendali.



Kronologi tertangkapnya Yuswohady (berpakaian putih).

Kedaulatan Rakyat, Bernas, dan *Yogya Post* yang melansir peristiwa ini menulis bahwa penyebab tertangkapnya Yuswohady adalah bunyi "tulalit" HT yang dia bawa. Itu berarti ada kemungkinan Yuswohady bersikap sembrono dengan memperlihatkan HT-nya. Namun, benarkah demikian?

John Priyadi, seorang aktivis Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), melihat bahwa kesimpulan itu terlalu menyederhanakan persoalan. Kepada BALAIRUNG John menyatakan, bunyi "tulalit" HT bukanlah penyebab utama terkuaknya identitas Yuswohady. Terbongkarnya identitas "intel" Yuswohady lebih karena *insting* dan pengalaman para aktivis mahasiswa UGM perihal intelijen. Mereka sudah cukup hapal, sekaligus jengkel dengan sosok-sosok intel di Kampus Biru ini.

Yuswohady adalah satu contoh. Masih banyak contoh lainnya. Persoalan intelijen bukanlah cerita baru dalam dinamika aktivitas mahasiswa UGM. Menurut Dr. Koentjoro, dosen Psikologi UGM, keberadaan para intel ataupun infoman di UGM sudah sejak lama. Namun demikian, tak ada kepastian sejak kapan intel diterjunkan ke Kampus Biru ini.

Masih pada hari yang sama, tampaknya, nasib yang menimpa Yuswohady belum membuat jera intel-intel lain yang beroperasi saat itu. Adalah Wahyudi korban penangkapan dan pemukulan massa selanjutnya. Intel yang bertugas di IPP Polres Sleman ini, sebenarnya, jauh lebih beruntung dibanding Yuswohady. Kalau Yuswohady harus opname di rumah sakit, maka Wahyudi "cukup" mendapatkan rawat ringan untuk luka-luka ditubuhnya. Hanya saja tentang modus operandi keduanya di lapangan, tidak jauh berbeda.

Menurut Andi, bukan nama sebenarnya, mahasiswa Arkeologi UGM yang mengaku menangkap Wahyudi, penangkapan itu berawal bukan saja karena sikap ingin tahu Wahyudi yang *over,* dan gerak-geriknya yang mencurigakan, tapi lebih karena Wahyudi sudah lama dicurigai sebagai intel oleh para aktivis mahasiswa. Wahyudi sering "terlihat" di antara aparat keamanan pada aksi tanggal 2 dan 3 April 1998. Inilah yang meyakinkan Andi, tentu saja bersama teman-temannya, untuk langsung menarik dan merangkul Wahyudi, lalu menginterogasinya.

Kala itu, Wahyudi sedang berusaha meminta fotokopian statemen aksi yang dibacakan ketua SM-UGM, Laode Ridaya Ngkowe. Saat diperiksa dompetnya, ditemukan berkas-berkas penting, seperti surat izin keluar markas, kartu anggota Polda/ ABRI, catatan-catatan seputar aksi 4 April 1998, nama pembuat patung Soeharto, nama anak ISI (Institut Seni Indonesia) yang membakar boneka Soeharto, data aktivis Timor Leste, para penggerak aksi, serta kronologinya. "Awal pengakuannya, *sih,* anak Sastra Jawa angkatan '97. Tapi setelah dipertemukan dengan anak dari jurusan yang sama, ternyata *nggak* ada yang kenal dia," jelas Andi.

Sebelumnya, pada aksi tanggal 5 Maret 1998, juga tejadi penangkapan intel yang menyamar menjadi wartawan dengan *handycam* di tangan. Neko Budi Handoyo, namanya, Sersan Dua Ditserse Polda DIY.

Menurut Kelik Supriyanto, mahasiswa yang menyaksikan peristiwa penangkapan Neko, apa yang dilakukan Neko sangat bodoh. Alasannya, meski aksi sudah selesai Neko masih saja merekam dari jarak yang sangat dekat satu per satu wajah *pentholan* aktivis pergerakan yang masih *ngumpul* di depan halaman Balairung. Tentu saja, itu membuat para aktivis curiga, lalu mengejarnya. Untungnya, berkat beberapa satpam yang menghalang-halangi kejaran mahasiswa, Neko akhirnya berhasil menyelamatkan diri di Gedung Perpustakaan Unit II.

Adakah peristiwa-peristiwa ini merupakan indikasi ketidakberesan kinerja intelijen? Ya, tentu saja. Dan terlepas bahwa kita bisa atau tidak bisa menerima segala tindak kekerasan yang menimpa para intel tersebut, peristiwa terbongkarnya identitas mereka sebagai intel, yang ujung-ujungnya adalah penangkapan dan penganiayaan, tentu saja mencuatkan keprihatinan sekaligus keheranan. Begitu mudahkah identitas seorang intel terbongkar?

Merujuk kepada tiga fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), apa yang dilakukan oleh ketiga intel tersebut sebenarnya masih pada dataran penyelidikan. Tapi, meski sekadar mencari informasi ketika aksi berlangsung, ketiganya ternyata gagal.

Boleh jadi mereka sedang sial. Namun, seringnya terdengar teriakan "intel...intel..!" dalam setiap aksi



FOTO: EKO/KR GRAFIS: DAVE

mahasiswa adalah bukti tak terbantahkan: kinerja intelijen di UGM tidak beres!

Ir. Bambang Kartika, Pembantu Rektor III, sampai-sampai mengandaikan dirinya menjadi intel. "Kalau saya jadi intel, saya akan jaga jarak, tidak perlu mendekat. Jadi, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ya sudah," tandasnya ketika ditemui BALAIRUNG.

Tingkah laku para intel di Kampus Biru memang sangat jauh dari yang diharapkan. Anda tak usah membayangkan sosok seorang James Bond 007 di UGM. Intel-intel yang beroperasi di sini justru terkesan "ingin diketahui". Lucu, memang. Mereka memakai HT, *handycam,* atau pistol *revolver* untuk dipamer-pamerkan. Apalagi, gerak-gerik mereka acapkali mencurigakan. Catat sana-sini dan rasa ingin tahu yang berlebihan (*over acting)* adalah kesan umum setiap aktivis mahasiswa terhadap para intel itu.

Kata kunci untuk memahami ketidakberesan intelijen adalah profesionalitas. Derek Manangka, wakil pemimpin redaksi *Realitas,* menandaskan hal ini. Menurutnya, masalah ketidakprofesionalan para intel telah menyebabkan kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah mudah terjadi (1998). Kesimpulan yang menarik.

Derek mungkin benar. Hanya saja, di Yogya, dan Kampus UGM khususnya, malapetaka ketidakberesan intelijen bukanlah melahirkan kerusuhan yang sifatnya massif, tapi justru memunculkan tindak-tindak kekerasan yang sifatnya parsial, banyak, dan terlupakan.

Entah sudah berapa banyak korban kekerasan intelijen di kampus ini. Jelas, bukan saja para intel yang menderita akibatnya, mahasiswalah yang paling dirugikan dengan ketidakprofesionalan intelijen ini. Polanya bisa bermacam-macam, mulai dari teror mental, seperti mengancam lewat telpon, membuntuti atau menekan orang tua mahasiswa, sampai perlakuan fisik, seperti penembakan, penculikan, bahkan penyiksaan dan pembunuhan. (Baca: "Mereka Berkorban, Mereka Jadi Korban").

Sayangnya, belum ada data yang jelas dan lengkap tentang persoalan kekerasan intelijen di Kampus Biru ini. BALAIRUNG mencoba mencari data-data kekerasan—yang secara khusus dilakukan aparat intelijen di kampus UGM—tidak mendapatkan hasil memuaskan. Bahkan, untuk lembaga sekelas LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta pun, data tentang hal ini kurang diperhatikan. Ketika berkunjung dan meminta data-data tentang korban-korban intelijen, BALAIRUNG cuma mememperoleh tumpukan kertas arsip yang tak teratur dan tak terawat. "Adanya cuma itu, Mas," ujar salah seorang petugas kantor LBH, ketika ditanya arsip-arsip lainnya.

Itu LBH, apalagi kelompok-kelompok pergerakan mahasiswa. Bisa dibilang, tak satu pun dari kelompok-kelompok mahasiswa yang ada di UGM, baik BEM-UGM, KPRP, HMI, DEMA, PMII, ataupun KAMMI, yang mendokumentasikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan intelijen. Akibatnya, beberapa kasus tentang kekerasan intelijen di Kampus Biru ini seperti menguap begitu saja. Usaha-usaha untuk sekadar membuktikan (bahwa mereka adalah intel yang melakukan tindak kekerasan) bukanlah hal gampang, apalagi untuk memejahijaukan para pelaku kekerasan itu ke pengadilan. Utopis, mungkin!

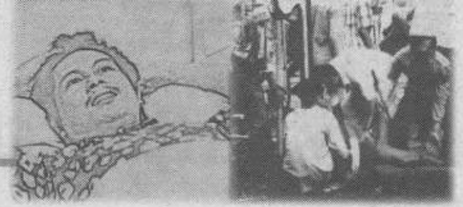
Sebabnya, para korban kekerasan intelijen sulit ditemui dan lebih suka tutup mulut. Kesulitan lain adalah kerancuan kategori antara mana yang termasuk kekerasan intelijen dan mana yang termasuk kekerasan aparat keamanan (militer). Para aktivis mahasiswa yang ditemui BALAIRUNG mengaku kesulitan untuk mengumpulkan bukti dan fakta khusus tentang kekerasan intelijen. Alasannya, karena peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan intelijen sifatnya insidental, tiba-tiba, cepat, kadang tak meninggalkan barang bukti sedikit pun.

Sayang, memang. Masih ingat Gati Handoko, mahasiswa Fakultas Sastra Jurusan Antropologi, yang ditembak oleh seseorang yang diduga keras intel? Siapakah penembak itu? Tidak jelas. Atau juga Triyono, mahasiswa UGM asal Ponorogo, pernah diculik. Siapakah penculiknya, bagaimanakah nasibnya sekarang? Juga tidak jelas.

Masih banyak korban kekerasan intelijen yang lain. Kepada siapakah mereka mesti menuntut keadilan? ❐

DOK. BERNAS





A. KURNIA EBD

Susahnya Menguak Jaringan Intelijen

Ibarat menelusuri jalan setapak yang bercecabang. Menguak jaringan intelijen di UGM, memang, bukan pekerjaan gampang. Ia masih sebuah teka-teki besar nan suram. Setiap jalan menawarkan berbagai macam kemungkinan. Dan setiap kemungkinan berkembang-biak, bercabang-cabang, dalam banyak jalan. Begitu seterusnya.

Bahwa jaringan intelijen di UGM itu memang ada tak perlu diragukan. Keterkaitan pelbagai variabel, antara peristiwa terkuaknya identitas para intel dalam aksi-aksi demonstrasi, penangkapan dan penginterogasian informan, sampai teror-teror intelijen yang diterima oleh banyak aktivis mahasiswa, sebetulnya, sudah cukup kuat untuk meyakinkan setiap orang soal itu. Para aktivis sendiri, ketika ditemui BALAIRUNG, tampak begitu yakin bahwa jaringan intelijen itu ada. Persoalannya hanya pada bagaimana membuktikan dan menjelaskan apa dan bagaimana keberadaan mereka. Itu saja. Dan memang, inilah sisi yang masih gelap.

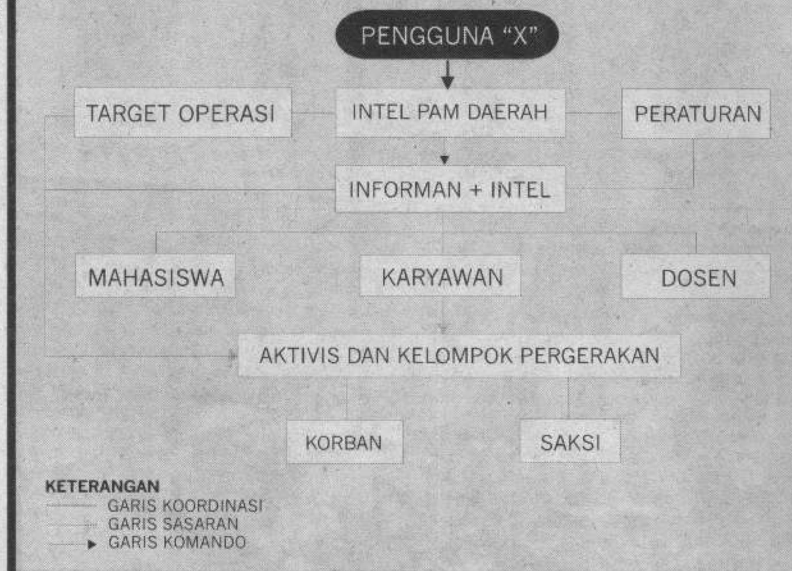
Beberapa usaha untuk membongkar bentuk dan kinerja jaringan intelijen di UGM memang sudah dilakukan. Tapi harus diakui, itu masih belum maksimal. Apa yang dilakukan John Priyadi, seorang aktivis Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), adalah satu contoh. Ketika aksi mogok makan mahasiswa Fakultas Filsafat berlangsung, John diletakkan sebagai sie keamanan. Bersama teman-temannya, John tidak saja menangkap dan menginterogasi seseorang (pedagang sayur) yang diduga kuat intel, tapi juga menekan, baik secara mental maupun fisik, agar pedagang sayur itu mengaku dan bercerita tentang jaringan intelijen.

Tapi nyatanya, cara itu pun belum berhasil. "Wajahnya, memang, tidak seperti mahasiswa. Namun ketika diperiksa identitasnya, ditemukan nomor-nomor telepon penting dan kartu ATM. *Masak,* pedagang sayur punya seperti itu!" ungkap John.

Sementara itu, Pedro, mahasiswa Sosiologi asal Timor Timur, juga mengaku pernah menginterogasi seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi, Herman namanya. Tidak jelas siapa sebenarnya Herman ini, angkatan berapa dan dari mana asal daerahnya. Tapi yang pasti, masih menurut Pedro, Herman adalah intel



GRAFIS: ABID



atau informan yang terlibat dalam rencana penembakan dirinya di kampus Fakultas Filsafat. Pedro tentu bukan tanpa bukti menuduh Hendi.

Orang lain yang sangat yakin tentang keterlibatan seseorang sebagai intel atau informan adalah Andi—bukan nama sebenarnya. Mahasiswa Arkeologi ini sangat meyakini bahwa Hendi, mahasiswa Sejarah, adalah seorang informan.

Bukti bahwa Hendi informan cukup banyak. Pertama, banyak data Senat Mahasiswa Sastra (1996) yang hilang. Andi tahu karena ia kebetulan bersama Hendi dalam Komisi I. Kedua, pernyataan mosi tidak percaya kepada Haris Rusli Moti (ketua Senat waktu itu, kini Haris menjadi ketua DPP PRD—*Red.*), dengan memalsu tanda tangan semua Kabid dan Sekum. Yang tidak dipalsu cuma tanda tanganya sendiri. Ketiga, pada aksi tanggal 28 Oktober 1996, hampir semua wajah yang ikut demo difotonya. Anehnya, dia sangat ngotot tak mau menyerahkan filmnya saat diminta oleh Haris Rusli.

Selain itu, Hendi dalam kesehariannya juga selalu membanggakan sosok militer pamannya, yang kebetulan menjadi Kasat Serse Polres Sleman, Yogyakarta. Hendi pun sering ikut aksi, tapi tak pernah sedari awal. Ia selalu bergabung di tengah-tengah perjalanan, selalu menguntit dan ingin tahu. Demikian alasan dan cerita Andi mengapa ia begitu yakin bahwa Hendi adalah informan.

Selanjutnya, karena jengkel, oleh para aktivis Kapala Sastra (Keluarga Mahasiswa Pencinta Alam Fak. Sastra—*Red.*) Hendi digebuki ramai-ramai sampai mengalami depresi dan masuk RS Puri Nirmala. Setelah itu, Hendi tak pernah lagi ikut rapat Senat, atau juga masuk ke komite. Peristiwa ini pun belum berhasil untuk membuat Hendi "berkicau" tentang bentuk dan jaringan intelijen di UGM.

Mengapa para aktivis begitu sulit membongkar jaringan intelijen di UGM? Kesulitan pertama ada pada persoalan data dan barang bukti tentang jaringan intelijen. Telah diketahui umum bahwa kasus-kasus teror intelijen pada para aktivis mahasiswa, biasanya, terjadi sangat cepat, tiba-tiba, dan personal sifatnya. Inilah yang menyebabkan data dan barang-barang bukti sangat jarang, kalaupun ada cuma serpihan-serpihan. Kesulitan kedua ialah pada peneloran jaringan. Sebabnya, bentuk "sistem sel" dipakai dalam jaringan intelijen di UGM. Pandangan ini disampaikan oleh Dr. Koentjoro, dosen Fakultas Psikologi UGM.

Apa yang dimaksud dengan "sistem sel" adalah sistem di mana persona-persona yang terlibat dalam kinerja jaringan intelijen tidak saling tahu. Misalnya, seperti dijelaskan oleh Dr. Koentjoro, jika X adalah seorang informan I, maka ia belum tentu akan mengenal Y yang informan II, meski keduanya sebenarnya berada dalam satu tim penugasan. Dan begitu seterusnya.

Itulah mengapa penangkapan seorang intel atau informan oleh para aktivis mahasiswa seperti tak banyak berarti, ketika dalam penginterogasian tak berhasil ditemukan sedikit pun informasi tentang keterkaitan antara berbagai variabel peristiwa dan orang yang ada. Adakah hubungan antara Herman dengan Hendi dalam proses kerja keintelijenan? Ini hanyalah satu contoh pertanyaan, yang sampai sekarang tetap merupakan tanda tanya besar bagi setiap aktivis mahasiswa.

Meski belum pernah berhasil mengguak jaringan intelijen, para aktivis tetap meyakini keberadaan jaringan intelijen di Kampus Biru ini. Pernyataan Letkol Pol. Drs. Bambang Waspada, mantan Kepala Direktorat Intelijen Pengamanan Polri (Kadit IPP) Polda DIY, setidaknya, merupakan pengakuan langsung yang kian menyakinkan para aktivis: jaringan spionase kampus itu sungguh-sungguh nyata! Kepada BALAIRUNG, Bambang Waspada yang ditemui di kantornya menandaskan bahwa mereka (kepolisian) dalam rangka mendapatkan sumber data telah membentuk sumber-sumber jaringan intelijen.

Masih menurut orang yang paling bertanggungjawab tentang persoalan intelijen ini, jaringan intelijen yang ada di Yogya ini, secara umum, terbagi menjadi dua: "jaringan dalam" dan "jaringan luar". Jaringan dalam beranggotakan aparat resmi intelijen dan juga seluruh anggota Polri DIY. Sedang jaringan luar diambil dari masyarakat luas, seperti mahasiswa biasa, mahasiswa tugas belajar, dosen, orang biasa, dan sanak kerabat aparat intelijen dan ABRI.

Konon, ketika rezim represif Orde Baru masih bercokol, satu informasi (dari seorang informan), berupa selebaran atau agenda aksi, bisa dihargai sampai Rp50.000. Benar-tidaknya masih belum jelas. Bambang sendiri, tampaknya, masih malu-malu untuk berterus terang tentang dunianya ini. "Tidak ada dana khusus. Jika hanya untuk "rokok", ya... itu 'kan untuk memudahkan pergaulan antara aparat intelijen dan informan," ujarnya. ❐

Letkol Pol. Drs. Bambang Waspada
Mantan Kepala Direktorat Intelijen Pengamanan Polri (Kadit IPP) Polda DIY

"Kami Membentuk Sumber-Sumber Jaringan Intelijen"

Kerja intelijen adalah kerja jaringan, struktural, dan sangat koordinatif. Fenomena ketidakberesan intelijen di Kampus UGM, yang memunculkan berbagai keheranan, tentulah menyisakan orang-orang penting di balik jaringan itu. Letkol Pol. Drs. Bambang Waspada adalah salah seorang yang dianggap bertanggung jawab terhadap operasi intelijen di Kampus UGM. Untuk mengorek lebih jauh soal ini, BALAIRUNG menemuinya di kantor Polda DIY, 30 Maret 1999. Kala itu Bambang masih menjabat sebagai Kadit IPP Polda DIY. Berikut petikannya:

Apa saja sebenarnya tugas intelijen?

Tugas intelijen secara umum adalah mendeteksi dan menyelidiki segala sesuatu sebelum kejadian, yaitu gangguan keamanan. Kemudian memperkirakan kejadian yang akan terjadi, menganalisa kemungkinan terburuk. Lalu, pas kejadiannya harus dicegah. Bukan menyerang kemudian mengamankan (membantu mengamankan/ menangkap target atau orang yang dicurigai, misalnya provokator).

Bagaimana hierarki intelijen di Polda DIY?

Ya...biasa. Ada pimpinan, pembantu-pembantu pimpinan, dan anak buah. Karena intelijen adalah aparat tertutup, maka struktur organisasinya tidak bisa saya omongkan di sini. Setiap anak buah mempunyai kewenangan kerja, dan dia harus melaporkan hasilnya kepada atasannya.

Berapa jumlah seluruhnya?

Menurut saya, "cukuplah" untuk mengatasi segala tugas dan kewajiban. Karena setiap anggota POLRI bisa menjadi intelijen, kalau dibutuhkan.

Bagaimana distribusinya?

Kelompok intelijen telah dibagi menjadi beberapa unit. Tiap unit terdiri dari 6 orang. Mereka harus bisa membaur dan mengawasi (setiap aksi), kemudian melaporkan. Personil akan ditambah berapa saja sesuai kebutuhan, bila jumlah massa bertambah besar.

Di Kampus UGM banyak terjadi aksi. Jadi berapa jumlah intelijen yang diturunkan?

Jumlah intelijen yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan, soalnya kerja intelijen adalah perorangan. Jadi, kewajiban orang-orang itu untuk memantau dan melaporkannya, apakah keadaan semakin lancar, aman, baik, ataukah buruk. Setiap aksi tidak dapat ditentukan dengan jumlah tertentu.

Dulu ada kejadian pengeroyokan intelijen oleh mahasiswa. Mengapa itu sampai terjadi? Apakah itu akibat kurang profesionalnya intelijen?

Sebenarnya, kalau dikatakan kurang profesional..., sebenarnya antara intelijen dengan mahasiswa tidak ada masalah, karena kita hanya bertugas mengawasi aman atau tidak. Kita tidak menyangka tiba-tiba mahasiswa menjadi beringas dan menyerang seperti itu. Mereka pasti sudah kenal dengan yang dikeroyok itu. Tapi kok muncul kebencian? Sebenarnya dia cuma mengawasi, kemudian koordinasi dengan purek III, pimpinan penyelengara, dsb. Dia di situ sebagai agen, kemudian melaporkan hasilnya kepada atasannya.

Bagaimana dengan intel yang dengan bangga menunjukkan *handy-talkie* (HT), padahal itu sangat membahayakan dirinya sendiri?

HT sebenarnya 'kan memang diberikan kepada masing-masing personil untuk berkomunikasi. Adapun cara penyimpanannya, jika HT itu tampak, atau berbunyi, sebenarnya itu di luar teknis! Yang jelas ya...dia harus punya alat untuk berkomunikasi, karena untuk memantau itu tadi.

Bagaimana persisnya kerja intelijen?

Kerja intelijen pada saat aksi ada tiga, yaitu sebelum aksi, pada saat aksi, dan sesudah aksi. Intelijen itu mesti begitu!

Maksudnya?

Pada saat sebelum aksi, kami harus bisa membaur dengan peserta aksi. Dan untuk mendapatkan kelengkapan data maka kami harus "membaur" dengan sumber terdekat suatu aksi, sehingga gerakan mereka bisa kami dengar dan ketahui.

Bagaimana cara mendapatkan sumber data untuk membantu kinerja intelijen, juga sistem perekrutannya?

Itu sumber jaringan namanya. Kami membentuk sumber-sumber jaringan intelijen. Jaringan itu bermacam-macam tingkatannya. Intelijen kami terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan luar dan jaringan dalam. Jaringan dalam anggotanya jelas intelijen itu sendiri dan juga seluruh anggota polri DIY. Sedangkan anggota jaringan luar adalah masyarakat yang membantu intelijen dalam melaksanakan tugasnya.

Siapa saja anggota jaringan luar?

Anggota jaringan luar adalah mahasiswa biasa, mahasiswa tugas belajar (maksudnya, ada anggota polisi yang kuliah), kenalan, juga hubungan keluarga, misalnya keponakan, anak, saudara, dan juga orang umum (dosen).

Apakah ada proses pelatihannya?

Tidak ada, karena yang mereka lakukan sifatnya teknis, hanya memberikan masukan yang kami butuhkan. *Makanya* kami menggangap tidak perlu untuk memberikan pelatihan.

Bagaimana pendapat Bapak ketika banyak

mahasiswa pergerakan yang mengalami kebocoran data, dan diperkirakan itu merupakan kerja intelijen?

Kebocoran? Kebocoran dalam bidang apa?

Misalnya, kebocoran data dan agenda kerja mereka.

Ya...saya pikir, bagi kita itu untuk mengamankan dan mengetahui kegiatan, dengan teknik-teknik kita sehingga bisa diketahui rencana-rencana mereka dan sebagainya. Itu namanya mendeteksi, untuk mengetahui apakah aktifitas dan rencana itu negatif dan membahayakan, ataukah positif.

Adakah imbalan berupa uang dan fasilitas untuk jaringan luar?

Tidak ada dana khusus. Jika untuk menyuplai dana terus (terdiam).... Jika hanya untuk "rokok", ya...itu 'kan untuk memudahkan pergaulan antara aparat intelijen dan informan.

Apakah terjadi pemaksaan dalam proses rekrutmen jaringan luar, misalnya penjahat yang tertangkap?

Kalau saya sendiri belum pernah melakukan hal itu. Prinsipnya, seseorang yang melakukan kesalahan, ya harus diproses, tidak dimanfaatkan begitu saja.

Bagaimana dengan tindakan pada saat aksi?

Kalau pada saat itu kami hanya memantau, apakah aksi itu akan menghasilkan *chaos* atau tidak. Kemudian kami ikut mengamankan aksi. Biasanya kami berkoordinasi dengan purek III, dan dengan penyelenggara aksi.

Bagaimana pula kegiatan intelijen selesai aksi?

Melaporkan seluruh kejadian, membaca situasi terus, dan menafsirkan serta mencegah ekses-eksesnya.

Pada tanggal 2 dan 3 April 1998 terjadi aksi berdarah di UGM. Bagaimana itu bisa terjadi?

Sebelum reformasi memang ada kebijakan, bagaimana strategi mencegah mahasiswa dalam berdemonstrasi tidak boleh keluar dari lingkungan kampus, karena semua itu dikhawatirkan akan mengakibatkan anarki dan *chaos*. Kalau mereka dalam kampus, sih, *oke-oke aja*, tidak akan ada masalah.

Apakah ada koordinasi antara intilijen militer dan kepolisian?

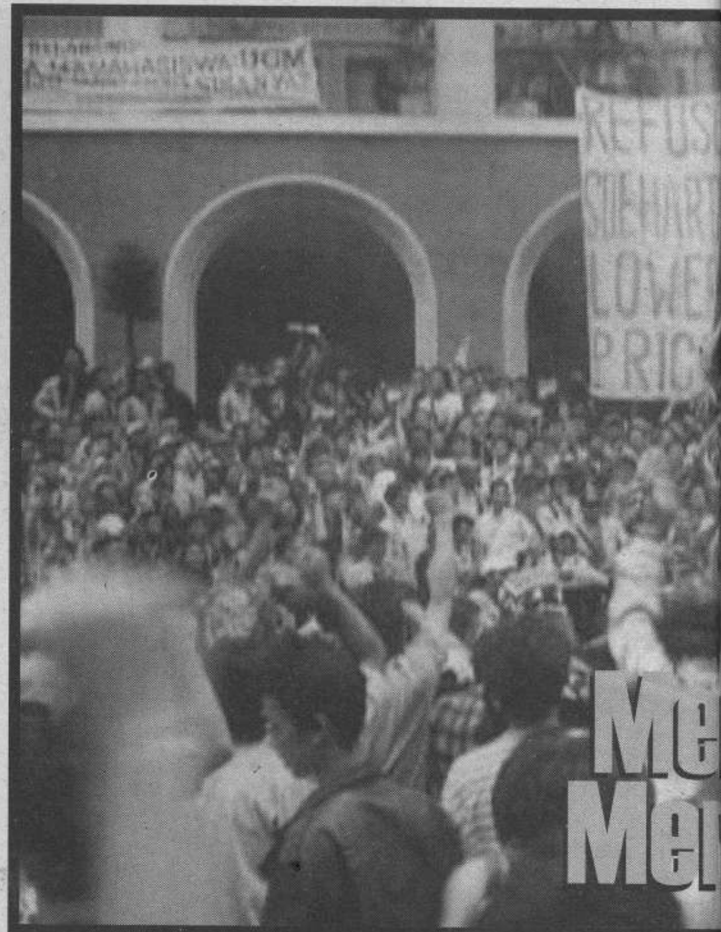
Ada. Kami saling membantu dalam hal informasi.

Dulu ada kejadian, aktivis yang ditangkap militer kemudian diberikan kepada kepolisian. Itu bagaimana?

Harus begitu. Penyerahan dari siapa pun, kami adakan proses penyidikan. Kalau tidak memenuhi unsur hukum, ya...dilepas. Kalau memenuhi unsur, ya...diproses.

Apakah proses interogasi itu tidak melanggar hak asasi manusia?

Tidak. Satu kali dua puluh empat jam adalah waktu kami untuk melakukan interogasi, menurut aturan KUHAP. Lagi pula, KUHAP telah disesuaikan dengan HAM. Kecuali jika dia tidak terbukti bersalah tapi tetap ditahan, itu yang melanggar HAM. ❐



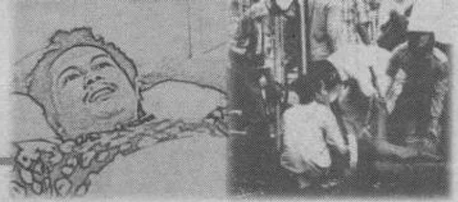
Sebuah motto "berkorbanlah tapi jangan jadi korban, berjasalah tapi jangan minta jasa", tampaknya, masih sulit dipenuhi oleh banyak aktivis mahasiswa di UGM. Cerita tentang pengorbanan yang dijawab dengan teror dan intimidasi, perjuangan yang dibalas dengan penculikan dan penyiksaan, hingga kepeloporan yang disikapi dengan penembakan dan pembunuhan sungguh ironis, memang.

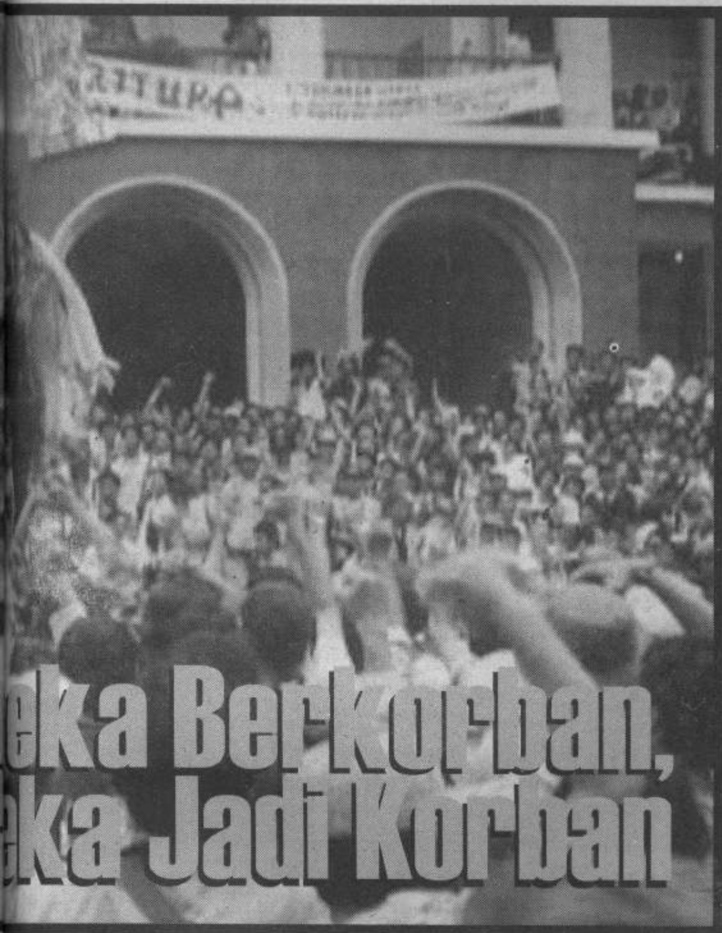
Tapi, begitulah, cerita toh terus bergulir. Keterlibatan mereka menuntut perubahan, turun ke jalan, bergerak bersama-sama, berhadap-hadapan dengan represifitas negara adalah sebuah pilihan yang telah dijatuhkan. Dan, ketika sebuah pilihan telah dijatuhkan, maka darah dan air mata, risiko dan tantangan, adalah "bunga-bunga sejarah" yang sudah seyogianya menghiasi jalan hidup seseorang. Inilah (sebagian) cerita tentang mereka yang menjadi korban aksi-aksi represif intelijen di Kampus UGM.

Gati Handoko: Dicium Peluru

Seperti apa orangnya, BALAIRUNG tak pernah bertemu langsung. Maklum, Mas Gati, begitu ia biasa dipanggil teman-teman dekatnya, termasuk mahasiswa semester tua di Fakultas Sastra Jurusan Antropologi. Ia sangat jarang datang ke kampus. Berkali-kali BALAIRUNG mencoba menemuinya, tapi selalu gagal. Cerita ini pun lebih banyak bersumber dari John Priyadi, seorang aktivis KPRP, yang memberikan pertolongan pertama kepada Gati Handoko, ketika ditembak oleh seseorang yang diduga intel.

Ceritanya berawal dari kantin "Bonbin" Fakultas Sastra. Gati





ASA. KURNIA EBO

bersama teman-temannya nongkrong sambil ngobrol *ngalor-ngidul*. Setelah beberapa lama, Gati lebih dulu beranjak pulang ke kos-kosannya. Kali ini ia berjalan melewati area belakang Fakultas Sastra. Jarum jam menunjuk pukul 12.00 WIB.

Waktu itu, Kamis, 14 Mei 1999, jalanan sangat sepi. Gati mulai menaruh curiga. Dan benar, tiba-tiba dari arah belakang utara jalan muncul dua orang bersepeda motor dengan kecepatan tinggi mendekatinya, dan...langsung dari jarak 3 meter meletus tembakan. Dor! Sebutir timah panas mencium lambung kiri Gati. Masih untung, peluru itu hanya *nyerempet*, dan Gati memang masih sempat menghindar.

John yang memberikan pertolongan pertama ketika Gati sampai di depan Fakultas Filsafat mengaku binggung waktu itu. Wajah Gati sangat pucat seperti mau mati. Tubuhnya panas, tapi anehnya, pinggang Gati tidak mengeluarkan darah. Hanya gosong begitu saja. "Mas Gati pasti punya apa-apa (ilmu kebal—**Red.**). Masalahnya, *kesrempet* peluru, tapi darahnya tak keluar, seperti darah menggumpal begitu. Warnanya kuning gosong," ujar John kepada BALAIRUNG.

Masih menurut John, ketika Gati datang dengan wajah pucat ke Fakultas Filsafat, informasi tentang penembakannya masih dirahasiakan hanya untuk beberapa orang. Alasannya, semata-mata untuk keselamatan Gati sendiri. Rupanya, Gati baru saja lolos dari percobaan pembunuhan. Tempat pengobatan Gati pun dirahasiakan.

Siapa yang menembak Gati? Gati sendiri, seperti penuturannya kepada John, mengaku tak tahu pasti. Namun, sejak pergi dari Bonbin ia sudah merasa ada orang yang mengikutinya. Tapi, siapa orang itu? Ia juga tak tahu pasti. Mungkin infoman, mungkin juga intel sungguhan. Dugaan keras memang mengarah kepada dua orang tersebut. Hanya, bagaimana membuktikannya?

Kembali Gati membentur tembok tebal. Menurut Endhiq, seorang aktivis PRD, Gati ditembak karena keterlibatannya dalam pembakaran foto dan patung Soeharto, pada aksi 4 April 1998. Mungkin, karena telah teridentifikasi sebagai orang yang ikut serta membakar, Gati menjadi target intelijen.

Benar-tidaknya, entahlah. Yang jelas, kini pengalaman itu terkenang di lambung kiri Gati. Ciuman manis sebutir timah panas dari orang tak dikenal.r

Danang Ardianta: Ditekan Melalui Orang Tua

Mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan '93 ini juga sudah jarang datang ke kampus. Maklum saja, pemilik rambut gondrong dan murah senyum ini kini telah menggenggam gelar S.Fil. Namanya cukup populer di kalangan aktivis mahasiswa, apalagi di antara teman-teman fakultas Filsafat UGM.

Kisah intimidasi yang dialami orang tuanya, dan juga dirinya, berawal ketika ia dipercaya menjadi koordinator aksi mogok makan mahasiswa Filsafat. Danang-lah orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan, kesehatan, dan keselamatan para peserta aksi mogok makan—juga terhadap masuknya dukungan dan keberhasilan akan tuntutan-tuntutan yang dimunculkan.

Awalnya, tugas Danang sebagai koordinator aksi berjalan lancar-lancar saja. Permasalahan baru muncul ketika orang tuanya dari Wonosori (Gunung Kidul, DIY) terpaksa datang ke kota Yoyga untuk memenuhi panggilan Polda DIY. Isinya, harapan untuk memaksa Danang berhenti dari aktivitasnya sebagai koodinator aksi.

Tentu saja, Danang bingung. Kini, ia dihadapkan pada masalah yang dilematis: pilihan antara menuruti harapan orang tua yang dipaksa aparat keamanan, atau tetap pada rel perjuangannya, yaitu sebagai koordinator aksi mogok makan. Entah bagaimana pergolakan yang tejadi dalam pikiran Danang. Tak lama setelah itu, Danang berhenti dari jabatannya sebagai koordinator aksi mogok makan.

Menyerah? Mungkin. Tapi tak sesederhana itu.r

Pedro Loi-Vachu-Veieire: Lolos dari tembakan

"Ya, saya. Mau apa?" tegas pemuda itu menjawab pertanyaan seorang laki-laki. Moncong pistol sudah di depan mukanya. Tiba-tiba, tangan yang menodongkan pistol itu lalu dipukulnya. *Prak!* Pistol pun jatuh. "Saya kembalikan lagi pistol itu kepada orangnya," kenangnya kepada BALAIRUNG.

Tak lama kemudian, datanglah sebelas orang mengeroyoknya. Perkelahian pun tak terelakkan. "Kami benar-benar berkelahi. Sebelas orang melawan tiga orang. Tapi, lucunya, kesebelas orang itu justru lari, padahal kami hanya bertiga. Helm-helmnya kami hancurkan," jelasnya.

Pedro Loi-Vachu-Veieire, nama laki-laki pemberani itu. Berbadan tinggi, kurus, dengan raut muka brewok, pemuda asal Timor Timur ini memang terkenal sangat berani. Dialah yang merampas *handycam* Neko, seorang intel yang



menyamar jadi wartawan. Dia pula yang membakar foto Soeharto pada aksi 4 April 1998. Dalam setiap aksi turun ke jalan, baik demi tuntutan reformasi di Indonesia maupun untuk pembebasan Timor Leste, Pedro selalu berada di barisan terdepan, berhadap-hadapan langsung dengan aparat.

Keterlibatannya dalam kisah penembakan ini dimulai ketika beberapa mahasiswa Filsafat mengadakan aksi mogok makan, Maret 1998. Merasa terpanggil, ia bersama teman-temannya dari Timtim ikut serta mengamankan jalannya aksi mogok makan. Diposisikan sebagai seksi keamanan, hampir setiap pagi dan malam ia berjaga. "Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan di sini. Jangan sampai ada penyerangan posko aksi mogok makan," jelasnya.



FAJAR RISQI

Telpon B-21. Ancaman penyadapan.

Cerita belum selesai. Masih pada hari yang sama (Pedro sudah lupa kapan tepatnya—*Red.*), malamnya, kurang lebih pukul dua, orang-orang yang gagal melakukan menembaknya datang lagi, ingin melakukan pembalasan. "Mungkin karena tidak puas dengan kejadian sore hari," ujar Pedro. Nah, saat itulah, sekali lagi, Pedro hampir saja tertembak. "Waktu itu saya keluar dari Kampus Filsafat. Jarak kurang lebih tiga meter, tiba-tiba ada tembakan. Untung tidak kena," tambahnya.

Pak Bambang dan KPRP: Teror Telepon

Teror! Teror! Teror! Cara yang cukup efektif untuk menciutkan nyali lawan ialah memperbesar rasa takut dengan berbagai cara. Salah satu bentuknya yaitu teror melalui telpon, seperti yang dirasakan oleh Pembantu Rektor III UGM, Ir. Bambang Kartika.

Rumah Purek III yang dikenal aktif mendukung gerakan mahasiswa ini memiliki dua telepon: telepon pribadi dan telepon dinas. Ketika aksi turun ke jalan sedang ramai-ramainya, kedua teleponnya sering berdering tanpa kejelasan maksud. Tentu itu sangat mengganggu. Kalau diangkat, tidak ada jawaban. Tapi begitu diletakkan, *eh*, telepon dinasnya ganti yang berdering.

Responnya pun sama. Tang lebih tidak mengenakkan, ketika telepon diangkat, tak ada suara orang. Yang ada cuma suara seperti televisi. "Kalaupun ada orang, maka biasanya kata-kata yang keluar berupa maki-makian, seperti 'bajingan!'," ujar Pak Bambang, menirukan suara yang sering muncul itu. Karena terjadi berulang kali, solusinya Pak Bambang memutus sambungan kedua teleponnya pada malam hari.

Apakah disadap, Pak? "Saya tak mengatakan seperti itu. Ini hal biasa," tegasnya. Teror telepon itu sendiri mereda, seiring dengan meredupnya hingar-bingar reformasi.

Teror semisal juga dialami kantor lama KPRP di Jalan Pandega Marta. Menurut Puthut, sekjen KPRP, jika lawan bicara menutup telepon maka yang muncul nada sambung. Padahal, seharusnya yang terdengar adalah nada panggil.

Setelah itu, persis seperti teror telpon yang dialami

Di Balik Hilangnya Triyono

"Anakku...pulanglah anakku, ibumu telah rindu. Pelita hatiku, malam bergiut dingin mencabik-cabik jiwa, angin kemarau dan hujan susul-menyusul mendewasakan dirimu, tetapi dimanakah engkau kini?

"Wahai pelita jiwa, aku tahu, malapetaka yang menimpa dirimu datang dari Dia, yang tak dapat ku lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat dan tipu muslihat. Karena filsuf di atas bumi tak berdaya menghadapi-Nya. Karena semua cerdik pandai menjadi dungu dihadapan-Nya.

Jika tidak demikian kami telah mengajukan dalih-dalih yang tidak dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta."

Sinopsis "Saru Siku", karya Otto Sukatno dan sutradara A. Muchlis

Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menunggu seseorang yang tak jelas nasibnya. Menunggu anak yang hilang tanpa sebab dan nasib yang jelas, tentu, bukan cuma persoalan bosan atau tak bosan. Apakah yang dikhawatirkan seorang ibu di saat anaknya tak kembali? Bahagiakah ia dalam menjalani hidup, atau sebaliknya?

Kebosanan ialah kenyataan kecil yang harus dihadapi. Seorang ibu, pastilah, akan *nrimo* menjalankan apa saja, asal anaknya kembali.

Bak pungguk merindukan bulan, itulah nasib Bu Nartin saat ini. Berasal dari Kota Reog Ponorogo, Jawa Timur, Bu Nartin ibu seorang mahasiswa yang hilang diculik: Triyono namanya. Sampai sekarang, tak jelas nasib Triyono. Lebih satu tahun Bu Nartin menunggu, dan selama itu pula Triyono tak diketahui kabarnya.

Cerita hilangnya Triyono berawal dari kepulangannya ke kota kelahirannya, Ponorogo. Tepatnya, tanggal 2 Mei 1998 ia pulang. Selanjutnya, secara tiba-tiba pada 12 Mei 1998 pukul 10.00 WIB, mahasiswa UGM dengan fakultas yang tak jelas ini dijemput temannya untuk kembali ke Yogya. Siapa teman yang menjemputnya? LBH Yogyakarta, yang mengadvokasi kasus ini, tak mampu memberikan kejelasan. Tapi, menurut laporan Bu Nartin, teman Triyono itu mengaku berasal dari Bali.

Kepada keluarganya, Triyono menjelaskan bahwa pada 18—28 Mei 1998 ia harus menghadapi ujian di fakultas. Ia sempat pula memberikan alamat kosnya yang baru, yaitu di Jalan Gejayan 62 Yogyakarta. Tanggal 2 Juni 1998, tiga minggu kemudian, Bu Nartin—dan

Pak Bambang, biasanya terdengar suara-suara yang tak jelas. Kadang seperti suara radio, suara orang, ataupun umpatan-umpatan. Meski tak setiap waktu, biasanya teman-teman KPRP justru membalasanya dengan teriakan senada.

Serikat Pengamen Indonesia (SPI): Delapan Hari Diinterogasi

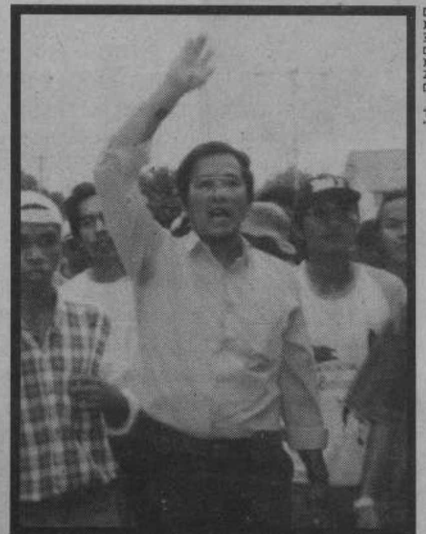
Anggota SPI bukanlah mahasiswa. Seperti namanya, mereka adalah pengamen jalanan. Tapi, biarpun pengamen, tak berarti mereka *cuek* dengan gerakan reformasi yang didengungkan mahasiswa. Melalui musik, melalui gitar dan *ecek-ecek*, suara-suara rakyat mereka dendangkan. Hampir pada setiap aksi mahasiswa mereka selalu hadir dan bergabung.

Pada 2 dan 3 April 1998 mereka bergabung dengan aksi di Boulevard UGM. Rupanya, perjuangan memang butuh pengorbanan. Sungguh sial, enam orang anggota SPI—dari 167 anggota yang bergabung dalam aksi 3 April yang diadakan oleh Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY)—ditangkap dan diinterogasi di Polresta Yogyakarta. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam aksi itu karena disuruh dan dibayar oleh pihak lain—entah siapa yang dimaksud pihak lain itu. Siapa?

Merasa tak ada yang menyuruh, apalagi membayarnya, keenam anggota SPI itu (Wawan *alias* Agus Pamuji, Subroto, Dono, Darman, Kadarisman, dan Miftakhul) memilih bungkam. Keesokan harinya, mereka dibawa ke Departemen Sosial (Depsos). Di situ mereka didiamkan begitu saja, hingga pukul 21.00 WIB. Lantas, mereka dibawa kembali ke Polresta. Kali ini, mereka diinterogasi secara bergantian oleh petugas yang, menurut mereka, bukan anggota Polresta Yogyakarta.

Wawan dan Kadarisman, yang bertindak sebagai juru bicara SPI, dipukul, bahkan diancam dengan todongan pistol. Kalau mereka tak mau mengakui tuduhan itu maka akan diremukkan tulang-belulangnya. Setiap pertanyaan selalu disertai dengan tendangan ke badan, juga injakan di kepala.

Interogasi ini selesai pukul 24.00, tengah malam. Mereka dikembalikan lagi ke Depsos. Akhirnya, mereka dibebaskan setelah delapan hari diinterogasi. Meski begitu, tiga buah KTP, masing-masing milik Wawan, Miftakhul, dan Darman, masih ditahan oleh aparat.


BAMBANG P.

Bambang Kartika. Teror telepon.

SPI—dengan ketuanya, Ibob Arief—dikenal dekat dengan mahasiswa UGM, terutama keterlibatannya dalam aksi-aksi mencipta dan menyanyikan lagu-lagu pembebasan/perubahan. Selain itu, mereka juga menggelar diskusi-diskusi dengan mahasiswa, dalam rangka pendidikan politik bagi anggotanya.

Meski hidup mereka serba pas-pasan, idealisme mereka dalam menggulirkan tuntutan perubahan patut diacungi jempol. "Kami ikut serta atas kesadaran hati nurani semata, dan kami tak pernah dibayar oleh siapa pun," tegas Ibob kepada BALAIRUNG. ❐

keluarga—menerima selembar telegram. Isinya benar-benar mengagetkan: Triyono diculik! Tentu saja, Bu Nartin kaget bukan kepalang.

"Sebelumnya mohon maaf. Sdr. Triyono mengalami penculikan pada kejadian di Jakarta, 13 Mei 1998. Mohon jangan cemas. Kami ingin tetap menemukannya. Terima kasih. Atas nama FISIPOL UGM Yogyakarta." Demikian isi telegram yang dikirim dari Kopegtel Yogyakarta 42 1/6 itu.

Telegram itu, "satu-satunya petunjuk" yang meyakinkan Bu Narti bahwa Triyono hilang diculik, menyimpan sejumlah informasi menarik. Pertama, bahwa Triyono diculik sehari setelah ia dijemput temannya di Ponorogo (12 Mei 1998). Kedua, bahwa Triyono diculik dalam sebuah peristiwa di Jakarta, 13 Mei 1999—artinya Triyono tidak pergi ke Yogya, tapi langsung ke Jakarta. Ketiga, bahwa pengirim telegram yang tertulis FISIPOL UGM, tanpa ada keterangan siapa dan dari institusi mana, sebenarnya sangat mengada-ada dan aneh. Kata-kata "mohon jangan cemas, kami ingin tetap menemukannya..." semakin memperkuat dugaan beberapa pihak bahwa pengirim telegram itu bukan FISIPOL UGM—dan memang tak ada yang mengaku. Namun, kuat dugaan bahwa itu dilakukan para penculik Triyono sendiri.

Setelah menerima telegram itu, Bu Narti tidak langsung melapor ke polisi. Mungkin karena ragu dan sekadar menunggu-nunggu jikalau ada kabar dari Triyono atau temannya. Sayangnya, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Akhirnya, pada 15 Juni 1998, Bu Nartin melapor ke Posko Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta. Kasus ini selanjutnya dilimpahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Dalam menindaklanjuti kasus ini, LBH Yogyakarta menuntut aparat yang berwajib, yakni pihak militer, untuk mengusutnya tuntas. LBH telah mengirim surat permintaan pertanggungjawaban, ditujukan kepada Menhakam Pangab (waktu itu Wiranto). Tapi, seperti kasus-kasus penculikan yang lain, tuntutan itu menguap begitu saja.

Bedanya dengan kasus-kasus penculikan aktivis mahasiswa yang lain, kasus Triyono hampir-hampir tak "disentuh" media massa mana pun. Mungkin, karena sejak awalnya sudah penuh dengan ketidakjelasan: mulai identitas teman yang menjemput Triyono, bahkan identitas Triyono sendiri (apakah ia mahasiswa Fisipol atau Sastra), sampai apa saja aktifitasnya selama ini. Semunya serba gelap.

Bu Nartin sendiri, dalam pengakuannya kepada LBH, juga tak tahu pasti di mana tepatnya (fakultas) Triyono kuliah. LBH pernah mencoba meng-*cross-check* langsung identitas Triyono ke Fakultas Sastra dan Fisipol UGM, tapi tak menemukan kepastian. Lalu, apa mungkin Triyono bukan mahasiswa UGM? Pertanyaan ini terasa tidak penting dibanding nasib Triyono sendiri, yang sampai sekarang belum jelas: hidup atau mati.❐

Visi Kerakyatan UGM



TEUKU JACOB
Guru Besar Antropologi Ragawi UGM

Universitas Gadjah Mada acapkali dianggap sebagai universitas desa, mendesa, atau pedesaan, dalam makna yang berbeda-beda. UGM memang berada di suatu konglomerasi desa, dan mahasiswanya banyak berasal dari desa sebagai mahasiswa generasi pertama. Sivitas akademika pada umumnya hidup dan berpakaian sederhana, seperti kebanyakan dosen dan mahasiswa Eropa dan Amerika sekarang. Batas antara desa dan kampus tidak mencolok, seperti misalnya di Singapura dan Malaysia.

Di samping itu, UGM banyak pula memperhatikan dan meneliti pedesaan, kemiskinan *rural* dan urban, rakyat yang tidak berdaya dan kurang terlayani oleh pelayanan publik. UGM memedulikan pertanian rakyat, penyakit rakyat, kesehatan komunitas, farmasi komunitas, kehutanan komunitas, perumahan rakyat, teknologi sederhana, dan antipenindasan terhadap rakyat. UGM memperhatikan juga obat-obatan tradisional rakyat, keamanan, demokrasi, dan perdamaian.

Di luar negeri, kadang-kadang orang mempunyai citra UGM sebagai "universitas Kiri" (bahkan Yogyakarta dianggap Kiri) atau Kiri baru, oposan pemerintah lama, atau antikonservatif dan militan Islam. UGM memang sejak berdirinya sudah berasaskan Pancasila seperti tercantum dalam statutanya; bahkan pada awal 1960-an pernah dijuluki "universitas sosialis". Lulusan UGM secara tradisional bersedia ditempatkan di mana saja di Indonesia, sehingga generasi tua pejabat pemerintah daerah banyak terdiri atas lulusan UGM. Alumni UGM juga tidak menjual dirinya terlalu tinggi; pada wisuda mereka tidak dibekali pesan "*do not sell yourself too cheap*" seperti di beberapa lembaga lain.

Oleh karena itu, kalau dikatakan UGM mempunyai visi atau orientasi "kerakyatan" tidaklah jauh dari sasaran. Bila "kerakyatan" dianggap terjemahan populisme model Amerika, yang membela petani dan anti-industri pada abad yang lalu, saya rasa kurang tepat. Sedangkan jika "kerakyatan" berarti kedaulatan rakyat atau demokrasi, ini pasti benar, karena pada waktu ini tidak ada sistem lain yang lebih baik daripada demokrasi--meskipun masih tidak memuaskan, apalagi ideal. Kalau visi kerakyatan dimaksudkan bahwa UGM hanya memperhatikan rakyat murba, rakyat jelata, rakyat kecil, kaum miskin-papa, yang terinjak dan terpinggirkan, ini tidak seluruhnya benar, karena hidup dan pengamatan serta perbaikan kehidupan tidak dapat sepotong-sepotong.

Kemiskinan berkaitan dengan bermacam-macam hal: sistem sosial, politik, dan ekonomi; keadilan distributif, kebodohan, dan penyakit; penjajahan dan perbudakan; hak asasi manusia; solidaritas masyarakat; sumber daya alam; kerajinan dan ketangguhan; hemat dan disiplin; alokasi anggaran militer di luar proporsi; salah urus dan korupsi; demografi dan kompetisi. Semuanya harus kita perhatikan kalau kita menangani kemiskinan rakyat.

Yang terpenting dari kerakyatan adalah kepentingan rakyat harus diperhatikan dan dibela. Rakyat banyak memerlukan informasi dan saluran untuk menyampaikan informasi. Rakyat banyak jangan dirugikan di depan hukum, karena tidak sanggup membayar pengacara dan tidak memahami mekanisme peradilan. Rakyat banyak harus dibebaskan dari gangguan kesehatan yang merintangi pekerjaannya, karena tidak semuanya mampu membiayai pelayanan kesehatan. Dikhawatirkan semboyan kesehatan bagi semua pada tahun 2000 tidak akan tercapai, bahkan merosot menjadi kesehatan tidak bagi siapa pun, karena yang kaya pun akan menderita penyakit-penyakit kemewahan.



Mahasiswa UGM harus menjadi pencegah kepincangan dan ketidakadilan, tidak hanya selama menjadi mahasiswa, tetapi terutama sesudah lulus. Mahasiswa harus konsisten memelihara idealisme yang menjadikannya kekuatan moral yang disegani. Janganlah berbisik di depan kejahatan, dan jangan membisu di depan penyelewengan. Berdiam diri di depan kesalahan berarti membantu kesalahan itu. Solidaritas tidak dapat dibangun di atas kecurangan atau kekerasan. □

Wajah Bopeng Pusat-Pusat Studi

Pusat studi, dari namanya terbayang dunia intelektualitas. Namun, ternyata, tak mudah mewujudkan idealisme pusat studi. Banyak cacat yang mesti diperbaiki di sana-sini.

Selama ini, pusat studi (PS) menjadi *trade mark* UGM. Di universitas *ndeso* ini, sebanyak 19 PS tersebar di seluruh penjuru. Bermacam-macam minat kajiannya, sifatnya interdisipliner. Banyak sudah penelitian dan seminar dilakukan.

Sayang, selama perjalanannya itu PS banyak mengalami hambatan dan tantangan. Padahal, sebagai barometer intelektualitas sivitas akademika, PS patut diberi tempat khusus. Kegiatan penelitian amat penting untuk mengembangkan ilmu. Dan, penelitian yang cuma bisa muncul dari SDM dan lembaga yang baik pula.

Sejarah dan Peran

Mencermati kiprah PS, ada berbagai fenomena menarik. Kemunculan PS ialah untuk menjawab berbagai masalah dalam dunia keilmuan interdisipliner. Di samping itu, PS juga berusaha menjawab masalah masyarakat, yang kian lama kian kompleks.

Dr. Ir. Mochammad Maksum, Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), mengungkapkan latar belakang pendirian P3PK. Katanya, P3PK merupakan salah satu wujud kesadaran UGM untuk mencermati masalah di pedesaan. Masalah-masalah itu, dalam penyelesaiannya, membutuhkan pendekatan interdisipliner, yang tak dimiliki fakultas-fakultas. Atau Pusat Studi Pariwisata (Puspar), yang melihat pariwisata sebagai bidang ilmu yang memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu. Kondisi yang sama, akhirnya, merangsang tumbuhnya pelbagai PS di UGM, berikut minat kajiannya masing-masing. Kini jumlahnya sudah mencapai angka 19.

Proses pendirian PS sederhana. Diawali dengan obrolan ringan sesama dosen atau peneliti yang *concern* pada suatu isu. Selanjutnya, seperti diungkapkan oleh Prof. dr. Mochamad Anwar, Pembantu Rektor I UGM, "Ya...mereka tinggal bikin proposal, lalu diajukan ke senat. Kalau disetujui, maka PS yang dimaksud dapat segera didirikan." Sedangkan cara pemilihan ketuanya, cerita Anwar, dipilih di antara mereka saja.

Namun, tak semua PS didirikan dengan cara-cara biasa seperti di atas. Ada beberapa PS yang latar belakang pendiriannya cukup unik. Salah satunya Pusat Studi Jepang (PSJ). Menurut Dr. Soesamto, Kepala PSJ, pendirian PSJ lebih didasari oleh alasan "politis": agar dana bantuan ataupun proyek dari Jepang mengalir ke UGM. "Orang Jepang cuma tertarik memberikan bantuan dana kepada lembaga yang meminati studi tentang Jepang atau kebudayaan Jepang," ungkapnya.

Peneliti senior di Fakultas Pertanian ini mengungkapkan, ia ditunjuk mendadak oleh rektor sebagai Kepala PSJ. Sebabnya, Soesamto dikenal memiliki jaringan kuat dengan kalangan akademisi Jepang, terutama di bidang pertanian. Jadi bukan karena dia aktif di PSJ. Menurutnya, sebelum diangkat sebagai kepala PSJ, ia belum pernah terlibat dengan PSJ. Maka, sebetulnya ia tak terlalu suka jabatan itu. "Cukup satu periode ini saya jadi kepala. Biarlah periode mendatang ditangani oleh orang yang lebih profesional, dari staf PSJ sendiri," katanya.

Cerita pendirian Pusat Studi Wanita (PSW) tak kalah menariknya. Waktu itu, menteri Urusan Peranan Wanita (UPW, kini Urusan Pemberdayaan Perempuan--*Red.*) tak punya "tangan" di bawah. Kementrian UPW tak memiliki biro, departemen, atau yang semacamnya, sehingga kajian secara ilmiah tentang gender harus didukung perguruan tinggi,













Pusat Studi Wanita. Mengilmiahkan isu gender

terutama PTN.

Pusat studi inilah yang diharapkan kelak memberi efek positif bagi perjuangan kaum perempuan. Dengan adanya kajian ilmiah, diharapkan tumbuh kesadaran pada masyarakat luas tentang ketidakadilan gender. Para akademisi, utamanya peminat masalah-masalah gender, bisa sejauh mungkin mengkaji isu-isu gender ini dengan pendekatan interdisipliner.

Peran Kabur Lemlit

Ternyata, posisi PS cukup unik. Secara struktural, sebetulnya, PS berada di bawah Lembaga Penelitian (LP). Menurut Prof. Dr. Hardjono, Kepala LP, tujuan didirikannya LP ialah untuk mengoordinasi pusat-pusat studi di UGM. "Koordinasi dalam hal ini tanpa intervensi. PS juga punya otonomi untuk mengurus dirinya sendiri," jelasnya.

Mochammad Anwar menyatakan, "Sekarang ini tidak wajib bagi mereka untuk melaporkan hasil penelitiannya. Namun, ini tak berlaku bagi penelitian-penelitian yang dikoordinasi universitas. Misalnya proyek QUE, yang di dalamnya sudah ada supervisinya."

Akibatnya, LP hanya mengadakan rapat bulanan, pun tanggalnya tidak tetap. Semuanya tergantung Hardjono sebagai ketua. Layaknya "arisan", tempat rapat bergilir antar-PS. Seluruh PS berkumpul untuk saling kenalan, silaturahmi. Memang ada pembicaraan masalah-masalah khusus, tapi bukan soal penelitian secara umum di UGM. Memang LP tak punya wewenang atas hal itu.

Inilah yang menjadi keluhan Kepala Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT), Dr. Sudarsono. Suatu ketika, ia bermaksud mengajukan masalah pembenahan laboratorium dalam rapat bulanan atau rapat kerja universitas yang dilaksanakan LP. Ia merasa, forum ini tepat dijadikan ajang pembahasan masalah itu sebab dihadiri oleh utusan dari fakultas-fakultas, yang tergabung dalam komisi penelitian.

Sayangnya, Sudarsono kecewa. Ternyata mereka tak berwenang untuk membicarakannya. Menurut Sudarsono ini aneh. "Lalu, di mana peran dan wewenang LP?" tanyanya, keheranan. Ia juga menyayangkan, dalam rapat bulanan yang dibicarakan cuma masalah remeh-temeh, seperti pengadaan kamar mandi, dll. Justru bukan masalah yang signifikan, seperti perbaikan fasilitas PS ataupun arah kebijakan dunia penelitian di UGM.

Posisi LP yang sekadar mengoordinasi itu membuat perannya kabur. Padahal, menurut Harjono, posisi LP sebenarnya sebagai *think-tank*. Untuk itu LP membentuk 5 gugus, yaitu Agro, Sains, Teknik, Medikal, dan, Sosial-Humaniora. Masing-masing gugus boleh mengembangkan orientasi penelitiannya pada penelitian dasar (*basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, selama ini program-program penelitian diorganisasikan secara baik di tingkat universitas. Baik di fakultas, LP, maupun PS tak ada kebijakan-kebijakan dan peran-peran yang jelas. Sulitnya posisi LP mengakibatkan sulitnya memberikan arahan yang jelas, atau bagaimana ia mengambil peran dalam dunia penelitian di UGM.

Mencermati posisi LP, Hardjono merunut masalah ini ke kebijakan nasional pendidikan, terutama Dewan Riset Nasional (DRN), yang anggotanya kurang lebih 150 orang dari seluruh Indonesia. Menurutnya, DRN selama ini kurang jelas fungsinya dan tak maksimal. "Saya kira, DRN mesti direformasi, kemudian ada DRN daerah. Nah, DRN daerah mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi, umpamanya UGM, dalam penelitian-penelitiannya," paparnya.

Kerja sama penelitian dengan industri atau lembaga swasta pun selama ini tak ada, atau jarang sekali dilakukan. Padahal, inilah yang dapat meningkatkan penelitian. Penelitian yang biasanya dilakukan pada suatu industri kemudian dapat dilakukan di PT. Sayangnya, masih menurut Hardjono, usulan ini pun belum ditanggapi rektor. "Mungkin rektor masih sibuk mengurusi otonomi kampus," ujarnya, menghibur diri. Padahal, siapa lagi yang akan mengurusi soal ini, kalau bukan LP?

Jalan Sendiri-Sendiri?

Akibat kekaburan pengorganisasian ini tak di LP saja. Dampak pertama dapat dilihat pada kondisi PS. Masing-masing PS cenderung berjalan sendiri-sendiri karena mereka sangat otonom dari LP. Posisi LP juga "aneh" (hanya sebagai koordinator--*Red.*). Sedangkan posisi PS yang relatif longgar membuat perkembangannya amat variatif.

Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), contohnya, amat maju. Didukung jaringan kerja sama yang luas dengan lembaga-lembaga di luar UGM, juga donatur asing, PS tertua ini terbilang "makmur". Sementara itu, sungguh kontras, Pusat Studi Pancasila (PSP) hampir tanpa dana sama sekali (lihat: "Idealisme vs Dana"). Atau juga Pusat Studi Pemuda dan Olah Raga (Puspora), yang akhirnya dibubarkan.

Tentu saja, tak dapat dipungkiri, perkembangan suatu PS tergantung pula pada manajemen lembaga dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Peneliti senior PPK, Dr. Muhadjir Darwin, mengungkapkan bahwa maju-mundurnya sebuah PS sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, staf PS harus menjadikan kantornya sekaligus rumah, di mana ia dapat bekerja, berkarya, dan mencari nafkah. Sulit, memang, mencapainya. Dibutuhkan pemimpin yang kuat dan kreatif, serta dukungan para staf, sehingga tercipta kerja sama yang kompak.

P3PK menerapkan manajemen yang agak lain dengan PPK. Bersama almarhum Prof. Loekman Soetrisno, para staf P3PK bersepakat untuk tak membuat komitmen terlalu banyak "di luar". Sebabnya, jumlah peneliti tetap P3PK sedikit. Bahkan, boleh dikata, hanya Mohamad Maksoem dan Loekman Soetrisno.

Untuk menjaga eksistensi lembaga, P3PK lebih memilih proyek yang mencakup kesatuan tugas. Maksudnya, P3PK membentuk sebuah tim atau subtim, dan bukan peneliti secara

perorangan. Dengan cara demikian, penelitian yang ditangani lebih intensif dan ideal. Yogya dijadikan *home base*, agar koordinasi lebih baik dan terarah.

Fasilitas plus Mentalitas

Buruknya manajemen penelitian ini, lebih jauh, berdampak pada kurangnya perhatian terhadap SDM peneliti di universitas. Tak ada kebijakan yang mampu mendorong berkembangnya iklim meneliti secara intensif. Banyak peneliti di UGM yang meneliti sekadar demi kenaikan pangkat, tidak benar-benar tertarik dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Kewajiban meneliti bagi dosen dalam jumlah kredit tertentu, misalnya.

Akar masalah lainnya, dan amat biasa, ialah ketiadaan fasilitas di fakultas maupun PS. Prof. Dr. Djoko Suryo, guru besar Sejarah, mengungkapkan, para peneliti ataupun mahasiswa selama ini sulit menghasilkan penelitian yang baik. Kebanyakan mereka tak menguasai materi, dan kesulitan mencari referensi pustaka yang relevan. "Karenanya, UGM," kata Kepala Pusat Studi Korea (PSK) ini, "harus menyediakan perpustakaan yang lebih lengkap dan lebih representatif bagi pengembangan penelitian."

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Puspar, Dr. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. "Selama ini saya melihat, terutama dosen-dosen muda, tak bisa mengeksploitasi kemampuan intelektualnya karena semata-mata sarana penelitiannya. Apalagi dalam riset interdisipliner." Untuk mewujudkannya, dosen Teknik Sipil ini berupaya melengkapi fasilitas di Pupar, misalnya buku-buku perpustakaan. Bantuan dana untuk peneliti, baik senior ataupun yunior, disediakan pula.

Sebaliknya, menurut Soesamto, fasilitas di UGM sudah sangat bagus, lengkap, dan didukung staf pengajar yang cukup bermutu. Apalagi UGM sedang mencanangkan program 1000 doktor untuk menunjang peningkatan kualitas UGM. "Tentu saja termasuk mutu penelitiannya," tandasnya.

Jadi, selesaikah? Belum. Terbukti, mentalitas peneliti menentukan juga. Iklim di sini tak cukup kondusif untuk merangsang minat meneliti. Mohammad Maksoem memandang, penelitian di UGM secara kuantitas banyak karena populasi di UGM juga tinggi. Sedangkan Muhadjir Darwin melihat penelitian di UGM belum maju. Bagi banyak dosen, meneliti bukanlah suatu hal yang menarik. Sebab lainnya, banyak dosen tak menguasai metode penelitian dengan baik.

Dalam kegiatan meneliti, kata Danang Parikesit, ada dua hal yang mesti dibedakan: minat meneliti dan keharusan meneliti. Hal kedua inilah yang sedang dikembangkan. Namun, Danang menekankan, "*Bottom line*-nya tetap pada fasilitas!"

Lebih lanjut, pakar transportasi ini mengungkapkan dua faktor yang harus disadari oleh peneliti. Pertama, meneliti butuh usaha yang keras. Kedua, kesadaran bahwa uang itu datangnya belakangan. Danang mencontohkan, seorang dosen mengajar selama semester pendek di fakultas hukum. Setelah mengajar, ia langsung tanda tangan,

MAJALAH/JURNAL ILMIAH YANG TERBIT DI UGM

No	Nama Jurnal/ Buletin/ Majalah	Mulai terbit	Frekuensi Terbit/ Tahun	Instansi Penerbit
1	Berkala Ilmiah Biologi	Juni 1991	2 kali	Fakultas Biologi
2	Jurnal Ekonomi dan Bisnis			Fakultas Ekonomi
3	Majalah Farmasi Indonesia (MFI)	1972	4 kali	Fakultas Farmasi
4	Majalah Obat Tradisional	1996	3 kali	Fakultas Farmasi
5	Majalah Farmasiutik	1997	3 kali	Fakultas Farmasi
6	Jurnal Filsafat	Februari 1990	3 kali	Fakultas Filsafat
7	Majalah Geografi Indonesia	1988	2 kali	Fakultas Geografi
8	Indonesian Journal of Geography	1961	2 kali	Fakultas Geografi
9	Mimbar Hukum	1982	3 kali	Fakultas Hukum
10	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1 Juli 1997	3 kali	Fakultas Isipol
11	Seri Monografi	September 1989	Tak berkala	Fakultas Isipol
12	Berita Ilmu Kesehatan			Fakultas Kedokteran
13	Sains dan Veteriner			Fakultas Kedokteran Gigi
14	Bulletin Kehutanan	1997	4 kali	Fakultas Kehutanan
15	Jurnal Konservasi Kehutanan	Februari 1999	2 kali	Fakultas Kehutanan
16	Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia	1995	2 kali	Fakultas Pertanian
17	Ilmu Pertanian	1968	Tak tentu	Fakultas Pertanian
18	Jurnal Perikanan UGM	1997	Tak tentu	Fakultas Pertanian
19	Jurnal Ilmu Tanah & Lingkungan	1997	2 kali	Fakultas Pertanian
20	Agro-Ekonomi	1977	Tak tentu	Fakultas Pertanian
21	Buletin Peternakan	1979	4 kali	Fakultas Peternakan
22	Humaniora	1989	3 kali	Fakultas Sastra
23	Forum Teknik Sipil	1991	2 kali	Fakultas Teknik
24	Media Teknik	1978	4 kali	Fakultas Teknik
25	Forum Teknik		3 kali	Fakultas Teknik
26	Clapeyron	1980	3 kali	Fakultas Teknik
27	Pro-Aktif (dalam proses)	September 1999	4 kali	Fakultas Teknik
28	Agritech	1977	4 kali	Fakultas Tek. Pertanian
29	Berkala Penelitian Pascasarjana	1998	4 kali	Program Pascasarjana
30	Mediagama	Januari 1999	3 kali	Lembaga Penelitian
31	Warta Pengabdian	1994	2 kali	LPM
32	Warta LP3	1996	2 kali	LP3
33	Forum Perencanaan Pembangunan	Juni 1993	2 kali	P4N
34	Warta Pedesaan	Juni 1983	12 kali	P3PK
35	Manusia & Lingkungan	19 Des. 1993	3 kali	PPLH
36	Lembaran Obat & Pengobatan	April 1987	4 kali	PSFKKO
37	Berita Pusat Studi Farmakologi Klinik dan Kebijakan Obat UGM	Oktober 1995	2 kali	PSFKKO
38	Filsafat Pancasila	Juli 1997	2 kali	Pusat Studi Pancasila
39	Energi	Agustus 1998	4 kali	Pusat Sudi Energi
40	Indonesian Food & Nutrition Progress	Januari 1994	2 kali	PAU Pangan & Gizi
41	Media Informasi	1987	4 kali	UPT Perpustakaan

Sumber: LP-UGM 1999

dapat uang. Sementara, jika melakukan penelitian maka peneliti harus bekerja keras lebih dahulu. Usai meneliti, barulah uang bisa diterima. Itupun kalau penelitiannya cukup bermutu.

SDM peneliti yang tak didukung oleh sarana serta etos kerja yang tinggi membuat hasil penelitiannya seringkali kurang layak. "Biasanya, mereka bikin proposal, meneliti, menyusun laporan, lalu tidur," ungkap Mochamad Anwar. Belum banyak dosen yang berinisiatif mengirimkan hasil penelitiannya ke jurnal-jurnal internasional. Penelitian seperti ini disebut "penelitian masturbasi" oleh Soesamto. Padahal, publikasi dalam bentuk jurnal sangat penting, untuk melihat signifikansi penelitian tersebut. Akibat lainnya, nama lembaga penelitian akan lebih terangkat. Dari sini memang ada kemungkinan peneliti atau PS bisa menjaring dana berdasarkan prestasi itu.

Celakanya, belum banyak upaya PS untuk menerbitkan jurnal penelitian. Dari 19 PS yang ada, menurut data LP, hanya 7 PS yang menerbitkan Jurnal. Dan, Pusat Studi Energi (PSE)-lah yang punya jaringan luas di luar negeri. Sedangkan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) jurnalnya sampai ke Canada (lihat tabel). "Selama ini, para dosen lebih bangga jika sudah membaca buku baru terbitan luar negeri. Seharusnya mereka lebih bangga jika hasil penelitiannya dimuat di jurnal luar negeri," tukas Soesamto.

Beberapa PS memang sedang merencanakan untuk menerbitkan sebuah jurnal. Salah satunya PSW, yang hendak menerbitkan jurnal pada Desember 1999. Puspar mengarah ke sana pula.

"Yang menyedihkan, UGM cuma menerbitkan sebuah jurnal, yaitu *Mediagama,* dan tak banyak peneliti yang mau di situ. Sangat susah untuk menarik tulisan dari mereka. Terutama tulisan-tulisan sosial humaniora," sesal Soesamto.

Otonomi: Pintu Gerbang *Research University*?

Sebentar lagi, di UGM dan 3 PTN lain (ITB, UI, dan IPB) akan diterapkan otonomi kampus. Salah satu bagiannya yakni program pengembangan PT menuju *research university.* Tampaknya, cita-cita ini terlalu muluk bagi UGM bila melihat kondisi nyatanya.

Untuk melangkah ke sana, UGM ingin mancapai 1.000 doktor pada tahun 2010. Karena itu, dibutuhkan posisi yang kuat bagi lembaga-lembaga penelitian. Arah yang jelas bagi program penelitian akan menunjang pertumbuhan penelitian. Maka, gerak langkah antara fakultas, pusat studi, dan program pascasarjana bisa serasi.

Satu hal yang penting diperhatikan ialah soal *reward.* Selama ini, *reward* tak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. "Kita bicara tentang infrastruktur, fisiknya, maka kita bicara tentang manajemennya. Akan tetapi, kita jangan lupa ada *reward* yang harus kita jaga, agar tak terjadi peneliti lari ke tempat lain yang *reward*-nya lebih bagus," jelas Danang Parikesit. Menurut Parikesit, akan lebih baik jika UGM menganut sistem pasar, bersaing ketat soal *output* dan *reward.* Ini bakal mendukung peningkatan kompetisi meneliti di kampus.

Namun, mengatasi soal ini tak semudah membalik tangan begitu saja. Otonomi dengan orientasi pasar (yang akan diterapkan UGM--*Red.*) tak akan dengan mudah menjawab persoalan rendahnya minat penelitian di sini. Lebih jauh, konsep otonomi itu masih dipertanyakan. Risiko terbesar, jika UGM akan membuka peluang pasar untuk ambil bagian dalam penelitian, yaitu munculnya "komoditas" penelitian. Artinya, penelitian tak lagi menjadi etos pengabdian terhadap masyarakat, tapi dijualbelikan antar perusahaan.

Tentu saja, mahasiswa di sini cuma jadi "buruh" dosen-dosen yang menggarap proyek. Pertanyaan yang akan selalu menghantui: apakah UGM masih setia dengan visi kerakyatannya?

Akhirnya, persoalan penelitian pun bukan saja persoalan dosen muda dengan fasilitas atau minat mereka, namun persoalan mahasiswa pula. Di manakah posisi mahasiswa dengan kondisi kampus yang *market orinted,* dan PS yang berjalan sendiri-sendiri?❑

Maesita Maharani
Sugi Siswiyanti, Nur Evi R.

Pusat Studi Pancasila

Idealisme vs Dana

Tak sulit mencari pusat studi ini. Sebuah bangunan yang cukup besar, bercat putih, tiga lantai, terletak di sebelah barat Fakultas Filsafat. Sebidang papan nama bertuliskan "Pusat Studi Pancasila" terpasang 10 meter dari pintu masuk ruang depan. Tapi, begitu masuk, tak perlu kaget. Hanya satu ruangan yang dipakai PSP sebagai kantor. Itu pun terletak di lantai satu, campur-baur dengan kantor dekanat Fakultas Filsafat.

Ruang PSP, yang selalu sepi sebelum pukul 11.00 siang, hanya ditempati dua karyawan dan empat staf peneliti—merangkap sebagai staf pengajar di Filsafat pula. Ada lima meja di dalamnya, dua unit komputer, satu lemari kaca, dan sebuah loker arsip di sudut ruangan.

Didirikan sejak 1995, ide pendirian PSP berawal dari obrolan dalam rapat dosen Fakultas Filsafat. Sederhana, memang. Waktu itu, muncul keinginan untuk mendirikan pusat studi yang khusus mengkaji Pancasila secara filsafati-ilmiah. Di bawah komando Prof. Dr. Koentowibisono, dosen senior Filsafat yang kini kepala PSP, ide itu akhirnya direalisasikan, sampai sekarang.

"PSP merupakan eksplisitisme, atau komitmen, atau juga landasan secara ilmiah, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyimpanga elite politik. Itu dilakukan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan sebulan sekali, dan hasilnya selalu dikirim ke pemerintah," ujar Koentowibisono kepada BALAIRUNG. "Namun, sebagai lembaga ilmiah beserta ilmuwannya, PSP tak bisa memaksakan atau tak berhak memutuskan kebijaksanaan sebagai *follow up* laporan hasil seminar tersebut," tambahnya.

Melihat "indahnya" tujuan pendirian PSP, bagaimana realisasinya? Ternyata, PSP—yang sampai kini masih bernaung di bawah Fakultas Filsafat—belum pernah sekali pun melakukan penelitian lapangan, sejak 4 tahun berdiri. Alasannya? Tak perlu heran juga: dananya terbatas.

"Untuk melakukan penelitian lapangan diperlukan dana yang lebih besar, dan PSP *nggak* punya itu," keluh Drs. Misnal Munir, M.Hum., sekretaris PSP.

Alasan dana jugalah yang membuat PSP selama ini hanya melakukan penelitian-penelitian pustaka. "Kita pernah akan melakukan penelitian yang rencananya dibantu Lemhanas, bekerja sama dengan Fak. Psikologi, tentang bagaimana wawasan kebangsaan saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan, terutama di Kalimantan yang berbatasan dengan Serawak. Tapi itu tak jadi karena ada krisis moneter dan krisis politik waktu itu," tambah dosen pengampu mata kuliah Filsafat Barat itu.

Tatakala Pak Harto masih berkuasa, PSP dijanjikan bakal didanai tiap bulan. Gedung khusus pun, yang hendak diberi nama Gedung Notonegoro, akan dibangunkan. Rencananya, PSP menjadi pusat pengkajian Pancasila yang betul-betul ilmiah-filsafati, untuk "mengimbangi" P-4. "Tapi, ya...itu tadi, batal akibat krisis moneter dan politik," papar Misnal panjang-lebar.

Persoalan dana ini semakin pelik ketika sejak Maret 1999, UGM menyetop distribusi dana kepada seluruh pusat studi. Sejak itu, PSP praktis hanya bekerja sama dengan Dikti, yang diwujudkan dalam proyek-proyek pelatihan pendalaman bagi para dosen Filsafat Pancasila, dari PTN-PTS seluruh Indonesia. Dari proyek inilah PSP memperoleh dana operasionalnya.

Dana bantuan dari Dikti itu, berjumlah sekitar Rp500 ribu per bulan, ternyata cukup buat ongkos operasional PSP dan honor dua orang karyawan saja. Lainnya? Entahlah. Keringnya dana pulalah yang membuat PSP hingga kini belum bisa merekrut peneliti dari luar Fakultas Filsafat.

Menurut Misnal Munir, mengapa PSP lebih sulit mencari dana dibanding Pusat Studi Wanita (PSW) atau Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), misalnya, adalah karena faktor kekhususan topik-topik penelitian PSP. Penelitian PSP memang berkutat pada Pancasila. Sedang PSW atau PPK, topik-topik yang diangkatnya lebih umum, universal, dan populis. "Donatur luar negeri dengan mudah memberi dana. Tapi kalau Pancasila, sementara orang luar negeri sendiri mulai bertanya-tanya: apakah Pancasila itu bisa dikaji secara ilmiah?" jelas Misnal.


DOK. PSP

Idealisme, memang, sulit berkompromi dengan penyediaan dana. Tapi, idealisme jelas amat diperlukan untuk kelangsungan pengembangan keilmuan. Persoalan penelitian yang terhambat akibat minimnya dana, tentulah, bukan suatu kondisi yang membuat sebuah pusat studi mengundurkan diri.

Drs. Rizal Mustansyir, M.Hum., staf peneliti PSP yang bertanggung jawab mengurusui jurnal dan publikasi, cukup optimis. "Dana itu sebetulnya bukan masalah, asal kita bisa mengajukan masalah-masalah aktual dalam proposal proyek penelitian. *Insya Allah* pasti dapat *kok*, selama kita kreatif untuk terus menggali persoalan-persoalan riil yang dihadapi bangsa Indonesia, dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan," ungkapnya.

Mungkin, setiap orang boleh berharap seperti halnya Rizal Mustansyir. Tinggal kemudian bagaiman kita tidak dengan "konyol" hanya menunggu rezeki turun dari langit.❒

Sugi Siswiyanti
Maesita Maharani, Tria Ayu, Nur Evi

Ir. Sudaryono, M.Eng., Ph.D.

"Penelitian itu Jalur Sunyi, Bukan Jalur Tol"



Sudaryono (43) adalah peneliti yang dinilai lebih banyak berkecimpung dalam penelitian-penelitian "mandiri" daripada penelitian-penelitian "pesanan" (proyek). Bapak dua anak ini, Ninggar (8) dan Lintang (5), menamatkan *Master of Engineering* (1988) dan *Doctor of Philosophy* (1993)-nya, dalam bidang Perencanaan Kota dan Perumahan, di Asian Institute of Technology, Thailand.

Saat ini, selain mengajar di Jurusan Teknik Arsitektur dan Pascasarjana UGM, ia juga aktif di Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunaan Nasional (P4N) UGM. Sudaryono banyak menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional, juga di media-media cetak. Karya tulisnya yang paling akhir (1999), berjudul *"The Practice of Self-help Housing in Indonesia"*, menunggu pemuatan di sebuah jurnal internasional.

Berikut kutipan wawancara BALAIRUNG dengannya.

Bagaimana keadaan pusat-pusat studi di UGM berikut program-program penelitiannya?

Penelitian memang membutuhkan organisasi. Dan pusat-pusat studi itu memiliki potensi. Hanya saja, bagaimana supaya pusat penelitian ini diisi oleh peneliti-peneliti, dan bukan semata-mata untuk mencari proyek belaka. Proyek-proyek ini sebenarnya bisa diciptakan melalui inisiatif peneliti, bukannya berasal dari suatu kantor atau departemen yang menawarkan atau minta tolong dibagikan. Saya rasa seharusnya tidak begitu lagi.

Artinya, para peneliti harus proaktif melakukan penelitian?

Ya, benar. Kita yang harus menciptakan tema-tema penelitian. Dan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi.

Tapi, banyakkah peneliti yang berinisiatif sendiri dalam penelitian?

Mungkin belum banyak, tapi sudah ada. Misalnya, kawan-kawan bioteknologi di Fakultas Biologi, Farmasi, atau di Kedokteran. Penelitian-penelitian mereka cukup aktual.

Anda menganjurkan penelitian mandiri. Apakah Anda sudah melakukan itu?

Sejak mengambil program pascasarjana, saya melakukan penelitian dengan inisiatif sendiri. Mengapa, karena saya merasa lebih bebas. Kalau proyek, ya, sekadarnya saja. Saya merasa tertekan jika harus bekerja dengan format yang mendikte. Produknya pun bisa diduga sebelumnya.

Maksudnya?

Sudah ada TOR (*terms of reference*) yang dibuat oleh pemberi proyek. Saya misalkan, penyandang dana memberikan proyek kepada perguruan tinggi (PT). Lalu PT menjalankan proyek sesuai dengan pesanan. Kalau di tengah proses penelitian ditemukan realitas yang lain, dan menawarkan pendekatan yang lain pula, biasanya tidak disetujui oleh pemilik proyek. Itu akan membengkakkan waktu dan biaya penelitian.

Di situ 'kan jadi tidak bebasnya. Padahal, penelitian yang baik, ketika suatu realitas ditemukan berbeda dengan asumsi sebelumnya, asumsi itu justru harus dikoreksi terus-menerus. Jadi, dengan sistem proyek, peneliti hanya berfungsi sebagai "justifikator" belaka.

Seringkali penelitian yang mandiri mengalami masalah aktualitas dan belum aplikatif dengan kebutuhan sekarang. Benarkah?

Itu kembali kepada sensibilitas peneliti. Harus dipahami *state of the art* suatu bidang penelitian. Kalau Anda meneliti studi-studi tentang psikologi lingkungan, ya...harus dipahami sampai sejauh mana penelitian mengenai hal ini bisa dilakukan. Dan itu meliputi pula aktualitas penelitian. Penelitian yang benar adalah pada ujung *state of the art*-nya.

Secara kualitas, bagaimana penelitian-penelitian di UGM?

Persentasenya mungkin masih kecil. Namun, apa penelitian di UGM harus berkualitas internasional? Itu tidak realistis. Yang penting membuat suasana kondusif, hingga para peneliti di UGM ini tertarik untuk memasuki dunia penelitian secara serius, kemudian mengomunikasikannya dengan komunitas sekitar.

Selama ini, apakah suasana itu sudah tercipta?

Misalnya di Fakultas Teknik, dekan memberikan insentif sebesar Rp1 juta untuk setiap penelitian yang dipublikasikan. Itulah salah satu upaya memberikan perhatian.

Kata Prof. Seno, penelitian sekarang tak lagi inovatif. Benarkah?

Secara umum ya. Tapi itu bukan cuma di UGM. Memang, sekarang terjadi transisi paradigma keilmuan, dari positivistik-rasionalistik menuju fenomenologi. Dalam positivistik hanya diuji hipotesis dan teori. Kalau teorinya salah maka rontoklah teori tersebut. Sekarang, paradigma baru mencoba keluar dari kejenuhan itu, supaya kerja ilmuwan tidak mekanistik. Melalui paradigma baru, ilmuwan mencoba melepaskan diri dari teori atau konsep-konsep yang ada, lalu masuk ke dalam realitas empiris. Dari situ, digalilah teori-teori baru.

Jadi, berubah dari kuantitatif ke kualitatif?

Ya, benar sekali. Kuantitatif sekarang sudah kuno. Ini sudah diterapkan di program doktoral. Misalnya, ada seorang mahasiswa doktoral meneliti sebuah pemukiman kumuh di Semarang. Dari wawancara dengan penduduk, hampir semuanya (99%) mengatakan bahwa MCK di sana merupakan bantuan GOLKAR sebab waktu itu sedang gencar dilakukan kampanye. Tapi, setelah dicek di PU, hal itu tidak benar. Dana itu berasal dari APBD. Semacam itu 'kan menunjukkan kebenaran statistik, namun bisa rontok karena informasi dari PU tadi, yang akurasinya amat tinggi. Nah, kemudian pendekatan kualitatif inilah yang berkembang. Jadi, penelitiannya *in-depth*, mendalam. Pendekatan natural inilah yang sekarang berkembang.

Bagaimana mengembangkan *sense of research*?

Sebenarnya itu bergantung pada individu. Ketika hal ini dilembagakan, saya tak percaya bisa berhasil. Misalnya, universitas harus meningkatkan *sense of research*, mereka tidak akan bisa karena itu berawal dari pribadi peneliti. Tugas universitas cukup memfasilitasi dan men-*support*-nya. *Sense* ini tak bisa direkayasa. Harusnya ada kecenderungan besar, lalu kita ditantang untuk bereaksi terhadap fenomena fenomena. Lagipula, itu tergantung sensitivitas, tidak mungkin dilembagakan. Universitas memang punya kepentingan namun tidak bisa dipaksakan. Universitas cuma bisa menyarankan. Semua terpulang pada individu. Yang bisa dilakukan untuk membangkitkan suasana itu adalah melalui seminar-seminar. Tapi, kalau tidak disambut oleh individu, sama juga *nggak* akan jalan.

Idealnya, apakah penelitian perlu waktu khusus, lepas dari kegiatan lain termasuk memberi kuliah?

Di situlah beratnya. Tri Dharma Perguruan Tinggi sebetulnya berat direalisasikan, kalau mau konsisten. Di satu sisi harus mengajar dengan baik, kemudian meneliti dengan baik, sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Di universitas luar negeri ini berlangsung gantian. Kalau melakukan penelitian, ya, libur satu semester, bahkan setahun. Keluar dari kampus lalu meneliti. Kalau telah selesai, kembali untuk mengajar.

Secara umum, di Indonesia, peneliti–peneliti tersebut bisa tercukupi kesejahteraannya?

Itu pun relatif. Penelitian itu jalur sunyi, bukan jalur tol! Untuk penelitian yang serius barangkali kita bisa menyisihkan honorarium penelitian, kadang-kadang bisa buat membeli komputer. Namun, kalau penelitiannya berskala kecil, kita malah bisa-bisa *nombok*. Yang bagus itu RUT (hibah penelitian). Yang sekarang, proaktif memberikan dana. Ada pos-pos untuk beli komputer. Bahkan kalau bisa menunjukkan urgensinya, bisa ke luar.❐

Rio Hutagaol, Zulkarnain

depan

n

lainan

n



menyongsong jaman baru Indonesia

Pendidikan Pancasila: Mengapa dan ke Mana?



Slamet Sutrisno
Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM

Tak ada yang ragu bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini umumnya tengah mengidap penyakit rohaniah, baik individual maupun kolektif, misalnya penyakit luntur rasa kebangsaannya. Padahal, dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi dan informasi, pemahaman tentang jati diri kebangsaan, tentang kepancasilaan, justru perlu dikembangkan.

Ungkapan Presiden Kennedy mungkin tak bakal pernah kadaluwarsa: "Janganlah bertanya apa yang dapat negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang dapat kamu berikan untuk negaramu". Sebagian orang menyikapi ungkapan itu sebagai sepenuhnya fasistik. Namun, barangsiapa yang memahami keindonesiaannya tentu akan berubah pikiran dari tudingan tersebut.

Semenjak terbitnya ufuk abad ke-20, cita rasa kebangsaan justru merupakan arus besar dalam serangkaian perjuangan kaum pergerakan. Wahidin Soedirohusodo berjuang di bidang sosial budaya buat mengangkat harkat orang Jawa, yang secara simbolik mencerminkan keindonesiaan. Sebelumnya, Sarekat Dagang Islam (SDI) memperjuangkan kecukupan ekonomi umat, yang implisit merupakan sikap melepaskan cap *inlander* bangsanya. Hal ini sama saja dengan mengimplementasikan semangat kebangsaan.

Tonggak-tonggak perjuangan dan pergerakan kebangsaan pun diawali dengan tonggak sosial budaya, tonggak politik, dan akhirnya sampai ke tonggak ideologis, sebagaimana tampak pada momen Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Substansi balada kejuangan itu, umpamanya, adalah pengorbanan dan kepahlawanan, bukan demi golongan dan ketokohan instan sebagaimana menggejala pada kaum oportunis murahan masa kini, melainkan sepenuhnya bagi kejayaan nusa bangsa.

Sayangnya, kini semangat kebangsaan semacam itu hilang bagai ditelan misteri. Orang harus merasa aneh dan asing mendengar kata-kata "pengorbanan", "perjuangan kebangsaan", atau "kepahlawanan". Di sisi lain, mereka kaum yang tak berkecukupan cepat berteriak, "Buat apa 'berpahlawan' di tengah anak-anak yang makin membutuhkan biaya sekolah!" Pada mereka kaum berkelimpahan, pertanyaan serupa ialah, buat apa peduli pada nasib negara-bangsa di tengah kebutuhan istri ke sekian, yang harus berganti giwang berlian atau mobil baru? Zaman ini bukanlah sebuah zaman yang mesti *dilakoni* dengan dan demi aneka derita ala bambu runcing!

* * *

"Gadis yang tak bisa menari akan mengatakan bahwa pemain musiknya tidak becus". Demikian bunyi pepatah bangsa Yiddish, yang bisa dikutipkan buat mereka yang enggan pada wacana kebangsaan dan patriotisme. Meski tak persis sama nuansanya, namun peribahasa ini cukup baik diberitahukan kepada mereka kaum hedonis: "Banyak orang yang kelihatannya berjuang dengan kesengsaraan toh bahagia, sementara banyak orang di tengah berkelimpahan amat sengsara". Tanyakanlah kepada generasi Soekarno-Hatta kebenaran kata mutiara itu. Tanyakan pula kepada generasi baru para mahasiswa yang, dengan "kesengsaraannya", sanggup menjungkalkan sebuah kekuasaan otoriter-totaliter.

Agaknya, telah jelas bahwa mereka yang menjauhkan dirinya dari cita rasa kebangsaan itu adalah mereka yang—sadar atau tidak—kurang mengerti sejarah. Negara-bangsa ini, tak pelak, dibangun oleh dan melalui sejarah. Pun bukan saja yang tampak manifes pada diri ketokohan, melainkan serangkaian ajaran zaman yang menyebarkan makna oleh nilai-nilai intrinsik yang diekspresikannya.

Bahkan, kalau kita mau menengok jauh ke masa silam, spirit yang mirip sudah muncul pada abad ke-7, tatkala Raja Kalinga di wilayah Jepara, Jawa Tengah, menebarkan kearifan dengan sikap kenegarawannya. Di zaman yang tua itu, Putri Shima—nama raja perempuan itu—ingin menguji kesetiaan kawulanya terhadap raja dan hukum negara. Ia meletakkan pundi-pundi berisi uang dinar, berikut catatan: "Barangsiapa menyentuh pundi-pundi ini akan dikenai hukuman sesuai undang-undang negara". Ketika terbukti ada


MERABUK. MURDI

seseorang yang menyepaki pundi-pundi itu, pun ternyata pula bahwa ia adik sang raja, Raja Kalinga tak segan-segan memerintahkan hukuman potong kaki kepada si terhukum.

Pada abad ke-13, raja Kediri, Kertanegara, marah besar kepada utusan kaisar Cina, Kubhilai Khan, yang memintanya takluk kepada kaisar dari negeri jauh itu. Konon, Kertanegara segera menghunus pedang dan menorehkannya pada dahi si utusan, akibat merasa terhina dilecehkan oleh penguasa asing.

Putri Shima maupun Kertanegara telah menunjukkan sikap keteladanan, yakni kejujuran dan keberanian dalam konteks cita rasa kenegara-bangsaan. Oleh karena itu, nyatalah betapa perlunya pengembangan perwatakan bagi generasi baru, dalam kerangka apa yang dahulu Soekarno dengung-dengungkan sebagai *"nation & character building"*. Tak akan ada bangsa yang berhasil membangun dan mengembangkan dirinya tanpa pembinaan mental dan watak kebangsaan.

Di lain pihak, upaya pembinaan itu mustahil ditempuh melalui cara-cara kuno: indoktrinasi, penataran P-4, ataulah temu kader. Sebabnya ialah pembentukan watak bangsa itu akan berkaitan benar dengan energi kultural, yang tak mungkin dicangkokkan hanya dalam tempo pendek, instan, atau sekejap mata. Apalagi bila diketahui bahwa masyarakat, lingkungan di mana benih-benih energi itu ditanamkan, ternyata penuh dengan gulma dan virus antinilai—entah sebagai akibat praktik orde pendahulunya, oleh kecanggungan kita menapaki modernitas, dan oleh kerusakan pembangunan yang sangat parah.

Seorang penulis berbangsaan Prancis pada abad ke-16, Michael Eyquem, menyatakan, "Siapa yang tidak berada dalam satu jenis hidup untuk orang lain, juga tidak banyak hidup bagi dirinya sendiri." Pernyataan itu pasti berkaitan langsung dengan penanaman semangat dan cita rasa kebangsaan bagi pembentukan watak bangsa. Bahkan dalam Islam, spirit seperti itu sudah berpahala tatkala masih potensial dalam wujud niat baik. Sedangkan bagi Kaum Nasrani, perkataan Bertrand Russel berikut bisa dicamkan: "Akar persoalannya adalah cinta kasih. Jika Anda merasakan ini, Anda punya motif untuk eksis, penuntun bagi tindakan, alasan untuk keberanian, keperluan mutlak untuk kejujuran intelektual." Ingatlah pula Sopochles, dramawan ulung Yunani, berkata hal yang sama, "Satu kata membebaskan kita dari semua beban dan rasa sakit kehidupan; kata itu ialah 'cinta'."

Dalam bahasa latin, cinta terungkap dalam *erros* (seksual), *fillia* (kekeluargaan), dan *agape* (kemanusiaan). Sikap mencintai bangsa dan tanah air merangkum sekaligus *fillia* dan *agape*. Untuk dimaklumi, terma tanah air dalam dunia baru akan mencakup tiga ranah: tanah air riil (teritorial), tanah air formal (negara dan konstitusi), dan tanah air mental (ideologi).



MERASUK. MURDI

* * *

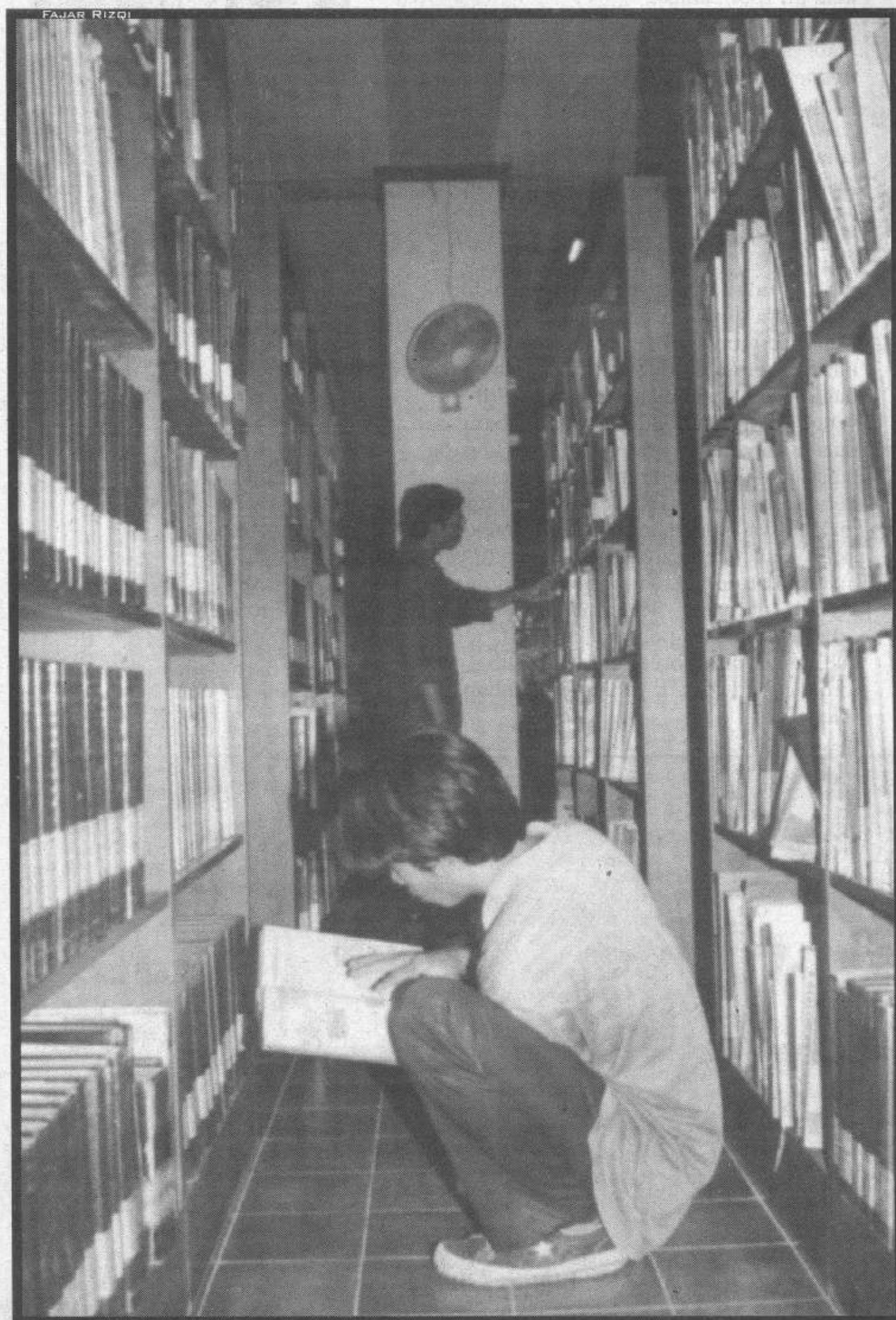
Maka tulisan ini tiba di terminal akhir. Pendidikan universiter yang disebut Mata Kuliah Umum (MKU), khususnya Pancasila, kiranya terutama dimaksudkan sebagai bagian dari pendidikan nilai, pendiditan watak, dan pendidikan mental kebangsaan, dalam konteks cita rasa dan cinta kepada tanah air—lebih-lebih tanah air mental. Pendidikan universiter itu akan mengajak mahasiswa memahami secara kontekstual-kritis. Bukankah sangat sedikit orang yang mampu jatuh cinta tanpa paham dulu kepada apa yang dicintainya itu?

Bahwa banyak perkuliahan MKU ternyata tak menarik dan boleh dibuat analogi, tak terbatas hanya pada jenis perkuliahan MKU.❐

Gaya Hidup Mahasiswa

Pilihan Ada di Tangan Anda!

UGM, namanya yang "besar", sebesar jumlah manusia di dalamnya, adalah jaminan heterogenitas. Ia memuat penghuni yang multiplis, juga beragam karakter yang tak mudah dirumuskan. Ada goresan radikal. Ada nuansa romantis. Tak luput bau urakan riuh rendah.


FAJAR RIZQI

Perpustakaan. Tempat "netral" untuk siapa saja.

Malam jam dua belas. Kampus terlelap. Sebut saja namanya Gugun, mahasiswa Sastra '97. Tengah malam itu, dia masih asyik berjoget dan bergoyang, mengikuti irama lagu yang sedang dimainkan teman-temannya di *basecamp* "For Us" Kampus Sastra. Maklum, beberapa hari lagi mereka akan *manggung*.

Di ruang lain, jam yang sama, Dian, mahasiswi Teknik Kimia '98, masih sibuk menyiapkan laporan praktikum "Gravimetri"-nya. Besok adalah saat terakhir pengumpulan laporan, sedang ia pun belum siap untuk *pre-test* praktikum pada hari yang sama.

Kehidupan mahasiswa yang beraneka ragam, kaya warna, seperti itu mungkin cukup wajar bagi sebuah kota pendidikan bernama Yogyakarta. UGM, sebuah universitas tua dengan 40 ribu lebih mahasiswa, pun menghadirkan berbagai keunikan dan aneka ragam kisah tersembunyi di balik kemegahan Gedung Pusatnya.

Didit Muhamadi (19) ialah salah satunya. Mahasiswa Teknik Fisika '98 ini, selain kuliah, juga aktif di Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Didit memang tertarik pada politik sejak SMU. Demo-demo yang sering diadakan mahasiswa pada paruh pertama 1998 kerap diikutinya. Melalui almameternya, SMU Muhamadiyah I Yogya, Didit bergabung dengan GAPCI (Gabungan Aksi Pelajar Cinta Indonesi). Setelah jadi mahasiswa, ia bergabung ke mentor organisasinya, KPRP.

Ketika ditemui BALAIRUNG, malam itu, Didit tampak sibuk. Ia dan beberapa temannya di KPRP sedang mempersiapkan sebuah konferensi anti-imperialis. Katanya, acara akbar itu bakal dihadiri oleh para aktivis pergerakan politik dari sejumlah negara Asia Pasifik. "*Woo*, stres! Stres!" keluhnya. Tas ranselnya penuh berisi draf-draf agenda

konferensi.

Jam sudah menunjukkan pukul sebelas lebih. Di ruang kerja berukuran kecil itu, Didit menghabiskan waktu bersama keenam temannya. Kebanyakan mereka mengaku tak bisa tidur di bawah jam dua belas. Waktu-waktu itu efektif buat kerja. Banyak hal bisa dilakukan Didit: dari koordinasi dan rapat kerja hingga *sharing* kehidupan sehari-hari dengan teman-teman KPRP-nya.

Kerja-kerja organisasi memang begitu menguras energi. Selain harus mengurus konferensi ini, esoknya pun ia harus kuliah di jam pertama. Tapi, biasanya, dia memilih bolos. "Masalahnya, aku sering bangun telat. Tidur jam dua belas atau jam dua, suruh bangun jam berapa?" tukasnya. Bagi Didit, bangun jam 8 atau 9 sudah cukup "pagi". Dan tak seperti teman-teman lainnya, setelah bangun pagi Didit bukannya segera kuliah atau berkegiatan di luar rumah. Dia mesti berlama-lama di depan komputer, memperbarui *web* KPRP, kemudian pergi ke warnet (warung internet) dan meng-*up-load*-nya. Jadi, saat istirahat amatlah langka. Itu harus dinikmati betul-betul.

Ya, begitulah Didit. Ini sedikit berbeda dengan Rahmat, mahasiswa Teknik Mesin '97. Walaupun sama-sama memilih jalur politik, Rahmat lebih suka melewatkan waktu istirahatnya dengan bermain *play station* sepak bola di komputernya. Mahasiswa berperawakan sedang yang sering menjadi koordinator lapangan dalam aksi-aksi mahasiswa ini bisa menghabiskan waktu berjam-jam demi kegemarannya itu.



Demonstrasi. Ekspresi terhadap rezim tiran tak mengenal jenis aktivitas mahasiswa.

Kesibukan yang beraneka ini, tentulah, bukan monopoli mahasiswa aktivis politik. Tak kalah hiruk-pikuknya keseharian para aktivis seni-budaya. Seperti yang terjadi pada Gugun (20), mahasiswa Antropologi, yang sehari-harinya hidup di bagian belakang gedung Fakultas Sastra. Dia menjadi bagian komunitas kebudayaan yang sering menamakan dirinya *Sastro Ndaloe* (*Ndalu*=malam dalam bahasa Jawa—*Red.*).

"Aku suka seni. Dan aku merasa asyik di sini," demikian Gugun mengawali percakapannya dengan BALAIRUNG. Gugun mengucapkan itu dengan santai, sesantai penampilannya: kemeja yang tak dikancingkan, celana jins butut, rambut acak-acakan.

"Penghuni *Sastro Ndaloe* (Sandal) memang beraneka ragam. Kita semua suka seni, meski seninya bermacam-macam. Ada yang suka melukis, musik, teater, dan puisi. Tapi, kalau ada kegiatan, kita bersatu dan saling mendukung. Orang-orang di sini alternatif dan independen. Merekalah jawaban atas kemalasan dan kebosananku terhadap sistem pendidikan. Pendidikan formal tak mencerdaskan!" tegas Gugun.

Pendek kata, *basecamp* "For Us", bagi Gugun, adalah segala-galanya: kos-kosan, sekolah, plus tempat bermain. Mungkin itulah yang membuatnya begitu betah berjam-jam—bahkan 24 jam—*nongkrong* di markasnya untuk melihat temannya latihan *band*. "Jadi, kuliah itu cuma bonus. Bisa diambil, bisa tidak. Tapi, ya, selama ini aku masih sering kuliah. Kewajiban moral *aja* sama orang tua. *Lagian*, yang kubenci sistemnya, bukan ilmunya. Aku masih suka *kok* belajar antropologi, terutama antropologi budaya," ungkap Gugun.

Menurutnya, belajar yang paling utama adalah belajar "proses hidup", bukan sekadar rajin kuliah dengan IP bagus. Dan di komunitas *Sastro Ndaloe*-lah ia bisa belajar itu semua: bekerja dan belajar sesuai pilihan, menghargai perbedaan dan tak tertindas oleh berbagai peraturan maupun birokrasi kampus. Mengagumi Jim Morrison, vokalis grup musik legendaris tahun '70-an, The Doors, adalah bagian dari proses itu. Dari lirik-lirik lagu The Doors, Gugun menemukan kritik-kritik sosial, yang kemudian mendorongnya untuk juga sesekali terlibat dalam aksi politis. Dari Jim Morrison jugalah dia belajar mabuk dan mencintai wanita.

"Komunitas ini asyik, menyenangkan, seperti keluarga sendiri. Di sini kita bisa belajar bersama sesuai hobi dan kesukaan. Banyak teman, banyak pengalaman, dan yang pasti santai. Berbagai topik bisa diobrolkan di sini, mulai dari persoalan sastra sampai topik politis. Itulah yang mungkin membuat kita semakin erat. Selain itu, juga soal 'minum'!" ujarnya sambil *nyengir.*

Tuduhan mengonsumsi minuman keras dan narkotika memang tak bisa ditolaknya. "Aku memang pakai *cimeng* (ganja—*Red.*). Tapi *nggak* semua anak Sandal gitu. Cuma beberapa. Itu pun cuma buat *fun-fun*, relaksasi!" jawabnya.

Gugun mengaku, porsi konsumsinya tak berlebihan dan tak akan membuatnya kecanduan. Minum sekali sampai tiga kali sehari bukanlah sesuatu yang berbahaya baginya. "Minumnya kalau pas tidak ada kegiatan *kok*," Gugun beralasan. Tapi jangan tanya soal rokok padanya. Ya, dia memang paling tak bisa hidup tanpa rokok. Dia bisa menghabiskan lebih dari dua bungkus rokok tiap hari.

Tampaknya, kelakuan inilah yang membuat orang lain berpikir miring tentang Sandal dan dirinya. "Dituduh anak nakallah, pemalaslah. Aku sih *cuek-cuek aja.* Kita masing-masing 'kan punya pilihan hidup. Selama aku *nggak* merugikan orang lain, *nggak* apa-apa, *tho?*"

Apa yang diungkapkan Gugun mungkin tak jauh beda dengan yang dikatakan Toni, mahasiswa Sastra Indonesia '96, aktivis Teater Gadjah Mada (TGM). Menurut Toni, ia masuk UKM Teater sebab minatnya besar pada kesenian. "Aku aktif di teater sejak SMA," ucapnya.

Menurutnya, teater dapat digunakan sebagai tempat belajar kebudayaan yang cukup intens. Komunitas ini amat erat, egaliter, menyenangkan. "Kehidupan kita banyak dihabiskan di sini, hingga terjalin ikatan emosional yang sangat kuat di antara kami," tambahnya.

Sementara itu, seorang anggota TGM yang lain, Asas, mahasiswa D-3 Ekonomi, mengatakan bahwa ia memilih kegiatan di TGM karena ia memperoleh kepuasan batin yang tak diperolehnya dari kuliah. Hampir tiap hari Asas menghabiskan waktunya di Gelanggang Mahasiswa, markas TGM. Bahkan, kadang-kadang Asas sampai bolos kuliah. "*Wong*, namanya kuliah ya *kayak gitu aja*," Asas menandaskan. Menurutnya, kuliah tak menjamin orang mampu menguasai ilmu. "Pelajaran yang dikuliahkan mungkin hanya akan bertahan selama tiga-dua bulan," tambahnya.

Toni pun berkata tak jauh beda. "Malahan, kuliah *nggak* begitu saya perhatikan. Yang penting teater. Kalau kuliah ya kuliah, ujian ya ujian," ucap Toni. "*Nggak* ada target tertentu. Pokoknya, dijalani aja, *deh*," ucap Toni lagi, ketika ditanya tentang masa depan kuliahnya. Tapi dia mengakui, kuliahnya di Sastra Indonesia menunjang kegiatan teaternya. Toni menyambung, "Dari teater kita jelas tak bisa berorientasi profit. Teater tak akan memberi jaminan material."

Betapapun mereka gandrung terhadap teater, *toh* tak selamanya mereka merasa nyaman dengan predikat aktivis teater. Seperti dikatakan Asas, "Saya merasa bahwa saya dianggap *nyeleneh* (aneh—*Red.*). Tapi saya sendiri tak tahu *nyeleneh*-nya seperti apa. Mungkin karena kebiasaan yang saya peroleh dari lingkungan TGM berbeda dengan di kampus," tandas Asas yang juga aktif di HMJ dan BEMF Ekonomi ini.

Tuduhan miring, bahwa anak-anak yang bergerak di wilayah kesenian cenderung membuang waktu dengan ngobrol dan bergurau, tidak mereka sangkal. "Habis mau *gimana*? Keadaannya memang seperti itu, *sih*!" Tidak adanya produksi dan pementasan tak menghalangi 25 anak-anak TGM untuk ngobrol dan nongkrong sampai larut malam. Mereka baru bangun keesokan harinya, minimal jam delapan!

Percakapan komunitas-komunitas di atas, mungkin, akan sangat berbeda dengan percakapan seorang Dian, mahasiswi Teknik Kimia '98, yang sebagian besar waktunya dihabiskan buat mengotak-atik rumus-rumus fisikanya. "Habis, *gimana* lagi. Aku *udah* memilih *kok*. Dan aku suka," ucap Dian.

Dian adalah realitas lain yang selalu identik dengan rumus-rumus hapalan, praktikum, PR hitungan, dll. Kurikulum pendidikan telah mengharuskan mahasiswa seperti Dian mengambil 156 SKS penuh, berikut sekian beban yang membuatnya praktis tak bisa "bergerak".

Hal yang sama pun menimpa John M. Mahasiswa Biologi '98 ini mesti membuat laporan praktikum enam kali tiap minggunya, dan menghapal bahan yang akan diujikan sebelum praktikum dimulai. "Kurikulum pendidikan memang sudah ditetapkan sedemikian rupa. Kita 'kan tinggal menjalani saja!" cetus John.

Lain lagi dengan Andi, mahasiswa MIPA '97, yang IP-nya mencapai nilai sempurna: empat. "Ini 'kan masalah pilihan. Mungkin teman-teman lain bahagia dengan memilih kegiatan di luar, dan saya bahagia dengan pilihan saya yang hanya kuliah," kata Andi. Baginya, siapapun sah-sah saja memilih kegiatan. Namun, perlu diingat, yang paling utama tetaplah kuliah. "Karena kita disuruh orang tua ke sini untuk kuliah," tandasnya.

"Kebijakan" pemerintah lewat NKK/BKK, juga pengetatan kurikulum nasional, ternyata, telah membuat orang-orang seperti Dian, John, dan Andi meluangkan banyak waktu untuk membuka-buka buku catatan, rajin ke perpustakaan, aktif berburu buku referensi praktikum—atau paling tidak bangun jam tiga pagi buat menyelesaikan laporan praktikum.

Seperti diakui Dian, ia memang banyak menghabiskan waktu untuk kuliah dan belajar, hingga tak sempat buat sekadar ikut UKM atau organisasi-organisasi di luar Teknik Kimia. "Sebenarnya ingin ikut juga, tapi waktuku 'kan sudah habis. Jadi organisasi yang kuikuti yang dekat dengan kampus *aja*!"

Dian mungkin sedikit mau meluangkan waktunya untuk kegiatan di luar kuliah. Ia ikut aktif di penerbitan jurusan. Tapi, inipun masih dalam rangka menunjang kesuksesan akademis. "Aku ingin tahu dan mencoba manajemen usaha penerbitan. Sekalian belajar lebih dalam tentang keteknik-kimiaan," katanya.

Mahasiswa seperti Dian memang banyak di UGM, juga di kampus-kampus lain. Kuliah menjadi sebuah kewajiban yang menuntut pertanggungjawaban, ketekunan, dan barangkali merenggut kebebasan. "Aku sering heran dengan anak sosial (non-eksak—*Red.*). Mereka *kok* santai sekali. Beda dengan anak eksak yang, *kayaknya*, tekanan dan bebannya berat," tambah Dian.

Bisa jadi ucapan Dian ada benarnya. Namun, bukan berarti ia tak tahu sama sekali tentang hal-hal lain di luar kuliah. Dunia Fisika, yang sarat angka-angka, tak menghalanginya untuk menyukai bacaan-bacaan filsafat. Walaupun itu sebatas membaca, bukan untuk minat dan ketertarikan yang lebih jauh. Bila ditanya mengapa, ia menjawab, "Belajar filsafat membuat orang lebih dewasa, lebih bisa menjalani hidup dengan tenang dan enak." Cuma, mahasiswa dengan IP di atas 3 ini pun tak mampu belajar filsafat secara intens. Lagi-lagi karena tak punya waktu.

Apa yang terjadi pada Dian, ternyata, dialami pula oleh Munib (20), mahasiswa semester ketiga Fakultas MIPA. Munib mengaku, sebenarnya dia suka membaca komik dan buku-buku agama. Kedatangan teman satu kamarnya yang punya banyak buku-buku keagamaan membuat Munib semakin intens membaca wacana-wacana di luar kuliahnya.

Begitulah, UGM bisa jadi seperti apa yang dibayangkan Dian, menjadi sebuah elevator untuk mewujudkan cita-citanya: lulus cepat dengan IP *cumlaude*; segera beroleh kerja di perusahaan *bonafide*, dengan gaji sekian juta; memperoleh pendamping yang baik; lantas membangun keluarga yang, tentu saja, harmonis". Berbagai warna mahasiswa ini seakan mengantarkan UGM menjadi sesuatu yang terlihat absurd, menyenangkan, menjengkelkan, tapi juga menindas.

Mahasiswa memang selalu punya cara untuk menyuarakan aspirasi dan membentuk dirinya. Sebagai anak kandung sistem pendidikan kapitalistis, mereka bisa memanggul tanggung jawab moral terhadap orang tua, tuntutan karir, dan harapan sejati rakyat. Demonstrasi, teater, musik, ganja, baju bermerk, *handphone, textbook*, ataupun komik adalah ekspresi.

Mereka bisa berwajah serius, musikus amatiran, dramawan, sampai demonstran sekaligus "*anak gaul abis*". Atau, seperti Gugun yang menirukan Jim Morrison sambil menghisap *cimeng*: *I've always been attracted to ideas that were about revolt against authority.... I like ideas about the breaking the established order. I'm interested in anything about revolt, disorder, chaos and seems to have no meaning*."❐

Veronika Kusuma
Darmanto

Gerakan Mahasiswa UGM dan Kukuhnya Mitos "Cowboy"


DOK. PRISADI

Ridaya La Ode Ngkowe
Ketua Umum SM-UGM 1997—1998,
Mantan Aktifis Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY)

Adalah almarhum Soe Hok Gie, nama yang sangat dekat di hati aktivis gerakan mahasiswa Indonesia, yang menganalogikan gerakan mahasiswa sebagai *"cowboy"*. Dari horison yang jauh, demikian Soe Hok Gie menulis, mereka datang ke sebuah kota untuk menantang berduel bandit-bandit yang menebar ketidakadilan, perampokan, pemerkosaan. *Cowboy* menang membasmi para bandit dan segera bergegas pergi ke horison yang jauh, sebelum penduduk kota sempat mengucapkan terima kasih.

Analogi *cowboy* ala Soe Hok Gie tersebut, tampaknya, tetap pas untuk menjelaskan dinamika gerakan mahasiswa Indonesia, khususnya di UGM, saat ini. Bagaimana tidak. Kendati hal ini sudah dicoba diantisipasi oleh aktivis-aktivisnya, pasca tumbangnya Soeharto gerakan mahasiswa kembali berada pada posisi marginal. Suara mahasiswa nyaris tak lagi berarti apa-apa. Berbeda dengan saat pergolakan menemukan momentumnya sehingga bisa memaksa Soeharto turun dari panggung kekuasaan. Padahal, sekian agenda masih membentang menanti giliran diperjuangkan.


NO TITLE. ANTOK

Beberapa kali aksi massa memang tetap dicoba digalang oleh berbagai elemen di berbagai kota. Kecuali aksi menentang UU PKB, nyaris tak ada lagi aksi yang dapat dikategorikan "sukses". Tak kurang barangkali jika dikatakan, gerakan mahasiswa telah kehilangan momentum. Kendali opini publik kini diambil alih oleh elite, baik elite oposisi (intelektual senior dan tokoh-tokoh parpol) maupun elite rezim lama yang masih bertahan.

Saat transisi politik yang berujung pada terbentuknya "pemerintahan bagi-bagi kekuasaan" di tingkat elite, ditandai dengan absennya oposisi di parlemen dan gejala munculnya orang kuat pada *top executive*, pertanyaan mengapa gerakan mahasiswa kembali memasuki masa-masa sulit dan termarginalisasi menggugah pikiran kita. Jawaban pertanyaan tersebut semakin urgen jika melihat di hadapan kita adanya ketegangan hubungan antara berbagai daerah dengan Jakarta (ada juga yang menyebut Jawa!), kerusuhan sosial yang tak berkesudahan di daerah-daerah, juga strategi pemulihan ekonomi oleh pemerintahan baru—yang masih menempuh jalan yang ditawarkan oleh kapitalisme global. Sejumlah agenda pemulihan keadilan dan demokrasi lainnya pun masih porak-poranda.

Pertanyaan tersebut memang tidak sederhana jawabannya. Selain bermotif ditemukannya jalan bagi terbangunnya kembali basis (massa) gerakan, itu juga menuntut dirumuskannya segera ideologi gerakan mahasiswa pasca terbentuknya pemerintahan baru. Akan tetapi, jawaban barangkali dapat ditelusuri dengan menyimak beberapa sisi dari dinamika gerakan mahasiswa, khususnya di UGM, di tahun 1998 kemarin.

Kepekaan Semu

Sisi pertama yang layak disimak secara seksama ialah bagaimana gerakan mahasiswa di tahun 1998 kembali membuktikan betapa kekuatan utama gerakan mahasiswa bertumpu pada massanya. Meski kekuatan internal pada mahasiswa adalah intelektualitasnya, suara-suara perlawanan mahasiswa tak bermakna apa-apa jika tidak diamplifikasi dengan akumulasi massa yang signifikan sebagai kekuatan tawar.

Nah, dari proses akumulasi massa ini bisa dilihat bahwa mahasiswa baru bereaksi atau ikut jika sudah merasakan sendiri dampak suatu dinamika (krisis). Ini dapat dilihat pada aksi-aksi di bulan Maret 1998. Wajah-wajah mahasiswa kita didominasi oleh wajah-wajah heroik, penuh gairah perlawanan dan optimis membangun keadilan dan demokrasi. Setelah Soeharto tumbang, wajah-wajah tadi kembali muram oleh apatisme dan mental subsisten. Daya adaptasi yang luar biasa terhadap krisis

dan cengkeraman hegemoni "sekolah" menyisakan sedikit saja (minoritas) mahasiswa yang layak dikatakan punya kepekaan dan—apalagi—responsif serta progresifitas, Terutama menyangkut hal-hal yang tidak kasat mata dan berjangka panjang. Di sinilah kesulitan membangun kembali kekuatan massa gerakan ditemukan.

Gesekan-Ketegangan

Sisi lain dari dinamika gerakan mahasiswa di UGM ini, yakni kelemahan di tingkat massa tadi, tidak dibarengi dengan konsolidasi yang memadai di tingkat organisasi gerakan. Jika dinamika gerakan mahasiswa di UGM disimak secara cermat, dapat dilihat bagaimana sebenarnya terjadi gesekan-gesekan atau ketegangan di antara kekuatan-kekuatan gerakan mahasiswa yang eksis (KM-UGM, LMMY, KPRP, DEMA, KAMMI, dsb.). Ketegangan-ketegangan itu oleh masing-masing elemen dicoba diusahakan untuk tidak saling bertabrakan melainkan bisa sinergis.

Pascakulminiasi pertama (jatuhnya Soeharto), ketegangan tetap "dipelihara". Tak adanya—tepatnya, keengganan atau ketidakmauan—melakukan dialog tentang masa depan gerakan mahasiswa UGM adalah penandanya. Padahal, mekanisme pengelolaan konflik semacam itu tampaknya sulit diandalkan sebagai cara konsolidasi kekuatan-kekuatan gerakan di UGM yang produktif. Kepercayaan diri, atau mungkin layak disebut arogansi, yang berlebihan pada masing-masing elemen terlalu sulit ditanggalkan pada saat tuntutan zaman untuk mengorganisir gerakan mahasiswa di UGM, dalam satu wadah perjuangan yang produktif, tampak sangat urgen. Mereka (elemen-elemen gerakan di UGM) enggan mundur setapak pun, untuk saling mempertukarkan keunggulannya masing-masing, saling mengajari dalam sebuah wadah perlawanan untuk menutup kelemahan yang ada pada gerakan mahasiswa di UGM saat ini.

Massa Terorganisir

Sisi ketiga dari dinamika gerakan mahasiswa di UGM adalah sukses mereka mendemonstrasikan keterbukaan gerakan mahasiswa terhadap bergabungnya elemen-elemen rakyat. Aksi-aksi bersama elemen-elemen rakyat, terutama yang cukup rapi didemonstrasikan oleh KPRP, telah membuat banyak orang terperangah. Itu bahkan menjadi sumber inspirasi berbagai elemen gerakan mahasiswa di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain. Kesuksesan ini, tentunya, tak lepas dari momentum krisis yang dapat dijadikan isu untuk menarik simpati dan memobilisasi solidaritas massa.

Sulit rasanya, kalau dalam keadaan seperti sekarang, untuk menjadikan kekuatan elemen-elemen rakyat sebagai penopang gerakan mahasiswa, meskipun ia diberi label gerakan rakyat. Pada hemat saya, dengan mengasumsikan lokus gerakan mahasiswa tetap pada mahasiswa, maka metode pengorganisasian rakyat seperti yang dilakukan selama ini harus diadopsi untuk mengorganisir mahasiswa UGM saat ini.

Pengorganisasian ini akan berdampak pada, setidaknya, empat hal. Pertama, pengorganisasian gerakan mahasiswa UGM mempunyai massa riil yang dapat digunakan untuk perlawanan, dengan isu apa pun. Dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 30.000 (termasuk pascasarjana yang tampaknya cukup potensial), merindukan angka 500 sampai 1000 orang massa yang terorganisir rasanya cukup realistis. Kedua, keberadaan massa riil juga bermakna memperbesar jumlah mahasiswa yang bukan saja sensitif, tetapi lebih jauh responsif dan progresif. Belum lagi jika jumlah itu dipandang sebagai agen ploriferasi wacana kritis atau wacana perjuangan. Ketiga, jumlah massa yang besar dengan ragam latar belakang keilmuan akan saling mendukung dalam pengangkatan isu-isu sektoral. Saling mendukung ini dapat dijadikan instrumen untuk mendekatkan sebagian besar mahasiswa dengan gerakan. Maka, tudingan gerakan mahasiswa hanya melulu *concern* pada isu-isu politik elite, jauh dari dimensi-dimensi disiplin yang dipelajari di bangku kuliah, dapat dijawab secara langsung. Keempat, massa besar yang terorganisir mengukuhkan lokus kekuatan gerakan mahasiswa pada bertemunya intelektualitas, dara muda, dan massa yang signifikan, sehingga suara gerakan mahasiswa tak lagi punya makna. Keempat, dampak yang dihitung ini merupakan jawaban atas problem sisi pertama dinamika mahasiswa UGM. Ia mensyaratkan ditutupnya lubang yang terbuka pada sisi kedua dinamika gerakan mahasiswa di UGM.

Watak Sentralisme

Akumulasi kealpaaan pada ketiga sisi dinamika gerakan mahasiswa UGM di ataslah, menurut saya, yang menjadi penyebab tetap kukuhnya mitos *cowboy*—ala Soe Hok Gie—di UGM. Jikalau dalam analogi *cowboy* terdapat makna implisit bahwa kepergian *cowboy* sebagai bentuk "serah terima tanpa pamrih" atas kendali perubahan berikutnya, setelah pendobrakkan kepada elite, karena bukan porsi mahasiswa, maka jangan-jangan yang terjadi adalah ketersisihan, keterpinggiran, atau ketertinggalan, akibat ketidakmampuan mahasiswa memberdayakan dirinya sendiri—di tengah situasi yang terus berubah di mana keadilan sosial dan demokrasi masih menampakkan wajah kusam, murung.

Kemampuan gerakan mahasiswa untuk berdiri di *avant garde* perjuangan untuk perubahan di saat krisis sudah terbukti. Termasuk dalam menepis anggapan bahwa gerakan mahasiswa hanya bisa eksis jika ada dukungan elite penguasa.

Yang belum, barangkali, ialah kemampuan mahasiswa memelihara momentum perubahan di mana suara mahasiswa tetap dihitung dan punya daya tawar. Harapan semacam ini akan kian sulit saja diwujudkan, mengingat akibat dari liberasi politik sebagai konsekuensi logis transisi politik seperti yang kita alami sekarang.

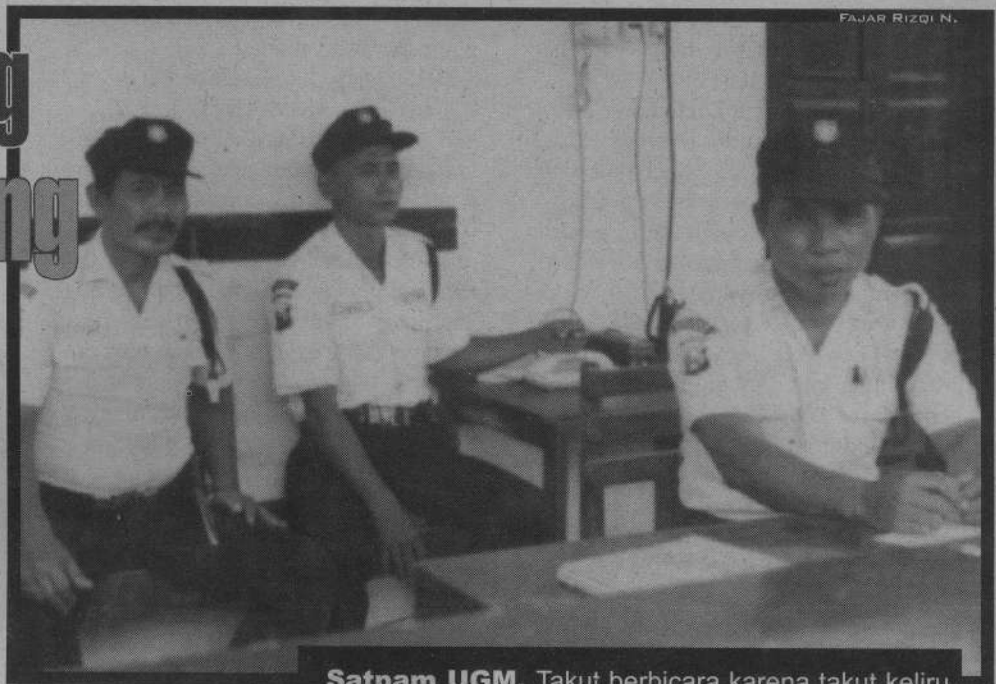
Liberasi berdampak pada mulai berperannya kembali lembaga-lembaga politik dalam menyuarakan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, dan segregasi wacana demokrasi di kalangan masyarakat sipil yang sulit dicarikan prioritasnya. Pers sebagai pilar demokrasi, yang juga tak luput dari liberasi, menjadi sulit diposisikan sebagai institusi yang mengonsolidasikan gerakan mahasiswa—seperti pernah dilakukannya saat gerakan mahasiswa tak mampu mengonsolidasikan diri pada momentum 1998.

Di titik inilah gerakan mahasiswa UGM ditantang untuk memperbaiki dirinya sendiri: menutup lubang-lubang yang selama ini menganga, termasuk memperbaiki watak sentralistik yang sedikit-banyak, menurut kawan-kawan mahasiswa luar Jawa yang saya temui, dimiliki oleh gerakan mahasiswa Jawa. Indikasinya, mahasiswa Jawa tak mau menyuarakan aspirasi "daerah". Meskipun, menurut mereka, kepercayaan dan harapan pada gerakan mahasiswa UGM, sebagai simpul penting gerakan mahasiswa Indonesia, masih ada.

Tanpa memperbaiki semua itu, mitos *cowboy* akan tetap kukuh. Dan, impian agar gerakan mahasiswa punya andil (apalagi memimpin) dalam perubahan akan tinggal impian.❐

Tentang Mereka

Orang-Orang Tak Terhitung



Satpam UGM. Takut berbicara karena takut keliru.

Suatu hari di sebuah pesta selamatan seorang dosen yang baru meraih gelar doktor. Para pejabat rektorat, dosen, hingga pegawai biasa tampak larut dalam meriahnya acara. Seperti biasa, pejabat rektorat dan dosen makan dengan cara prasmanan; sedang para pegawai biasa, seperti biasanya pula, dipisah dan cuma diberi makan "nasi kotakan".

Peristiwa itu terjadi di UGM, sebuah universitas yang kadang, dengan agak tinggi hati, disebut sebagai "komunitas intelektual". Sebuah komunitas yang melibatkan puluhan ribu orang dari berbagai latar. Maka, pola hubungan kerja pun tercipta dengan sendirinya, antara pejabat, dosen, dan karyawan. Peristiwa di atas sedikit banyak bisa menjelaskan bahwa Jawa, yang kata orang "feodal", ternyata bukan hanya monopoli keraton.

Pengaruh budaya Jawa, di mana rasa *pakewuh* berlaku, menghinggapi para pegawai UGM. Tentunya, ini kontradiktif dengan sepak terjang mahasiswa dan dosen UGM, yang kental dengan hawa demokrasi dan reformasi. Pun profil seorang Ichlasul Amal, Rektor UGM yang cukup vokal mengritik penyimpangan pada elite pemerintah, tak menginspirasikan apa pun kepada sebagian besar pegawai UGM--untuk lebih berani berbicara. Apalagi jika berkaitan dengan birokrasi, tempat kini mereka berada di dalamnya sebagai sebuah elemen kecil.

Joko Nuranto (33), staf baru Bagian Rumah Tangga Fakultas Filsafat, setelah 8 tahun menjadi sopir, hanya bisa mengeluh dengan rekan sekerjanya. "Pimpinan di Filsafat kadang pilih kasih. Ada yang tak bisa kerja masih dipakai terus hanya karena dekat dengan pimpinan," gerutunya. Ini dibenarkan oleh Budhi (37), Kabag RT Fakultas Filsafat. Budhi mengaku, "Struktur organisasi di sini tidak rapi, profesi kurang dihargai. Pimpinan asal tunjuk saja sehingga pegawai kadang melakukan pekerjaan yang bukan bagiannya."

Hal senada pun terlihat dari ungkapan Yuswantoro, salah seorang satpam Gedung Pusat yang belum genap setahun bekerja di UGM. "Takut keliru!" ujarnya, "karena saya bekerja dalam suatu korps. Jika ada yang tak sesuai dengan pendapat korps, nanti mencoreng nama baik korps dan mendapat teguran dari atasan."

Tapi, bukan berarti tak ada yang berani *complain* ke atasan. Supratikno (47), Kepala Urusan Listrik pada Bagian Listrik dan Air, yang koordinasinya berada di bawah Bagian Perlengkapan Gedung Pusat, mengutarakan tentang adanya kontradiksi antara urusan listrik dan taman. "Rupanya Pak Amal kurang antusias dengan listrik. Beliau lebih mementingkan urusan taman, padahal kami sudah laporkan bahwa pohon-pohon yang di Boulevard dan beberapa di depan Balairung berada di atas jaringan listrik, jika dibiarkan, lama-kelamaan akarnya akan merusak jaringan listrik tersebut, sehingga membahayakan," cerita ayah tiga orang anak ini.

Hanya saja, ternyata laporan tersebut tak diindahkan. Seperti diakui oleh Kabag Perlengkapan, Drs. Suratman, "Pak Amal langsung yang telepon ke bagian perlengkapan, minta agar tempat dan jenis pohonnya beliau sendiri yang menentukan. Kami sudah beritahu masalah jaringan listrik itu, tapi mau bagaimana lagi kalau itu sudah keinginan pimpinan. Kami tinggal melaksanakannya saja."

Di tingkat pegawai dengan kedudukan yang sangat rendah, perintah dan teguran merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka. "Namanya juga orang kerja, ya memang untuk disuruh-suruh," ujar Pak Parmin (53), tukang kebun yang sudah 14 tahun mengabdi di Fakultas Psikologi.

Tak jauh beda penuturan Maryono (38), petugas kebersihan Gedung Graha Sabha Pramana. Ia sering ditegur atasannya yang suka "main perintah". Untuk memprotes tindakan tersebut, lelaki yang tinggal di Babarsari, Sleman, ini sempat melakukan mogok kerja selama satu hari bersama enam orang rekannya. Cara ini, syukurlah, cukup efektif untuk membuat atasannya lebih pengertian, meski cuma beberapa hari. Selanjutnya, Maryono kembali dihadapkan pada tabiat otoriter atasannya.

"Begitulah akibat sikap bawahan itu sendiri yang menempatkan dirinya sebagai objek, dalam posisi yang siap diperintah," tanggap Drs. Rasimin, B.S., M.A., dosen Fakultas Psikologi. Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan teori harapan, faktor penghasilan yang tak mencukupi kebutuhan dasar membuat pegawai-pegawai kecil sangat peka jika ada ketidakberesan di kantor, misalnya perlakuan yang tak adil atau diabaikan. "Karena ketidakberanian dan

ketidakterbukaan mereka, maka manifestasinya adalah perilaku yang tak produktif," tambah Rasimin.

Akibat yang terjadi kemudian bisa dilihat pada sudut-sudut Kampus UGM. Di mana-mana sampah bertebaran, dan rerumputan liar tak terurus. Penjaga parkir lebih suka bermain kartu, petugas kebersihan sibuk menggodai mahasiswi, atau pemandangan yang kerap tampak di Gedung Pusat ketika jam kerja: pegawai-pegawai bergerombol bersenda gurau. Juga satpam yang termangu di depan layar televisi di pos jaga bagian depan Gedung Pusat saat jam kerja.

Kerja Terbentur Gaji Minim

Pola kerja yang tak sistematis, kurang dihargainya waktu, menurut Rasimin, karena tak ada sistem yang jelas untuk mengontrol kerja mereka. "Lihat saja, seringkali pegawai-pegawai kecil itu sekitar pukul 11-an cuma duduk ngobrol, *kayak nggak* ada kerjaan. Padahal kerjaan masih banyak," katanya.

Persoalan jeleknya kinerja para karyawan UGM itu tak lepas dari masalah umum PNS di Indonesia. Rasimin menjelaskan, Dr. Chris Manning (peneliti pada PPK-UGM--*Red.*) pernah mengadakan riset soal ini (*Prisma*, Januari 1988). Menurut Manning, gaji PNS itu sebetulnya sangat besar, karena dalam satu hari, kerja efektifnya cuma dua jam. "Jadi, jika waktu kerja 8 jam, yang 6 jam untuk duduk, ngobrol, baca koran," tandas Rasimin panjang lebar.

Lumayan banyak jumlah pegawai UGM. Ada 2.419 orang berstatus PNS, 952 orang tenaga honorer yang "di-SK-kan", sejumlah tenaga honorer lainnya yang "tak dilaporkan" pihak fakultas ke pusat, serta pegawai Graha Sabha Pramana--yang pengelolaannya ditangani yayasan. Kinerja mereka itu, memang, patut dipertanyakan.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Kepegawaian UGM, Hariyadi, S.H., ketika ditemui BALAIRUNG di ruang kerjanya, mengemukakan bahwa jumlah pegawai sebenarnya masih dapat dirampingkan. Tapi, karena setelah rekruitmen PNS tahun 1994 secara nasional jumlah PNS tak bakal ditambah lagi, maka untuk mengganti yang pensiun diperlukan sokongan tenaga honorer. "Diperlukan suatu penelitian apakah tenaga honorer sudah memenuhi kebutuhan kepegawaian ataukah belum," ujar Hariyadi. Lebih lanjut dikatakan, pengangkatan tenaga honorer di UGM menjadi kewenangan masing-masing fakultas, sedang Kantor Pusat cukup mengeluarkan SK dan mendatanya saja.

Hariyadi mengakui pula, banyak tenaga honorer UGM yang dibayar dengan tidak semestinya. "Karena sifatnya yang tak terikat UMR, maka kami tak berwenang menegur jika ada pegawai honorer yang dibayar sangat murah," ujarnya memberi alasan. Tak cukupnya gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi yang sudah berstatus PNS ataupun tenaga honorer, kemudian, membuat banyak pegawai mencari penghasilan tambahan di luar jam kerjanya.

Pak Budhi misalnya. Pegawai Fakultas Filsafat ini kadang *nyambi* jadi makelar. Kerap ia meninggalkan tempat kerjanya jika ada *obyekan* lain. Sedangkan Maryono mengandalkan lembur untuk menambah honornya, yang berjumlah Rp130.000 sebulan, walaupun uang lembur itu hanya Rp500 per jam.

Yang terjadi kemudian, gaji yang diterima tak dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih produktif. Kondisi itu justru membuat mereka lebih berkonsentrasi untuk mencari uang lebih banyak lagi, demi menghidupi keluarganya. Sebagaimana digambarkan Dra. Noor Siti Rahmani, hal tersebut disebabkan tak adanya *reward* dan *punishment* yang jelas bagi para pegawai. "Mau rajin, *nggak* dapat hadiah. Malas-malasan didiamkan saja, paling cuma ditegur. Akhirnya, ya...sudah, sikap *inggih-inggih ning ora kepanggih* membudaya di kalangan pegawai kecil suatu birokrasi," jelasnya.



Mbah Barjo. Penunggu setia parkiran Gelanggang.

Otonomi kampus, walau masih dalam pembicaraan, akhirnya menjadi harapan Kabag Kepegawaian agar lebih memotivasi efektifitas kerja pegawainya. "Dari segi kepegawaian, profesionalisme sangat dibutuhkan. Ini bisa memotivasi para pegawai untuk kerja lebih giat. Karena jika tidak, maka mungkin tak akan dipakai lagi," ucapnya.

Terhadap rencana tersebut, Bambang selaku salah satu komandan regu satpam UGM menganggap tak ada masalah. "Kita tidak bisa mengelak. Lagi pula, profesionalisme memang diperlukan dalam bekerja," ujarnya sembari berharap dengan diberlakukannya otonomi kampus tenaga satpam dapat ditambah. Sedangkan Ari Djatmiko (36) mengungkapkan kekhawatiran akan adanya otonomi kampus. "Saya takut kalau-kalau atasan merasa tidak cocok, lalu saya dikeluarkan," kata tukang kebun FMIPA ini, yang sudah tiga kali gagal dalam ujian PNS.

Untuk tenaga honorer, otonomi kampus juga bakal kian memperkuat status mereka. "Tenaga honorer nanti akan mempunyai hak yang sama dengan pegawai yang tadinya berstatus PNS, yaitu sama-sama berstatus sebagai 'pegawai UGM'. Jadi, dari segi penggajian pun akan dibuat standarisasi berpatokan pada gaji PNS," jelas Hariyadi.

Berbekal Asa, Bermodal Loyalitas

Kesenjangan semakin bila situasi di atas dibandingkan dengan Magister Manajemen (MM). Meski memakai nama UGM, pengelolaan MM adalah swasta penuh. Hal ini diakui Suratman (32), satpam MM yang sebelumnya tenaga honorer di Unit Pelaksanan Teknis Perpustakaan (UPTP) I. Walau gaji pokok hanya Rp128.000, banyak tambahan yang diterimanya, seperti uang makan, transpor, dan insentif. Semuanya mencapai Rp500.000, menyamai gaji satpam golongan tertinggi di Gedung Pusat. Belum lagi, upah satu kali lembur selama 12 jam senilai Rp35.000. Tiap tahun, dua stel pakaian dan mantel sebagai bonusnya.

Kesejahteraan pegawai di MM sangat diperhatikan, hal yang tak dialami Suratman dulu ketika masih di UPTP I. "Bahkan, belum lama ini, seluruh

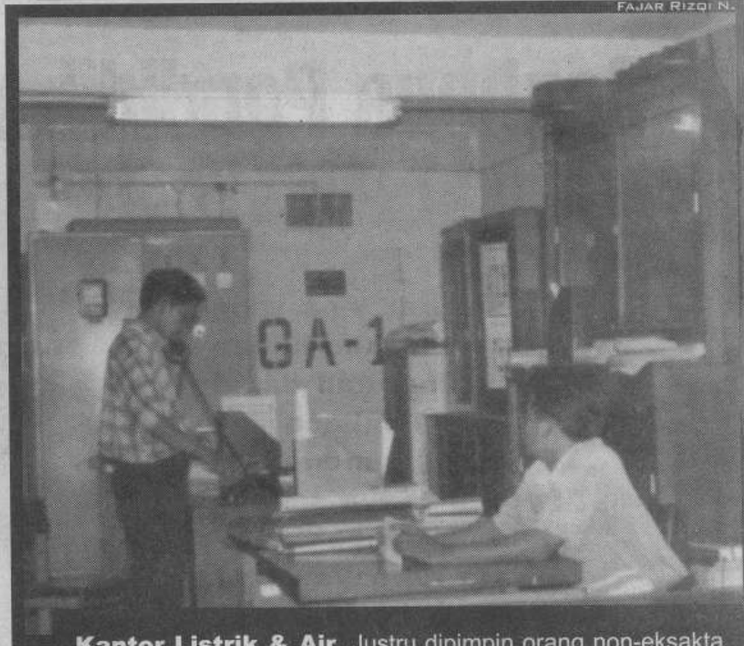
pegawai dari atasan sampai tukang sapu berekreasi ke Bali selama satu minggu, dengan biaya penuh dari pihak MM," cerita Suratman berseri-seri. Tak cuma itu, para atasan dinilai cukup perhatian oleh bapak dengan dua putra ini. "Pak Bambang Sudibyo itu, kalau lagi *sela*, sering menyempatkan diri untuk menegur, meski kalau *nggak* perlu *nggak* bicara," tambah Suratman.

Kepedulian MM terhadap para pegawainya juga diwujudkan dengan mengadakan diklat kepribadian selama satu minggu, tentornya Djamaludin Ancok. Beberapa kali pernah diadakan rapat pleno dua tahunan, melibatkan seluruh pegawai, untuk *sharing*. Tak berlebihan jika Suratman merasa sangat betah bekerja di MM. Selain sarana dan fasilitas memadai, ternyata iklim di dalamnya tidak seangkuh gedungnya yang megah.

Kontras, memang, jika dibandingkan dengan kondisi kerja Bagian Listrik dan Air UGM, yang terletak di ruang bawah tanah Hall Balairung. Bagian ini amat miskin sarana penunjang kerja, juga perhatian atasan. "Waktu kepala bironya orang teknik, fasilitas dan perhatian cukup bagus karena beliau mengerti masalah listrik. Tapi, karena lebih sering dipegang orang sosial, jadi, ya, beginilah," ujar Supratikno.

Jika selama 19 tahun Supratikno setia menggeluti pekerjaan berbahaya dengan alat seadanya, itu lebih karena pengabdian. "Saya cukup puas karena bisa ikut berperan dalam UGM. Bangga, rasanya, jika melihat mahasiswa-mahasiswa yang berhasil," ujarnya dengan senyum mengembang. "'Kan saya ikut andil. Coba kalau tidak ada yang *ngurusi* listrik, mahasiswa jadi *nggak* bisa belajar," selorohnya.

Atau Mbah Prawiro Purnomo (80), penjaga parkir D-3 Ekonomi, yang termasuk beruntung karena pihak fakultas mampu menggajinya Rp200.000 tiap bulannya. "Besar hati, rasanya, melihat bangsa kita bisa sekolah tinggi. Jadi teringat dulu bagaimana susahnya berjuang agar bangsa kita merdeka," ucap lelaki ini haru. Ia bekerja atas ajakan rektor keempat UGM, Prof. Dr. Sukadji R., M.A., teman seperjuangannya di Heiho dulu.



Kantor Listrik & Air. Justru dipimpin orang non-eksakta

Loyalitas itu keluar dari jiwa-jiwa yang tulus, berbaur dengan romantika yang mewarnai masa demi masa. Keberadaan mereka dalam menangguk nafkah di Kampus Biru membuat mereka tak bisa lepas dari universitas tua ini.

Sebut saja kisah haru Sri Harti (56), penjual di kantin Farmasi. Limpahan bantuan dan perhatian UGM ketika harus *mondok* di RS Sarjito menyebabkan Harti bertahan sejak tahun 1961, walau pendapatannya tak seberapa. Atau kebanggaan Parmin ketika Fakultas Psikologi memperoleh juara kebersihan se-UGM tahun 1986. Ada juga cerita lucu satpam-satpam ketika menjaring pasangan remaja yang asyik memadu kasih di bawah temaramnya lampu Boulevard, atau sembunyi di balik gelapnya lembah UGM. Romantika itu bak bunga di antara kepenatan dan cucuran keringat mereka di kampus tua ini.

Namun, tak sedikit pula yang menjalani hari-harinya di UGM hanya untuk memenuhi setengah saja dari asanya--karena tak ada alternatif pekerjaan lain. "Daripada *nganggur*," demikian alasan beberapa pegawai yang ditemui BALAIRUNG.

Seperti diandaikan oleh Yuswantoro, "Ibaratnya naik bis kota, yang penting naik duluan. Perkara dapat duduk atau tidak, itu urusan belakangan." ❐

Tria Ayu K.
Sugi Siswiyanti, Nur Evi R.

Gerhana Pendidikan di Kaki Langit Politik

Freire: "Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali dapat membaca dan menulis?"
Petani: "Saya senang karena dengan kata-kata itu saya dapat berbicara"

Pengetahuan, kata Michel Foucault, adalah kekuasaan. Benarkah? Paulo Freire, pakar pendidikan radikal-legendaris asal Brasil, lewat buku ini, mencoba menguak keterkaitan antara teks generatif (pengetahuan) dengan mekanisasi pembusukan yang bekerja di bawah mesin kekuasaan (negara dan pasar).

Freire mengawali proyek praksis pendidikannya dengan mendekonstruksi semua material teks dan linguistik dominatif. Menurutnya, awal terjadinya penjejalan pengetahuan (*paedagogy of banking*) secara massif ialah lewat katarsis teks (pengetahuan) yang bersifat penaklukan. Maka, pantas bila Jacques Derrida dan Heidegeer meneriakkan ultimatum dekonstruksi, yakni berusaha melihat setiap teks yang digulirkan dengan "mata curiga".

Dalam pisau dekonstruksi, tak satu pun teks yang steril dari tafsiran (ulang), uraian, gugatan. Semua teks, apapun bentuknya, selalu bisa diperlihatkan kontradiksinya, termasuk relasi pendidikan dan politik yang menjadi sentrum perbincangan dalam buku ini.

Buku yang aslinya berjudul *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation* ini berisi gagasan-gagasan yang padat-pejal dengan kondisi hidup yang dialami penulisnya sendiri, selama kungkungan rezim otoriter Brasil. Maka, jangan heran bila pada bagian tengah buku ini terurai nasib kaum marginal di bawah piramida kekuasaan secara sarkastis. Kaum miskin disudahi hingga menjadi manusia bisu (*silent of man*). Kaum buruh, petani yang buta huruf (politik), jadi bulan-bulanan penipuan.

Nah, di tengah masyarakat seperti



Judul Buku
Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan
Penulis
Paulo Freire
Penerbit
READ & Pustaka Pelajar, 1999

inilah Freire mengonstruksi agar pendidikan mengembalikan peran kaum miskin untuk menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Di sinilah pula, sesungguhnya, inti pemihakan pendidikan. Tapi, semua fragmen itu kian terserak. Subversifikasi yang dilakukan negara dan pasar telah merontokkan semua bangunan humanisme itu (hlm. 186).

Sekolah, misalnya, sudah termodifikasi dalam bentuknya yang amat kaku, feodal, dan militeristik. Hubungan insani di dalamnya diperlakukan hierarkis, mekanistik, dan formalis. Yang didapatkan di sana hanyalah indoktrinasi, berbagai peraturan dan penyeragaman-penyeragaman, kultur semi-militer, seperti baris berbaris, upacara, budaya komando, dan sebagainya.

Makna pendidikan dibabat sebatas membangun sekolah sebanyak mungkin, menyedot guru semassal mungkin, mencetak *seabrek* sarjana dan profesor, dan menerapkan paket-paket pendidikan yang telah "disucikan" isinya dari wacana perlawanan dan pembebasan.

Begitulah, sekolah sudah menjadi institusi pendidikan yang terlampau kapitalistik. Ada proses elitisasi-komersialisasi. Sekolah begitu mewah, komersial, menguras banyak biaya. Sekolah menjadi—semacam—institusi perusahaan yang diwarnai suap-menyuap, uang pelicin, jalan belakang, dan seterusnya. Pada akhirnya, sekolah cuma melahirkan generasi-generasi yang gamang dan gagap.

Mengerikan sekali. Pantas Freire berseru lantang, agar semua bentuk mistifikasi kebenaran lewat mimbar pendidikan segera diakhiri lewat jalan revolusioner. Sebabnya, dalam mistifikasi bekerja sebuah mesin pengabur realitas yang mengalienasikan masyarakat. Lewat mistifikasi itu propaganda "penyucian" bekerja dengan amat sistematis: semua tatanan yang ada tak boleh disentuh atau diotak-atik. Dan bila ada yang mempertanyakan struktur sosial tersebut akan dikenai stigma subversif atau menjadi penjahat internasional (hlm. 195).

Bisa dibayangkan begitu muram cakrawala pendidikan di bawah kaki langit politik. Gerhana itu begitu sempurna, terlebih peran pendidikan terjelma sebagai instrumen pemaksa untuk melegitimasi kepentingan pasar dan negara.

Oleh sebab itu, lewat buku ini Freire menyalakan perlawanan: rebut kembali semua teks yang telah direnggut oleh negara dan pasar, dan kembalikan kepada mereka yang selama ini ditelantarkan! Hanya lewat teks yang terbebaskan itulah rakyat bisa bebas dari "buta huruf politik".

"Saya senang karena dengan kata-kata itu saya dapat berbicara". Sebuah ungkapan yang saat ini kita tunggu-tunggu dalam larat-larat (visi) pendidikan—bukan di sekolah (formal), tapi di "sekolah jalanan". Inilah proyek "menuju konsientisasi tanpa sekolah", yang selama ini terabaikan.❐

Muhidin M. Dahlan
Komunitas Jurnalistik *Goresan*,
HMI Universitas Negeri Yogyakarta

Dicari, Oposan Gus Dur

Mungkin hanyalah Gus Dur satu-satunya tokoh paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia. Tokoh yang kini "menguasai" Istana Negara ini memang terlalu sulit dipahami orang awam, bahkan oleh pakar politik sekalipun. Suatu saat mungkin Gus Dur dipuji karena kecerdasan atau keberanian *move* politiknya, tetapi bisa juga Gus Dur dihujat habis-habisan karena statemen atau langkah politik tertentu. Begitulah, orang sesekali menyebut Gus Dur sebagai *"reformer"*—jauh sebelum gerakan tuntutan reformasi meluas secara massif—dan sesekali pula orang ada yang menyebutnya sebagai *"destroyer"*.

Buku ini ditulis oleh seorang mantan asisten pribadi Gus Dur, Al-Zastrouw Ngatawi. Mungkin ini merupakan bagian dari "upaya klarifikasi" atas beberapa laku politik Gus Dur, terutama pada bulan-bulan terakhir menjelang terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI. Secara spesifik, ada lima pokok soal yang dibahas panjang lebar, yakni kehadiran Gus Dur di Istana Negara dua hari menjelang lengsernya Soeharto, pembantaian di Banyuwangi, Deklarasi Ciganjur, rangkaian silaturahmi ke tokoh-tokoh Orde Baru, dan *open house* di kediaman Gus Dur.

Kalau dicermati secara kritis, di sisi inilah sebenarnya kelemahan buku ini. Sidang pembaca tentu berharap bahwa buku ini akan banyak bercerita tentang sosok pribadi Gus Dur, presiden baru Bangsa Indonesia di era Reformasi. Provokasi judul yang dipilih setidaknya mengarah pada bayangan demikian. Nyatanya, buku ini lebih banyak bercerita konteks peristiwa kelima hal di atas secara lebih luas, sehingga sosok pemikiran Gus Dur yang lebih spesifik dan mendalam terabaikan.

Dalam uraian tentang kasus Banyuwangi, hampir 50 halaman, misalnya, Zastrouw lebih banyak mendeskripsikan data lapangan kasus itu. Sementara, untuk memahami inti pemikiran Gus Dur dalam kasus ini, pembaca sebenarnya cukup mencermati alinea terakhir di ujung bab saja.

Terlepas dari kenyataan tersebut, fenomena bahwa buku ini cukup mampu menyedot animo pasar cukup menarik. Ada semacam dugaan kuat yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia—atau setidak-tidaknya para pendukung Gus Dur—saat ini amat merindukan informasi-informasi menarik tentang Gus Dur, khususnya dari orang-orang terdekatnya. Demikian juga tentang tokoh-tokoh lain. Semacam catatan biografis.

Kerinduan ini bertolak dari suatu fakta lapangan yang menunjukkan betapa selama ini citra seorang tokoh, apalagi yang bermain di bidang politik, amat ditentukan oleh "konstruksi media massa". Tentang siapa Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan yang lainnya, orang hanya dapat mereka-rekanya melalui informasi-informasi yang disusun sedemikian rupa oleh para kuli disket.

Ini bukan berarti kurang baik. Namun, orang tentu akan sepakat bahwa media massa, di era sibernetik ini, bekerja dengan alas kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan, sebagian mungkin akan setuju bila dikatakan bahwa beberapa media bekerja di bawah kontrol kepentingan gurita kapitalisme-global, atau kelompok kepentingan tertentu. Pun, keterbukaan pers seiring dengan tuntutan reformasi memang cukup berdampak positif, meski hal ini kadang menghadirkan euforia yang berlebihan—bahkan tak jarang menyesatkan.

Dalam konteks demikian, buku ini sebenarnya merupakan sebuah awal yang cukup baik untuk lebih mengayakan wacana figur aktor politik di Indonesia. Kehidupan tokoh memang perlu ditransparansikan agar publik memiliki referensi yang kaya untuk menilai.

Judul Buku
Gus Dur, Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur
Penulis
Al-Zastrouw Ngatawi
Penerbit
Erlangga, 1999



Dilihat dari isinya, buku ini bolehlah dikatakan suatu "pembelaan" atas kelima laku politik Gus Dur menjelang Pemilu '99. Atau, lebih tepatnya, suatu klarifikasi publik dan upaya membentuk komunikasi yang lebih cair. Pembelaan memang tak amat perlu dilakukan. Gus Dur sendiri mungkin tak suka itu. Bahkan, "...Tuhan pun tidak perlu dibela," tulis Gus Dur pada pertengahan 1982 di *Tempo*. Apa yang dilakukan Zastrouw melalui buku ini adalah semacam—dalam bahasa Gus Dur—"informasi dan ekspresi diri yang 'positif-konstruktif', dengan mendudukkan persoalan secara dewasa dan sewajarnya".

Sejumlah kalangan mungkin khawatir buku ini akan menumpulkan kritisisme masyarakat terhadap Gus Dur. Klarifikasi yang dilakukan memang cukup potensial untuk ditafsirkan sebagai suatu pembelaan. Namun, sosok Gus Dur memang problematik, bila dihadapkan dengan soal kritik atau oposisi.

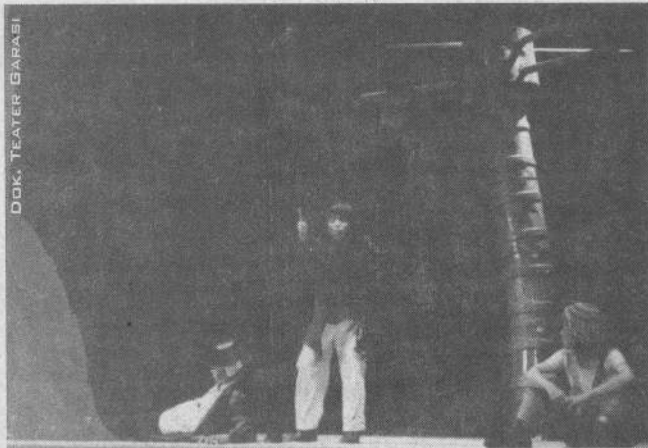
Persoalannya, Gus Dur sejak dulu dikenal sebagai oposan. Ia konsisten memperjuangkan hak-hak minoritas yang tertindas. Lagipula, Gus Dur seorang pemimpin umat (Islam-NU), sehingga cukup *legitimate*. Lalu, dari mana oposisi bisa diharapkan? Apakah kehadiran buku ini bakal menumpulkan kritisisme masyarakat?

Mungkin, perlu ada buku-buku lain yang menulis pemikiran Gus Dur secara lebih mendalam, terutama dari perspektif teoritis yang lebih canggih—lebih dari sekadar buku ini, atau buku Hartono Ahmad Jaiz (*Bahaya Pemikiran Gus Dur*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999) yang provokatif itu. Perlu ada semacam wacana tanding terhadap wacana-wacana yang telah disebarkan ini, tentu—dalam perspektif Foucault—dengan konsekuensi hantu-kuasa yang ikut mendekam di dalamnya. Kata Foucault, "Bila segala sesuatu ternyata berbahaya, setidaknya ada yang bisa kita lakukan."❐

M. Mushtafa
Mahasiswa Filsafat UGM

Wanita-Wanita Pembunuh Waktu

Pentas teater
***Waiting for Godot* karya Samuel Becket**
Terjemahan
Sementara Menunggu Godot oleh Very Handayani
Sutradara
Retno Ratih Damayanti
Gedung Societet Militer, Yogyakarta, 2—4 Desember 1999


DOK. TEATER GARASI

Sementara Menunggu Godot. Menanti ketidakpastian.

Layar perlahan tersibak. Panggung terpulas biru. Ditingkahi musik elektronik yang berkerinik, Gogo (panggilan akrab Estrogen) tiba-tiba datang. Susah payah ia melepaskan sepatu. Lalu hadir Didi (Vladimir) menemui sahabatnya yang kakinya bau itu. Keduanya telah sepakat menunggu Godot. Mereka bertiga hendak bertemu di bawah pohon di pinggir jalan hari itu.

Sambil menunggu Godot, Gogo dan Didi berbincang-bincang. Keduanya punya selera humor yang miring, pesimis, kelam, sekaligus riang. Maka, perbincangan yang terjadi: asyik, serius, lucu, sekaligus penuh kemarahan. Tentang dosa, tentang sepatu, tentang topi, tentang neraka, dan tentang Tuhan. Mereka mempercakapkan remah-remah absurditas kehidupan. Mereka terus mengobrol di sela-sela penantian Godot. Karakter keduanya lantas melebur, ambigu. Tidak jelas!

Penantian itu menjadi sebuah penantian yang panjang. Godot tak menampakkan tanda akan hadir. Tiba-tiba, bunyi pecut menghentak membahana. Mereka lantas berbahagia, mungkin inilah Godot—"makhluk" penantian. Ternyata tidak. Yang datang justru Pozzo, sang juragan dengan topi *laken* dan pecut, bersama Lucky, budaknya yang bungkuk. Pozzo-lah empunya kebun dan pohon tempat pertemuan Gogo, Didi, dan Godot direncanakan. Mereka terlibat dalam percakapan yang sama, tentang dunia yang absurd. Ikut-ikutan ambigu.

Pozzo dan budaknya kemudian pergi. Estrogen dan Vladimir pun mengulangi pembicaraan. Sambil menanti Godot, tentu saja. Waktu terus berjalan. Pemberi warta utusan Godot menghampiri mereka berdua. Katanya, "Godot tak bisa datang hari ini, melainkan esok."

Pulanglah Gogo dan Didi. Esoknya, mereka berusaha menemui Godot lagi. Gogo dan Didi kembali ke bawah pohon perjanjian. Sambil menanti Godot, mereka terus membincangkan kejadian kemarin, yang telah mereka lupakan. Pozzo dan Lucky datang lagi. Lalu datang pula utusan Godot. Katanya lagi, Godot tak bisa datang hari ini dan akan memenuhi janjinya untuk datang esok hari di bawah pohon perjanjian.

Semua peristiwa di atas lalu kembali terulang. Persis seperti sebelumnya. Percakapan absurd, Pozzo, dan utusan Godot. Sementara, sang waktu terus terbunuh oleh Gogo dan Didi, melalui kubangan peristiwa yang sama dalam masa penantian menunggu Godot. Godot sendiri entah di mana.

Ditulis dramawan masyhur Samuel Beckett, *"Waiting For Godot"* dipentaskan pertama kali tahun 1952. Dalam drama ini Becket—sastrawan asal Irlandia yang hijrah ke Prancis—menggambarkan tamparan terhadap kemenangan manusia dalam setiap kemalangannya, yang disebut "takdir", yang telah ditimpakan oleh alam, oleh Tuhan, bahkan sesamanya. Bahwa manusia ditimpa kemalangan, (digariskan) sebagai makhluk yang selalu mengulang dan menghabiskan waktu selama hidupnya, untuk menanti kesia-sian. Ya, menanti Godot.

Dunia, oleh Beckett, dikemas dengan wajah yang suram dan murung—sekaligus kocak dan komikal. Suatu campuran puitis dari pertanyaan, pernyataan-pernyataan ulang, pertanda, resonansi, dan keheningan—mungkin ini kelebihan Becket, peraih Nobel Kesusastraan 1969. Mengenai kisah ini, Becket menulis, "Ini bukanlah keputusasaan, melainkan pengharapan. *Godot* adalah kehidupan tak bertujuan, tapi selalu dengan unsur pengharapan. Seperti yang diteriakkan Vladimir, 'Aku tahu kau akan datang lagi dan memberi kabar kepadaku bahwa Godot tak bisa datang hari ini. Ia akan datang ke sini esok.' Begitu seterusnya." Sambil memarahi sang pewarta, lanjutnya, "Namun aku juga akan terus menanti Godot datang meskipun aku juga tahu ia tak akan datang."

Pentas Garasi kali ini bisa dikatakan kurang puitis menerjemahkan pengharapan dan semangat kesia-siaan gaya Beckett. Patahan-patahan perbincangan remeh nan reflektif yang menukik kurang menggigit. Percakapan reflektif Gogo dan Didi tak menyentuh. Maka, kesia-siaan Didi dan Gogo bukan hal yang mengiris. Juga kelucuannya tak membuat orang menertawakan dirinya sendiri. Semuanya datar dan *wagu*.

Yang menarik dari drama berdurasi 2,5 jam ini—lazimnya orang mementaskan Godot tak kurang dari 3 jam—adalah para pemainnya. Kelima pemain semuanya kaum wanita. Vladimir, yang biasanya tampil dengan karakter laki-laki, dimainkan dengan memikat melalui tokoh dan karakter wanita. Juga Pozzo, Lucky, dan Didi. Wanita-wanita penunggu Godot itu sukses memainkan penantiannya.

Produksi yang dimaksudkan sebagai kado ulang tahun ke-6 Garasi (lahir 4 Desember 1993) ini tak luput dari cacat. Kelihaian para pemain di atas pentas tak didukung tata suara yang memadai. Banyak percakapan yang tak terdengar. Keriuhan perdebatan sang tokoh seringkali jadi kabur. Meski begitu, pementasan selama tiga hari berturut-turut ini pantas dicatat. Di tengah aktivitas kita yang rutin dan hambar, Garasi menyempatkan diri mengajak kita mempercakapkan rutinitas kita sendiri. Melalui Didi dan Gogo, yang membunuh waktu bareng-bareng.❐

Darmanto

Membangun Bangsa Cerdas dengan BALAIRUNG

TERIMA KASIH KEPADA ANDA YANG TELAH MENJADI PELANGGAN ABADI

44. IR. PRAWOTO S.D.	JAKARTA
45. RUDIANTO	JAKARTA
46. SAMDJI	JAKARTA
47. PANDANASIH	JAKARTA
48. SOENANDAR S.	JAKARTA
49. HARIYONO	JAKARTA
50. HERMAN PURNOMO	JAKARTA
51. HADARI YUNUS	YOGYAKARTA
52. SYLVIA BAMBANG ISMAWAN	JAKARTA
53. A. ROESILAH KASIYANTO	JAKARTA
54. ACHMAD BARABA	JAKARTA
55. DRA. GEETRUIDA HUTHAEAN T., M.P.H.	JAKARTA
56. TRI AGUNG WINANTORO	JAKARTA
57. UNIVERSITAS SATYAGAMA	JAKARTA
58. DRS. MASFAR JAMIN	JAKARTA
59. DJOKOSANTOSO MOELJONO	JAKARTA
60. WAHYU HIDAYAT	JAKARTA
61. YAYASAN TRI DHARMA KAGAMA	JAKARTA
62. DRS. H. DJOKO SIDIK PRAMONO, M.SC.	JAKARTA
63. DJOKO SUSENO	JAKARTA
64. IR. S. SYUKUR	JAKARTA
65. SUSENO HARSONO	JAKARTA



Anda ilmuwan, eksekutif, ataukah intelektual muda? Ingin menjadi pelanggan abadi BALAIRUNG? Kirimkan minimal Rp200.000 ke Bagian Sirkulasi BALAIRUNG. Setiap edisi terbaru akan kami kirim ke alamat Anda.

*Penghargaan ISAI 1999 untuk Majalah BALAIRUNG

Formulir Pelanggan Abadi



Dengan ini saya,

Nama ______________________

Alamat ______________________

bersedia menjadi pelanggan abadi **Majalah BALAIRUNG**. Untuk itu saya memberikan dana berlangganan sebesar

____

melalui transfer Tabanas Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro, Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah), atau via wesel ke alamat: Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 901703 Faksimili (0274) 566171.

Tanggal.........................

Pelanggan Abadi,

What's BALAIRUNG ?

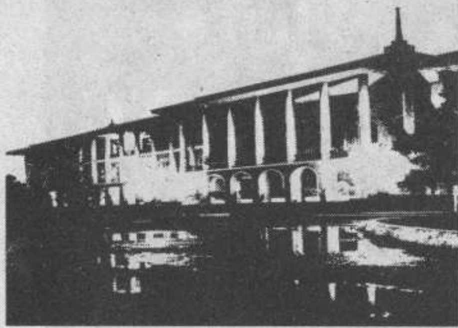


Campus papers still thrive, but they tend to be tame organs for university public relations rather than an expression of student discontent. Some campus publications have adapted by claiming the political middle ground, displaying commercial nous and journalistic sophistication in both content and lay-out. Gadjah Mada University's **BALAIRUNG**, for example, produced a special edition to celebrate its eight-year (*windu*) anniversary in 1994. The 128-page glossy magazine was slick and well-produced, marketed through major bookshop chains such as Gramedia, for Rp3.000. It included a lengthy article about, and interview with, prominent leftist author Pramoedya Ananta Toer, seventeen researched essays by student leaders on their vision for Indonesia's future, together with a student analysis of the election of the university's new Rector. The magazine listed on its advisory board not only Amir Effendi Siregar, who in addition to lecturing in the university's highly-regarded journalism program is also a director of *Warta Ekonomi* economic weekly, but also *Kompas'* chief Jakob Oetama.

David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Nedlands: University of Western Australia Press, 1995: 116—117)

"...Sebagai majalah mahasiswa, BALAIRUNG sudah sangat memadai. Secara visual tampilannya sangat baik, sementara dari isinya...tak bakal dijumpai pada pers umum."

MOCHTAR LUBIS
BUDAYAWAN, DIREKTUR YAYASAN OBOR INDONESIA




BERNAS
Banjir Darah
Ancam SU MPR
BERNAS
Ghalib
HARIAN
BERNAS


KOPMA UGM

GM ke-50
Desember 1999

Nggak Suka **Diekspos**

Ungkapan itu meluncur dengan lugas dari mulut **The Liang Gie** begitu BALAIRUNG meminta waktu wawancara. Katabelece yang dibawa BALAIRUNG dari seorang relasi dekatnya pun tak mampu menggoyahkannya. "Sudah terlalu banyak orang yang ngomong, saya *nggak* mau seperti mereka," tambahnya.

Tahun 1986, mantan staf pengajar Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM, yang sejak 1974 mengajar di Fak. Filsafat UGM ini mengajukan percepatan pensiun. Sekitar 53 buku dalam berbagai bidang ilmu dan filsafat, juga 250 lebih karangan tentang aneka pengetahuan, telah dihasilkannya sejak lulus Fisipol UGM, 1957.

Lahir di Yogyakarta, 67 tahun lalu, tak seorangpun--selain keluarganya--tahu tanggal kelahiran doktor lulusan Columbia Pacific berputra tiga ini. "Ya, biar *nggak* ada yang repot-repot *ngucapin* selamat ulang tahun," akunya. Kakek yang hobi jogging mengelilingi Stadion Kridosono ini hidup tenteram, ditemani istri dan putri bungsunya. Ia cukup menutup diri. Itulah sosok aneh seorang The Liang Gie, warga keturunan yang mencoba konsisten dengan pilihan hidupnya.❑

M. Bustom



KOPMA UNY

UGM Tidak *Prestise*

Lulusan UGM yang bekerja di perusahaan swasta kalah *prestise* dengan lulusan dari UI, atau ITB," ujar **Sri Bugo Suratmo**, *General Manager Public Relations* PT Indofood Sukses Makmur Tbk. "Orang-orang UGM yang bekerja di sektor pemerintahan atau di bidang akademis lebih dikenal. Padahal, mereka belum tentu mau terjun langsung ke lapangan, seperti yang dilakukan orang-orang swasta," tambahnya, sembari membereskan tumpukan map dan kertas yang berserakan di mejanya.

Kehidupannya memang tak jauh dari publik. Alumnus Psikologi UGM tahun 1980 ini dulu humas Radio Gama UGM. Kariernya berawal di salah satu biro iklan di Jakarta, selama empat tahun. Sambil bekerja, ia meneruskan kuliah S-2 manajemen. Tak betah, ia pindah ke salah satu perusahaan makanan bayi terkemuka. Baru pada 1986 Ia memutuskan bergabung dengan Indofood.

Sri Bugo yang beristrikan Ina Trevina, teman semasa kuliahnya, ternyata penggemar berat otomotif. Terbukti, salah satu koleksi uniknya adalah mobil *morris mini-mog*, yang konon cuma ada enam buah di negeri ini. Di sela-sela kesibukannya, penggemar fotografi dan kibor Roland G-800 ini masih menyempatkan diri berolahraga. "Selain tenis, jogging, saya juga bersepeda," katanya. Tak heran, di usianya yang hampir setengah abad itu Sri Bugo tetap segar.❑

Bayu Iswara

ISTIMEWA

Jangan Mengandalkan Nama Besar UGM

Bapak satu anak ini memang ramah, terbuka, santai. Resep itulah yang membuat ia awet muda di usianya yang mulai senja. "*Fully concentrated, completely relax*," katanya saat ditemui BALAIRUNG di kantor pusat BRI di Jakarta.

Mengawali karier di Perusahaan Negara Garam, sebelum akhirnya terdampar di BRI, ia sempat mampir di PN Bea Cukai dan Bank Exim. **Djokosantoso Moeljono,** demikian nama lengkapnya, memang punya keterikatan kuat dengan UGM. Betapa tidak, bapak yang pernah memelopori berdirinya Himpunan Mahasiswa Manajemen FE-UGM ini masih sempat merasakan kuliah di Sitihinggil. "Bahkan, ujian akhir masih dilakukan di Alun-Alun Lor," ceritanya.

Tentang UGM sekarang? Secara khusus ia menyarankan agar lulusan UGM lebih tangguh menghadapi benturan-benturan. "Jangan cuma mengandalkan nama besar UGM, *dong*," tegasnya.❑

Agoeng W.

Sepi ing Koran, *Rame ing Gawe*



Setelah lulus, mau kerja di mana? Begitulah pertanyaan yang sering menghantui para lulusan universitas di Indonesia. Tapi, untuk urusan "kecil" ini, dialah jagonya.

Wahyu Hidayat memang kenyang makan asam-garamnya dunia kerja. Wahyu kini menjabat Dirut Merpati. Sederhana resepnya. Baginya, perjuangan adalah kunci utama dalam "memaknai kehidupan".

Mulanya adalah sikap *nrimo* jadi pegawai pemerintahan, selepas dari almamaternya. "Saya tak pernah mengejar sesuatu, bukan berarti saya *nrimo* atau pasrah. Saya bekerja keras, saya nikmati, dan saya lakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaan. Biar orang lain yang lihat," katanya. "Kalau kita punya obsesi tapi tak tercapai, maka kita merasa sangat sakit hati. Artinya, *sepi ing* koran *rame ing gawe* saja," ujarnya, mantap.

Saat bekerja, alumnus Fakultas Ekonomi UGM yang hobinya membaca dan nonton teve ini mengakui betapa pentingnya menjadi mahasiswa yang aktif di luar kampus. Ia menambahkan, kampus sebagai sebuah institusi pendidikan dituntut untuk tetap mengembangkan *creativity thinking and proactive.* "Tak hanya dari para dosen, namun dari mahasiswanya juga," tuturnya.

Siap, komandan!□

Agoeng W., Sriyani Puspa

Aku Masih *Pengen* Sekolah Lagi

Biar telat, aku masih ingin lulus,"ujar **Kiki Widyasari** viatelepon ke Redaksi BALAIRUNG pukul 01.12 dini hari, usai syuting ketoprak humor. Kuliahnya kini semester ke-10 di Fakultas Ekonomi UGM, Jurusan Manajemen. Kiki mengaku kuliahnya *keteteran.* "Teoriku itu masih sekitar 24 SKS minus KKN dan skripsi. Setelah lulus, aku masih *pengen* sekolah lagi. Ya, aku bisa *survive* sekarang ini karena aku punya basis pendidikan," tambahnya.



Jadi bintang sinetron bagi Kiki, alumnus SMU 3 Yogya, sungguh di luar impiannya. Sejak kecil ia bercita-cita ingin jadi astronot. Berawal dari Kontes Diajeng Jogja 1994 dan Putri Ayu 1995, yang membawanya ke Jakarta. Perlahan tapi pasti, tahun 1997 untuk kali pertama Kiki mendapat tawaran bermain sinetron *Selendang Sutra Ungu,* sebagai peran pembantu. Dari sinilah kariernya mulai menanjak. Sekitar 7 sinetron telah ia bintangi. Beruntung, orang tua putri bungsu dari 6 bersaudara ini mendukungnya. "Asal kuliahku bisa selesai, mereka *nggak* masalah, *kok,*" katanya, manja.

Walau ke kampus hanya pas ujian, Kiki masih memantau perkembangan almamaternya. Ditanya kesannya tentang Dies Natalis UGM ke-50, gadis kelahiran kota gudeg, 28 November 1975, ini dengan antusias menjawab, "Jelas aku bangga banget dengan UGM sekarang ini." Tambahnya, "Aku *pengen* nantinya bisa jadi alumnus UGM yang baik."□

M. Bustom



Otonomi I

Para demonstran penentang otonomi PT telah tiba di Fakultas Farmasi. Sang koordinator lapangan terus berorasi, dilanjutkan hiburan ringan. Sebagian lain menyimak dengan sungguh-sungguh. Kemudian, seorang mahasiswa demonstran keluar dari barisan. Ia meminta dekan Farmasi untuk memberikan orasi kilat soal otonomi PT.

Mahasiswa : Bapak kami minta menyampaikan orasi singkat.

Dekan : Maaf, sa...sa...saya sedang *nunggu* telepon dari Jakarta. Sa...sama PD III saja, ya!

Mahasiswa : Oh, ya. Jadi, bagaimana, Pak, isu otonomi PT versi rektorat?

PD III : Sa...sa...saya, apa Saudara *nggak* lihat! Saya sedang banyak kerjaan. Mau *nguji* skripsi, *ndak* bisa diganggu. Pokoknya, saya setuju otonomi dengan segala keadilannya.❒

Yusuf W.J.
(dari pengalaman Luqman & Bachtiar)

Otonomi II

Kentot, mahasiswa Filsafat, sedang melakukan dialog spiritual dengan roh Romo Mangun. Ia pesimis dengan rencana otonomi di kampusnya. Asap kemenyan pun mulai memenuhi bilik, dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu.

Kentot : Tolong kami, Romo. SPP akan naik dan kampus saya suatu saat akan dibeli orang asing.

Romo : Itulah konsekuensi hidup di bumi.

Kentot : Jadi, harus bagaimana, Romo?

Romo : Kamu tenang saja, *nggak* usah khawatir. Percayalah apa yang dikatakan rektormu. Dia 'kan sudah bilang, kalau kamu *nggak* mau bersahabat dengan para kapitalis itu, hidup saja di planet lain! *Kayak* saya ini, *lho*!❒

Yusuf W.J.

Si Buta dan Si Bisu

Alkisah, di suatu negeri yang penuh rahmat, hiduplah seorang lelaki buta dan adiknya, seorang wanita bisu. Semua permintaannya kepada Tuhan selalu dikabulkan Tuhan.

Si bisu memohon kepada Tuhan dalam batinnya, "Berikanlah saya suara yang merdu sehingga semua orang mau mendengarkan suara saya."

Kemudian, Tuhan menjadikannya seorang penyanyi tenar.

Si buta memohon kepada Tuhan, "Ya, Tuhan, izinkanlah saya untuk melihat dunia. Saya ingin bepergian keliling dunia."

Tuhan mengabulkan juga permohonan si buta. Ia jadi presiden.❒

Kelik Supriyanto

Tender Proyek

Di sebuah negeri antah berantah, hiduplah seorang intelektual buta yang sekarang menduduki posisi paling penting di sana. Ia satu-satunya intelektual yang masih tersisa. Seluruh intelektual telah mati. Otak-otaknya dimakan penguasa sebelumnya yang kanibal.

Semua pengusaha berbondong-bondong datang kepadanya buat mengajukan usulan proyek. Para pengusaha itu ingin menikmati berbagai fasilitas dari negara.

Usulan-usulan diajukan satu-satu, dan diterima langsung oleh sang penguasa buta. Akhirnya, terpilihlah seorang pemenang tender tersebut.

Seorang ajudannya heran dan bertanya, "Bagaimana Bapak bisa menentukan pemenangnya, padahal Bapak buta?"

"Tenang sajalah," jawabnya, "Aku pilih yang mapnya paling tipis. Itulah yang paling sedikit bohongnya."❒

Kelik Supriyanto

Meramal Nasib

Chandra, anak muda yang sedang menghadapi UMPTN, tiba-tiba mengubah pilihan jurusan yang diminatinya. Ia semula mengincar Teknik Kimia, lalu ganti Ilmu Pemerintahan. Kontan, sikapnya itu mengundang amarah dan pertanyaan bapaknya. Bapak Chandra terkenal sebagai kontraktor sukses. Ibunya dokter. Meski demikian, Chandra tetap tak bergeming. Ia amat yakin dengan pilihannya.

"Kamu mau jadi apa, Nak? Sudah bagus pilihanmu semula, kenapa kamu ubah?" tanya ibunya sambil mengelus dada, prihatin. "Apa *nggak* ada lagi jurusan lain? Kalau kamu *milih* itu, paling *banter*, ya, jadi pegawai negeri. Sudah cari makan susah, besok kamu makan apa?" tambah bapaknya, geleng-geleng kepala tak mengerti.

"*Lho*, apa Bapak sama Ibu *nggak* pernah baca berita akhir-akhir ini?" Chandra balik membela diri. "Sebentar lagi 'kan Indonesia jadi 26 negara. Pasti banyak lowongan kerja bergengsi. Jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi dirjen, jadi...pokoknya banyaklah," ujarnya, optimis.❒

Irfan M.

Main Truf

Suatu hari Habibie sedang main truf dan terlibat *eyel-eyelan* dengan Bo'ol.

Habibie: *Ehhh, nggak* bisa. Saya yang *ngambil* kartunya, saya yang menang. Bukan kamu!

Bo'ol : *Nggak* bisa, trufmu King. Trufku 'kan As. *Bego, lu*!

Habibie: Enak *aja*. Kamu *nggak* lihat, ya, King-ku gambarnya kepala Mbah Harto. Kamu harusnya takut!

Bo'ol : Dasar *status quo*! Kamu *nggak* lihat, ya! As-ku gambarnya kepala mahasiswa!❒

Yusuf W.J.

Penjahat Orde Baru

Arwah seorang wartawan kaget bukan kepalang. Arwah mantan seorang pejabat tinggi Orde Baru, yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi, ternyata ada di surga.

"Apa kabar, Pak? Masih juga *nyebar-nyebarkan* ideologi Orde Baru di sini? Apa *ndak* ada krisis ekonomi?" tanya arwah wartawan tersebut, antusias.

"Apa tadi kamu bilang? Orde Baru? Makhluk macam apa itu?" jawabnya, sambil menghisap cerutunya dalam-dalam.❒

Kelik Supriyanto



MOERDI

Indofood

LAMBANG MAKANAN BERMUTU

Persembahan Citarasa Khas Indonesia

Alam Indonesia begitu kaya raya.
Palawija dan rempah-rempah melimpah.
Semangat kami tergugah untuk memberi nilai tambah.
Mengolah kekhasan citarasa Indonesia.

Hasil racikan dan sentuhan ketekunan.
Menghasilkan makanan dan minuman olahan bermutu.
Kesegaran, higienis, kandungan gizi, keanekaragaman rasa,
praktis, aman dan halal dikonsumsi
senantiasa menjadi perhatian utama kami.

Kini kami mempersembahkan hasil alam Indonesia
ke seluruh penjuru Nusantara dan menembus pasar mancanegara.
Dari pelosok desa sampai kota metropolitan.
Dalam berbagai suasana dan kesempatan.
Menemani keseharian anak Balita hingga Manula.
Itulah tempat produk kami di hati konsumen.



PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR